



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah APBD disahkan, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan APBD. Pemerintah Daerah harus bisa merealisasikan target-target pendapatan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap. Setelah APBD dilaksanakan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akan disampaikan kepada DPRD. Sebelum Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD maka laporan keuangan pemerintah daerah harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Dumai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan keuangan yang disusun berbasis akrual yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Pemerintah Kota Dumai mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan oleh Kepala Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur atas pertanggungjawaban SKPD dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan umum penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sedangkan tujuan spesifiknya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Dumai;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
29. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
30. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 60 Seri E);
31. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
32. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kesepuluh atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 10 Seri A); dan

33. Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 15 Seri A).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berupa penjelasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program;
3. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
4. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan; dan
5. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I** : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II** : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III** : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV** : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- BAB V** : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen Laporan Realisasi Anggaran, komponen-komponen Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen Laporan Operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen Laporan Perubahan Ekuitas.
- BAB VI** : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII** : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

2. Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapaian Target Kinerja APBD

1. Ekonomi makro
2. Kebijakan fiskal/keuangan
3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

4. Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
5. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 6. Pengungkapan atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah**
- 7. Penutup**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB II

**KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN, EKONOMI MAKRO,
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Perekonomian Kota Dumai secara makro sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Dunia, Nasional dan Provinsi Riau. Namun melihat perkembangan ekonomi global dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, Perekonomian Kota Dumai secara makro pada Triwulan I diperkirakan membaik seiring membaiknya perekonomian nasional dan Riau secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari membaiknya permintaan global dan domestik. Jika dilihat berdasarkan PDRB berdasarkan lapangan usaha, Perekonomian Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh kontribusi sektor industri pengolahan (kontribusi > 50%).

Menurut Bank Indonesia (2022), Tren pemulihan perekonomian Riau terus berlanjut pada Triwulan I 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,72% *year on year (yoy)*. Pertumbuhan ekonomi Riau mengalami akselerasi jika dibandingkan dengan Triwulan IV 2021 yang tumbuh 3,81% (*year on year*). Akselerasi perekonomian Riau pada Triwulan I 2022 ditopang oleh kinerja komponen investasi. Terjaganya permintaan terhadap komoditas Riau dan tren harga komoditas yang relatif tinggi turut mendorong investor untuk melakukan ekspansi, terutama untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Riau khususnya kota Dumai ditopang oleh peningkatan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor konstruksi serta penyediaan jasa akomodasi, makanan dan minuman. Akselerasi kinerja sektor-sektor ini sejalan dengan pelonggaran aktivitas masyarakat seiring menurunnya kasus positif COVID-19. Sementara itu, peningkatan kinerja pada sektor konstruksi didukung oleh meningkatnya intensitas pembangunan proyek pemerintah daerah dan proyek infrastruktur strategis nasional. Secara umum, perekonomian Kota Dumai tumbuh lebih baik dari Triwulan I dan II Tahun 2022. Hal ini ditinjau dari kebijakan terkait beberapa pelonggaran aktivitas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat dan aktivitas bagi pemerintah sendiri, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan belanja pemerintah.

Proses pemulihan global dan domestik yang masih berlanjut, mendorong akselerasi ekonomi Riau termasuk Kota Dumai pada Tahun 2022. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang positif akan berlanjut pada Tahun 2022, meski dibayangi berbagai risiko. Permintaan global diyakini akan mendorong ekspor dan kinerja sektor-sektor utama Riau termasuk Kota Dumai, khususnya perkebunan serta industri pengolahan. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan tumbuh membaik didorong peningkatan aktivitas eksplorasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak Agustus 2021.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Kota Dumai. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kondisi ekonomi Kota Dumai Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya. Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/Industri), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari sembilan lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) PDRB atas dasar harga berlaku

PDRB dengan jenis ini isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Dengan menggunakan harga berlaku, kita bisa melihat pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam sektor ekonomi. Selain itu, bisa juga untuk melihat struktur ekonomi yang dimiliki oleh sebuah daerah. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah.

2) PDRB atas dasar harga konstan

PDRB dengan jenis ini, isinya menggambarkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Biasanya, tahun yang dijadikan harga dasar ini diubah setiap 10 tahun sekali, dengan tujuan untuk pembaruan. Selain itu juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di sebuah daerah dari tahun ke tahun. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang menggambarkan andil masing-masing sektor. Indeks implisit adalah suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Indeks implisit digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga produsen dari barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi di sisi produsen.

Bila kita lihat angka PDRB Tahun 2021-2022 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 36.326,79 miliar rupiah pada Tahun 2021 meningkat menjadi 39.999,41 miliar rupiah di Tahun 2022. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 24.597,99 miliar rupiah pada Tahun 2021 meningkat menjadi 26.068,58 miliar rupiah pada Tahun 2022.

Indeks implisit di Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 153,44 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 53,44 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada Tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada Tahun 2022 sebesar 3,90 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 3,90 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 6,55 persen.

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya laju pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita dan inflasi. Selain menjadi indikator ekonomi, laju pertumbuhan PDRB juga menjadi indikator



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kemakmuran suatu daerah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Dumai Tahun 2022 sebesar 6,36%, sementara Provinsi Riau sebesar 4,55%.

Tabel 2.1 PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai Tahun 2018 - 2022

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.223,32	1.247,92	1.299,76	1.351,37	1.353,31
B.	Pertambangan & penggalian	76,74	78,51	77,47	77,97	79,58
C.	Industri pengolahan	13.605,10	14.581,61	15.020,31	16.006,34	17.241,07
D.	Pengadaan listrik dan gas.	17,84	19,14	45,61	57,81	82,60
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,72	3,95	4,11	4,43	4,79
F.	Konstruksi	2.360,06	2.458,03	2.383,80	2.384,99	2.502,10
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.042,84	4.158,87	3.730,30	4.066,73	4.202,23
H.	Transportasi dan pergudangan	675,94	712,13	465,48	467,44	510,17
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	174,35	180,83	145,58	173,38	181,31
J.	Informasi dan komunikasi	287,48	308,20	336,68	350,59	360,50
K.	Jasa keuangan dan asuransi	270,44	270,75	280,07	292,58	307,31
L.	Real estat	103,20	108,66	110,43	113,30	119,37
M,N	Jasa perusahaan	1,25	1,34	1,05	1,06	1,08
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	432,38	442,43	432,88	442,18	482,18
P.	Jasa pendidikan	101,57	107,28	108,79	111,57	114,00
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	36,29	40,22	46,10	50,86	53,09
R.,S,T,U	Jasa lainnya	125,95	137,02	109,57	115,97	131,19
PDRB		23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58	27.725,88

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.2 PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kota Dumai Tahun 2018 - 2022

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.875,18	1.923,59	2.079,11	2.303,17	2.452,76
B.	Pertambangan & penggalian	120,04	128,17	129,55	132,99	139,35
C.	Industri pengolahan	18.660,48	20.867,98	21.785,57	24.346,07	27.843,51
D.	Pengadaan listrik dan gas.	28,10	31,77	73,72	92,98	140,55
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,88	5,33	5,60	6,04	6,60
F.	Konstruksi	3.786,76	4.049,17	3.941,63	3.995,66	4.510,78
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5.413,96	5.736,01	5.258,19	5.873,68	6.350,00
H.	Transportasi dan pergudangan	973,79	1.055,62	726,94	759,02	889,95
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	303,73	319,40	260,31	314,99	335,60



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Kategori Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021	2022
J.	Informasi dan komunikasi	380,26	418,39	457,24	478,07	500,69
K.	Jasa keuangan dan asuransi	390,06	397,13	409,20	449,22	517,34
L.	Real estate	153,05	161,76	164,08	168,40	182,03
M.N	Jasa perusahaan	1,84	2,06	1,63	1,65	1,75
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	568,68	587,76	590,24	605,35	667,05
P.	Jasa pendidikan	161,94	177,13	185,34	192,27	199,18
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	56,82	65,84	77,38	86,28	93,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	196,64	220,03	181,04	193,57	225,57
PDRB		33.076,21	36.147,15	36.326,79	39.999,41	45.056,39

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2022 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha

NO	KATEGORI	PERTUMBUHAN (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	1,99	4,18	3,97	0,14
B.	Pertambangan dan Penggalian	-3,75	2,30	-1,30	0,65	2,06
C.	Industri Pengolahan	7,51	7,17	3,01	6,56	7,72
D.	Pengadaan Listrik dan Gas.	3,21	7,29	138,28	26,75	42,88
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,13	6,24	3,90	7,78	8,13
F.	Konstruksi / Bangunan	2,58	4,15	-3,02	0,05	4,91
G.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,91	2,89	-10,30	9,02	3,33
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,85	5,35	-34,64	0,42	9,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,46	3,79	-20,01	19,10	4,57
J.	Informasi dan Komunikasi	5,75	7,21	9,24	4,13	2,83
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,09	0,12	3,44	4,47	5,03
L.	Real Estate	3,81	5,24	1,65	2,60	5,35
M, N	Jasa Perusahaan	9,07	7,74	-22,06	1,65	1,35
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,28	2,33	-2,16	2,15	9,04
P.	Jasa Pendidikan	3,94	5,62	1,41	2,55	2,18
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,57	10,83	14,62	10,32	4,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,61	8,79	-20,03	5,84	13,12
PERTUMBUHAN EKONOMI		5,34	5,60	-1,05	5,98	6,36

Sumber Data : BPS Kota Dumai

b. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Secara umum tingkat inflasi yang cukup tinggi biasanya terjadi pada bulan menjelang atau bertepatan dengan hari raya keagamaan, misalnya hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi lonjakan permintaan barang dan jasa oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat inflasi lebih disebabkan oleh faktor musiman, sebagai akibat dari perubahan perilaku konsumsi masyarakat pada bulan-bulan tersebut.

Selama Tahun 2022, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yaitu sebesar 1,56 persen, hal ini dipicu oleh meningkatnya harga komoditas pangan yang ada di masyarakat terutama cabai merah, cabai rawit dan bawang merah yang memiliki andil terbesar dalam mempengaruhi nilai inflasi pada bulan Juli. peningkatan harga ini disebabkan curah hujan yang tinggi di sentra komoditas yang menyebabkan gagal panen dan terganggunya distribusi pasokan. Sementara itu, kenaikan permintaan menjelang hari raya Idul Fitri juga menyebabkan inflasi tinggi selama Mei yakni mencapai 1,51 persen, tertinggi kedua sepanjang semester pertama tahun 2022. Selama Tahun 2022, pergerakan inflasi umum bulanan di Kota Dumai relatif menunjukkan pola yang searah dengan inflasi di Provinsi Riau di bulan yang sama, kecuali pada bulan April yang menunjukkan arah yang berbeda antara Kota Dumai dan Provinsi Riau.

Tabel 2.4 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 – 2022

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,36	-0,04	0,54	0,4	0,68
Februari	-0,24	-0,32	0,21	-0,38	-0,38
Maret	0,05	0,07	-0,05	-0,04	0,66
April	0,14	0,35	-0,19	0,24	0,74
Mei	0,16	1,05	0,95	0,65	1,51
Juni	0,65	0,80	0,11	0,02	1,56
Juli	-0,10	0,41	-0,26	0,22	0,57
Agustus	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05
September	-0,26	-0,79	-0,02	0,1	1,57
Oktober	0,50	0,05	0,44	0,46	-0,59
November	0,70	-0,12	0,37	0,36	0,17
Desember	0,22	0,07	0,80	-0,13	0,88

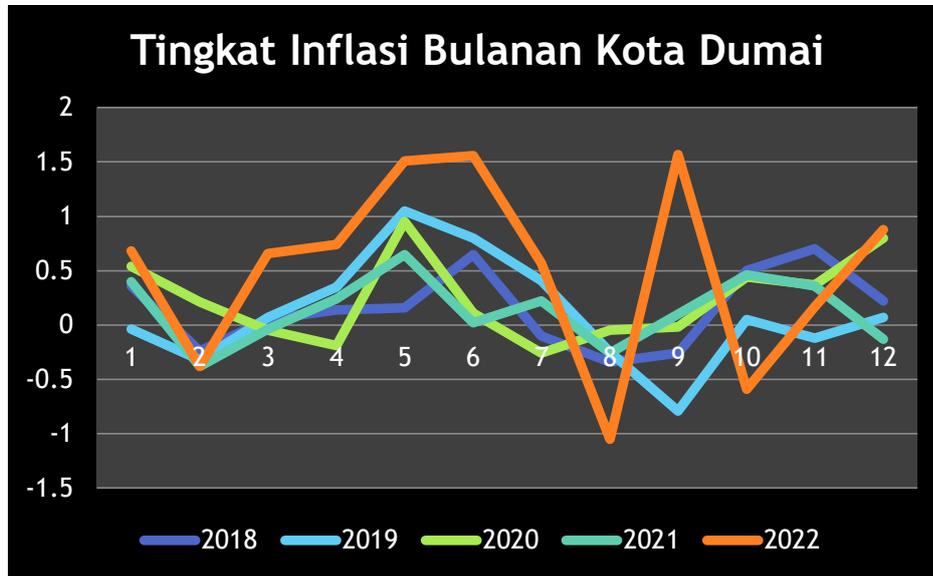
Catatan: Tahun 2020 menghitung inflasi dengan menggunakan Tahun Dasar 2018 dan terdiri dari 11 kelompok pengeluaran

Sumber Data : BPS Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 1 Inflasi Bulanan Kota Dumai Tahun 2018 – 2022



Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah dengan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
 - a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan.
 - b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif.
 - c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer.
- 2) Aspek Program
 - a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program *multiyears* dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
 - b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerah dalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
- 3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
 - a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat.
- c. Pembangunan Manusia

Manusia sudah sepantasnya menjadi tujuan utama dalam pembangunan, karena manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Keberhasilan pembangunan seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan kualitas manusianya. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah diperkenalkan oleh UNDP pada Tahun 1990. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator umur harapan hidup pada waktu lahir. Pertimbangannya adalah umur harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Umur harapan hidup pada waktu lahir diukur dengan tahun.

- 2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah yang mencerminkan harapan bagi penduduk usia 7 tahun untuk merasakan bangku pendidikan dan indikator rata-rata lama sekolah yang mencerminkan lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku sekolah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3) Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini diwakili oleh indikator pendapatan perkapita. Namun agar dapat diperbandingkan antar negara, angka pendapatan perkapita tersebut perlu disesuaikan daya belinya melalui konsep yang disebut “purchasing power parity” (PPP) atau daya beli yang disesuaikan. Penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan adanya “diminishing return of the income utility”.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Perubahan yang dilakukan UNDP terhadap penghitungan IPM disadari atas kebutuhan bahwa suatu indeks komposit seperti IPM harus mampu menjadi alat ukur yang tepat, dengan pemilihan variabel dan metode yang akurat. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmetik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.

Kategori IPM sesuai UNDP:

- 1) Rendah : $IPM < 60$
- 2) Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- 3) Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- 4) Sangat tinggi : $IPM \geq 80$

Pada Tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai sebesar 75,26. Nilai ini berada diatas nilai IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 73,52. Nilai capaian IPM pada Tahun 2022 mengalami peningkatan 0,51 poin dibanding Tahun 2021. Walaupun ada sedikit peningkatan capaian IPM akibat Pandemi Covid19, dengan nilai capaian IPM 2022 ini masih diatas angka 70, yang artinya kualitas pembangunan manusia di Kota Dumai masih berstatus ‘tinggi’.

Tingginya capaian pembangunan manusia di Kota Dumai tidak terlepas dari tiga dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Capaian yang telah dicapai Kota Dumai dari sisi pembangunan manusia merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Butuh waktu dan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia, dan Kota Dumai telah berhasil mencapainya. Namun, selain berbangga, kita juga perlu memperhatikan bahwa masih ada kabupaten kota yang masih berada pada kategori sedang. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan manusia di Riau pada umumnya belum merata.

Tabel 2.5 Indikator IPM Kota Dumai

Uraian	2019	2020	2021	2022
Angka Harapan Hidup Saat Lahir (Tahun)	70,82	70,93	70,98	71,25
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,10	13,12	13,31	13,32
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,85	10,07	10,14	10,15



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

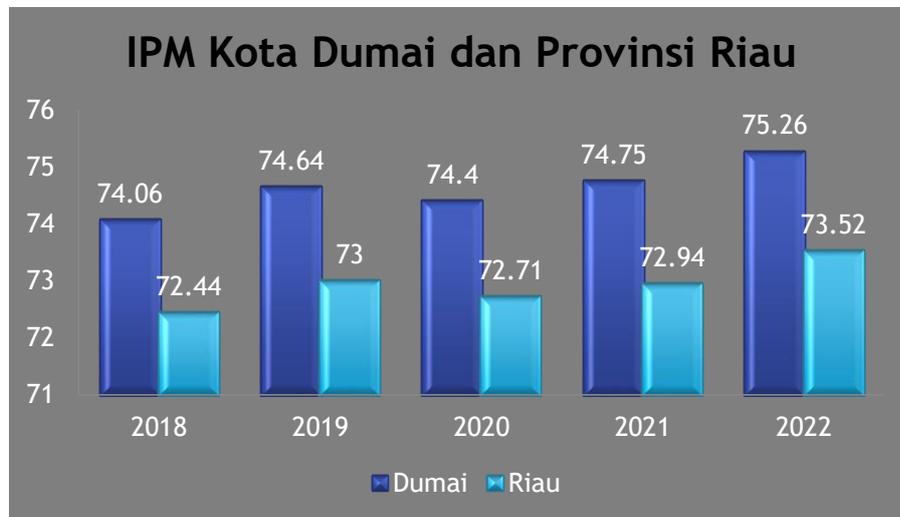
Pengeluaran PerKapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	12.453	11.751	11.818	12.249
---	--------	--------	--------	--------

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dumai	74,06	74,64	74,40	74,75	75,26
Riau	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Gambar 2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai



d. Hotel dan Pariwisata

Pada Tahun 2022, di Kota Dumai tersedia sembilan hotel berbintang (satu bintang satu, tiga bintang dua, tiga bintang tiga dan dua bintang empat) dengan 748 kamar dan 1.134 tempat tidur serta 28 hotel melati dengan 747 kamar dan 1.108 tempat tidur. Selama Tahun 2021 di Kota Dumai tercatat tidak terdapat kedatangan dan keberangkatan warga negara asing.

Tabel 2.7 Statistik Hotel di Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Akomodasi					
Hotel Berbintang	7	8	9	9	9
Akomodasi lainnya	28	28	28	31	31
Total	35	36	37	40	40
Jumlah Kamar					
Hotel berbintang	524	635	748	748	748
Hotel Non Bintang	657	657	723	808	808
Total	1.181	1.292	1.471	1.556	1.556
Jumlah Tempat Tidur					
Hotel berbintang	729	905	1.134	1.134	1.134



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Hotel Non Bintang	1.020	1.020	1.078	1.182	1.182
Total	1.749	1.925	2.212	2.316	2.316

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Tabel 2.8 Tempat-tempat Pariwisata di Kota Dumai

Jenis	Lokasi
A. WISATA ALAM	
1. Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei - Pakning (Kel. Teluk Makmur)
2. Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
3. Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
4. Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
5. Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
6. Pantai Koneng	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
7. Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
8. Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
9. Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
10. Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
11. Pantai Salam Lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
12. Pantai Kampung Mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
13. Pantai Pesona Batu Purnama	Jl. Cut Nyak Dien-Purnama
14. Hutan Wisata	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
15. Danau Bunga Tujuh	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
16. Hutan Bakau UNRI	Jl. Raja Ali Haji Kel. Purnama
17. Wisata Sungai Mesjid	Jl. Dr. Wahidin Purnama
18. Kuala Sungai Dumai	Jl. Syekh Umar
19. Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
20. Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai
21. Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
22. Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
23. Kampung Lamo Pulau Bungk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
24. Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana)
25. Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
26. Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. HR Soebrantas
27. Penakaran Harimau Senepis	Kel. Baslam Baru Kec. Sungai Sembilan
28. Embung Bukit Cahaya	Kel. Bumi Ayu
29. Sungai Dumai (Wisata Air)	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
30. Telaga Tirta Bukit Datuk	Komplek PERTAMINA - Bukit Datuk
B. WISATA SEJARAH	
1. Makan Pawang Lion	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
2. Perigi Tuk Kurus	Komplek Pertamina Bukit Datuk
3. Batu Telapak Harimau Sakti	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Keramat Cengal Sakti	Jl. Teduh (Pangkalan Sesai)
5. Makan Tuk Kedondong	Komplek Patra Dock
6. Makam Tuk Syech Umar	Jl. Syech Umar
7. Pesanggrahan Putri Tujuh	Jl. Putri Tujuh (Kilang Pertamina)
C. WISATA AGAMA	
1. Dumai Islamic Center (DIC)	Jl. HR Soebrantas
2. Klenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Ratu Sima - Kelakap Tujuh
3. Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
4. Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai - Duri)
5. Wisata Religi Rumah Suluk	Kec. Sungai Sembilan - Basilam Baru
6. Masjid Terapung Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai- Sei. Pakning (Kel. Teluk Makmur)
D. WISATA OLAH RAGA	
1. Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
2. Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
3. Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
4. Wisata Mancing Wak Ngah Kampung Mundam	Mundam
E. WISATA KULINER	
1. DEKRANASDA Kota Dumai (BKemojo, Dodol, Keripik, dll)	Jl. Jend Sudirman No.55 (Samping Ramayana Plaza)
2. Wisata Kuliner Ombak (Menyediakan Berbagai Jenis Kuliner)	Jl. Sultan Hasanuddin / Jl. Ombak
3. Oleh - Oleh Khas Dumai (Kerupuk Cabe)	Jl. Pulau Mampu (Dekat Pasar P. Payung)
4. Dendeng Pucuk Ubi Fatmawa	Jl. Jeruk Jayamukti
5. Restoran Dan Rumah Makan	Jl. Tenaga - Sultan Syarif Kasim
6. Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	Jl. Kelakap Tujuh
7. Wisata Kuliner Dock Yard	Jl. Dock Yard
8. Kuliner Janur Kuning Jayamukti	Jl. Janur Kuning – Jaya Mukti
9. Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	Jl. Jend. Sudirman
F. WISATA BELANJA	
1. Ramayana Plaza	Jl. Jend. Sudirman
2. Citimall	Jl. Raya Bukit Datuk
3. Pasar Bunda Sei Mersing/ PPulau Payung	Jl. Diponegoro
4. Pasar Senggol	Jl. Jend. Sudirman
5. Pasar Lepin	Jl. Jend. Sudirman

Sumber Data : BPS Kota Dumai

e. Kependudukan

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020.

Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan “SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA”.

SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri.

Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2023 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak Tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015.

Hasil Proyeksi Interim Penduduk Kota Dumai pada pertengahan Tahun 2022 sebanyak 331.832 jiwa. Jumlah penduduk Kota Dumai mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021 sebanyak 8.380 jiwa. Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 105. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kota Dumai Tahun 2022 mencapai 161 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Dumai Kota sebesar 7.695 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 32 jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terbanyak Tahun 2022 adalah Dumai Timur dengan jumlah penduduk 72.106 jiwa (21,73 persen), sedangkan kecamatan dengan penduduk terendah adalah Medang Kampai dengan jumlah penduduk 18.512 jiwa (5,58 persen). Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Dumai paling banyak berada pada kelompok umur 0-4 tahun dan paling sedikit pada kelompok umur 75 tahun keatas, dengan jumlah masing-masing sebesar 34.761 jiwa dan 2.759 jiwa.

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Tahun 2018 - 2022 Kota Dumai

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Laki-laki (Jiwa)	155.638	158.287	162.769	166.049	170.201
Perempuan(Jiwa)	147.654	150.525	154.013	157.403	161.631
Total (Jiwa)	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832
Sex Ratio	105,41	105,16	105,69	105,49	105,30
Pertumbuhan (%)	1,90	2,15	2,17	0,19	2,71



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kepadatan (Jiwa/km ²)	176	178,77	183	187	192,1

Sumber Data : BPS Kota Dumai

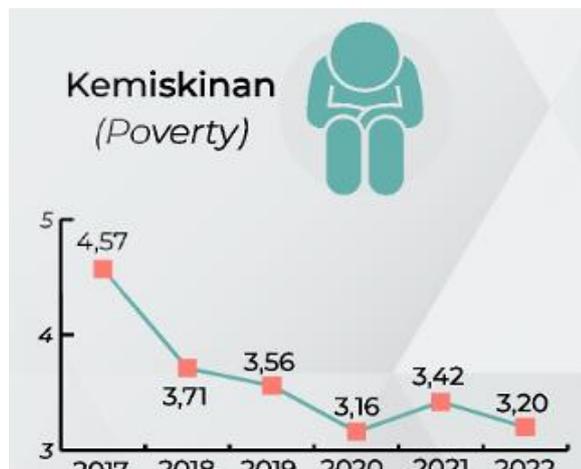
Gambar 3 - Penduduk Kota Dumai Tahun 2022



Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, secara umum perkembangan jumlah penduduk Riau mengalami peningkatan pada kurun waktu 2015-2022. Secara regional, kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Pekanbaru, yakni 1.007.540 jiwa. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah. Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk (Interim) Tahun 2020-2023 adalah 6,61 juta jiwa.

Dan sebagai salah satu cara mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat dari tingkat kemiskinan daerah tersebut. Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebanyak 6,84%. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan Kota Dumai memiliki 3,20% penduduk miskin di Tahun 2022. Persentase penduduk miskin di tahun ini menurun dibanding dengan Tahun 2021 yang sebesar 3,42%.

Gambar 4 – Persentase Penduduk Miskin Kota Dumai Tahun 2022





PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 5 – Persentase Penduduk Miskin Provinsi Riau Tahun 2022



Untuk menghitung pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indikator rasio indeks gini. Tingkat ketimpangan merupakan indikator yang menggambarkan derajat ketimpangan dalam suatu wilayah dengan nilai yang terletak antara 0 (kemerataan sempurna) hingga 1 (ketidakmerataan sempurna). Kriteria koefisien rasio gini dibagi tiga, yakni ketimpangan Rendah (rasio gini $< 0,3$), Sedang ($0,3 \leq$ rasio gini $\leq 0,5$) dan Tinggi (rasio gini $> 0,5$). Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan di Kota Dumai berada di kriteria sedang dengan nilai rasio gini sebesar 0,36 dan tetap konsisten mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan pemerataan distribusi ekonomi dan kesempatan dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial di Kota Dumai semakin membaik.

f. Ketenagakerjaan

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati masalah ketenagakerjaan adalah angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Dari sekitar 222 ribu penduduk usia kerja Kota Dumai pada Tahun 2021, tercatat sekitar 64,91 persen termasuk dalam angkatan kerja. Angka ini menurun daripada tahun sebelumnya, sehingga dapat dimaknai sebagai peningkatan proporsi penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya).

Sementara itu, selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT adalah angka perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di dunia kerja. Pada Tahun 2021, TPT Kota Dumai menurun dibandingkan Tahun 2020, yaitu dari 8,19 persen menjadi 6,29 persen, yang menunjukkan semakin tingginya proporsi angkatan kerja yang terserap dunia kerja.

Pada Tahun 2022, BPS mencatat dari 148.506 orang Angkatan Kerja (penduduk 15 tahun ke atas), 140.509 orang adalah Pekerja dan 7.997 orang adalah Penganggur. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Dumai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 2.627 orang dan terjadi penurunan sebesar 53,85 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yang mana pada Tahun 2022 terdaftar 1.817 laki-laki dan 810 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Tahun 2022 adalah yang berpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 73,20 persen (1.923 orang).

Tabel 2.10 Statistik Ketenagakerjaan Kota Dumai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2019	2020	2021	2022
Penduduk 15 tahun Keatas	216.983	218.283	222.553	226.891
Angkatan Kerja	150.323	146.586	144.465	148.506
1. Bekerja	140.600	134.581	135.381	140.509
2. Pengangguran Terbuka	9.723	12.005	9.084	7.997
Bukan Angkatan Kerja	66.660	71.697	78.088	78.385
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	69,28	67,15	64,91	65,45
Tingkat Pengangguran (TPT) (%)	6,47	8,19	6,29	5,38

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Dumai pada Tahun 2022 mencapai 148.506 orang, bertambah secara absolut sebanyak 4.041 orang dibanding Tahun 2021 (144.465 orang). Peningkatan jumlah angkatan kerja pada Tahun 2021 diikuti dengan peningkatan persentase TPAK pada Tahun 2022. Persentase TPAK mengalami peningkatan persentase sebesar 0,54 persen, dari 64,91 persen pada Tahun 2021 menjadi 65,45 persen pada Tahun 2022. Peningkatan angkatan kerja menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Dumai semakin meningkat. Sementara itu, TPT menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir hingga mencapai 5,38 persen pada Tahun 2022. Penurunan angka TPT pada Tahun 2022 mengandung makna bahwa semakin besar proporsi angkatan kerja yang telah terserap dunia kerja. Peningkatan TPAK yang diiringi dengan penurunan TPT menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan produktivitas penduduk angkatan kerja melalui perluasan lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja di Tahun 2022.

Berdasarkan status pekerjaan utama, selama tiga tahun terakhir, total penduduk Kota Dumai yang bekerja didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya mencapai 49,78 persen pada Tahun 2022, menurun dibandingkan Tahun 2021. Persentase penduduk yang berusaha juga mengalami penurunan pada Tahun 2022. Sementara itu, kelompok pekerja bebas mengalami peningkatan persentase yang signifikan, dari 4,23 persen menjadi 11,22 persen di Tahun 2022. Adapun pekerja keluarga mengalami penurunan persentase. Dari empat klasifikasi tersebut, hanya kelompok pekerja bebas yang mengalami peningkatan persentase.

Tabel 2.11 - Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status Pekerjaan	2020	2021	2022
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	52,37	54,30	49,78
Berusaha/Wiraswasta	31,77	32,32	29,97
Berusaha sendiri	16,54	18,44	16,84
Berusaha dibantu buruh tidak tetap / buruh tidak dibayar	10,36	10,23	10,23
Berusaha dibantu buruh tetap / buruh dibayar	4,88	3,65	2,90
Pekerja Bebas	5,08	4,23	11,22
Pekerja Keluarga	10,78	9,14	9,03



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	100,00	100,00	100,00
---------------	--------	--------	--------

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Pola pada tiga tahun terakhir dapat menjelaskan bahwa, telah terjadi pergeseran pola pekerjaan masyarakat Kota Dumai, yaitu sebagian kecil pekerja beralih menjadi pekerja bebas atau *freelancer* di mana mereka menerima upah tidak secara tetap, tetapi secara harian atau borongan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Kelompok pekerja bebas bekerja untuk lebih dari satu majikan dalam satu bulan terakhir karena belum ada pekerjaan tetap atau usaha yang dapat digelutinya, baik karena alasan rendahnya upah atau jaminan pekerjaan dalam jangka panjang. Berhubung Kota Dumai merupakan salah satu wilayah produsen kelapa sawit dan merupakan kota pelabuhan, pekerja bebas di Kota Dumai umumnya bekerja di perkebunan sawit atau pelabuhan barang. Lapangan pekerjaan ini tidak membutuhkan spesifikasi pendidikan tinggi, sehingga memegang kendali yang krusial dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak terhadap penurunan jumlah pengangguran.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi dikhawatirkan menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan Pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan, sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 2.12 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2020	2021	2022
Tidak Memiliki Ijazah SD / Memiliki Ijazah SD	6,45	5,83	3,43
SMP	4,88	2,20	4,51
SMA	8,65	5,82	4,24
SMK	11,16	9,28	9,47
Perguruan Tinggi	9,21	7,36	6,88
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,19	6,29	5,38

Sumber Data : BPS Kota Dumai

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan SMK merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 11,16 pada Tahun 2020, menurun menjadi 9,28 pada Tahun 2021, dan sedikit meningkat menjadi 9,47 pada Tahun 2022 Tingginya pengangguran dari tamatan SMK menunjukkan bahwa masih banyak lulusan SMK yang tidak terserap di lapangan pekerjaan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah agar lulusan SMK semakin banyak yang bekerja, baik melalui peningkatan motivasi bekerja atau melalui perluasan spesifikasi lapangan pekerjaan yang tersedia. Pada Tahun 2022, TPT tertinggi berikutnya setelah tamatan SMK adalah pada kelompok tamatan perguruan tinggi sebesar 6,88 persen, diikuti



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

kelompok tamatan SMP sebesar 4,51 persen, tamatan SMA sebesar 4,24 persen, dan terakhir tamatan SD ke bawah sebesar 3,43 persen. TPT di Kota Dumai bernilai tinggi pada kelompok tamatan SMK dan perguruan tinggi, sama halnya dengan yang terjadi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Dumai tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki para pencari pekerjaan lulusan SMK dan perguruan tinggi. Sementara itu, rendahnya TPT pada tamatan SD ke bawah di Tahun 2022 dapat mengindikasikan bahwa para pencari kerja tamatan SD ke bawah cenderung tidak selektif terhadap jenis pekerjaan yang dapat mereka lakukan.

Gambar 6 – Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Kondisi pengangguran di Kota Dumai diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat keahlian penduduk. Pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di Kota Dumai akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pekerja dalam pembangunan. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha, sehingga dapat turut serta membangun daerahnya karena telah membantu perluasan lapangan pekerjaan baru. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

2.2 Kebijakan Keuangan

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka memastikan kebijakan dan tujuan nasional menggunakan instrumen kebijakan fiskal di APBN tetap sinkron dengan yang dilakukan pemerintah daerah. APBN dan APBD bekerja sama secara



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sinergis, harmonis, dan selaras untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional.

Ada tiga tugas utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bidang ekonomi sebagai prioritas pembangunan, yaitu Pertama, merumuskan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus fungsi penyediaan kesempatan kerja. Kedua, mencermati karakter pertumbuhan ekonomi di tiap daerah agar bisa mencetak model pembangunan ekonomi regional. Ketiga, pemetaan potensi daerah dari segala sisi untuk menajamkan fokus pembangunan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu Tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 disusun untuk menentukan arah kebijakan bagi perencanaan pembangunan Kota Dumai dengan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)". Mengacu pada kedua Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi existing maka rumusan Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah " Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu ". RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, Renstra dan Renja SKPD dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Dumai.

Tahun 2022, perekonomian Indonesia melanjutkan arah pemulihan seiring pandemi Covid-19 yang sudah lebih terkendali dengan berbagai langkah penanganan sistematis dan program vaksinasi yang sudah menjangkau populasi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian nasional diperkirakan sudah mampu keluar dari bayang-bayang krisis dan menjalankan proses normalisasi secara bertahap. Selain itu, agenda-agenda reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga mulai memberikan dampak positif kepada daya saing destinasi investasi dan produk-produk ekspor unggulan nasional. Meski demikian, potensi kemunculan pandemi dari virus varian baru tetap menjadi faktor utama risiko yang harus terus diantisipasi oleh masyarakat. Kemampuan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

adaptasi masyarakat untuk terus menerapkan disiplin protokol kesehatan akan menjadi fitur penting dalam memitigasi risiko dimaksud. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia di Tahun 2022 diproyeksi mampu tumbuh pada kisaran 5,0 – 5,5 persen. Dari sisi sektoral, arah pemulihan sektor usaha strategis seperti sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata sangat bergantung pada sisi pengendalian Covid-19. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika dan dukungan pemulihan terhadap dunia usaha dan industri, kinerja sektor-sektor strategis diperkirakan tetap mampu melanjutkan momentum pertumbuhan positif secara keseluruhan Tahun 2021.

Keberhasilan pengendalian pandemi mendorong tingkat kepercayaan masyarakat dalam beraktivitas sebagaimana dilakukan sebelum pandemi. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja konsumsi masyarakat. Penguatan program perlindungan sosial akan dijalankan dengan integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, serta sinergi program yang relevan, termasuk program subsidi bagi masyarakat. Lebih jauh, stabilitas inflasi yang terkendali pada rentang 3 ± 1 persen secara berkelanjutan juga turut mendukung menjaga daya beli masyarakat.

Tema utama pada prioritas kebijakan fiskal Tahun 2022 adalah percepatan program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Prioritas kebijakan fiskal yang pertama adalah melanjutkan dan mempercepat program pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah di bidang kesehatan tentang penanggulangan wabah Covid-19 supaya bisa dikendalikan menjadi hal yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi karena akar dari permasalahan ini adalah keberadaan virus yang menginfeksi banyak manusia sehingga mengganggu interaksi antar manusia dan berimplikasi kepada perputaran ekonomi. Selanjutnya, prioritas kebijakan fiskal Tahun 2022 adalah penguatan reformasi struktural. Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi menjadi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas Kesehatan dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi yang terjadi.

Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi Tahun 2022 akan mencakup:

a. Penguatan Sektor Kesehatan

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

b. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

c. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.

d. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

e. Akselerasi Investasi

Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission (OSS)*, meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.

f. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi *competitive advantage* sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement (PTA)*, *Free Trade Agreement (FTA)*, *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* untuk perluasan ekspor dan peningkatan efisiensi logistik.

g. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke *originasi* yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya, dan *meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE)*; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

h. Pendalaman Sektor Keuangan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

APBD Kota Dumai disusun berdasarkan anggaran berbasis kinerja, yaitu pengeluaran diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta sesuai dengan rencana, program dan target kegiatan serta fungsi masing-masing instansi. APBD sebagai suatu Rencana Kerja Tahunan Daerah telah diupayakan penyusunannya secara cermat dan menyeluruh yang disesuaikan dengan perkiraan kemampuan dana yang dapat dihimpun untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi nasional dan bahkan perkembangan ekonomi global yang tentunya sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian Pemerintah Kota Dumai akan mengefektifkan dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerah serta mengutamakan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus membuat kebijakan anggaran daerah yang bertumpu pada kondisi nyata di daerah dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan pada Tahun Anggaran 2021.

Hal lain yang juga mempengaruhi kebijakan umum APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 khususnya untuk penyesuaian belanja daerah adalah pertimbangan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi akibat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta menjaga stabilitas perekonomian masyarakat, dimana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan menjalankan visi serta misi pembangunan daerah.

Dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

a. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran**

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah guna kesejahteraan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan.

b. **Disiplin Anggaran**

APBD disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara biaya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap program dan kegiatan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu APBD dialokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Ekonomis, Efisien dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Kebijakan terhadap struktur APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan Kota Dumai yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah, meliputi ; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- 2) Pendapatan Transfer
 - a) Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ; Dana Perimbangan (Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil; dan Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - DAK Fisik; dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus;
 - b) Transfer Antar Daerah, meliputi ; Pendapatan Bagi Hasil; dan Bantuan Keuangan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah; Dana Darurat; dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KM.07/2021 tentang penetapan kurang bayar, lebih bayar, dan alokasi sementara kurang bayar dana bagi basil pada Tahun 2021;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/pmk.07/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021;
- 5) Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017, mulai 13 Desember 2021, PPJ tidak dapat dikenakan lagi atas listrik yang dihasilkan sendiri dan dihasilkan sumber lain selain PLN. Oleh karena itu, mulai tanggal tersebut, Pemda hanya dapat memungut PPJ atas listrik yang dihasilkan PLN kepada masyarakat; dan
- 6) Realisasi Pendapatan Tahun 2021.

Peningkatan pendapatan daerah dapat ditempuh dengan usaha, baik intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua cara tersebut terus diupayakan Pemerintah Kota Dumai melalui berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran penerimaan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan angka pertumbuhan dan keberhasilan penggalan potensi pendapatan daerah Kota Dumai, telah diupayakan usaha-usaha ke arah peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai strategi, diantaranya diarahkan pada:

- 1) Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan memperbaiki program kegiatan yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
- 2) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- 3) Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah untuk tercapainya peningkatan PAD;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya;
- 2) Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah; dan
- 3) Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam penyusunan APBD Tahun 2022 didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun 2021.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Dumai dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain:

- 1) Melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi di bidang pendapatan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait dengan PAD;
- 3) Meningkatkan kualitas data dan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait porsi dana transfer daerah;
- 4) Menyiapkan data-data penerimaan secara akurat sebagai bahan analisis potensi penerimaan atau PAD;
- 5) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap PAD;
- 6) Peningkatan pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
- 7) Koordinasi antar SKPD ditingkatkan sebagai upaya Peningkatan PAD;
- 8) Peningkatan kinerja BUMD dalam rangka optimalisasi pendapatan dari unit usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
- 9) Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;
- 10) Mendorong investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
- 11) Melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait dengan alokasi dana transfer;
- 12) Melakukan reviu untuk penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
- 13) Sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- 14) Melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak dan retribusi daerah; dan
- 15) Pemanfaatan teknologi informasi dan di bidang pendapatan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit perbendaharaan.

Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksananya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2022, yang sejalan dengan strategi pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2022 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN). Ketujuh Prioritas Nasional (PN) tersebut, dengan penjabaran masing-masing, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan kata lain prioritas pendanaan ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. Ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran SKPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah.

Selain belanja dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah juga mengalokasikan pendanaan untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya sesuai peraturan perundangan yang paling sedikit meliputi:

- 1) Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- 2) Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- 3) Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019*;
- 4) Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* untuk pos komando tingkat kelurahan;
- 5) Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan
- 6) Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah.

Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Kota Dumai, diarahkan pada:

- 1) Mengutamakan pemanfaatan belanja yang menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 2) penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- 3) Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kota Dumai; dan
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja daerah Tahun 2022 dialokasikan dengan pengaturan pola yang menganut asas proporsional, efisien dan efektif dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
- 2) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun berjalan yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- 3) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
- 5) Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
- 6) Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 7) Pengalokasian belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
- 8) Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun Pemerintah Pusat;
- 9) Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
- 10) Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi SKPD.

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2022 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencakup: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman.

Adapun Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran. Sehingga dari sisi pembiayaan dilakukan langkah-langkah antara lain dengan; (a) memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu; (b) tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) dengan tidak menciptakan utang/pinjaman.

1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

2) Kebijakan pengeluaran pembiayaan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah deviden (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesungguhnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah membagi kekuasaan pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan ini kemudian: (a). dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; (b). dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB) kementerian negara/lembaga yang dipimpinya; (c). diserahkan kepada Kepala Daerah (gubernur/wali kota/bupati) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jika kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal & Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan & kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya, dikuasakan, maka kekuasaan pengelolaan keuangan Negara oleh Presiden kepada Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah & mewakili Pemda dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, diserahkan. Konsepsi diserahkan, berkesesuaian dengan asas desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pendapatan daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat baik dana perimbangan (DAU, DBH dan DAK), DID & dana desa sudah terbagi dalam belanja pemerintah pusat dalam mandatory spending. Mandatory spending merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Dalam menyusun APBD perlu diperhatikan pengeluaran wajib bagi Pemerintah Daerah yakni *mandatory spending* yang merupakan pengeluaran yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang. Dipahami & dimaknai secara paripurna, *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial & ekonomi daerah.

Pengalokasian anggaran sebagai *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan Pemerintah Daerah, antara lain:

a. Alokasi anggaran fungsi Pendidikan

Sesuai amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, & Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00. Dan untuk anggaran pendidikan pada Tahun 2022 telah dialokasikan senilai Rp360.450.184.856,00, yaitu sebesar 21,99% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2022.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp326.083.984.482,09 atau sebesar 90,47% dari anggaran.

b. Alokasi anggaran Kesehatan

Pemda Provinsi, kabupaten/kota mengalokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, & anak terlantar.

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00. Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja diluar gaji senilai Rp270.912.859.357,00, yaitu sebesar 16,53% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, total alokasi dana belanja untuk bidang ini senilai Rp458.105.293.984,00 sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp447.623.317.455,90 atau sebesar 97,71% dari anggaran.

c. Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Sebagaimana amanat Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan (5 Januari 2022).

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00. Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana senilai Rp205.833.844.805,00, yaitu sebesar 12,56% dari Total Belanja APBD Kota Dumai Tahun 2022.

Sampai akhir tahun anggaran, terealisasi senilai Rp168.867.495.714,01 atau sebesar 82,04% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 disajikan sesuai format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian target dan realisasi kinerja Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4.	PENDAPATAN	1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	98,41	1.287.005.084.625,14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	452.558.659.244,67	464.003.743.318,86	102,53	366.696.884.199,75
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	222.013.986.230,00	226.332.093.315,36	101,94	185.979.625.987,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12	23.776.863.396,46
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90	1.415.125.255,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180.895.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99	155.525.269.561,29
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	939.777.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43	879.612.437.425,39
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	97,98	763.025.612.681,00
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	774.402.942.753,00	758.360.104.729,00	97,93	731.422.367.681,00
4.2.1.1.1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	162.373.681.000,00	167.642.355.626,00	103,24	145.468.956.587,00
4.2.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	429.554.051.000,00	427.742.257.138,00	99,58	429.427.931.000,00
4.2.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62.721.068.973,00	61.389.147.488,00	97,88	92.602.935.776,00
4.2.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119.754.141.780,00	101.586.344.477,00	84,83	63.922.544.318,00
4.2.2.1.	Dana Insentif Daerah (DID)	20.360.896.000,00	20.360.896.000,00	100,00	31.603.245.000,00
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,00	127.473.704.418,00	87,90	116.586.824.744,39
4.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	135.038.655.888,33	119.057.454.418,00	88,17	108.598.824.744,39
4.2.2.2.	Bantuan Keuangan	9.974.789.600,00	8.416.250.000,00	84,38	7.988.000.000,00



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	40.695.763.000,00
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	0	0	0	40.695.763.000,00

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam perhitungan APBD Tahun Anggaran 2022 tercatat senilai Rp1.370.173.351.941,86 atau sebesar 98,41% dari target APBD Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan senilai Rp1.392.335.943.486,00 yang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan senilai Rp83.168.267.316,72 atau sebesar 6,64% dari realisasi tahun sebelumnya senilai Rp1.287.005.084.625,14. Secara garis besar, komposisi pendapatan daerah terbagi dalam:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp452.558.659.244,67 dengan realisasi senilai Rp464.003.743.318,86 atau sebesar 102,53%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp97.306.859.119,11 atau sebesar 26,54% dari realisasi tahun lalu senilai Rp366.696.884.199,75.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah yang mencakup Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-Dana Penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi-Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp939.777.284.241,33 dengan realisasi senilai Rp906.194.705.147,00 atau sebesar 96,43%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp26.582.267.721,61 atau sebesar 3,02% dari realisasi tahun lalu senilai Rp879.612.437.425,39.

3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kota Dumai tidak menganggarkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, dan juga tidak ada realisasinya atau sebesar 0,00%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp40.695.763.000,00.

Di sisi pendapatan, analisis kesehatan keuangan APBD dilakukan dengan melihat beberapa hal, salah satunya adalah melihat pada rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah dicerminkan oleh Rasio PAD terhadap total pendapatan, serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi Rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya untuk rasio transfer. Dan untuk Rasio kemandirian daerah Kota Dumai pada Tahun 2022, tergambar sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 sedangkan Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar 33,86%.
- 2) Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Pendapatan Pajak Daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp226.332.093.315,36. Rasio Pendapatan Pajak terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 48,78%.
- 3) Rasio Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Pendapatan Retribusi daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp32.206.368.295,17. Rasio Pendapatan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 6,94%.
- 4) Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan daerah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp1.079.761.191,00. Rasio Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2021 sebesar 0,23%.
- 5) Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah
Realisasi PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp464.003.743.318,86 dari total tersebut jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang dapat dicapai pada Tahun 2022 adalah senilai Rp204.385.520.517,33 Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 44,05%.
- 6) Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86 sedangkan Pendapatan Transfer Kota Dumai pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp906.194.705.147,00 Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 66,14%.
- 7) Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86 sedangkan jumlah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kota Dumai pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp110.563.276.614,00 Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 8,07%.

8) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.198.448.465,86 sedangkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp427.742.257.138,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2021 sebesar 31,22 %.

9) Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022 tercatat senilai Rp427.742.257.138,00 Sedangkan jumlah Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2022 yaitu senilai Rp649.325.852.373,00 Rasio Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 65,87%.

10) Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan

Total Pendapatan yang dapat dicapai pada Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.370.173.351.941,86 sedangkan pada Tahun 2022 tidak ada realisasi atas lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Dumai, dengan kata lain lain-lain pendapatan daerah yang sah, tercatat senilai Rp0,00. Rasio Lain-lain Pendapatan terhadap Total Pendapatan Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,00%.

Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022, dihitung berdasarkan PAD terhadap jumlah antara Dana Transfer dan Pinjaman Daerah. Sehingga Rasio Kemandirian Daerah Kota Dumai pada Tahun 2022 yaitu sebesar 46,39%. Kota Dumai masih memiliki nilai Rasio kemandirian Daerah di bawah 50% yang artinya memiliki rasio kemandirian keuangan daerah yang rendah.

b. Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja belanja Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 setelah di konversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.2 Ikhtisar Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.	BELANJA	1.639.213.506.052,00	1.507.041.615.158,67	91,94	1.314.289.659.257,23
5.1.	BELANJA OPERASI	1.332.589.032.114,00	1.246.579.389.430,03	93,55	1.105.414.852.748,84
5.1.1	Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	93,01	587.860.841.072,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	559.998.434.987,95	95,57	481.698.811.775,84
5.1.3	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	53,02	0



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5.1.4	Belanja Subsidi	132.027.000,00	0	0	0
5.1.5	Belanja Hibah	30.956.352.225,00	23.282.916.899,08	75,21	35.855.199.901,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	83,53	0
5.2.	BELANJA MODAL	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	84,94	199.818.329.751,39
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	99,79	17.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	90,88	84.487.469.177,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.485.105.586,00	87.322.813.477,02	83,57	52.685.031.521,31
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.178.025.211,00	73.340.485.070,99	81,33	56.397.085.845,08
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	61,21	6.231.743.208,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	88,99	9.056.476.757,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(246.877.562.566,00)	(136.843.166.692,81)	55,43	(27.284.574.632,09)

Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00 dengan realisasi senilai Rp1.507.041.615.158,67 atau sebesar 91,94%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi kenaikan realisasi senilai Rp192.751.955.901,44 atau sebesar 14,67% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.314.289.659.257,23 dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan senilai Rp1.246.579.403.615,03 atau sebesar 93,55% dari yang dianggarkan.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal secara keseluruhan senilai Rp260.201.936.711,64 atau sebesar 84,94 % dari anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan anggarannya senilai Rp292.485.131,00 pada Tahun 2022 dan realisasi senilai Rp260.289.017,00 atau 88,99% dari anggaran.

Berikut ini akan beberapa jenis rasio yang terkait dalam pos belanja yaitu:

a) Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Operasi yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp1.246.579.403.615,03. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 82,72%

b) Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modal yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp260.201.936.711,64. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 17,27%

c) Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Tak Terduga yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp260.289.017,00. Rasio Belanja Tak Terduga terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,02%

d) Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Transfer yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp0,00. Rasio Belanja Transfer terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,00%

e) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp649.325.852.373,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 43,09%

f) Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi

Realisasi Total Belanja Operasi Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.246.579.403.615,03 dari total tersebut jumlah Belanja Pegawai yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp649.325.852.373,00. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Operasi Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 52,09%

g) Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja

Realisasi Total Belanja Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah senilai Rp1.507.041.629.343,67 dari total tersebut, jumlah Belanja Bantuan Sosial yang dapat direalisasikan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp12.911.808.100,00. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Kota Dumai pada Tahun 2022 sebesar 0,86%.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.370.198.448.465,86 dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.507.041.629.343,67 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit senilai Rp136.868.277.401,81.

c. Ikhtisar Pembiayaan Daerah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berikut disajikan target dan realisasi kinerja pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 setelah dikonversi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3.3 Ikhtisar Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

No.	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	95,11	195.481.309.973,34
7.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	168.196.735.341,25	168.196.735.341,25	100,00	195.481.309.973,34
7.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	107.534.013.538,00	94.060.540.965,89	87,47	0
7.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	3.500.000,00	0	0
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0
7.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100,00	0
	PEMBIAYAAN NETTO	257.730.748.879,25	244.260.776.307,14	94,77	195.481.309.973,34
	SURPLUS / (DEFISIT)	(246.877.562.566,00)	(136.843.180.877,81)	55,44	(27.284.574.632,09)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	10.853.186.313,25	107.417.595.429,33	989,73	168.196.735.341,25

Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Penerimaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp262.260.776.307,14 atau sebesar 95,11% dari yang dianggarkan.

2) Pembiayaan Pengeluaran Daerah

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah secara keseluruhan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00 % dari yang di anggarkan.

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto senilai Rp244.260.776.307,14 atau 94,77% dari yang dianggarkan, merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 senilai Rp107.392.498.905,33 atau sebesar 989,50% dari anggaran yang ditetapkan, merupakan jumlah dari defisit belanja senilai Rp136.868.277.401,81 ditambah dengan Pembiayaan Netto senilai Rp244.260.776.307,14.

d. Ikhtisar Kinerja Keuangan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai

Format Susunan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1) URUSAN WAJIB

Pada Tahun Anggaran 2022 urusan wajib mendapat alokasi dana senilai Rp1.277.738.300.065,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp1.070.590.456.127,09 atau sebesar 83,79% dari anggaran.

a) URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

(1) PENDIDIKAN

(a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp360.450.184.856,00 sampai akhir tahun anggaran unit kerja ini terealisasi senilai Rp326.083.984.482,00 atau sebesar 90,47% dari anggaran.

(2) KESEHATAN

(a) Dinas Kesehatan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp458.105.293.984,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp447.623.317.455,90 atau sebesar 97,71% dari anggaran. Dinas Kesehatan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp168.986.533.951,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp192.479.014.394,14 atau sebesar 113,90% dari anggaran.

(3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp239.807.061.077,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp205.603.703.843,68 atau sebesar 85,74% dari anggaran. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp15.125.050.000,00 sampai akhir tahun pendapatan realisasi senilai Rp6.363.880.145,17 atau sebesar 42,08% dari anggaran..

(4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(a) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp30.420.926.685,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp29.364.083.743,00 atau sebesar 96,53% dari anggaran.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(5) KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(a) Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.603.365.028,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.795.649.835,00 atau sebesar 91,59% dari anggaran.

(b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp16.370.749.743,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.458.100.131,00 atau sebesar 76,10% dari anggaran.

(c) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.178.450.634,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.724.149.796,00 atau sebesar 94,45% dari anggaran.

(6) SOSIAL

(a) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.744.573.947,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.821.356.900,00 atau sebesar 88,08% dari anggaran.

b) URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

(1) TENAGA KERJA

(a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.614.357.919,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.368.884.673,00 atau sebesar 96,29 % dari anggaran.

(2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(a) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp6.832.285.231,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp6.501.885.491,00 atau sebesar 95,16 % dari anggaran.

(3) PANGAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp19.058.528.368,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp18.327.280.462,00 atau sebesar 96,16 % dari anggaran. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp25.440.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp18.160.000,00 atau sebesar 71,38% dari anggaran.

(4) LINGKUNGAN HIDUP

(a) Dinas Lingkungan Hidup.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp26.646.900.873,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp25.667.573.338,00 atau sebesar 96,32% dari anggaran. Dinas Lingkungan Hidup juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp750.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp717.640.000,00 atau sebesar 95,69% dari anggaran.

(5) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

(a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada Tahun Anggaran 2021 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.663.029.736,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.309.900.521,00 atau sebesar 95,39% dari anggaran.

(6) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(a) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.380.153.015,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.588.010.878,00 atau sebesar 90,55% dari anggaran.

(7) PERHUBUNGAN

(a) Dinas Perhubungan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp53.188.470.907,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp51.042.171.358,62 atau sebesar 95,96% dari anggaran. Dinas Perhubungan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp31.000.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

teralisasi senilai Rp25.844.794.449,00 atau 83,37% dari anggaran.

(8) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(a) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.623.386.261,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.314.885.363,00 atau 97,35% dari anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp1.000.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp525.197.100,00 atau 52,52% dari anggaran.

(9) PENANAMAN MODAL

(a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp12.621.869.768,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.949.829.438,00 atau 86,75% dari anggaran.

(10) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

(a) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp17.218.749.159,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp14.460.147.345,79 atau 83,98% dari anggaran.

(11) PERPUSTAKAAN

(a) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp5.291.532.346,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp4.901.218.316,00 atau 92,62% dari anggaran.

2) URUSAN PILIHAN

Pada Tahun Anggaran 2021 urusan pilihan mendapat alokasi dana senilai Rp28.950.614.543,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp25.295.080.360,68 atau 87,37% dari anggaran.

a) KELAUTAN DAN PERIKANAN

(1) Dinas Perikanan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.877.088.245,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.436.540.150,00 atau 94,41% dari anggaran. Dinas Kelautan dan Perikanan juga



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp25.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp26.009.600,00 atau 104,04% dari anggaran.

b) **PERDAGANGAN**

(1) Dinas Perdagangan.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.823.110.887,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.914.998.722,68 atau 91,61% dari anggaran. Dinas Perdagangan juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp1.009.950.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp681.737.000,00 atau 67,50% dari anggaran.

c) **KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian.

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.215.465.411,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.235.794.888,00 atau 78,52%

3) URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENDUKUNG DAN PENUNJANG

Pada Tahun Anggaran 2022 urusan pemerintahan fungsi penunjang mendapat alokasi dana senilai Rp1.479.891.941.507,00 sampai akhir tahun anggaran telah terealisasi senilai Rp1.417.065.067.280,55 atau 95,75% dari anggaran.

a) **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

(1) Sekretariat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp67.124.101.596,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp63.531.192.220,00 atau sebesar 94,65% dari anggaran. Sekretariat Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp50.000.000,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp28.950.000,00 atau sebesar 57,90% dari anggaran.

(2) Sekretariat DPRD

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp56.293.494.721,00 sampai akhir tahun anggaran



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bidang ini terealisasi senilai Rp42.684.718.587,00 atau sebesar 75,83% dari anggaran.

(3) Kecamatan Dumai Barat

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp9.243.700.309,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp8.886.542.573,00 atau sebesar 96,14% dari anggaran.

(4) Kecamatan Dumai Timur

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja Rp10.527.519.072,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.228.597.526,00 atau sebesar 97,16% dari anggaran.

(5) Kecamatan Bukit Kapur

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.898.896.475,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp11.511.371.758,00 atau sebesar 96,74% dari anggaran.

(6) Kecamatan Medang Kampai

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp7.901.180.723,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.574.545.065,00 atau sebesar 95,87% dari anggaran.

(7) Kecamatan Sungai Sembilan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.869.637.137,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.471.023.827,00 atau sebesar 96,33% dari anggaran.

(8) Kecamatan Dumai Kota

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp11.281.034.946,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.944.772.000,00 atau sebesar 97,02% dari anggaran.

(9) Kecamatan Dumai Selatan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.476.259.589,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp10.178.026.757,00 atau sebesar 97,15% dari anggaran.

b) PENGAWASAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(1) Inspektorat

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp14.858.074.831,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp12.867.287.746,00 atau sebesar 86,60% dari anggaran.

c) PERENCANAAN

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp10.176.748.354,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp9.393.400.419,00 atau sebesar 92,30% dari anggaran.

d) KEUANGAN

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp50.833.413.741,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp43.120.970.189,00 atau sebesar 84,83% dari anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp951.174.224.428,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp915.311.002.629,19 atau sebesar 96,23% dari anggaran.

(2) Badan Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp25.847.932.084,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp24.505.432.187,00 atau sebesar 94,81% dari anggaran. Badan Pendapatan Daerah juga mengalokasikan anggaran pendapatan senilai Rp223.189.745.107,00 sampai akhir tahun pendapatan terealisasi senilai Rp228.202.063.148,36 atau sebesar 102,25% dari anggaran.

e) KEPEGAWAIAN

(1) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Tahun Anggaran 2022 bidang ini mendapat alokasi dana belanja senilai Rp8.145.978.394,00 sampai akhir tahun anggaran bidang ini terealisasi senilai Rp7.650.267.173,00 atau sebesar 93,91% dari anggaran.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan urusan Keuangan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Sumber pendanaan pembangunan yang masih tergantung pada dana perimbangan dan potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- b. Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat;
- c. Adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
- d. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan faktor demografis, yaitu semakin berkembangnya Kota yang menarik penduduk dari daerah lain yang menyebabkan tuntutan akan kebutuhan pelayanan publik harus selalu prima demi kepuasan masyarakat akan kinerja pelayanan publik;
- e. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan sehingga menyebabkan pemekaran wilayah administrasi;
- f. Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal; dan
- g. Pelaksanaan lelang kegiatan fisik yang terlambat, karena prosesnya terkadang baru dimulai pada bulan April dan bahkan ada yang baru dimulai pada Semester II. Hal ini juga disebabkan oleh perencanaan Detail Engineering Design (DED) dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik, sehingga apabila pelaksanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

a. Entitas Pelaporan

- 1) Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Dumai dan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 2) Pemerintah Kota Dumai sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

b. Entitas Akuntansi

- 1) Setiap satuan kerja perangkat daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
- 2) Perusahaan daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya menggunakan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- 3) Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu, seperti badan layanan umum daerah (BLUD), yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Kota Dumai ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.
- b. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kota Dumai tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Dumai, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Pemerintah Kota Dumai mulai Tahun 2015 menggunakan Basis Akrua dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Akrua dan Buletin Teknis yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Dumai. Basis akrua digunakan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan - LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi yang khusus.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrua.
2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat, pemerintah provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Dumai, sedangkan entitas akuntansi yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam lingkup



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pemerintah Kota Dumai, tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
3. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
4. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban;
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo Anggaran Lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus Kas.
5. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
6. Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS DAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.
3. Laporan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi LRA ini diterapkan dalam penyajian LRA yang disusun oleh SKPD/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), PPKD, dan Pemda.
2. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintahan Kota Dumai).

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

1. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. Nama SKPD/PPKD/Pemda;
 - b. Periode yang dicakup;
 - c. Mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
 - d. Satuan angka yang digunakan.
 3. Laporan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai perubahan gunggung saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Tujuan

1. Tujuan pernyataan standar LO adalah menetapkan dasar-dasar penyajian LO Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan - LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

1. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan - LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
2. Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan entitas pelaporan;
 - c. Periode yang dicakup;
 - d. Mata uang pelaporan; dan
 - e. Satuan angka yang digunakan.
3. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan - LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/Defisit dari Operasi;
 - d. Kegiatan Non-operasional;
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - f. Pos Luar Biasa; dan
 - g. Surplus/Defisit - LO.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Klasifikasi

1. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang;
 - d. Persediaan;
 - e. Investasi jangka panjang;
 - f. Aset tetap;
 - g. Kewajiban jangka pendek;
 - h. Kewajiban jangka panjang; dan
 - i. Ekuitas.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN ARUS KAS

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Pemerintah daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

KAS DAN SETARA KAS

1. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
2. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

1. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
2. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
3. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
3. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian BLUD pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

KETENTUAN UMUM

1. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

7. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA

Tujuan

1. Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LRA Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan - LRA diakui pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/ SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

PENGUKURAN

1. Pendapatan - LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang biaya terhadap Pendapatan - LRA bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan - LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LRA adalah:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan BLUD.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

PENGUKURAN

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal
 - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
3. Perlu diungkapkan mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

9. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. apabila pada saat proses penyusunan laporan keuangan tahun berkenaan terjadi transfer atas pendapatan tahun berkenaan dan tahun-tahun sebelumnya, yang penerimaan kasnya setelah tanggal 31 Desember tahun berkenaan sampai saat penerbitan laporan keuangan, maka pendapatan tersebut diakui sebagai pendapatan – LO tahun berkenaan.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

PENGUKURAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

1. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat senilai nilai SP2D yang diterbitkan atas belanja anggaran transfer keluar.
2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat senilai kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

PENILAIAN

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapannya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

PENGUKURAN

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi yang dilakukan secara langsung (tidak melalui RKUD), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

PENGUNGKAPAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

11. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan - LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan - LO yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

Pendapatan - LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan atau;
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi.

PENGUKURAN

1. Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/retribusi, Peraturan Presiden tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, dan sebagainya.
4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat senilai nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat senilai nilai nominal kas yang diterima pemda.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat senilai estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
6. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Pendapatan - LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan - LO adalah:
 - a. Penerimaan Pendapatan - LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan mengenai Pendapatan - LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

12. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya.

PENGAKUAN

1. Beban diakui pada:
 - a. Saat timbulnya kewajiban;
 - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban Pegawai

1. Beban pegawai terdiri dari beban pegawai yang tidak terkait langsung dengan kegiatan atau disebut belanja tidak langsung (seperti gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, dan sebagainya) dan belanja pegawai yang terkait dengan kegiatan atau disebut belanja langsung (seperti belanja honor).
2. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
3. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.

Beban Barang dan Jasa

1. Beban barang dan jasa termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
2. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
3. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
4. Terbitnya SP2D-LS mengindikasikan bahwa SPP/SPM-LS dan bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, dan hal ini juga menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau jasa telah diterima pemda.
5. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telepon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Belanja persediaan yang diakui sebagai beban persediaan di dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun berjalan.
7. Nilai persediaan yang telah dikonsumsi dihitung dengan menjumlahkan nilai persediaan awal tahun dengan belanja/perolehan persediaan selama tahun berjalan, kemudian dikurangi dengan estimasi nilai persediaan yang tersisa pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. Pengungkapan beban persediaan dalam CaLK meliputi beban persediaan yang merupakan konsumsi persediaan selama periode akuntansi dan persediaan dalam kondisi rusak atau usang pada periode akuntansi.
9. Estimasi nilai persediaan akhir tahun dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Untuk persediaan yang variasinya banyak namun nilai pembelian per unitnya tidak material (contoh persediaan ATK), nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah unit persediaan yang tersisa pada akhir tahun dikalikan dengan nilai pembelian yang terakhir.
 - b. Untuk persediaan yang memiliki nilai nominal, seperti karcis, nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan harga perolehannya yang terakhir.
 - c. Untuk persediaan yang menggunakan kartu kendali persediaan dengan pencatatan dilakukan secara kontinyu setiap kali terdapat pembelian dan penggunaan, seperti persediaan obat-obatan, nilai persediaan akhirnya mengacu kepada kartu kendali persediaan tersebut. Namun demikian, jika dari hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) terdapat persediaan obat-obatan yang kadaluarsa, rusak atau hilang, maka nilai persediaan akhirnya dihitung berdasarkan jumlah barang yang ada (dengan kondisi baik) hasil *stock opname* dikalikan nilai pembelian yang tercatat dalam kartu kendali persediaan.
10. Pencatatan jurnal atas transaksi pembelian/perolehan persediaan dapat dicatat dengan sistem periodik, yaitu dengan mencatat akun 'Beban Persediaan' setiap kali terjadi transaksi perolehan persediaan, dan pada akhir tahun dilakukan jurnal penyesuaian untuk membawa akun 'Beban Persediaan' ke nilai persediaan yang telah dikonsumsi selama tahun anggaran yang berkenaan.
11. Belanja yang dibayar di muka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
12. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
13. Beban penyusutan atas pengeluaran setelah tanggal perolehan (rehab/pemeliharaan) yang terjadi sebelum Tahun 2016 dihitung sesuai



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

perhitungan beban penyusutan aset induk. Untuk pengeluaran setelah tanggal perolehan yang terjadi mulai Tahun 2016, maka beban penyusutannya dihitung berdasarkan tabel tambahan masa manfaat.

14. Semua aset tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan beberapa jenis aset tetap lainnya yang belum dapat ditentukan masa manfaatnya sebagaimana diatur di dalam kebijakan akuntansi aset tetap.
15. Aset tetap yang masuk dalam klasifikasi ekstrakomptabel, yaitu aset tetap yang nilai perolehannya di bawah batas minimal kapitalisasi, tidak dilaporkan di dalam neraca.
16. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).
17. Tabel masa manfaat aset tetap yang disusutkan diatur di dalam Kebijakan Akuntansi tentang Aset Tetap.
18. Masa manfaat aset diperhitungkan sejak tahun perolehan aset yang bersangkutan. Dengan demikian, aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan harus dilakukan koreksi penyusutan dengan mengacu kepada nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya pengakuan penyusutan.
19. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
20. Nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai piutang bruto dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
21. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
22. Besarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang selanjutnya diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lancar pada paragraf yang mengatur tentang penyajian nilai piutang di neraca.
23. Pengakuan beban penyisihan piutang tak tertagih dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian.
24. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
25. Beban Bunga terkait dengan penarikan pinjaman oleh pemda kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemda lainnya, lembaga keuangan/nonkeuangan, masyarakat). Beban bunga yang dilaporkan di dalam LO dengan basis akrual tentu saja dapat berbeda dengan jumlahnya dengan belanja bunga yang dilaporkan di dalam LRA dengan basis kas.
26. Beban bunga diakui melalui jurnal penyesuaian akhir tahun dan/atau pada tanggal pelunasan pinjamannya



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.
28. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.
29. Beban Subsidi diberikan sebagai bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
30. Beban bantuan sosial yang dibayar dengan uang persediaan diakui pada saat SPJ Belanja Bantual Sosial telah disahkan oleh PPKD.
31. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
32. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang tidak memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
33. Penyisihan dana bergulir tak tertagih yang memiliki agunan dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun setelah dikurangi dengan jumlah agunan. Apabila jumlah agunan lebih besar dari pada jumlah tagihan dana bergulir terkait, penyisihan dana bergulir tak tertagih tidak dihitung.
34. Besarnya penyisihan dana bergulir yang tidak dapat diterima kembali, dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

TABEL 4.1 PERSENTASE PENYISIHAN DANA BERGULIR

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Periode 1 s.d 2 Tahun Setelah Jatuh Tempo	25%
2	Periode 2 s.d 3 Tahun Setelah Jatuh Tempo	50%
3	Periode 3 s.d 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	75%
4	Periode Diatas 4 Tahun Setelah Jatuh Tempo	100%

PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - b. Beban Transfer
 - c. Beban Non-operasional
 - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional.
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

13. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LO DAN POS LUAR BIASA

Tujuan

Kebijakan akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa mengatur perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi surplus/defisit-LO dan Pos Luar Biasa yang meliputi definisi, klasifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

PENGUKURAN

1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Surplus dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih lebih antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
3. Defisit dari kegiatan operasional terjadi apabila terdapat selisih kurang antara Pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan.
4. Selisih dari Pendapatan - LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.
5. Yang termasuk ke dalam Pendapatan - LO/beban dari kegiatan non-operasional yaitu surplus/defisit penjualan aset non-lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional lainnya.
6. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional.
7. Surplus/Defisit - LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan pos kejadian luar biasa.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. Surplus/defisit LO merupakan bottom line item atau item bads terakhir dari LO.
2. Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPE.
3. Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. Kejadian di luar kendali entitas pemerintah.
4. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
5. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam CaLK.

14. KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi Kas dan Setara Kas mengatur perlakuan akuntansi atas Kas dan Setara Kas dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam menyusun laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Kas dan Setara Kas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi beban yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapannya

Definisi

1. Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
3. Kas meliputi:
 - a. Seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan atau yang lebih dikenal sebagai Uang Persediaan;
 - b. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran;
 - c. Uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke kas daerah; dan
 - d. Uang tunai atau simpanan di bank yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pelayanan langsung kepada masyarakat.
4. **Kas terdiri** dari:
 - a. Kas di Kas Daerah;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan;
 - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - d. Kas di BLUD;
 - e. Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
 - f. Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
5. Setara **kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
6. Setara kas meliputi investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
7. Setara kas terdiri dari:
 - a. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan;
 - b. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bulan.

8. **Kas di Kas Daerah** adalah uang tunai dan saldo simpanan di tempat penyimpanan uang daerah/bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah atau Rekening Kas Umum Daerah.
9. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
10. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dikelola oleh pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
11. **Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Kas di Bendahara BOS adalah merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Pendidikan yang tidak melalui RKUD.
13. Kas di Bendahara JKN merupakan uang yang berada dalam pengelolaan Dinas Kesehatan yang tidak melalui RKUD.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

PENGAKUAN

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan maupun Bendahara umum Daerah.

PENGUKURAN

Kas dan setara kas diukur dan dicatat senilai nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1. **Saldo** kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
 - a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
 - b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
 - c. Kebijakan manajemen setara kas.

15. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Kota Dumai tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Piutang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
2. **Penyisihan piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
3. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya
4. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Piutang pendapatan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Piutang Lainnya.
5. Piutang Pendapatan terdiri dari:
 - a. Piutang Pajak Daerah;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - f. Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - g. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - h. Piutang Pendapatan Lainnya.
6. Piutang lainnya terdiri dari:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan
 - c. Uang Muka.
7. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

PENGAKUAN

Piutang pendapatan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

PENGUKURAN

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

2. Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
3. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
 - d. Kualitas Piutang Macet.
4. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
5. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun;
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak kooperatif;
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari tiga tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan;
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lima tahun ke atas;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
6. Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari satu tahun;
 - 2) Wajib Pajak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari tiga tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lima tahun ke atas;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
7. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari satu tahun;
 - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu tahun sampai kurang dari tiga tahun;
 - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan kurang dari lima tahun; dan
 - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lima tahun ke atas.
8. Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

jatuh tempo yang ditetapkan;

- b. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
9. Wajib pajak/retribusi dinyatakan bangkrut, tidak ditemukan dan meninggal dunia harus didukung oleh bukti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan senilai:
 - a. Kualitas Lancar senilai 0% (nol persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan senilai 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan senilai:
 - a. Kualitas Lancar senilai 0% (nol persen);
 - b. Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh persen) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Kualitas Diragukan senilai 50 % (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. Kualitas Macet 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan senilai:
 - a. Nol persen (0%) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. Sepuluh pesen (10%) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c. Lima puluh (50%) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. Seratus persen (100%) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
4. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
 5. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
 6. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

PENGUNGKAPAN

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - c. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - d. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
 - e. Jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

16. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Kota Dumai yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Definisi

1. **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
4. Untuk barang yang diproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
6. Persediaan meliputi:
 - a. Barang konsumsi;
 - b. Barang pakai habis;
 - c. Barang cetakan;
 - d. Perangko dan materai;
 - e. Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - f. Amunisi;
 - g. Bahan untuk pemeliharaan;
 - h. Suku cadang;
 - i. Persediaan untuk tujuan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) /berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras);
 - j. Pita cukai dan leges;
 - k. Bahan baku ;
 - l. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - m. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

PENGAKUAN PERSEDIAAN

1. Persediaan diakui:
 - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
3. Persediaan diakui sebagai:
 - a. Aset, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan/terus-menerus dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan.

- b. Beban, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis.

PENGUKURAN PERSEDIAAN

1. Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.

Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

2. Metode periodik adalah metode pencatatan persediaan dimana nilai persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
3. Dengan metode periodik ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.
4. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.
5. Untuk persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi, persediaan disajikan senilai:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
6. Harga pembelian terakhir adalah harga persediaan yang dijadikan dasar pengukuran nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PERSEDIAAN

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Pengungkapan untuk persediaan di dalam Laporan Keuangan, antara lain:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- b. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

17. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI INVESTASI

Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Kota Dumai, baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Definisi

1. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi

1. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
2. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan.
 - b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
3. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
4. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Pengukuran investasi jangka pendek
 - 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu senilai harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat senilai nilai nominalnya.
- b. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - 1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat senilai biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - 2) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - a) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat, dan diukur senilai nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR) diukur dan dicatat senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
3. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat senilai harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai senilai biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai senilai harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (aging schedule).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

TABEL 4.2 PERSENTASE PENYISIHAN PENGEMBALIAN INVESTASI

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25 %
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d 3 Tahun	50 %
3	Jatuh tempok pada periode di atas 3 s.d 4 Tahun	75 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

6. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
 - c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
 - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
7. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
- f. Perubahan pos investasi.

18. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
3. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*nonregenerative natural resources*).

Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

Definisi

1. **Aset tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. **Biaya perolehan** adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. **Masa manfaat** adalah:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - b. **Jumlah** produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
4. **Nilai sisa** adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
5. **Nilai tercatat** adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
6. **Nilai wajar** adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. **Penyusutan** adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
8. **Konstruksi dalam pengerjaan** adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
9. **Kontrak konstruksi** adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

10. **Kontraktor** adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
11. **Uang muka kerja** adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
12. **Klaim** adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
13. **Pemberi kerja** adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
14. **Retensi** adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
15. **Termin** (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Klasifikasi

1. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
4. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

1. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah nilai minimum pengeluaran atas pengadaan baru suatu aset tetap yang dihitung sesuai nilai aset tetap per satuan/unit untuk dikapitalisir menjadi aset tetap. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal (pengadaan baru) berlaku hanya untuk aset tetap peralatan dan mesin dengan nilai per unitnya \geq Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah ke atas).
3. Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya dikecualikan dari batasan jumlah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk perolehan awal, sehingga berapapun nilai perolehan awal tersebut yang berasal dari belanja modal seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap.
4. Belanja pengadaan yang memenuhi kriteria aset tetap, dengan nilai perolehan dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas dan pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja modal maka dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*) dan **dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah**.

PENGUKURAN ASET TETAP

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada Poin satu diatas, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya perencanaan;
 - b. biaya lelang;
 - c. biaya persiapan tempat;
 - d. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - e. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - f. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - g. biaya konstruksi.
3. Tanah diakui pertama kali senilai biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
6. Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset.
10. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
11. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Walikota selaku Pemegang kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos/Fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang **tidak serupa** atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat senilai nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya senilai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

1. Batasan jumlah biaya kapitalisasi setelah perolehan adalah batasan nilai minimum yang dikeluarkan dalam rangka melakukan penambahan nilai aset tetap dari hasil pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, renovasi, atau restorasi yang memenuhi kriteria tertentu.
2. **Tidak termasuk** dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk penambahan fungsi, peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah **pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.**

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi **akumulasi** penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

1. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
3. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing aset tetap, terlampir pada bagian akhir kebijakan akuntansi ini.
4. Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
5. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
6. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan/atau



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
 - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
 - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
1. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
 - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
 - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - a. Asuransi;
 - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
 - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
3. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
4. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. Retensi.

19. KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Tujuan

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

PENGAKUAN

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenis nya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

PENGUKURAN

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur senilai nilai nominal yang diterima.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Nonlancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
 - e. Sumber Dana Cadangan; dan
 - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.
5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

20. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kebuildmitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d. Aset Tidak Berwujud; dan
 - e. Aset Lain-lain.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena rusak berat namun masih memiliki nilai buku maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap dan atas penyusutan tersebut disajikan ke dalam pos Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain.

PENGAKUAN

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
- b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
6. Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu senilai nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
8. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi.

Amortisasi

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
3. Amortisasi aset tidak berwujud diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurnagi nilai buku dari aset tidak berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (*Sewa, Build Operate Transfer/BOT dan Build Transfer Operate/BTO*); dan
- d. Informasi lainnya yang penting.

21. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
2. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Definisi

1. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. **Kewajiban** muncul antara lain karena:
 - a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
 - b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
 - c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
 - d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
3. **Nilai** nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah

Klasifikasi

1. Kewajiban diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek; dan
 - b. Kewajiban Jangka Panjang.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Pendek adalah:
 - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Utang Bunga (*Accrued Interest*);
 - c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - d. Pendapatan Diterima Dimuka;
 - e. Utang Beban; dan
 - f. Utang Jangka Pendek Lainnya
4. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan dan Asuransi Pegawai (Taspen), dan Tabungan Perumahan (Taperum).
 5. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya
 6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal neraca
 7. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
 8. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 9. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya.
 10. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:
 - a. Utang Dalam Negeri;
 - b. Utang Luar Negeri; dan
 - c. Utang Jangka Panjang Lainnya.
 11. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari dua belas bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
 12. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

13. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
14. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK).
15. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.

PENGAKUAN

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*) diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*) diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
3. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
4. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam dua belas bulan setelah tanggal



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

6. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
7. Utang Beban, diakui pada saat beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
8. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
9. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
10. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
12. Utang Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
14. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
15. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

PENGUKURAN

1. Kewajiban dicatat senilai nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan senilai jumlah yang masih harus disetorkan.

3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat senilai biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui senilai nilai kekurangan transfer

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
- 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

22. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Tujuan

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah Kota Dumai, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE.
3. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.
4. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
5. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

6. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

PENGAKUAN EKUITAS

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

PENGUKURAN EKUITAS

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

23. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

Ruang Lingkup

1. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
2. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai.

Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

fungsi, program atau kegiatan yang lain.

5. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
6. Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
7. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

KOREKSI KESALAHAN

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.
11. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:
 - a. Yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
 - a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-Lain - LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LRA:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
15. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan Pendapatan - LO:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
16. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
18. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
20. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - a. Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

24. KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian.

Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian yang dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian dimaksud mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Definisi

1. BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Entitas akuntansi adalah unit/satker pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
4. Konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
5. Laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi (entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD), sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

1. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LPE, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan,



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Laporan keuangan konsolidasian disusun oleh entitas pelaporan.
3. Entitas pelaporan adalah entitas di tingkat Pemda yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh PPKD.
4. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh PPKD selaku BUD.
5. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan/entitas akuntansi dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
6. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan PPKD dalam kapasitas selaku pengguna anggaran.
7. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
8. Laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan oleh entitas pelaporan disampaikan ke DPRD setelah terlebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit.
2. Selaku penerima APBD, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan Pemerintah Daerah.
3. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.
4. Konsolidasi laporan keuangan BLUD dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh Pemerintah Daerah.

PROSEDUR KONSOLIDASI

1. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi (SKPD dan PPKD), dan mengeliminasi Akun Resiprokal (jika ada).
2. Contoh format Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan laporan



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

keuangan di tingkat Pemerintah Daerah diilustrasikan pada Kebijakan Akuntansi Nomor satu sampai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor lima.

PENGUNGKAPAN

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing.

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	PERALATAN DAN MESIN	
	ALAT BESAR	
	ALAT BESAR DARAT	10
	ALAT BESAR APUNG	8
	ALAT BANTU	7
	ALAT ANGKUTAN	
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
	ALAT UKUR	5
	ALAT PERTANIAN	
	ALAT PENGOLAHAN	4
	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	
	ALAT KANTOR	5
	ALAT RUMAH TANGGA	5
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
	ALAT STUDIO	5
	ALAT KOMUNIKASI	5
	PERALATAN PEMANCAR	10
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
	ALAT KEDOKTERAN	5
	ALAT KESEHATAN UMUM	5
	ALAT LABORATORIUM	
	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15
	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8
	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIK	15
	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN	10



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	10
	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10
	ALAT PERSENJATAAN	
	SENJATA API	10
	PERSENJATAAN NON SENJATA API	3
	SENJATA SINAR	5
	ALAT KHUSUS KEPOUSIAN	4
	KOMPUTER	
	KOMPUTER UNIT	4
	PERALATAN KOMPUTER	4
	ALAT EKSPLORASI	
	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
	ALAT PENGEBORAN	
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
	PERALATAN SUMUR	10
	PERALATAN PRODUKSI	10
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
	ALAT BANTU EKSPLORASI	
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
	ALAT BANTU PRODUKSI	10
	ALAT KESELAMATAN KERJA	
	ALAT DETEKSI	5
	ALAT PELINDUNG	5
	ALAT SAR	2
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10
	ALAT PERAGA	
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
	UNIT PERALATAN PROSES / PRODUKSI	8
	RAMBU-RAMBU	
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
	PERALATAN OLAHRAGA	



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	PERALATAN OLAHRAGA	3
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	
	BANGUNAN GEDUNG	
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
	BANGUNAN MONUMEN	
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
	BANGUNAN MENARA	
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
	TUGU/TANDA BATAS	50
3	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
	JALAN DAN JEMBATAN	
	JALAN	10
	JEMBATAN	50
	BANGUNAN AIR	
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
	BANGUNAN AIR KOTOR	40
	INSTALASI	
	INSTALASI AIR BERSIH /AIR BAKU	30
	INSTALASI AIR KOTOR	30
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
	INSTALASI PERTAHANAN	30
	INSTALASI GAS	30
	INSTALASI PENGAMAN	20
	INSTALASI LAIN	5
	JARINGAN	
	JARINGAN AIR MINUM	30
	JARINGAN LISTRIK	40
	JARINGAN TELEPON	20
	JARINGAN GAS	30

**TABEL KAPITALISASI, BATASAN DAN PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET
TETAP SETELAH PEROLEHAN AWAL**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4	5
1	TANAH	Tidak dikapitalisasi	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN :	Tidak dikapitalisasi	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN :			
	BANGUNAN GEDUNG			
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	MONUMEN			
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		7
		>75% s.d 100%		10
	BANGUNAN MENARA			
	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI			
	TUGU/TANDA BATAS	>0% s.d 25%	≥ Rp 10.000.000,00 Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas, Bukan Pemeliharaan Rutin.	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN			
	JALAN DAN JEMBATAN			
	JALAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	dikapitalisasi	15
	JEMBATAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		30
	BANGUNAN AIR			
	BANGUNAN AIR IRIGASI	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	BANGUNAN AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang	5
		>25% s.d 50%		7



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	10
		>75% s.d 100%		12
	INSTALASI			
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI AIR KOTOR	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		10
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GARDU LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI PERTAHANAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	INSTALASI GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis Aset Tetap	Persentase Pemeliharaan dari Harga Perolehan Aset Setelah Kapitalisasi	Batasan Kapitalisasi untuk Pemeliharaan dan Kriteria	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d 100%	dikapitalisasi	20
	INSTALASI PENGAMAN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	INSTALASI LAIN	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	1
		>25% s.d 50%		3
		>50% s.d 75%		5
		>75% s.d 100%		7
	JARINGAN			
	JARINGAN AIR MINUM	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		15
	JARINGAN LISTRIK	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	5
		>25% s.d 50%		10
		>50% s.d 75%		15
		>75% s.d 100%		20
	JARINGAN TELEPON	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		5
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
	JARINGAN GAS	>0% s.d 25%	Seluruh Penambahan dan atau Perubahan Fungsi, Luas dan Kapasitas yang Bukan Pemeliharaan Rutin dikapitalisasi	2
		>25% s.d 50%		7
		>50% s.d 75%		10
		>75% s.d 100%		12
4	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-
<p>Penambahan masa manfaat paling tinggi sebesar masa manfaat aset bersangkutan dan tidak melebihi masa manfaat aset tersebut.</p>				

MASA MANFAAT ASET TIDAK BERWUJUD

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
----	---------------------------	----------------------



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Hak Paten	10
4	Hak Cipta	10
5	Waralaba	20
6	Hasil Kajian / Pengembangan	20



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 PENDAPATAN

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	1,392,335,943,486.00	1,370,198,448,465.86	98.41	1,287,005,084,625.14

Penyajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kota Dumai diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Peraturan Daerah Kota Dumai mengalami perubahan dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun Anggaran 2022 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2022.

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.392.335.943.486,00 dengan realisasi senilai Rp1.370.198.448.465,86 atau sebesar 98,41%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.287.005.084.625,14 mengalami kenaikan senilai Rp83.193.363.840,72 atau sebesar 6,46% .

Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, berikut rinciannya:

Tabel 5.1.1 Rincian Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	452,558,659,244.67	464,003,743,318.86	102.53	366,696,884,199.75
Pendapatan Transfer	939,777,284,241.33	906,194,705,147.00	96.43	879,612,437,425.39
Lain-lain Pendapatan yang sah	0.00	0.00	0.00	40,695,763,000.00
Jumlah	1,392,335,943,486.00	1,370,198,448,465.86	98.41	1,287,005,084,625.14

Dasar Hukum Pungutan atas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.1.a Pendapatan Asli Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	452,558,659,244.67	464,003,743,318.86	102.53	366,696,884,199.75

Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp452.558.659.244,67 dengan realisasi senilai Rp464.003.743.318,86 atau sebesar 102,53%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp366.696.884.199,75 mengalami kenaikan senilai Rp97.306.859.119,11 atau sebesar 26,54% .

Pendapatan Asli Daerah mencakup pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	222,013,986,230.00	226,332,093,315.36	101.94	185,979,625,987.00
Pendapatan Retribusi Daerah	47,985,440,000.00	32,206,368,295.17	67.12	23,776,863,396.46

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1,663,748,323.67	1,079,761,191.00	64.90	1,415,125,255.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	180,895,484,691.00	204,385,520,517.33	112.99	155,525,269,561.29
Jumlah	452,558,659,244.67	464,003,743,318.86	102.53	366,696,884,199.75

5.1.a.1) Pendapatan Pajak Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	222,013,986,230.00	226,332,093,315.36	101.94	185,979,625,987.00

Pendapatan Pajak Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp222.013.986.230,00 dengan realisasi senilai Rp226.332.093.315,36 atau sebesar 101,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp185.979.625.987,00 mengalami kenaikan senilai Rp40.352.467.328,36 atau sebesar 21,70% .

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Wajib Pajak atau Wajib Pajak Daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan apabila dalam Surat Pemberitahuan Pajak/Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPT/SPTD)/ Dokumen Pemberitahuan/Pemesanan diketahui bahwa pajak terutang lebih kecil daripada kredit pajak atau pajak yang telah dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimungkinkan terjadinya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Restitusi ini dapat terjadi pada periode yang sama ataupun tidak sama antara tahun pajak dengan tahun anggarannya. Hal ini terjadi terus menerus setiap tahun sehingga transaksi ini merupakan transaksi yang berulang. Oleh karena itu transaksi pengembalian penerimaan perpajakan diperlakukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian, tanpa memperhatikan tahun penerimaan pajak yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Dumai melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak Daerah (WPD) melalui mekanisme pemungutan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D). Penerimaan pajak daerah tersebut merupakan penerimaan atas pajak Tahun 2022 maupun tunggakan pajak tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah dalam Tahun 2022 senilai Rp 226.332.093.315,36 tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pajak Hotel	4,550,000,000.00	5,074,791,223.00	111.53	4,361,663,283.00
Pajak Restoran	10,000,000,000.00	11,356,465,806.00	113.56	9,048,442,070.00
Pajak Hiburan	1,800,000,000.00	1,964,400,861.00	109.13	798,429,705.00
Pajak Reklame	2,900,000,000.00	2,948,451,655.00	101.67	2,564,739,618.00
Pajak Penerangan Jalan	51,000,000,000.00	53,107,445,718.36	104.13	49,460,966,966.00
Pajak Parkir	600,000,000.00	762,420,003.00	127.07	696,543,612.00
Pajak Air Tanah	1,100,000,000.00	1,204,938,824.00	109.54	1,092,931,785.00
Pajak Sarang Burung Walet	92,000,000.00	99,458,475.00	108.11	91,147,560.00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	130,971,986,230.00	134,826,570,198.00	102.94	97,362,170,939.00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	19,000,000,000.00	14,987,150,552.00	78.88	20,502,590,449.00
Jumlah	222,013,986,230.00	226,332,093,315.36	101.94	185,979,625,987.00

Tabel 5.1.3a Realisasi Penerimaan Pajak Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya

Uraian	Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi LRA
Pajak Hotel	4,967,851,420.00	106,939,803.00	5,074,791,223.00
Pajak Restoran	11,224,936,653.00	131,529,153.00	11,356,465,806.00

Uraian	Realisasi Tahun Berjalan	Realisasi Atas Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Realisasi LRA
Pajak Hiburan	1,937,938,580.00	26,462,281.00	1,964,400,861.00
Pajak Reklame	2,911,870,139.00	36,581,516.00	2,948,451,655.00
Pajak Penerangan Jalan	53,071,690,244.36	35,755,474.00	53,107,445,718.36
Pajak Parkir	759,711,603.00	2,708,400.00	762,420,003.00
Pajak Air Tanah	1,181,018,899.00	23,919,925.00	1,204,938,824.00
Pajak Sarang Burung Walet	96,736,475.00	2,722,000.00	99,458,475.00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0.00	0.00	134,826,570,198.00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.00	0.00	14,987,150,552.00
Jumlah	76,151,754,013.36	366,618,552.00	226,332,093,315.36

Pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Dumai ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Daftar jenis pungutan dan dasar hukum pungutan serta SKPD pemungutan terlampir.

Rincian Pajak Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	4,550,000,000.00	5,074,791,223.00	111.53	4,361,663,283.00
Jumlah	4,550,000,000.00	5,074,791,223.00	111.53	4,361,663,283.00

b. Pajak Restoran

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	10,000,000,000.00	11,356,465,806.00	113.56	9,048,442,070.00
Jumlah	10,000,000,000.00	11,356,465,806.00	113.56	9,048,442,070.00

c. Pajak Hiburan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1,800,000,000.00	1,964,400,861.00	109.13	798,429,705.00
Jumlah	1,800,000,000.00	1,964,400,861.00	109.13	798,429,705.00

d. Pajak Reklame

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2,900,000,000.00	2,948,451,655.00	101.67	2,564,739,618.00
Jumlah	2,900,000,000.00	2,948,451,655.00	101.67	2,564,739,618.00

e. Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	51,000,000,000.00	53,107,445,718.36	104.13	49,460,966,966.00
Jumlah	51,000,000,000.00	53,107,445,718.36	104.13	49,460,966,966.00

f. Pajak Parkir

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	600,000,000.00	762,420,003.00	127.07	696,543,612.00
Jumlah	600,000,000.00	762,420,003.00	127.07	696,543,612.00

g. Pajak Air Bawah Tanah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	1,100,000,000.00	1,204,938,824.00	109.54	1,092,931,785.00
Jumlah	1,100,000,000.00	1,204,938,824.00	109.54	1,092,931,785.00

h. Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	92,000,000.00	99,458,475.00	108.11	91,147,560.00
Jumlah	92,000,000.00	99,458,475.00	108.11	91,147,560.00

i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	130,971,986,230.00	134,826,570,198.00	102.94	97,362,170,939.00
Jumlah	130,971,986,230.00	134,826,570,198.00	102.94	97,362,170,939.00

j. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	19,000,000,000.00	14,987,150,552.00	78.88	20,502,590,449.00
Jumlah	19,000,000,000.00	14,987,150,552.00	78.88	20,502,590,449.00

5.1.a.2) Pendapatan Retribusi Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	47,985,440,000.00	32,206,368,295.17	67.12	23,776,863,396.46

Pendapatan Retribusi Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp47.985.440.000,00 dengan realisasi senilai Rp32.206.368.295,17 atau sebesar 67,12%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp23.776.863.396,46 mengalami kenaikan senilai Rp8.429.504.898,71 atau sebesar 35,45% .

Penerimaan Retribusi Daerah tersebut merupakan penerimaan atas retribusi Tahun 2022 maupun tunggakan retribusi tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah dalam Tahun 2022 senilai Rp 32.206.368.295,17 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Rincian Retribusi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Umum	4,579,475,000.00	2,494,026,850.00	54.46	2,119,372,650.00
Jasa Usaha	28,403,965,000.00	23,468,411,300.00	82.62	18,300,235,746.46
Perizinan Tertentu	15,002,000,000.00	6,243,930,145.17	41.62	3,357,255,000.00
Jumlah	47,985,440,000.00	32,206,368,295.17	67.12	23,776,863,396.46

Untuk Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan atas piutang tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2022 dirincikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Jasa Umum Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	750,000,000.00	717,640,000.00	95.69	775,275,000.00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1,000,000,000.00	427,750,000.00	42.78	144,779,000.00
Retribusi Pelayanan Pasar	750,000,000.00	393,516,000.00	52.47	368,187,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	829,475,000.00	178,702,750.00	21.54	71,080,550.00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	250,000,000.00	251,221,000.00	100.49	203,602,000.00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1,000,000,000.00	525,197,100.00	52.52	556,449,100.00
Jumlah	4,579,475,000.00	2,494,026,850.00	54.46	2,119,372,650.00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Umum per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	750,000,000.00	717,640,000.00	95.69	775,275,000.00
Jumlah	750,000,000.00	717,640,000.00	95.69	775,275,000.00

(2) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	1,000,000,000.00	427,750,000.00	42.78	144,779,000.00
Jumlah	1,000,000,000.00	427,750,000.00	42.78	144,779,000.00

(3) Retribusi Pelayanan Pasar

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	750,000,000.00	393,516,000.00	52.47	368,187,000.00
Jumlah	750,000,000.00	393,516,000.00	52.47	368,187,000.00

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	829,475,000.00	178,702,750.00	8.60	71,080,550.00
Jumlah	829,475,000.00	178,702,750.00	21.54	71,080,550.00

(5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	250,000,000.00	251,221,000.00	100.49	203,602,000.00
Jumlah	250,000,000.00	251,221,000.00	100.49	203,602,000.00

(6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian	1,000,000,000.00	525,197,100.00	52.52	556,449,100.00
Jumlah	1,000,000,000.00	525,197,100.00	52.52	556,449,100.00

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Jasa Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	135,000,000.00	157,000,000.00	116.30	38,250,000.00
Retribusi Terminal	74,722,500.00	141,688,000.00	189.62	106,910,000.00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	27,808,802,500.00	22,971,389,300.00	82.60	18,090,824,546.46
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	50,000,000.00	28,950,000.00	57.90	0.00
Retribusi Rumah potong Hewan	25,440,000.00	18,160,000.00	71.38	24,680,000.00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	285,000,000.00	125,214,400.00	43.93	31,686,200.00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25,000,000.00	26,009,600.00	104.04	7,885,000.00
Jumlah	28,403,965,000.00	23,468,411,300.00	82.62	18,300,235,746.46

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Jasa Usaha per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	38,250,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135,000,000.00	157,000,000.00	116.30	0.00
Jumlah	135,000,000.00	157,000,000.00	116.30	38,250,000.00

(2) Retribusi Terminal

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	74,722,500.00	141,688,000.00	189.62	106,910,000.00
Jumlah	74,722,500.00	141,688,000.00	189.62	106,910,000.00

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	27,808,802,500.00	22,971,389,300.00	82.60	18,090,824,546.46
Jumlah	27,808,802,500.00	22,971,389,300.00	82.60	18,090,824,546.46

(4) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	50,000,000.00	28,950,000.00	57.90	0.00
Jumlah	50,000,000.00	28,950,000.00	57.90	0.00

(5) Retribusi Rumah potong Hewan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	25,440,000.00	18,160,000.00	71.38	24,680,000.00
Jumlah	25,440,000.00	18,160,000.00	71.38	24,680,000.00

(6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	285,000,000.00	125,214,400.00	43.93	31,686,200.00
Jumlah	285,000,000.00	125,214,400.00	43.93	31,686,200.00

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	25,000,000.00	26,009,600.00	104.04	7,885,000.00
Jumlah	25,000,000.00	26,009,600.00	104.04	7,885,000.00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan dianggarkan senilai Rp25.000.0000,00 terealisasi senilai Rp26.009.600,00 merupakan hasil penjualan bibit ikan yang pembibitannya dilakukan oleh Dinas Perikanan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.7 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.00	0.00	0.00	3,348,255,000.00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	9,950,000.00	37,000,000.00	371.86	9,000,000.00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2,000,000.00	50,000.00	2.50	0.00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	14,990,050,000.00	6,206,880,145.17	41.41	0.00
Jumlah	15,002,000,000.00	6,243,930,145.17	41.62	3,357,255,000.00

Realisasi akun Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu per akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	0.00	0.00	3,348,255,000.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	3,348,255,000.00

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perdagangan	9,950,000.00	37,000,000.00	371.86	9,000,000.00
Jumlah	9,950,000.00	37,000,000.00	371.86	9,000,000.00

(3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	2,000,000.00	50,000.00	2.50	0.00
Jumlah	2,000,000.00	50,000.00	2.50	0.00

(4) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14,990,050,000.00	6,206,880,145.17	41.41	0.00
Jumlah	14,990,050,000.00	6,206,880,145.17	41.41	0.00

5.1.a.3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	1,663,748,323.67	1,079,761,191.00	64.90	1,415,125,255.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.663.748.323,67 dengan realisasi senilai Rp1.079.761.191,00 atau sebesar 64,90%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp1.415.125.255,00 mengalami penurunan senilai Rp335.364.064,00 atau sebesar 23,70%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	1,663,748,323.67	1,079,761,191.00	64.90	1,415,125,255.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen yang dibagikan oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah

Tabel 5.1.8 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) - PT. Bank Riau Kepri	1,663,748,323.67	1,079,761,191.00	64.90	1,415,125,255.00
Jumlah	1,663,748,323.67	1,079,761,191.00	64.90	1,415,125,255.00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari PT. Bank Riau Kepri merupakan Pendapatan yang berasal dari dividen senilai Rp1.079.761.191,00 dari anggaran senilai Rp1.663.748.323,67 atau sebesar 64,90% yang dibagikan oleh PT. Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2022 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Riau Kepri tanggal 18 Juni 2022.

5.1.a.4) Lain-lain PAD yang sah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
180,895,484,691.00	204,385,520,517.33	112.99	155,525,269,561.29

Belanja Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp180.895.484.691,00 dengan realisasi senilai Rp204.385.520.517,33 atau sebesar 112,99%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp48.860.250.956,04 atau sebesar 31,42% dari realisasi tahun lalu senilai Rp155.525.269.561,29

Untuk Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah selama Tahun 2022 tidak terdapat penerimaan atas piutang tahun sebelumnya.

Realisasi Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.9 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	3,049,424,600.00	1,107,157,800.00	36.31	2,432,359,773.03
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	801,206,585.00	853,733,335.00	106.56	514,768,500.00
Hasil Kerja Sama Daerah	1,000,000,000.00	1,999,999,999.00	200.00	0.00
Penerimaan Jasa Giro	2,750,000,000.00	3,540,712,219.01	128.75	4,697,811,210.09
Penerimaan Bunga Deposito	3,100,000,000.00	793,646,059.95	25.60	1,135,241,649.19
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	1,586,341,852.39	100.00	6,901,321,180.88
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1,175,758,877.00	1,869,969,833.00	159.04	618,882,522.00
Pendapatan Dari Pengembalian	32,560,678.00	154,945,024.84	475.87	258,427,665.00
Pendapatan BLUD	168,986,533,951.00	192,479,014,394.14	113.90	138,966,457,061.10
Jumlah	180,895,484,691.00	204,385,520,517.33	112.99	155,525,269,561.29

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Peralatan dan Mesin	3,049,424,600.00	880,302,000.00	28.87	2,187,764,625.00
Gedung dan Bangunan	0.00	226,855,800.00	100.00	244,595,148.03
Jumlah	3,049,424,600.00	1,107,157,800.00	36.31	2,432,359,773.03

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Sewa BMD	0.00	0.00	0.00	133,000,000.00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	801,206,585.00	853,733,335.00	106.56	381,768,500.00
Jumlah	801,206,585.00	853,733,335.00	106.56	514,768,500.00

(3) Hasil Kerja Sama Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Hasil Kerja Sama Daerah	1,000,000,000.00	1,999,999,999.00	200.00	0.00
Jumlah	1,000,000,000.00	1,999,999,999.00	200.00	0.00

(4) Jasa Giro

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jasa Giro pada Kas Daerah	2,500,000,000.00	3,450,542,404.01	138.02	4,544,788,522.09
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250,000,000.00	90,169,815.00	36.07	153,022,688.00
Jumlah	2,750,000,000.00	3,540,712,219.01	128.75	4,697,811,210.09

(5) Penerimaan Bunga Deposito

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3,100,000,000.00	793,646,059.95	25.60	1,135,241,649.19
Jumlah	3,100,000,000.00	793,646,059.95	25.60	1,135,241,649.19

(6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	1,586,341,852.39	100.00	6,901,321,180.88
Jumlah	0.00	1,586,341,852.39	0.00	6,901,321,180.88

(7) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Denda Pajak Hotel	12,881,622.00	21,892,978.00	169.96	618,882,522.00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	20,147,339.00	50,568,239.00	250.99	80,889,803.00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	8,222,100.00	35,629,981.00	433.34	17,612,429.00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1,112,877.00	3,763,944.00	338.22	7,680,986.00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	818,170,264.00	862,809,160.00	105.46	178,691,012.00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	2,128,173.00	6,473,205.00	304.17	3,189,268.00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	11,665,567.00	18,520,345.00	158.76	3,189,268.00
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	1,001,910.00	4,402,830.00	439.44	1,493,030.00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	300,429,025.00	865,909,151.00	288.22	248,516,325.00
Jumlah	1,175,758,877.00	1,869,969,833.00	159.04	1,160,144,643.00

(8) Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	15,000,000.00	57,619,144.84	384.13	83,530,148.00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	17,560,678.00	97,325,880.00	554.23	174,897,517.00
Jumlah	32,560,678.00	154,945,024.84	475.87	258,427,665.00

(9) Pendapatan BLUD

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan BLUD	168,986,533,951.00	192,479,014,394.14	113.90	138,966,457,061.10
Jumlah	168,986,533,951.00	192,479,014,394.14	113.90	138,966,457,061.10

Pendapatan BLUD senilai Rp192.479.014.394,14 yang terdiri dari BLUD-RSUD senilai Rp178.253.562.735,00 , BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A senilai Rp118.132.821,00 dan BLUD-Puskesmas senilai Rp14.107.318.838,14 yang digunakan langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 untuk BLUD-RSUD dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/DINKES/2014 tanggal 5 Desember 2014 untuk BLUD-Puskesmas.

Tabre 5.1.10 Rincian Pendapatan BLUD Puskesmas dan UPT LABKES Dinas Kesehatan Tahun 2022

Uraian	Jumlah Pendapatan (Rp)
BLUD Puskesmas Dumai Kota	1,672,806,012.64
BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,093,425,890.43
BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1,329,364,254.60
BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2,306,619,170.45
BLUD Puskesmas Medang Kampai	911,622,312.79
BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,119,859,928.79
BLUD Puskesmas Bukit Timah	633,100,760.32
BLUD Puskesmas Jaya Mukti	2,409,331,511.01
BLUD Puskesmas Purnama	1,138,190,636.56
BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1,492,998,360.55
Jumlah I	14,107,318,838.14
UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kulaitas Air Kelas A	118,132,821.00
Jumlah II	118,132,821.00
Jumlah BLUD PUSKESMAS dan UPT LABKES	14,225,451,659.14

Tabre 5.1.11 Rincian Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah Tahun 2022

BLUD RSUD Dumai	178,253,562,735.00
Jumlah Pendapatan BLUD - RSUD	178,253,562,735.00
Jumlah Pendapatan BLUD PUSKESMAS, UPT LABKES, dan BLUD RSUD	192,479,014,394.14

5.1.b Pendapatan Transfer

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	939,777,284,241.33	906,194,705,147.00	96.43	879,612,437,425.39

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai.

Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 senilai Rp906.194.705.147,00 atau sebesar 96,43% dengan anggaran senilai Rp939.777.284.241,33, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp879.612.437.425,39 mengalami kenaikan senilai Rp26.582.267.721,61 atau sebesar 3,02%.

Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794,763,838,753.00	778,721,000,729.00	97.98	763,025,612,681.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	145,013,445,488.33	127,473,704,418.00	87.90	116,586,824,744.39
Jumlah	939,777,284,241.33	906,194,705,147.00	96.43	879,612,437,425.39

5.1.b.1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	794,763,838,753.00	778,721,000,729.00	97.98	763,025,612,681.00

Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Tabel 5.1.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Perimbangan	774,402,942,753.00	758,360,104,729.00	97.93	731,422,367,681.00
Dana Insentif Daerah (DID)	20,360,896,000.00	20,360,896,000.00	100.00	31,603,245,000.00
Jumlah	794,763,838,753.00	778,721,000,729.00	97.98	763,025,612,681.00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 senilai Rp778.721.000.729,00 atau sebesar 97,98% dengan anggaran senilai Rp794.763.838.753,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp763.025.612.681,00 mengalami kenaikan senilai Rp15.695.388.048,00 atau sebesar 2,06% , dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	774,402,942,753.00	758,360,104,729.00	97.93	731,422,367,681.00

Realisasi Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 senilai Rp758.360.104.729,00 atau sebesar 97,93% dengan anggaran senilai Rp774.402.942.753,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp731.422.367.681,00 mengalami kenaikan senilai Rp26.937.737.048,00 atau sebesar 3,68%.

Tabel 5.1.14 Rincian Dana Perimbangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	162,373,681,000.00	167,642,355,626.00	103.24	145,468,956,587.00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	429,554,051,000.00	427,742,257,138.00	99.58	429,427,931,000.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	62,721,068,973.00	61,389,147,488.00	97.88	92,602,935,776.00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	119,754,141,780.00	101,586,344,477.00	84.83	63,922,544,318.00
Jumlah	774,402,942,753.00	758,360,104,729.00	97.93	731,422,367,681.00

1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	162,373,681,000.00	167,642,355,626.00	103.24	145,468,956,587.00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp167.642.355.626,00 atau sebesar 103,24% dengan anggaran senilai Rp162.373.681.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp145.468.956.587,00 mengalami kenaikan senilai Rp22.173.399.039,00 atau sebesar 15,24% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.15 Rincian Dana Tranfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26,807,415,000.00	28,290,914,676.00	105.53	32,489,986,139.00
DBH PPh Pasal 21	26,523,015,000.00	26,523,015,000.00	100.00	28,458,745,600.00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN	1,150,983,000.00	2,265,106,496.00	196.80	907,558,300.00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	261,000.00	42,840.00	16.41	7,105.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	90,637,250,000.00	93,308,519,614.00	102.95	65,037,087,400.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	3,994,893,000.00	3,994,893,000.00	100.00	1,732,767,313.00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2,892,430,000.00	2,892,430,000.00	100.00	2,011,059,867.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8,409,123,000.00	8,409,123,000.00	100.00	13,157,244,713.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,958,311,000.00	1,958,311,000.00	100.00	1,674,500,150.00
Jumlah	162,373,681,000.00	167,642,355,626.00	103.24	145,468,956,587.00

2. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
429,554,051,000.00	427,742,257,138.00	99.58	429,427,931,000.00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp427.742.257.138,00 atau sebesar 99,58% dengan anggaran senilai Rp429.554.051.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp429.427.931.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.685.673.862,00 atau sebesar 0,39%.

3. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
62,721,068,973.00	61,389,147,488.00	97.88	92,602,935,776.00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp61.389.147.488,00 atau sebesar 97,88% dengan anggaran senilai Rp62.721.068.973,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp92.602.935.776,00 mengalami penurunan senilai Rp31.213.788.288,00 atau sebesar 33,71% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.16 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1,376,396,000.00	1,374,823,000.00	99.89	1,164,180,030.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10,775,078,000.00	10,715,841,000.00	99.45	13,973,518,877.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10,360,454,000.00	10,329,665,000.00	99.70	7,420,333,655.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	470,885,000.00	470,885,000.00	100.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304,614,000.00	302,130,900.00	99.18	497,949,500.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0.00	0.00	0.00	6,961,322,360.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0.00	0.00	0.00	2,612,930,185.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2,892,701,000.00	2,793,306,235.00	96.56	2,604,123,885.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0.00	0.00	0.00	33,250,090,451.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	5,305,345,110.00	5,073,521,108.00	95.63	740,017,000.00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7,340,205,000.00	7,326,130,000.00	99.81	0.00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0.00	0.00	0.00	684,582,499.00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0.00	0.00	0.00	2,221,395,747.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0.00	0.00	0.00	4,569,233,064.00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6,188,582,000.00	6,068,554,005.00	98.06	0.00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0.00	0.00	0.00	4,556,055,598.00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4,803,838,000.00	4,775,800,000.00	99.42	0.00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0.00	0.00	0.00	1,660,233,500.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	12,902,970,863.00	12,158,491,240.00	94.23	3,994,119,110.00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0.00	0.00	0.00	4,121,535,315.00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0.00	0.00	0.00	1,571,315,000.00
Jumlah	62,721,068,973.00	61,389,147,488.00	97.88	92,602,935,776.00

4. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	119,754,141,780.00	101,586,344,477.00	84.83	63,922,544,318.00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Pemerintah Pusat kepada Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp101.586.344.477,00 atau sebesar 84,83% dengan anggaran senilai Rp119.754.141.780,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp63.922.544.318,00 mengalami kenaikan senilai Rp37.663.800.159,00 atau sebesar 58,92% .

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.17 Rincian Dana Tranfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
DAK Non Fisik-BOS Reguler	50,738,030,000.00	39,790,809,140.00	78.42	0.00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1,125,000,000.00	720,000,000.00	64.00	0.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	53,724,109,000.00	51,967,177,370.00	96.73	55,565,896,000.00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2,271,000,000.00	1,558,500,000.00	68.63	528,000,000.00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	2,661,700,000.00	0.00	0.00	2,761,200,000.00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	747,200,000.00	0.00	0.00	248,850,000.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3,898,007,720.00	4,119,961,607.00	105.69	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	459,094,000.00	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	586,357,000.00	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	113,748,200.00	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2,133,477,900.00	2,133,478,400.00	100.00	1,812,823,476.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0.00	0.00	0.00	1,514,289,842.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0.00	0.00	0.00	99,692,000.00
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	254,403,060.00	254,403,060.00	100.00	326,122,000.00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan	289,414,900.00	289,414,900.00	100.00	575,671,000.00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	752,600,000.00	752,600,000.00	100.00	490,000,000.00
Jumlah	119,754,141,780.00	101,586,344,477.00	84.83	63,922,544,318.00

Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler senilai Rp39.790.809.140,00 merupakan realisasi atas Sekolah Dasar Negeri senilai Rp28.277.287.442,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp11.513.521.698,00

Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja senilai Rp720.000.000,00 merupakan realisasi atas Sekolah Dasar Negeri senilai Rp340.000.000,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp380.000.000,00

Realisasi DAK Non Fisik-BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan tidak disajikan sebagai realisasi di dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) karena mekanisme penyalurannya menggunakan Belanja Hibah.

Berikut rincian realisasi Pendapatan DAK Non Fisik-BOS Reguler, BOS Kinerja, BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Masyarakat:

Tabel 5.1.18 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Reguler untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	5,555,387,650.00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	3,333,380,000.00
Jumlah	8,888,767,650.00

Tabel 5.1.19 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOS Kinerja untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	285,000,000.00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	120,000,000.00
Jumlah	405,000,000.00

Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik-BOP Paud Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Paud dan Taman Kanak-Kanak	2,650,636,000.00
Jumlah	2,650,636,000.00

Tabel 5.1.21 Rincian Penerimaan Realisasi DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Lembaga Pendidikan Kesetaraan	670,850,000.00
Jumlah	670,850,000.00

b. Dana Insentif Daerah (DID)

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	20,360,896,000.00	20,360,896,000.00	100.00	31,603,245,000.00

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp20.360.896.000,00 atau sebesar 100,00% dengan anggaran senilai Rp20.360.896.000,00, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp31.603.245.000,00 mengalami penurunan senilai Rp11.242.349.000,00 atau sebesar 35,57%.

Penyaluran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 170/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Periode kedua Pada Tahun 2022.

5.1.b.2) **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	145,013,445,488.33	127,473,704,418.00	87.90	116,586,824,744.39

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember Tahun 2022 senilai Rp127.473.704.418,00 atau sebesar 87,90% dengan anggaran senilai Rp145.013.445.488,33, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp116.586.824.744,39 mengalami kenaikan senilai Rp10.886.879.673,61 atau sebesar 9,34%.

Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021:

Tabel 5.1.22 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil - Pajak	135,038,655,888.33	119,057,454,418.00	88.17	108,598,824,744.39
Bantuan Keuangan	9,974,789,600.00	8,416,250,000.00	84.38	7,988,000,000.00
Jumlah	145,013,445,488.33	127,473,704,418.00	87.90	116,586,824,744.39

a. **Pendapatan Bagi Hasil-Pajak**

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	135,038,655,888.33	119,057,454,418.00	88.17	108,598,824,744.39

Realisasi Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil - Pajak Desember Tahun 2022 senilai Rp119.057.454.418,00 atau sebesar 88,17% dengan anggaran senilai Rp135.038.655.888,33, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp108.598.824.744,39 mengalami kenaikan senilai Rp10.458.629.673,61 atau sebesar 9,63%.

Rincian Pendapatan Bagi Hasil-Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.23 Rincian Pendapatan Bagi Hasil - Pajak Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34,896,492,585.00	22,971,874,473.00	65.83	29,992,973,539.39
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	19,832,685,376.00	21,921,639,641.00	110.53	17,354,434,978.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56,990,711,781.00	49,412,202,929.00	86.70	40,254,549,943.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4,511,341,254.00	1,132,139,769.00	25.10	1,063,038,420.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	18,807,424,892.33	23,619,597,606.00	125.59	19,933,827,864.00
Jumlah	135,038,655,888.33	119,057,454,418.00	88.17	108,598,824,744.39

Realisasi Dana Bagi Hasil dari Tahun 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 809 /IV/ 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1137/VII/ 2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 756 /IV / 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2021) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 868 /V/ 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1220 /VIII / 2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1658/XI/2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 867 /V / 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
- Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1851 /XII / 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober - November) Tahun 2022 untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.

b. Bantuan Keuangan

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
9,974,789,600.00	8,416,250,000.00	84.38	7,988,000,000.00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
9,974,789,600.00	8,416,250,000.00	84.38	7,988,000,000.00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi kepada Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp9.974.789.600,00 dengan realisasi senilai Rp8.416.250.000,00 atau sebesar 84,38%, sedangkan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka terjadi penurunan senilai Rp428.250.000,00 atau sebesar 5,36% dari realisasi tahun lalu senilai Rp7.988.000.000,00.

Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi dari Tahun 2022 dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1651./XI/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

5.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0.00	0.00	0.00	40,695,763,000.00

Lain - lain Pendapatan - Hibah Dana Bos

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0.00	0.00	0.00	40,695,763,000.00

Lain - lain Pendapatan merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dari Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0 % mengalami penurunan dari Tahun 2021 senilai Rp40.695.763,00 atau sebesar 100%. Pada Tahun 2022 alokasi Pendapatan Dana BOS telah dianggarkan pada Pendapatan DAK Non Fisik.

5.2 BELANJA

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
1,639,213,506,052.00	1,507,041,615,158.67	91.94	1,314,289,659,257.23

Belanja Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.639.213.506.052,00 dengan realisasi senilai Rp1.507.041.615.158,67 atau sebesar 91,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp192.751.955.901,44 atau sebesar 14,67% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.314.289.659.257,23. Yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Rincian Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Operasi	1,332,589,032,114.00	1,246,579,389,430.03	93.55	1,105,414,852,748.84
Belanja Modal	306,331,988,807.00	260,201,936,711.64	84.94	199,818,329,751.39
Belanja Tidak Terduga	292,485,131.00	260,289,017.00	88.99	9,056,476,757.00
Jumlah	1,639,213,506,052.00	1,507,041,615,158.67	91.94	1,314,289,659,257.23

5.2.a Belanja Operasi

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	1,332,589,032,114.00	1,246,579,389,430.03	93.55	1,105,414,852,748.84

Belanja Operasi Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.332.589.032.114,00 dengan realisasi senilai Rp1.246.579.389.430,03 atau sebesar 93,55%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp141.164.536.681,19 atau sebesar 12,77% dari realisasi tahun lalu senilai Rp1.105.414.852.748,84 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Rincian Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pegawai	698,106,313,302.00	649,325,852,373.00	93.01	587,860,841,072.00
Belanja Barang dan Jasa	585,937,529,587.00	559,998,434,987.95	95.57	481,698,811,775.84
Belanja Bunga	2,000,000,000.00	1,060,377,070.00	53.02	0.00
Belanja Subsidi	132,027,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	30,956,352,225.00	23,282,916,899.08	75.21	35,855,199,901.00
Belanja Bantuan Sosial	15,456,810,000.00	12,911,808,100.00	83.53	0.00
Jumlah	1,332,589,032,114.00	1,246,579,389,430.03	93.55	1,105,414,852,748.84

5.2.a.1) Belanja Pegawai

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	698,106,313,302.00	649,325,852,373.00	93.01	587,860,841,072.00

Belanja Pegawai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp698.106.313.302,00 dengan realisasi senilai Rp649.325.852.373,00 atau sebesar 93,01%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp61.465.011.301,00 atau sebesar 10,46% dari realisasi tahun lalu senilai Rp587.860.841.072,00

Tabel 5.2.4 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan	305,050,873,034.00	273,861,489,044.00	89.78	264,398,713,084.00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	195,022,865,866.00	184,476,904,079.00	94.59	176,126,304,790.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	74,007,872,524.00	66,297,988,023.00	89.58	70,662,436,970.00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27,300,079,400.00	15,996,033,321.00	58.59	16,005,055,941.00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1,106,903,009.00	955,752,317.00	86.34	867,676,247.00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	964,560,000.00	801,600,000.00	83.11	731,600,000.00
Belanja Pegawai BLUD	94,653,159,469.00	106,936,085,589.00	112.98	59,069,054,040.00
Jumlah	698,106,313,302.00	649,325,852,373.00	93.01	587,860,841,072.00

Rincian Belanja Pegawai per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Tabel 5.2.5 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125,199,400,127.00	115,866,747,496.00	92.55	109,607,991,163.00
Dinas Kesehatan + RSUD	54,547,034,746.00	46,160,358,111.00	84.62	44,338,165,658.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,483,162,995.00	4,035,992,649.00	90.03	4,332,922,594.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,024,651,240.00	1,811,468,079.00	89.47	1,539,293,883.00
Satuan Polisi Pamong Praja	3,242,212,160.00	3,044,886,232.00	93.91	3,057,993,720.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,058,294,393.00	1,852,081,277.00	89.98	1,831,923,658.00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1,592,494,934.00	1,531,595,485.00	96.18	1,489,105,874.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,865,064,600.00	1,691,915,293.00	90.72	1,276,703,727.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,042,316,480.00	1,896,039,953.00	92.84	1,755,111,248.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,408,880,222.00	2,255,882,488.00	93.65	2,199,000,089.00
Dinas Lingkungan Hidup	2,545,590,700.00	2,307,013,648.00	90.63	2,525,572,039.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,222,949,816.00	1,978,416,101.00	89.00	1,982,126,556.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,712,732,164.00	1,510,462,587.00	88.19	1,672,198,906.00
Dinas Perhubungan	4,546,837,032.00	4,271,860,674.00	93.95	4,409,864,372.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2,087,509,381.00	1,915,306,770.00	91.75	1,965,311,344.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2,574,915,440.00	2,265,166,716.00	87.97	2,315,892,455.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,958,732,705.00	2,722,318,797.00	92.01	2,757,633,258.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1,948,762,160.00	1,760,159,906.00	90.32	1,773,535,646.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,939,673,320.00	1,726,048,827.00	88.99	1,681,981,117.00
Dinas Perikanan	1,737,186,520.00	1,557,320,318.00	89.65	1,762,800,790.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4,797,319,532.00	4,474,556,614.00	93.27	4,487,359,422.00
Dinas Perdagangan	2,541,583,560.00	2,353,000,762.00	92.58	2,494,326,642.00
Sekretariat Daerah	9,246,407,840.00	8,042,081,295.00	86.98	8,115,674,803.00
Sekretariat DPRD	2,858,947,800.00	2,592,353,901.00	90.68	2,452,828,454.00
Kecamatan Dumai Barat	2,805,573,760.00	2,632,972,353.00	93.85	2,556,412,091.00
Kecamatan Dumai Timur	3,029,461,392.00	2,844,446,077.00	93.89	2,538,532,411.00
Kecamatan Bukit Kapur	3,843,592,195.00	3,614,944,973.00	94.05	3,341,266,560.00
Kecamatan Medang Kampai	2,815,930,086.00	2,625,860,942.00	93.25	2,553,140,323.00
Kecamatan Sungai Sembilan	3,611,513,133.00	3,360,973,411.00	93.06	3,014,707,947.00
Kecamatan Dumai Kota	2,994,715,560.00	2,935,612,338.00	98.03	2,880,320,396.00
Kecamatan Dumai Selatan	2,937,772,639.00	2,792,878,216.00	95.07	2,780,155,618.00
Inspektorat	3,982,222,875.00	3,643,073,816.00	91.48	3,465,354,799.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2,523,787,490.00	2,357,785,046.00	93.42	2,428,129,130.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26,463,691,480.00	21,241,098,008.00	80.27	21,111,876,690.00
Badan Pendapatan Daerah	4,717,418,757.00	4,239,027,893.00	89.86	3,993,847,702.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,142,533,800.00	1,949,781,992.00	91.00	1,909,651,999.00
Jumlah	305,050,873,034.00	273,861,489,044.00	89.78	264,398,713,084.00

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tabel 5.2.6 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65,165,923,608.00	62,898,987,813.00	96.52	61,565,463,813.00
Dinas Kesehatan + RSUD	37,141,637,159.00	35,464,288,454.00	95.48	31,785,722,796.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,421,320,000.00	3,130,716,930.00	91.51	3,173,016,392.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,649,208,831.00	1,571,285,800.00	95.28	1,256,154,901.00
Satuan Polisi Pamong Praja	3,385,974,168.00	2,822,503,200.00	83.36	2,666,440,080.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,546,716,000.00	1,441,248,429.00	93.18	1,482,746,781.00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1,649,349,000.00	1,476,856,928.00	89.54	1,357,564,836.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,638,754,267.00	1,626,206,020.00	99.23	1,096,349,006.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,708,563,084.00	1,646,692,155.00	96.38	1,499,395,077.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,036,736,000.00	1,995,628,213.00	97.98	1,874,381,639.00
Dinas Lingkungan Hidup	2,160,234,328.00	2,053,724,761.00	95.07	2,133,428,583.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,257,200,000.00	2,162,418,155.00	95.80	2,121,067,374.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,453,946,088.00	1,385,935,934.00	95.32	1,421,584,960.00
Dinas Perhubungan	3,183,240,000.00	3,135,442,888.00	98.50	3,064,919,305.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,886,950,000.00	1,871,098,956.00	99.16	1,792,451,729.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,967,992,451.00	1,866,636,804.00	94.85	1,800,976,729.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,998,194,008.00	2,750,385,030.00	91.73	2,759,987,326.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1,689,816,000.00	1,603,340,078.00	94.88	1,519,912,978.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,557,728,822.00	1,460,622,923.00	93.77	1,293,092,734.00
Dinas Perikanan	1,530,165,735.00	1,422,576,542.00	92.97	1,433,609,761.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,771,480,204.00	3,625,993,724.00	96.14	3,512,733,148.00
Dinas Perdagangan	1,906,911,237.00	1,845,121,976.00	96.76	1,814,231,058.00
Sekretariat Daerah	10,059,853,348.00	9,434,802,412.00	93.79	9,812,849,719.00
Sekretariat DPRD	1,926,358,952.00	1,845,575,065.00	95.81	1,713,402,435.00
Kecamatan Dumai Barat	2,240,571,949.00	2,161,670,112.00	96.48	1,995,780,547.00
Kecamatan Dumai Timur	2,497,200,000.00	2,442,972,781.00	97.83	2,180,812,040.00
Kecamatan Bukit Kapur	3,171,792,540.00	3,084,840,077.00	97.26	2,728,286,709.00
Kecamatan Medang Kampai	2,267,966,615.00	2,161,108,365.00	95.29	2,039,364,500.00
Kecamatan Sungai Sembilan	2,954,281,200.00	2,844,638,097.00	96.29	2,376,112,758.00
Kecamatan Dumai Kota	2,660,520,363.00	2,487,420,423.00	93.49	2,283,603,805.00
Kecamatan Dumai Selatan	2,516,400,000.00	2,442,889,416.00	97.08	2,313,192,817.00
Inspektorat	6,505,269,497.00	5,008,733,030.00	77.00	5,138,905,117.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2,698,041,114.00	2,648,003,534.00	98.15	2,479,161,026.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,168,474,773.00	3,515,839,035.00	84.34	3,841,043,278.00
Badan Pendapatan Daerah	3,385,545,731.00	3,025,732,323.00	89.37	2,759,880,340.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,262,548,794.00	2,114,967,696.00	93.48	2,038,678,693.00
Jumlah	195,022,865,866.00	184,476,904,079.00	94.59	176,126,304,790.00

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.2.7 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56,374,447,400.00	51,221,618,400.00	90.86	56,579,577,040.00
Dinas Kesehatan + RSUD	850,603,253.00	757,829,214.00	89.09	370,400,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,187,824,000.00	1,145,984,000.00	96.48	1,009,630,000.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	178,000,000.00	141,830,000.00	79.68	118,147,000.00
Satuan Polisi Pamong Praja	121,560,000.00	102,165,000.00	84.04	65,190,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,040,000.00	71,040,000.00	100.00	31,720,000.00
Badan kesatuan bangsa dan politik	71,460,000.00	71,460,000.00	100.00	71,460,000.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	71,475,000.00	71,475,000.00	100.00	71,400,000.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	81,005,000.00	77,095,000.00	95.17	66,220,000.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,400,000.00	23,400,000.00	100.00	128,350,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	183,600,000.00	180,420,000.00	98.27	76,893,983.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,700,000.00	32,700,000.00	100.00	32,700,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	145,290,000.00	145,290,000.00	100.00	119,670,000.00
Dinas Perhubungan	1,349,920,000.00	235,542,167.00	17.45	330,440,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	236,280,000.00	234,770,000.00	99.36	208,040,600.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	65,220,000.00	65,220,000.00	100.00	65,220,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	718,920,000.00	118,069,250.00	16.42	164,305,711.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	48,250,000.00	46,000,000.00	95.34	51,030,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66,660,000.00	66,659,600.00	100.00	69,750,000.00
Dinas Perikanan	67,910,000.00	67,910,000.00	100.00	55,270,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	161,934,000.00	160,710,000.00	99.24	147,804,000.00
Dinas Perdagangan	104,230,000.00	86,170,000.00	82.67	100,573,550.00
Sekretariat Daerah	771,680,000.00	512,580,000.00	66.42	374,060,000.00
Sekretariat DPRD	393,192,000.00	227,500,000.00	57.86	239,000,000.00
Kecamatan Dumai Barat	94,215,000.00	93,165,000.00	98.89	110,820,000.00
Kecamatan Dumai Timur	80,830,000.00	79,080,000.00	97.83	88,740,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	92,560,000.00	92,560,000.00	100.00	125,137,000.00
Kecamatan Medang Kampai	98,280,000.00	98,280,000.00	100.00	68,620,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	87,885,000.00	87,885,000.00	100.00	63,572,000.00
Kecamatan Dumai Kota	140,080,000.00	136,730,000.00	97.61	98,370,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	115,216,000.00	114,164,000.00	99.09	95,218,600.00
Inspektorat	119,480,000.00	118,759,250.00	99.40	56,500,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	187,179,500.00	187,179,500.00	100.00	185,120,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,359,623,640.00	2,236,620,000.00	94.79	1,598,434,000.00
Badan Pendapatan Daerah	7,158,444,531.00	7,092,809,642.00	99.08	7,541,133,486.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,478,200.00	97,318,000.00	99.84	83,920,000.00
Jumlah	74,007,872,524.00	66,297,988,023.00	89.58	70,662,436,970.00

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Tabel 5.2.8 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat DPRD	27,300,079,400.00	15,996,033,321.00	58.59	16,005,055,941.00
Jumlah	27,300,079,400.00	15,996,033,321.00	58.59	16,005,055,941.00

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Tabel 5.2.9 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0.00	0.00	0.00	1,326,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61,750,000.00	0.00	0.00	0.00
Sekretariat Daerah	179,513,040.00	90,112,348.00	50.20	136,043,407.00
Badan Pendapatan Daerah	865,639,969.00	865,639,969.00	100.00	730,306,840.00
Jumlah	1,106,903,009.00	955,752,317.00	86.34	867,676,247.00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Pendapatan Daerah merupakan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah,

f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.2.10 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	600,000,000.00	600,000,000.00	100.00	530,000,000.00
Sekretariat DPRD	364,560,000.00	201,600,000.00	55.30	201,600,000.00
Jumlah	964,560,000.00	801,600,000.00	83.11	731,600,000.00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Belanja Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

g. Belanja Pegawai BLUD

Tabel 5.2.11 Belanja Pegawai BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan+RSUD	94,653,159,469.00	106,936,085,589.00	112.98	59,069,054,040.00
Jumlah	94,653,159,469.00	106,936,085,589.00	112.98	59,069,054,040.00

Rincian Belanja Pegawai per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.2.12 Rincian Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	246,739,771,135.00	229,987,353,709.00	93.21	227,753,032,016.00
Dinas Kesehatan + RSUD	187,192,434,627.00	189,318,561,368.00	101.14	135,563,342,494.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,092,306,995.00	8,312,693,579.00	91.43	8,515,568,986.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3,851,860,071.00	3,524,583,879.00	91.50	2,913,595,784.00
Satuan Polisi Pamong Praja	6,749,746,328.00	5,969,554,432.00	88.44	5,789,623,800.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,676,050,393.00	3,364,369,706.00	91.52	3,346,390,439.00
Badan kesatuan bangsa dan politik	3,313,303,934.00	3,079,912,413.00	92.96	2,918,130,710.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3,575,293,867.00	3,389,596,313.00	94.81	2,444,452,733.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,831,884,564.00	3,619,827,108.00	94.47	3,320,726,325.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,469,016,222.00	4,274,910,701.00	95.66	4,201,731,728.00
Dinas Lingkungan Hidup	4,889,425,028.00	4,541,158,409.00	92.88	4,735,894,605.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,512,849,816.00	4,173,534,256.00	92.48	4,135,893,930.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,311,968,252.00	3,041,688,521.00	91.84	3,213,453,866.00
Dinas Perhubungan	9,079,997,032.00	7,642,845,729.00	84.17	7,805,223,677.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,210,739,381.00	4,021,175,726.00	95.50	3,967,129,673.00
Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4,608,127,891.00	4,197,023,520.00	91.08	4,182,089,184.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,737,596,713.00	5,590,773,077.00	82.98	5,681,926,295.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3,686,828,160.00	3,409,499,984.00	92.48	3,344,478,624.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,564,062,142.00	3,253,331,350.00	91.28	3,044,823,851.00
Dinas Perikanan	3,335,262,255.00	3,047,806,860.00	91.38	3,251,680,551.00
Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	8,730,733,736.00	8,261,260,338.00	94.62	8,147,896,570.00
Dinas Perdagangan	4,552,724,797.00	4,284,292,738.00	94.10	4,409,131,250.00
Sekretariat Daerah	20,857,454,228.00	18,679,576,055.00	89.56	18,968,627,929.00
Sekretariat DPRD	32,843,138,152.00	20,863,062,287.00	63.52	20,611,886,830.00
Kecamatan Dumai Barat	5,140,360,709.00	4,887,807,465.00	95.09	4,663,012,638.00
Kecamatan Dumai Timur	5,607,491,392.00	5,366,498,858.00	95.70	4,808,084,451.00
Kecamatan Bukit Kapur	7,107,944,735.00	6,792,345,050.00	95.56	6,194,690,269.00
Kecamatan Medang Kampai	5,182,176,701.00	4,885,249,307.00	94.27	4,661,124,823.00
Kecamatan Sungai Sembilan	6,653,679,333.00	6,293,496,508.00	94.59	5,454,392,705.00
Kecamatan Dumai Kota	5,795,315,923.00	5,559,762,761.00	95.94	5,262,294,201.00
Kecamatan Dumai Selatan	5,569,388,639.00	5,349,931,632.00	96.06	5,188,567,035.00
Inspektorat	10,606,972,372.00	8,770,566,096.00	82.69	8,660,759,916.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5,409,008,104.00	5,192,968,080.00	96.01	5,092,410,156.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	32,991,789,893.00	26,993,557,043.00	81.82	26,551,353,968.00
Badan Pendapatan Daerah	16,127,048,988.00	15,223,209,827.00	94.40	15,025,168,368.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,502,560,794.00	4,162,067,688.00	92.44	4,032,250,692.00
Jumlah	698,106,313,302.00	649,325,852,373.00	93.01	587,860,841,072.00

5.2.a.2) Belanja Barang Dan Jasa

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	585,937,529,587.00	559,998,434,987.95	95.57	481,698,811,775.84

Belanja Barang dan Jasa Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp585.937.529.587,00 dengan realisasi senilai Rp559.998.434.987,95 atau sebesar 95,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp78.299.623.212,11 atau sebesar 16,25% dari realisasi tahun lalu senilai Rp481.698.811.775,84

Rincian Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.2.13 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang	107,830,463,142.00	100,611,417,194.76	93.31	71,658,965,621.76
Belanja Jasa	229,062,824,220.00	214,602,274,534.00	93.69	207,941,185,381.00
Belanja Pemeliharaan	58,581,354,009.00	56,896,834,399.19	97.12	57,923,284,043.08
Belanja Perjalanan Dinas	57,430,622,841.00	52,881,607,692.00	92.08	45,083,480,276.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,162,320,292.00	13,137,750,300.00	99.81	6,088,260,000.00
Belanja Barang dan Jasa BOS	36,104,699,500.00	31,947,871,800.00	88.49	29,942,171,389.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	83,765,245,583.00	89,920,679,068.00	107.35	63,061,465,065.00
Jumlah	585,937,529,587.00	559,998,434,987.95	95.57	481,698,811,775.84

Rincian Belanja Barang dan Jasa per Akun Belanja sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Tabel 5.2.14 Rincian Belanja Barang Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	103,938,915,233.00	96,724,503,053.00	93.06	71,587,059,821.76
Belanja Barang Tak Habis Pakai	3,891,547,909.00	3,886,914,141.76	99.88	71,905,800.00
Jumlah	107,830,463,142.00	100,611,417,194.76	93.31	71,658,965,621.76

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Tabel 5.2.15 Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,570,002,018.00	4,490,465,534.00	98.26	2,798,937,108.00
Dinas Kesehatan + RSUD	36,501,319,272.00	35,498,010,354.00	97.25	19,842,753,466.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20,027,436,130.00	18,642,654,136.00	93.09	14,720,780,794.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,985,672,937.00	2,645,885,902.00	88.62	197,772,773.00
Satuan Polisi Pamong Praja	358,014,596.00	357,527,096.00	99.86	434,704,788.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,443,784,943.00	745,185,010.00	30.49	1,637,702,342.76
Badan kesatuan bangsa dan politik	157,477,700.00	139,862,001.00	88.81	194,649,638.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	592,380,860.00	493,758,729.00	83.35	566,314,995.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	957,244,923.00	937,158,855.00	97.90	176,587,260.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	596,916,539.00	572,338,796.00	95.88	777,316,908.00
Dinas Lingkungan Hidup	2,658,063,425.00	2,521,009,699.00	94.84	1,725,580,055.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,334,744,670.00	1,331,464,510.00	99.75	1,566,242,594.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	937,363,554.00	906,601,490.00	96.72	1,504,640,320.00
Dinas Perhubungan	2,783,252,077.00	2,715,810,830.00	97.58	777,808,620.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	998,499,833.00	916,526,675.00	91.79	5,059,091,547.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	295,072,010.00	242,509,300.00	82.19	776,964,335.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	699,067,755.00	571,293,560.00	81.72	340,698,616.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1,370,217,035.00	1,364,703,471.00	99.60	941,854,808.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	176,306,404.00	165,002,764.00	93.59	192,393,103.00
Dinas Perikanan	529,028,872.00	528,142,587.00	99.83	887,886,835.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	992,390,608.00	980,483,768.00	98.80	129,876,689.00
Dinas Perdagangan	180,492,960.00	136,398,510.00	75.57	170,178,700.00
Sekretariat Daerah	5,354,809,437.00	4,981,877,701.00	93.04	3,704,754,480.00
Sekretariat DPRD	4,979,041,572.00	4,194,248,386.00	84.24	3,792,626,620.00
Kecamatan Dumai Barat	604,157,200.00	563,612,973.00	93.29	355,369,546.00
Kecamatan Dumai Timur	644,842,720.00	612,411,609.00	94.97	550,573,157.00
Kecamatan Bukit Kapur	1,007,751,740.00	985,294,960.00	97.77	710,150,387.00
Kecamatan Medang Kampai	502,518,190.00	502,360,470.00	99.97	740,580,585.00
Kecamatan Sungai Sembilan	599,547,204.00	583,549,100.00	97.33	510,342,700.00
Kecamatan Dumai Kota	686,691,913.00	636,957,910.00	92.76	1,040,445,808.00
Kecamatan Dumai Selatan	775,807,809.00	744,095,466.00	95.91	650,341,315.00
Inspektorat	477,444,985.00	407,844,500.00	85.42	357,877,554.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	800,810,845.00	666,312,100.00	83.20	602,412,427.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,660,423,972.00	2,415,530,750.00	90.79	1,426,842,705.00
Badan Pendapatan Daerah	2,157,054,016.00	2,014,243,066.00	93.38	1,273,729,135.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	543,264,509.00	513,370,485.00	94.50	450,277,108.00
Jumlah	103,938,915,233.00	96,724,503,053.00	93.06	71,587,059,821.76

2. Belanja Barang Tak Pakai Habis

Tabel 5.2.16 Belanja Barang Tak Pakai Habis Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	117,300,000.00	117,208,000.00	99.92	105,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	210,000.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	210,000.00
Dinas Perhubungan	3,774,247,909.00	3,769,706,141.76	99.88	29,148,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	816,900.00
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	13,272,000.00
Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	8,879,200.00
Kecamatan Dumai Kota	0.00	0.00	0.00	543,600.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	18,721,100.00
Jumlah	3,891,547,909.00	3,886,914,141.76	99.88	71,905,800.00

b. Belanja Jasa

Tabel 5.2.17 Rincian Belanja Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	182,400,390,606.00	173,737,758,588.00	95.25	170,331,365,223.00
Belanja Jaminan/Asuransi	19,827,767,308.00	19,625,710,325.00	98.98	20,482,319,490.00
Belanja Sewa Tanah	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	0.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4,411,597,006.00	4,180,106,860.00	94.75	2,954,888,260.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,029,214,601.00	877,927,837.00	85.30	2,215,125,012.00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	305,000,001.00	290,000,000.00	95.08	150,650,000.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2,602,608,980.00	2,575,694,221.00	98.97	4,062,366,050.00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Non Konstruksi	15,335,715,376.00	10,484,590,538.00	68.37	4,555,020,582.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3,090,530,342.00	2,770,486,165.00	89.64	3,178,450,764.00
Jumlah	229,062,824,220.00	214,602,274,534.00	93.69	207,941,185,381.00

1. Belanja Jasa Kantor

Tabel 5.2.18 Belanja Jasa Kantor Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,110,861,459.00	20,699,696,281.00	89.57	25,390,635,924.00
Dinas Kesehatan + RSUD	46,788,183,529.00	44,369,820,271.00	94.83	51,308,932,666.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12,279,974,670.00	11,409,947,710.00	92.92	7,937,152,003.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,723,418,625.00	1,633,936,927.00	94.81	940,384,638.00
Satuan Polisi Pamong Praja	1,535,765,000.00	1,518,518,062.00	98.88	1,299,643,923.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,326,549,000.00	1,034,016,112.00	77.95	968,350,957.00
Badan kesatuan bangsa dan politik	1,185,220,000.00	1,096,120,000.00	92.48	1,171,695,933.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,514,875,000.00	1,482,960,757.00	97.89	1,469,127,379.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	918,626,400.00	911,185,001.00	99.19	660,728,685.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,032,678,100.00	942,596,763.00	91.28	999,181,300.00
Dinas Lingkungan Hidup	8,700,293,400.00	8,597,796,761.00	98.82	2,730,167,533.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	804,009,250.00	800,837,251.00	99.61	8,084,282,543.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,634,767,800.00	1,531,276,810.00	93.67	1,132,069,207.00
Dinas Perhubungan	18,648,226,215.00	18,541,423,014.00	99.43	1,206,633,533.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,606,761,246.00	4,577,678,000.00	99.37	16,490,966,299.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1,063,419,200.00	1,025,918,153.00	96.47	5,114,736,732.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	999,109,500.00	911,099,506.00	91.19	772,193,313.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1,873,657,086.00	1,812,322,596.00	96.73	1,297,106,171.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	586,865,000.00	572,401,498.00	97.54	532,010,963.00
Dinas Perikanan	1,105,989,990.00	1,066,019,779.00	96.39	1,085,048,554.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,008,279,860.00	2,958,535,045.00	98.35	1,640,850,177.00
Dinas Perdagangan	1,951,425,150.00	1,749,668,821.00	89.66	954,886,313.00
Sekretariat Daerah	14,258,556,079.00	13,819,049,115.00	96.92	10,780,719,889.00
Sekretariat DPRD	3,391,119,198.00	3,008,047,046.00	88.70	2,511,768,720.00
Kecamatan Dumai Barat	2,555,045,240.00	2,507,325,176.00	98.13	2,042,859,014.00
Kecamatan Dumai Timur	3,493,505,780.00	3,485,179,048.00	99.76	2,788,872,360.00
Kecamatan Bukit Kapur	2,214,299,980.00	2,189,097,229.00	98.86	2,083,116,823.00
Kecamatan Medang Kampai	1,316,532,000.00	1,297,829,064.00	98.58	1,264,210,531.00
Kecamatan Sungai Sembilan	2,200,016,000.00	2,190,807,191.00	99.58	2,124,401,309.00
Kecamatan Dumai Kota	3,162,685,000.00	3,141,547,606.00	99.33	2,485,057,139.00
Kecamatan Dumai Selatan	2,832,914,600.00	2,810,106,385.00	99.19	2,347,698,116.00
Inspektorat	513,538,000.00	477,043,300.00	92.89	546,577,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,450,920,000.00	1,209,550,000.00	83.36	1,288,533,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5,099,596,649.00	4,975,110,649.00	97.56	3,510,825,500.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	2,391,721,500.00	2,314,165,761.00	96.76	2,090,293,076.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,120,985,100.00	1,069,125,900.00	95.37	1,279,648,000.00
Jumlah	182,400,390,606.00	173,737,758,588.00	95.25	170,331,365,223.00

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.2.19 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan	4,013,280.00	3,114,720.00	77.61	0.00
Dinas Kesehatan + RSUD	19,631,999,378.00	19,486,840,658.00	99.26	20,410,623,927.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,655,744.00	4,635,360.00	53.55	1,146,960.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,063,680.00	12,670,560.00	96.99	6,432,739.00
Satuan Polisi Pamong Praja	6,609,600.00	6,609,600.00	100.00	1,636,260.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5,468,602.00	5,447,736.00	99.62	0.00
Dinas Perikanan	703,488.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,411,200.00	1,411,200.00	100.00	1,411,200.00
Dinas Perdagangan	624,880.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3,895,944.00	3,895,944.00	100.00	1,676,160.00
Sekretariat Daerah	19,784,520.00	19,784,520.00	100.00	14,752,530.00
Sekretariat DPRD	3,000,240.00	734,130.00	24.47	0.00
Kecamatan Dumai Barat	13,498,560.00	6,779,813.00	50.23	3,675,780.00
Kecamatan Dumai Kota	8,035,200.00	4,001,400.00	49.80	1,995,840.00
Kecamatan Dumai Selatan	6,782,400.00	1,695,600.00	25.00	0.00
Kecamatan Dumai Timur	9,060,480.00	847,800.00	9.36	0.00
Kecamatan Medang Kampai	5,056,560.00	3,814,560.00	75.44	941,760.00
Kecamatan Sungai Sembilan	5,811,600.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	11,391,840.00	9,913,596.00	87.02	1,624,332.00
Dinas Lingkungan Hidup	54,959,040.00	41,290,714.00	75.13	30,683,402.00
Dinas Perhubungan	1,905,120.00	1,878,660.00	98.61	1,379,700.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4,840,560.00	4,723,920.00	97.59	4,338,900.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3,274,992.00	2,796,174.00	85.38	0.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,555,200.00	1,017,360.00	65.42	0.00
Badan Pendapatan Daerah	2,365,200.00	1,806,300.00	76.37	0.00
Jumlah	19,827,767,308.00	19,625,710,325.00	98.98	20,482,319,490.00

3. Belanja Sewa Tanah

Tabel 5.2.20 Belanja Sewa Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	0.00

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.21 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84,400,000.00	82,300,000.00	97.51	60,121,260.00
Dinas Kesehatan + RSUD	165,550,000.00	129,815,460.00	78.41	157,150,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,825,969,456.00	2,802,752,000.00	99.18	1,968,464,000.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45,450,000.00	45,300,000.00	99.67	61,450,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	107,900,000.00	106,900,000.00	99.07	70,675,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	3,645,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	390,000.00
Dinas Tenaga Kerja	11,200,000.00	11,200,000.00	100.00	0.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	31,500,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	81,577,550.00	81,127,000.00	99.45	26,900,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150,000.00	150,000.00	100.00	1,400,000.00
Dinas Perikanan	19,700,000.00	19,700,000.00	100.00	47,100,000.00
Sekretariat Daerah	921,200,000.00	833,190,000.00	90.45	423,075,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	13,700,000.00	7,567,100.00	55.23	8,288,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53,400,000.00	38,205,300.00	71.55	32,530,000.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	45,500,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Kecamatan Dumai Kota	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00	7,600,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Sekretariat DPRD	13,700,000.00	11,700,000.00	85.40	0.00
Jumlah	4,411,597,006.00	4,180,106,860.00	94.75	2,954,888,260.00

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.22 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68,540,000.00	57,037,055.00	83.22	422,010,000.00
Dinas Kesehatan + RSUD	165,400,000.00	139,800,000.00	84.52	1,374,670,012.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,916,000.00	1,350,000.00	46.30	14,900,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15,000,000.00	12,150,000.00	81.00	41,050,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	4,880,000.00
Dinas Perhubungan	162,002,101.00	162,000,000.00	100.00	60,000,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	49,300,000.00	47,260,000.00	95.86	2,400,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,800,000.00	4,597,782.00	52.25	1,400,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Sekretariat Daerah	309,810,000.00	265,809,500.00	85.80	115,615,000.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58,946,500.00	33,626,500.00	57.05	106,700,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	40,000,000.00	37,400,000.00	93.50	26,900,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	20,000,000.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	0.00
Dinas Tenaga Kerja	24,900,000.00	22,855,000.00	91.79	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	600,000.00	555,000.00	92.50	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89,500,000.00	59,987,000.00	67.02	0.00
Jumlah	1,029,214,601.00	877,927,837.00	85.30	2,215,125,012.00

6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.23 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	3,000,000.00
Dinas Kesehatan + RSUD	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	10,500,000.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	1,500,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8,500,001.00	8,500,000.00	100.00	0.00
Sekretariat Daerah	251,000,000.00	245,000,000.00	97.61	122,400,000.00
Sekretariat DPRD	9,000,000.00	1,500,000.00	16.67	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Kecamatan Dumai Kota	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	6,000,000.00
Jumlah	305,000,001.00	290,000,000.00	95.08	150,650,000.00

7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Tabel 5.2.24 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	555,370,900.00	548,935,121.00	98.84	1,643,849,700.00
Dinas Kesehatan + RSUD	100,000,000.00	99,800,000.00	99.80	268,522,450.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,620,150,195.00	1,617,100,000.00	99.81	1,456,011,000.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	179,500,000.00	179,111,700.00	99.78	0.00
Dinas Perdagangan	101,913,750.00	95,300,000.00	93.51	29,478,900.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	5,550,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	30,000,000.00	19,980,000.00	66.60	0.00
Inspektorat Daerah	5,174,135.00	5,100,000.00	98.57	0.00
Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	17,779,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	276,810,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	10,500,000.00	10,367,400.00	98.74	10000000.00
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	54,230,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	0.00	0.00	300,135,000.00
Jumlah	2,602,608,980.00	2,575,694,221.00	98.97	4,062,366,050.00

8. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.2.25 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	11,288,633,700.00	6,555,725,328.00	58.07	2,403,828,482.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	598,290,000.00	598,290,000.00	100.00	0.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	170,000,000.00	169,242,750.00	99.55	100,000,000.00
Dinas Perhubungan	1,877,531,732.00	1,872,271,910.00	99.72	1,580,773,000.00
Dinas Tenaga Kerja	80,000,000.00	79,750,000.00	0.00	0.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	90,000,000.00	89,630,000.00	99.59	0.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	212,259,944.00	207,368,900.00	0.00	28,703,100.00
Dinas Kominfo, Informatika, Statistik dan Persandian	224,000,000.00	223,660,800.00	0.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	390,000,000.00	288,450,850.00	0.00	162,533,000.00
Kecamatan Dumai Kota	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	400,000,000.00	395,200,000.00	0.00	265,400,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	13,783,000.00
Jumlah	15,335,715,376.00	10,484,590,538.00	68.37	4,555,020,582.00

9. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Tabel 5.2.26 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00

10. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Tabel 5.2.27 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	99,405,739.00
Dinas Kesehatan + RSUD	641,714,126.00	542,298,143.00	84.51	439,120,025.00
Dinas Kominfo, Informatika, Statistika dan Persandian	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00
Dinas Perhubungan	93,041,550.00	81,629,000.00	87.73	182,500,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0.00	0.00	0.00	67,000,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	361,600,000.00
Sekretariat Daerah	288,000,000.00	288,000,000.00	100.00	125,985,000.00
Sekretariat DPRD	608,272,666.00	464,000,000.00	76.28	796,780,000.00
Dinas Perikanan	160,600,000.00	155,940,000.00	0.00	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	200,500,000.00	181,500,000.00	90.52	259,915,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	638,522,000.00	638,522,000.00	100.00	753,270,000.00
Dinas Tenaga Kerja	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	15,000,000.00	11,550,022.00	0.00	24,000,000.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
Inspektorat	53,000,000.00	32,457,000.00	0.00	30,375,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	38,500,000.00	35,090,000.00	0.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	195,000,000.00	192,000,000.00	0.00	0.00
Dinas Perdagangan	10,880,000.00	0.00	0.00	0.00
Kecamatan Dumai Selatan	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
Jumlah	3,090,530,342.00	2,770,486,165.00	89.64	3,178,450,764.00

c. Belanja Pemeliharaan

Tabel 5.2.28 Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah	2,656,110,668.00	2,446,840,139.69	92.12	1,398,082,846.99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,064,954,526.00	18,934,447,782.95	94.37	18,217,754,364.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,669,065,054.00	12,356,427,610.99	97.53	20,862,788,932.09
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	23,178,723,761.00	23,148,118,865.56	99.87	17,257,872,900.00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12,500,000.00	11,000,000.00	88.00	186,785,000.00
Jumlah	58,581,354,009.00	56,896,834,399.19	97.12	57,923,284,043.08

1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Tabel 5.2.29 Belanja Pemeliharaan Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,906,068,000.00	1,897,479,966.69	99.55	1,398,082,846.99
Dinas Perhubungan	49,980,000.00	49,939,800.00	99.92	0.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	100,062,668.00	99,885,000.00	99.82	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	600,000,000.00	399,535,373.00	66.59	0.00
Jumlah	2,656,110,668.00	2,446,840,139.69	92.12	1,398,082,846.99

2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.2.30 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	225,701,500.00	210,955,500.00	93.47	201,484,700.00
Dinas Kesehatan + RSUD	1,468,240,000.00	1,316,746,750.00	89.68	955,408,230.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,616,372,800.00	1,268,329,101.00	78.47	1,451,535,363.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	196,620,000.00	196,323,440.00	99.85	187,751,613.00
Satuan Polisi Pamong Praja	280,060,000.00	275,274,000.00	98.29	289,886,400.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	676,903,477.00	312,985,055.00	46.24	417,135,063.00
Badan kesatuan bangsa dan politik	116,838,700.00	109,622,160.00	93.82	125,120,779.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	162,985,380.00	159,930,761.00	98.13	137,775,000.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	221,110,000.00	220,269,767.00	99.62	160,390,300.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107,170,000.00	107,113,000.00	99.95	143,326,900.00
Dinas Lingkungan Hidup	3,550,772,972.00	3,548,713,011.00	99.94	3,856,868,107.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	170,130,000.00	169,878,000.00	99.85	241,062,350.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	171,028,563.00	166,841,799.00	97.55	138,900,044.00
Dinas Perhubungan	4,838,877,162.00	4,830,526,661.95	99.83	3,681,346,659.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	168,408,504.00	167,434,600.00	99.42	206,779,678.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	148,546,000.00	148,449,500.00	99.94	161,841,500.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179,540,000.00	177,966,476.00	99.12	170,599,681.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	131,820,400.00	130,647,500.00	99.11	271,397,350.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	231,002,200.00	230,975,850.00	99.99	222,362,600.00
Dinas Perikanan	81,710,040.00	79,628,950.00	97.45	71,811,550.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300,260,000.00	300,111,198.00	99.95	291,875,000.00
Dinas Perdagangan	140,180,850.00	139,925,500.00	99.82	166,858,600.00
Sekretariat Daerah	1,699,733,400.00	1,572,715,653.00	92.53	1,277,551,720.00
Sekretariat DPRD	422,580,000.00	412,491,137.00	97.61	390,512,497.00
Kecamatan Dumai Barat	140,528,000.00	139,565,962.00	99.32	94,781,800.00
Kecamatan Dumai Timur	196,627,822.00	195,456,335.00	99.40	158,654,880.00
Kecamatan Bukit Kapur	69,534,000.00	69,169,000.00	99.48	99,153,850.00
Kecamatan Medang Kampai	114,160,200.00	114,152,350.00	99.99	273,344,690.00
Kecamatan Sungai Sembilan	48,845,000.00	48,684,722.00	99.67	156,430,110.00
Kecamatan Dumai Kota	258,691,000.00	253,035,525.00	97.81	236,199,310.00
Kecamatan Dumai Selatan	247,655,000.00	232,099,411.00	93.72	243,277,925.00
Inspektorat	252,020,000.00	251,244,000.00	99.69	195,241,550.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	280,492,856.00	249,131,960.00	88.82	321,064,058.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	377,460,000.00	360,262,500.00	95.44	557,847,350.00
Badan Pendapatan Daerah	496,438,700.00	492,607,898.00	99.23	413,535,357.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275,910,000.00	275,182,750.00	99.74	248,641,800.00
Jumlah	20,064,954,526.00	18,934,447,782.95	94.37	18,217,754,364.00

3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.2.31 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	164,000,000.00	163,972,000.00	99.98	13,034,416,829.09
Dinas Kesehatan + RSUD	3,314,894,929.00	3,295,669,452.90	99.42	1,223,812,754.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	370,028,000.00	367,901,000.00	99.43	1,167,043,000.00
Satuan Polisi Pamong Praja	195,000,000.00	192,093,750.00	98.51	119,345,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	20,790,000.00	20,600,000.00	99.09	0.00
Dinas Perhubungan	1,618,656,000.00	1,616,754,777.16	99.88	691,237,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	79,500,000.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45,578,750.00	44,479,000.00	97.59	6,400,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	894,665,211.00	893,826,735.93	99.91	721,562,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,000,000.00	49,755,750.00	99.51	99,925,000.00
Dinas Perikanan	194,300,000.00	194,226,880.00	99.96	131,376,549.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	334,999,692.00	334,390,000.00	99.82	1,153,926,420.00
Dinas Perdagangan	13,000,000.00	12,190,000.00	93.77	37,187,780.00
Sekretariat Daerah	2,915,373,350.00	2,842,557,140.00	97.50	1,144,705,600.00
Sekretariat DPRD	438,703,734.00	435,325,100.00	99.23	165,661,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	75,000,000.00	74,904,000.00	99.87	314,670,000.00
Kecamatan Medang Kampai	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	148,200,000.00
Kecamatan Dumai Kota	100,000,000.00	99,841,000.00	99.84	0.00
Kecamatan Dumai Selatan	142,344,200.00	142,326,000.00	99.99	0.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	137,336,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	97080000.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	32,936,000.00
Inspektorat	356,542,000.00	353,713,000.00	99.21	0.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	225,000,000.00	224,565,000.00	99.81	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	668,618,958.00	666,966,000.00	99.75	296,468,000.00
Badan Pendapatan Daerah	271,570,230.00	270,371,025.00	99.56	0.00
Jumlah	12,669,065,054.00	12,356,427,610.99	97.53	20,862,788,932.09

4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tabel 5.2.32 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	179,800,000.00	179,500,000.00	99.83	195,336,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,360,946,761.00	22,330,897,000.00	99.87	10,982,240,000.00
Dinas Perhubungan	194,905,000.00	194,701,865.56	99.90	199,252,000.00
Kecamatan Dumai Barat	47,052,000.00	47,000,000.00	99.89	1,278,060,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	1,475,000,000.00
Kecamatan Medang Kampai	196,020,000.00	196,020,000.00	100.00	188,000,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	297,605,500.00
Dinas Perdagangan	0.00	0.00	0.00	103,027,400.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	285,940,000.00
Kecamatan Selatan	0.00	0.00	0.00	169,770,000.00
Kecamatan Dumai Kota	0.00	0.00	0.00	2,083,642,000.00
Jumlah	23,178,723,761.00	23,148,118,865.56	99.87	17,257,872,900.00

5. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.2.33 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pendapatan Daerah	12,500,000.00	11,000,000.00	88.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	156,805,000.00
Kecamatan Dumai Kota	0.00	0.00	0.00	29,980,000.00
Jumlah	12,500,000.00	11,000,000.00	88.00	186,785,000.00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5.2.34 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57,430,622,841.00	52,881,607,692.00	92.08	45,083,480,276.00
Jumlah	57,430,622,841.00	52,881,607,692.00	92.08	45,083,480,276.00

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Tabel 5.2.35 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,520,879,538.00	1,497,936,416.00	98.49	1,437,340,205.00
Dinas Kesehatan + RSUD	7,396,396,578.00	6,087,392,448.00	82.30	6,737,967,219.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,950,708,750.00	1,402,169,530.00	71.88	1,800,708,626.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	952,199,610.00	920,830,671.00	96.71	385,279,335.00
Satuan Polisi Pamong Praja	434,519,904.00	434,356,003.00	99.96	411,540,794.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,767,656,450.00	823,181,388.00	46.57	553,785,645.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	491,142,600.00	384,223,722.00	78.23	551,225,800.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	647,497,000.00	637,696,744.00	98.49	501,394,967.00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	332,181,008.00	331,863,544.00	99.90	228,307,125.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	613,338,370.00	593,326,231.00	96.74	505,368,785.00
Dinas Lingkungan Hidup	809,804,908.00	804,028,349.00	99.29	2,590,769,463.00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	272,696,000.00	270,686,504.00	99.26	666,656,919.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,404,624,846.00	1,034,672,258.00	73.66	414,917,360.00
Dinas Perhubungan	1,577,064,034.00	1,568,512,288.00	99.46	1,054,855,934.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	779,481,625.00	775,229,349.00	99.45	1,427,920,198.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	246,881,000.00	238,691,495.00	96.68	889,103,131.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	728,612,300.00	594,175,819.00	81.55	267,676,280.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	437,766,021.00	435,947,341.00	99.58	420,102,488.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	330,700,200.00	285,141,242.00	86.22	438,219,060.00
Dinas Perikanan	518,940,000.00	469,604,994.00	90.49	368,278,720.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,815,568,400.00	1,806,171,959.00	99.48	421,823,101.00
Dinas Perdagangan	416,725,000.00	294,189,414.00	70.60	309,075,610.00
Sekretariat Daerah	6,230,344,523.00	6,137,159,981.00	98.50	5,166,005,977.00
Sekretariat DPRD	13,159,049,821.00	12,882,813,201.00	97.90	7,809,911,425.00
Kecamatan Dumai Barat	97,889,000.00	97,450,384.00	99.55	119,304,948.00
Kecamatan Dumai Timur	101,766,000.00	97,096,400.00	95.41	118,211,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	168,137,200.00	167,739,210.00	99.76	222,635,037.00
Kecamatan Medang Kampai	144,984,000.00	135,464,314.00	93.43	119,511,227.00
Kecamatan Sungai Sembilan	146,260,000.00	139,246,244.00	95.20	67,805,476.00
Kecamatan Dumai Kota	143,675,000.00	141,390,798.00	98.41	196,940,680.00
Kecamatan Dumai Selatan	156,242,000.00	155,586,800.00	99.58	240,824,700.00
Inspektorat	2,021,501,639.00	2,003,049,000.00	99.09	2,105,963,560.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,744,020,555.00	1,603,306,625.00	91.93	1,295,820,908.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,576,451,530.00	4,370,935,000.00	95.51	3,004,366,337.00
Badan Pendapatan Daerah	2,334,627,940.00	2,301,970,176.00	98.60	1,254,022,886.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	960,289,491.00	958,371,850.00	99.80	979,839,350.00
Jumlah	57,430,622,841.00	52,881,607,692.00	92.08	45,083,480,276.00

e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.36 Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,999,720,292.00	12,975,150,300.00	99.81	6,088,260,000.00
Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162,600,000.00	162,600,000.00	100.00	0.00
Jumlah	13,162,320,292.00	13,137,750,300.00	99.81	6,088,260,000.00

1. Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.37 Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68,500,000.00	68,500,000.00	100.00	106,400,000.00
Dinas Kesehatan + RSUD	74,621,720.00	74,000,000.00	99.17	10,500,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,564,000,000.00	4,564,000,000.00	100.00	0.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6,960,000,000.00	6,960,000,000.00	100.00	4,150,000,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00
Satuan Polisi Pamong Praja	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	0.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5,750,000.00	5,750,000.00	100.00	10,480,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	7,530,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	855,000,000.00
Sekretariat Daerah	988,500,000.00	975,500,000.00	98.68	576,500,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	0.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	145,500,000.00	138,600,000.00	95.26	344,100,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	112,158,572.00	112,110,300.00	99.96	0.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	0.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8,940,000.00	8,940,000.00	100.00	4,000,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
Kecamatan Dumai Kota	23,250,000.00	23,250,000.00	100.00	1,500,000.00
Kecamatan Dumai Barat	36,500,000.00	32,500,000.00	89.04	0.00
Jumlah	12,999,720,292.00	12,975,150,300.00	99.81	6,088,260,000.00

2. Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5.2.38 Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	162,600,000.00	162,600,000.00	0.00	0.00
Jumlah	162,600,000.00	162,600,000.00	100.00	0.00

f. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Tabel 5.2.39 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BOS	36,104,699,500.00	31,947,871,800.00	88.49	29,942,171,389.00
Jumlah	36,104,699,500.00	31,947,871,800.00	88.49	29,942,171,389.00

1. Belanja Barang dan Jasa Dana Bos

Tabel 5.2.40 Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36,104,699,500.00	31,947,871,800.00	88.49	29,942,171,389.00
Jumlah	36,104,699,500.00	31,947,871,800.00	88.49	29,942,171,389.00

Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp36.104.699.500,00, yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa Dana Bos Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp31.947.871.800,00 ini merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp22.480.447.836,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp9.467.423.964,00.

Berikut rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022:

Tabel 5.2.41 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	209,121,784.00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	88,874,770.00
Jumlah	297,996,554.00

g. Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD

Tabel 5.2.42 Rincian Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Barang dan Jasa BLUD	83,765,245,583.00	89,920,679,068.00	107.35	63,061,465,065.00
Jumlah	83,765,245,583.00	89,920,679,068.00	107.35	63,061,465,065.00

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.2.43 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	83,765,245,583.00	89,920,679,068.00	107.35	63,061,465,065.00
Jumlah	83,765,245,583.00	89,920,679,068.00	107.35	63,061,465,065.00

5.2.a.3) Belanja Bunga

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
2,000,000,000.00	1,060,377,070.00	53.02	0.00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 53,02%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Rincian Belanja Bunga sebagai berikut:

Tabel 5.2.44 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	2,000,000,000.00	1,060,377,070.00	53.02	0.00
Jumlah	2,000,000,000.00	1,060,377,070.00	53.02	0.00

1. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Tabel 5.2.45 Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,000,000,000.00	1,060,377,070.00	53.02	0.00
Jumlah	2,000,000,000.00	1,060,377,070.00	53.02	0.00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 53,02%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 100% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) merupakan Bunga yang dikenakan atas pinjaman kepada PT. BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan perhitungan menggunakan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) korporasi ditambah 0,5%.

5.2.a.4) Belanja Subsidi

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
132,027,000.00	0.00	0.00	0.00

Belanja Bunga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp132.027.000,00 dengan realisasi senilai Rp0,00 atau sebesar 0,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 tidak mengalami perubahan atau dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Tabel 5.2.46 Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	132,027,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	132,027,000.00	0.00	0.00	0.00

1. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Tabel 5.2.47 Realisasi Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	132,027,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	132,027,000.00	0.00	0.00	0.00

5.2.a.5) Belanja Hibah

Anggaran	Tahun 2022		Tahun 2021
	Realisasi	(%)	Realisasi
30,956,352,225.00	23,282,916,899.08	75.21	35,855,199,901.00

Belanja Hibah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp30.956.352.225,00 dengan realisasi senilai Rp23.282.916.899,08 atau sebesar 75,21%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp12.572.283.001,92 atau sebesar 35,06% dari realisasi tahun lalu senilai Rp35.855.199.901,00

Rincian Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.2.48 Rincian Belanja Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15,061,649,043.00	10,871,570,966.08	72.18	23,488,088,951.00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13,575,140,382.00	10,091,783,133.00	74.34	10,047,548,150.00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	100.00	2,319,562,800.00
Jumlah	30,956,352,225.00	23,282,916,899.08	75.21	35,855,199,901.00

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.49 Rincian Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	400,000,000.00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14,561,649,043.00	10,371,570,966.08	71.23	23,088,088,951.00
Jumlah	15,061,649,043.00	10,871,570,966.08	72.18	23,488,088,951.00

A. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.50 Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Sekretariat Daerah	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	400,000,000.00
Jumlah	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00	400,000,000.00

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp500.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp500.000.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp100.000.000,00 atau sebesar 25,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp400.000.000,00

B. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.2.51 Realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Kesehatan + RSUD	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,958,829,643.00	6,829,304,973.08	62.32	23,088,088,951.00
Sekretariat Daerah	3,602,819,400.00	3,542,265,993.00	98.32	0.00
Jumlah	14,561,649,043.00	10,371,570,966.08	71.23	23,488,088,951.00

Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp14.561.649.043,00 dengan realisasi senilai Rp10.371.570.966,08 atau sebesar 71,23%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp13.116.517.984,92 atau sebesar 55,84% dari realisasi tahun lalu senilai Rp23.488.088.951,00

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.2.52 Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	100.00	350,000,000.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4,685,997,182.00	1,277,097,182.00	27.25	4,961,450,000.00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7,789,143,200.00	7,714,685,951.00	99.04	4,736,098,150.00
Jumlah	13,575,140,382.00	10,091,783,133.00	74.34	10,047,548,150.00

A. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 5.2.53 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	400,000,000.00	400,000,000.00	100.00	0.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	550,000,000.00	550,000,000.00	100.00	250,000,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	100.00	350,000,000.00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp1.100.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp1.100.000.000,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp750.000.000,00 atau sebesar 214,29% dari realisasi tahun lalu senilai Rp350.000.000,00

B. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Tabel 5.2.54 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,408,900,000.00	0.00	0.00	2,691,450,000.00
Dinas Kesehatan + RSUD	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,077,097,182.00	1,077,097,182.00	100.00	2,000,000,000.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	0.00	0.00	70,000,000.00
Jumlah	4,685,997,182.00	1,277,097,182.00	27.25	4,961,450,000.00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp4.685.997.182,00 dengan realisasi senilai Rp1.277.097.182,00 atau sebesar 27,25%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp927.097.182,00 atau sebesar 74,26% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.961.450.000,00

C. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Tabel 5.2.55 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	600,000,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,563,763,200.00	2,517,125,951.00	98.18	1,216,098,150.00
Dinas Perikanan	565,380,000.00	547,560,000.00	96.85	0.00
Sekretariat Daerah	4,410,000,000.00	4,400,000,000.00	99.77	2,865,000,000.00
Jumlah	7,789,143,200.00	7,714,685,951.00	99.04	4,736,098,150.00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp7.789.143.200,00 dengan realisasi senilai Rp7.714.685.951,00 atau sebesar 99,04%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.978.587.801,00 atau sebesar 62,89% dari realisasi tahun lalu senilai Rp4.736.098.150,00

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp650.000.000 tidak termasuk realisasi Belanja Hibah BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Berikut rincian realisasi Belanja Hibah untuk BOP Paud dan BOP Pendidikan Kesetaraan:

Tabel 5.2.56 Rincian Realisasi Belanja Hibah BOP Paud Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Paud dan Taman Kanak-Kanak	2,650,636,000.00
Jumlah	2,650,636,000.00

Tabel 5.2.57 Rincian Realisasi Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Lembaga Pendidikan Kesetaraan	670,739,002.00
Jumlah	670,739,002.00

3. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Tabel 5.2.58 Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	100.00	2,319,562,800.00
Jumlah	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	100.00	2,319,562,800.00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp2.319.562.800,00 dengan realisasi senilai Rp2.319.562.800,00 atau sebesar 100,00%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 tidak mengalami perubahan atau sebesar 0,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp2.319.562.800,00

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.2.59 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Partai Hanura	131,840,640.00	131,840,640.00	100.00	131,840,640.00
Partai Golongan Karya	216,931,320.00	216,931,320.00	100.00	216,931,320.00
Partai Persatuan Pembangunan	157,914,360.00	157,914,360.00	100.00	157,914,360.00
Partai Amanat Nasional	303,950,880.00	303,950,880.00	100.00	303,950,880.00
Partai Demokrat	342,342,360.00	342,342,360.00	100.00	342,342,360.00
Partai Keadilan Sejahtera	333,036,360.00	333,036,360.00	100.00	333,036,360.00
Partai Nasdem	257,014,800.00	257,014,800.00	100.00	257,014,800.00

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	320,126,400.00	320,126,400.00	100.00	320,126,400.00
Partai Gerindra	256,405,680.00	256,405,680.00	100.00	256,405,680.00
Jumlah	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	100.00	2,319,562,800.00

5.2.a.6) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
15,456,810,000.00	12,911,808,100.00	83.53	0.00

Belanja Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp15.456.810.000,00 dengan realisasi senilai Rp12.911.808.100,00 atau sebesar 83,53%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.911.808.100,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.2.60 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14,983,810,000.00	12,438,808,100.00	83.01	0.00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	473,000,000.00	473,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	15,456,810,000.00	12,911,808,100.00	83.53	0.00

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Tabel 5.2.61 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14,983,810,000.00	12,438,808,100.00	83.01	0.00
Jumlah	14,983,810,000.00	12,438,808,100.00	83.01	0.00

A. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu

Tabel 5.2.62 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9,744,000,000.00	9,744,000,000.00	100.00	0.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,045,200,000.00	459,600,000.00	43.97	0.00
Dinas Perhubungan	711,000,000.00	237,000,000.00	33.33	0.00
Dinas Perikanan	680,610,000.00	664,208,100.00	97.59	0.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian	2,803,000,000.00	1,334,000,000.00	47.59	0.00
Jumlah	14,983,810,000.00	12,438,808,100.00	83.01	0.00

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.2.63 Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	473,000,000.00	473,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	473,000,000.00	473,000,000.00	100.00	0.00

A. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.2.64 Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Dinas Perikanan	473,000,000.00	473,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	473,000,000.00	473,000,000.00	100.00	0.00

5.2.b Belanja Modal

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	306,331,988,807.00	260,201,936,711.64	84.94	199,818,329,751.39

Belanja Modal Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp306.331.988.807,00 dengan realisasi senilai Rp260.201.936.711,64 atau sebesar 84,94%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp60.383.606.960,25 atau sebesar 30,22% dari realisasi tahun lalu senilai Rp199.818.329.751,39

Rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.2.65 Rincian Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	3,541,754,940.00	3,534,281,800.00	99.79	17,000,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,498,144,002.00	91,334,440,997.63	90.88	84,487,469,177.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104,485,105,586.00	87,322,813,477.02	83.57	52,685,031,521.31
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90,178,025,211.00	73,340,485,070.99	81.33	56,397,085,845.08
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,628,959,068.00	4,669,915,366.00	61.21	6,231,743,208.00
Jumlah	306,331,988,807.00	260,201,936,711.64	84.94	199,818,329,751.39

Adapun realisasi dan rincian jenis belanja modal adalah sebagai berikut:

5.2.b.1) Belanja Modal Tanah

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	3,541,754,940.00	3,534,281,800.00	99.79	17,000,000.00

Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp3.541.754.940,00 dengan realisasi senilai Rp3.534.281.800,00 atau sebesar 99,79%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.517.281.800,00 atau sebesar 20689,89% dari realisasi tahun lalu senilai Rp17.000.000,00

Tabel 5.2.66 Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	3,541,754,940.00	3,534,281,800.00	99.79	17,000,000.00
Jumlah	3,541,754,940.00	3,534,281,800.00	99.79	17,000,000.00

1. Pengadaan Tanah Untuk Persil

Tabel 5.2.67 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36,494,940.00	29,021,800.00	79.52	17,000,000.00
Dinas Perhubungan	3,505,260,000.00	3,505,260,000.00	100.00	0.00
Jumlah	3,541,754,940.00	3,534,281,800.00	99.79	17,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Persil Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.2.68 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Pelayanan Pemeriksaan Tanah Kelurahan Teluk Makmur	2,506,000.00
Pembuatan Akta Perubahan (adendum) Pelepasan Hak Atas Tanah Tanpa Ganti Rugi Kementerian Kelautan POLTEK Perikanan	750,000.00
Proses pelepasan Hak SHM Kantor Kelurahan Sungai Geniot	7,500,000.00
Belanja Modal Tanah Basilam Baru	6,100,000.00
Belanja Modal Tanah Kampung Baru	12,165,800.00
Jumlah	29,021,800.00

Tabel 5.2.69 Rincian Pengadaan Tanah Untuk Tanah Persil Pada Dinas Perhubungan Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Tanah Jl. Gatot Subroto Kel. Purnama Kec. Dumai Barat	3,505,260,000.00
Jumlah	3,505,260,000.00

5.2.b.2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	100,498,144,002.00	91,334,440,997.63	90.88	84,487,469,177.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp100.498.144.002,00 dengan realisasi senilai Rp91.334.440.997,63 atau sebesar 90,88%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.846.971.820,63 atau sebesar 8,10% dari realisasi tahun lalu senilai Rp84.487.469.177,00

Tabel 5.2.70 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	10,434,856,736.00	9,058,011,303.30	86.81	6,174,879,550.00
Belanja Modal Alat Angkutan	16,421,665,466.00	16,197,885,848.00	98.64	8,468,561,100.00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	219,172,600.00	217,384,900.00	99.18	48,874,400.00
Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00	180,617,552.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,433,017,929.00	10,061,137,615.10	96.44	9,255,750,575.00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	953,665,452.00	942,893,956.00	98.87	1,221,559,600.00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23,962,471,988.00	22,435,533,976.00	93.63	20,686,823,311.00
Belanja Modal Alat Laboratorium	2,701,641,567.00	2,265,980,134.00	83.87	1,484,092,500.00
Belanja Modal Komputer	11,630,804,616.00	11,348,148,363.00	97.57	21,162,449,350.00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	430,000,000.00	425,077,984.74	98.86	0.00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00	14,652,646.00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0.00	0.00	0.00	2,612,930,185.00
Belanja Modal Rambu-Rambu	300,114,000.00	299,832,986.49	99.91	5,124,671,500.00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9,240,626,300.00	4,778,211,035.00	51.71	5,608,559,365.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13,770,107,348.00	13,304,342,896.00	0.00	2,438,387,543.00
Jumlah	100,498,144,002.00	91,334,440,997.63	90.88	84,487,469,177.00

1. Belanja Modal Alat Besar

Tabel 5.2.71 Rincian Belanja Modal Alat Besar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	37,576,000.00	35,600,000.00	94.74	718,520,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,800,894,370.00	8,440,140,103.30	86.12	4,950,000,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33,000,000.00	27,528,000.00	83.42	197,175,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10,627,516.00	10,500,000.00	98.80	4,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	467,370,000.00	466,906,200.00	99.90	35,000,000.00
Dinas Perhubungan	5,236,350.00	5,206,000.00	99.42	0.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	0.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
Dinas Perikanan	13,700,000.00	13,700,000.00	100.00	9,065,400.00
Sekretariat Daerah	10,090,000.00	10,086,000.00	99.96	9,400,000.00
Sekretariat DPRD	6,352,400.00	6,345,000.00	99.88	7,229,250.00
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Kecamatan Dumai Kota	35,010,100.00	27,000,000.00	77.12	0.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	17,689,900.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	220,000,000.00
Jumlah	10,434,856,736.00	9,058,011,303.30	86.12	6,174,879,550.00

2. Belanja Modal Alat Angkutan

Tabel 5.2.72 Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1,840,851,000.00	1,833,645,350.00	99.61	2,775,862,500.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,671,320,000.00	5,640,540,000.00	99.46	1,842,500,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	61,000,000.00	55,543,000.00	91.05	193,900,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	4,566,690,000.00	4,457,300,000.00	97.60	537,075,000.00
Kecamatan Dumai Barat	360,000,000.00	356,966,250.00	99.16	179,840,600.00
Kecamatan Dumai Timur	450,000,000.00	446,886,248.00	99.31	404,590,800.00
Kecamatan Bukit Kapur	33,440,000.00	21,737,500.00	65.00	0.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	343,868,600.00
Kecamatan Dumai Kota	603,993,250.00	601,229,500.00	99.54	392,830,600.00
Kecamatan Dumai Selatan	518,721,750.00	515,958,000.00	99.47	286,592,000.00
Dinas Perikanan	67,000,000.00	50,370,000.00	75.18	276,430,000.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	34,500,000.00
Sekretariat Daerah	1,715,536,966.00	1,702,258,000.00	99.23	874,320,000.00
Sekretariat DPRD	0.00	0.00	0.00	251,500,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	189,000,000.00	179,830,000.00	95.15	0.00
Dinas Tenaga Kerja	25,000,000.00	24,988,000.00	99.95	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	319,112,500.00	310,634,000.00	97.34	74,751,000.00
Jumlah	16,421,665,466.00	16,197,885,848.00	98.64	8,468,561,100.00

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Tabel 5.2.73 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	11,076,600.00
Dinas Perhubungan	200,000,000.00	198,301,500.00	99.15	5,400,000.00
Sekretariat Daerah	5,089,200.00	5,000,000.00	98.25	0.00
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	2,813,000.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	10,834,700.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	1,850,100.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	14,083,400.00	14,083,400.00	100.00	0.00
Jumlah	219,172,600.00	217,384,900.00	99.18	48,874,400.00

4. Belanja Modal Alat Pertanian

Tabel 5.2.74 Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	3,507,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	3,891,252.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	138,569,300.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	180,617,552.00

5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tabel 5.2.75 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	481,403,224.00	479,431,024.00	99.59	1,240,220,775.00
Dinas Kesehatan + RSUD	821,661,367.00	805,842,700.00	98.07	2,112,162,139.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70,000,000.00	69,507,090.00	99.30	30,109,100.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	51,243,125.00	48,661,000.00	94.96	181,040,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	531,975,600.00	479,178,100.00	90.08	387,238,750.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	83,650,000.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	63,391,000.00
Dinas Perdagangan	0.00	0.00	0.00	25,371,500.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	0.00	0.00	20,980,000.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21,999,900.00	21,996,700.00	99.99	0.00
Dinas Tenaga Kerja	59,068,500.00	56,769,589.00	96.11	82,076,250.00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	226,800,000.00	224,100,000.00	98.81	189,254,300.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,366,400.00	1,366,400.00	100.00	62,907,100.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,184,030,900.00	2,039,609,500.00	93.39	55,000,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32,000,000.00	31,635,000.00	98.86	520,367,500.00
Dinas Perikanan	18,791,400.00	18,700,000.00	99.51	41,279,900.00
Satuan Polisi Pamong Praja	6,352,400.00	5,451,802.00	85.82	1,470,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	38,775,450.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	568,800,000.00	564,500,000.00	99.24	147,470,000.00
Dinas Perhubungan	1,427,133,340.00	1,425,228,370.10	99.87	859,997,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56,736,384.00	56,300,000.00	99.23	78,809,725.00
Sekretariat Daerah	2,183,437,770.00	2,133,000,962.00	97.69	675,975,450.00
Sekretariat DPRD	122,633,000.00	117,146,100.00	95.53	343,417,750.00
Kecamatan Dumai Barat	19,340,800.00	19,215,000.00	99.35	57,436,000.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	315,001,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	112,137,460.00	107,080,660.00	95.49	352,580,970.00
Kecamatan Medang Kampai	49,718,072.00	49,640,000.00	99.84	28,680,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	11,238,800.00	11,170,000.00	99.39	236,333,800.00
Kecamatan Dumai Kota	53,923,960.00	47,583,500.00	88.24	249,838,030.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Selatan	75,779,463.00	75,779,463.00	100.00	269,570,050.00
Badan Pendapatan Daerah	432,766,810.00	415,848,411.00	96.09	99,431,376.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	92,036,794.00	85,562,194.00	92.97	88,182,360.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	296,618,664.00	255,785,000.00	86.23	99,200,000.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	91,440,000.00
Inspektorat	48,784,200.00	46,453,650.00	95.22	27,456,000.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	348,239,596.00	341,595,400.00	98.09	99,637,300.00
Jumlah	10,433,017,929.00	10,061,137,615.10	96.44	9,255,750,575.00

6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Tabel 5.2.76 Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	142,450,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	12,843,500.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0.00	0.00	0.00	46,851,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	194,720,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	4,079,100.00
Dinas Kesehatan + RSUD	96,580,578.00	95,950,000.00	99.35	31,700,000.00
Dinas Perdagangan	623,100.00	560,000.00	89.87	0.00
Dinas Tenaga Kerja	2,469,499.00	2,450,000.00	99.21	7,637,750.00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	34,800,000.00	34,600,000.00	99.43	7,260,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	23,493,100.00	23,377,453.00	99.51	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	34,204,800.00	34,165,000.00	99.88	12,214,700.00
Dinas Perhubungan	75,536,397.00	75,503,000.00	99.96	166,264,850.00
Sekretariat Daerah	132,328,200.00	131,500,000.00	99.37	264,644,000.00
Sekretariat DPRD	100,383,600.00	99,300,000.00	98.92	20,900,000.00
Kecamatan Dumai Timur	5,656,478.00	5,656,478.00	100.00	9,614,000.00
Kecamatan Dumai Kota	5,970,000.00	5,950,000.00	99.66	41,304,500.00
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	0.00	0.00	0.00	21,676,200.00
Kecamatan Dumai Selatan	29,375,000.00	29,375,000.00	100.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	311,773,000.00	305,460,025.00	97.98	31,800,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9,455,400.00	9,000,000.00	95.18	192,000,000.00
Inspektorat	91,016,300.00	90,047,000.00	98.94	0.00
Jumlah	953,665,452.00	942,893,956.00	98.87	1,221,559,600.00

7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Tabel 5.2.77 Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	733,000.00	0.00	0.00	0.00
Dinas Kesehatan + RSUD	23,930,695,228.00	22,408,627,327.00	0.00	20,621,673,311.00
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	0.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	650,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22,844,000.00	22,755,000.00	99.61	0.00
Kecamatan Dumai Kota	1,260,900.00	1,260,000.00	99.93	6,600,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	6,938,860.00	2,891,649.00	41.67	16,200,000.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	29,900,000.00
Jumlah	23,962,471,988.00	22,435,533,976.00	93.63	20,686,823,311.00

8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Tabel 5.2.78 Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	989,410,000.00	957,048,000.00	96.73	298,179,700.00
Dinas Kesehatan + RSUD	1,696,068,467.00	1,293,825,634.00	76.28	1,183,615,800.00
Dinas Lingkungan Hidup	11,521,000.00	10,500,000.00	91.14	0.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,642,100.00	4,606,500.00	99.23	0.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	1,777,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	520,000.00
Jumlah	2,701,641,567.00	2,265,980,134.00	83.87	1,484,092,500.00

9. Belanja Modal Komputer

Tabel 5.2.79 Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,733,421,854.00	5,663,469,190.00	0.00	16,244,824,700.00
Dinas Kesehatan + RSUD	515,740,862.00	495,580,300.00	0.00	463,138,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,860,100.00	4,393,935.00	0.00	217,537,500.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	64,234,325.00	64,211,300.00	0.00	23,303,300.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,446,200.00	18,446,200.00	0.00	17,450,000.00
Dinas Perikanan	112,372,200.00	107,932,000.00	0.00	32,999,000.00
Dinas Perdagangan	54,520,400.00	53,230,000.00	97.63	32,003,000.00
Dinas Tenaga Kerja	26,786,681.00	26,681,600.00	99.61	83,517,000.00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	307,000,000.00	304,800,000.00	99.28	265,434,200.00
Satuan Polisi Pamong Praja	32,797,200.00	31,765,090.00	0.00	57,135,000.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22,905,000.00	22,850,000.00	0.00	0.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	40,280,000.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	221,753,000.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	0.00	0.00	0.00	37,750,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	79,960,650.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	388,710,804.00	388,273,360.00	99.89	166,686,941.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	49,669,250.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	49,658,200.00	49,500,000.00	99.68	53,108,750.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan	120,704,000.00	118,330,000.00	98.03	124,499,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,066,426,500.00	1,037,550,000.00	97.29	45,710,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	302,706,400.00	299,287,080.00	98.87	85,359,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	210,406,300.00	165,484,800.00	78.65	52,504,760.00
Dinas Perhubungan	281,804,888.00	281,538,000.00	99.91	944,882,000.00
Sekretariat Daerah	365,411,600.00	347,776,200.00	95.17	375,449,499.00
Sekretariat DPRD	196,520,338.00	188,006,200.00	95.67	69,369,000.00
Kecamatan Dumai Timur	18,568,400.00	18,564,750.00	99.98	9,198,750.00
Kecamatan Dumai Kota	84,332,700.00	84,082,000.00	99.70	119,934,900.00
Kecamatan Dumai Barat	68,115,500.00	67,106,250.00	0.00	54,004,700.00
Kecamatan Sungai Sembilan	26,692,200.00	26,530,000.00	0.00	21,544,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	0.00	0.00	0.00	196,999,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	95,306,650.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	92,840,000.00
Badan Pendapatan Daerah	723,565,700.00	672,798,848.00	92.98	279,056,800.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	567,015,064.00	545,959,060.00	96.29	274,650,000.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	124,128,000.00
Inspektorat	252,081,200.00	250,002,200.00	99.18	110,463,000.00
Jumlah	11,630,804,616.00	11,348,148,363.00	97.57	21,162,449,350.00

10. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Tabel 5.2.80 Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	430,000,000	425,077,985	98.86	0.00
Jumlah	430,000,000.00	425,077,984.74	98.86	0.00

11. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Tabel 5.2.81 Realisasi Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00

12. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Tabel 5.2.82 Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	3,553,200.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	10,162,446.00
Kecamatan Dumai Kota	0.00	0.00	0.00	187,000.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	14,652,646.00

13. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Tabel 5.2.83 Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0.00	0.00	0.00	2,612,930,185.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	2,612,930,185.00

14. Belanja Modal Rambu-Rambu

Tabel 5.2.84 Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	0.00	0.00	20,350,000.00
Dinas Perhubungan	300,114,000.00	299,832,986.49	99.91	5,004,571,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	99,750,500.00
Jumlah	300,114,000.00	299,832,986.49	99.91	5,124,671,500.00

15. Belanja Modal Peralatan Olahraga

Tabel 5.2.85 Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00

16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Tabel 5.2.86 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9,240,626,300.00	4,778,211,035.00	51.71	5,608,559,365.00
Jumlah	9,240,626,300.00	4,778,211,035.00	51.71	5,608,559,365.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp9.240.626.300,00, yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS senilai Rp4.778.211.035,00 ini merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp3.648.909.895,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri senilai Rp1.129.301.140,00.

Capaian Realisasi sebesar 51,71% disebabkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS untuk Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta tidak disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai karena Satuan Pendidikan Swasta merupakan Entitas diluar lingkup Entitas Pelaporan pada Pemerintah Kota Dumai

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagai berikut:

Tabel 5.2.87 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Sekolah Swasta Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	961,003,082.00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	463,952,510.00
Jumlah	1,424,955,592.00

17. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Tabel 5.2.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	13,770,107,348.00	13,304,342,896.00	96.62	2,438,387,543.00
Jumlah	13,770,107,348.00	13,304,342,896.00	96.62	2,438,387,543.00

Tabel 5.2.89 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16,445,594,378.00	11,878,159,249.00	72.23	23,534,984,540.00
Dinas Kesehatan + RSUD	42,709,280,850.00	40,273,414,207.00	94.30	32,999,989,478.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10,306,754,470.00	8,939,119,113.04	86.73	5,214,043,300.00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	115,477,450.00	112,872,300.00	97.74	251,194,300.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,254,741,800.00	6,165,692,300.00	98.58	2,639,083,750.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	133,319,250.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	106,098,000.00
Dinas Perdagangan	55,143,500.00	53,790,000.00	0.00	57,374,500.00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	0.00	0.00	63,930,000.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44,904,900.00	44,846,700.00	99.87	0.00
Dinas Tenaga Kerja	113,324,680.00	110,889,189.00	97.85	173,231,000.00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	568,600,000.00	563,500,000.00	99.10	461,948,500.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	428,570,304.00	428,017,213.00	99.87	229,594,041.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,277,943,500.00	3,104,521,000.00	94.71	100,710,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	334,706,400.00	330,922,080.00	98.87	605,726,500.00
Dinas Perikanan	211,863,600.00	190,702,000.00	90.01	504,272,800.00
Satuan Polisi Pamong Praja	39,149,600.00	37,216,892.00	95.06	58,605,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	5,317,192,100.00	5,161,356,000.00	97.07	711,187,762.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	757,800,000.00	744,330,000.00	98.22	369,223,000.00
Dinas Perhubungan	2,289,824,975.00	2,285,609,856.59	99.82	6,981,114,850.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	178,022,100.00	171,843,000.00	96.53	333,988,475.00
Sekretariat Daerah	4,411,893,736.00	4,329,621,162.00	98.14	2,205,938,949.00
Sekretariat DPRD	425,889,338.00	410,797,300.00	96.46	692,416,000.00
Kecamatan Dumai Barat	447,456,300.00	443,287,500.00	99.07	307,694,300.00
Kecamatan Dumai Timur	474,224,878.00	471,107,476.00	0.00	743,904,550.00
Kecamatan Bukit Kapur	152,516,320.00	131,709,809.00	86.36	587,456,170.00
Kecamatan Medang Kampai	49,718,072.00	49,640,000.00	99.84	693,288,600.00
Kecamatan Sungai Sembilan	37,931,000.00	37,700,000.00	99.39	257,877,800.00
Kecamatan Dumai Kota	784,490,910.00	767,105,000.00	97.78	810,695,030.00
Kecamatan Dumai Selatan	633,876,213.00	631,112,463.00	99.56	720,055,746.00
Badan Pendapatan Daerah	1,468,105,510.00	1,394,107,284.00	94.96	413,288,176.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	212,740,794.00	203,892,194.00	95.84	212,681,360.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,192,201,628.00	1,121,378,060.00	94.06	640,601,000.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	215,568,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Inspektorat	391,881,700.00	386,502,850.00	98.63	137,919,000.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	362,322,996.00	355,678,800.00	98.17	318,465,450.00
Jumlah	100,498,144,002.00	91,334,440,997.63	90.88	84,487,469,177.00

5.2.b.3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jumlah	104,485,105,586.00	87,322,813,477.02	83.57	52,685,031,521.31

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp104.485.105.586,00 dengan realisasi senilai Rp87.322.813.477,02 atau sebesar 83,57%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp34.637.781.955,71 atau sebesar 65,75% dari realisasi tahun lalu senilai Rp52.685.031.521,31

Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.90 Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	102.202.456.866.00	86.045.004.477.02	84.19	50.961.671.221.31
Belanja Modal Monumen	90.000.000.00	86.000.000.00	0.00	96.000.000.00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	700.000.000.00	699.435.000.00	99.92	794.463.300.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.492.648.720.00	492.374.000.00	32.99	832.897.000.00
Jumlah	104,485,105,586.00	87,322,813,477.02	83.57	52,685,031,521.31

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Tabel 5.2.91 Realisasi Belanja Modal Gedung Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,191,246,948.00	19,990,845,953.00	99.01	5,099,857,505.00
Dinas Kesehatan + RSUD	12,664,552,572.00	7,780,237,348.00	61.43	32,593,693,736.65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60,510,752,779.00	51,845,191,783.01	85.68	7,421,486,699.27
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0.00	0.00	0.00	210,142,000.00
Dinas Tenaga Kerja	49,990,400.00	49,990,265.00	100.00	0.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	0.00	0.00	445,696,000.00
Dinas Perhubungan	417,700,000.00	417,313,581.60	99.91	26,714,000.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4,227,574,399.00	2,072,600,806.73	49.03	2,656,715,498.63
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	0.00	0.00	199,178,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	214,589,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200,000,000.00	199,690,000.00	99.85	596,843,300.00
Dinas Perdagangan	3,400,000,000.00	3,149,243,739.68	92.62	0.00
Kecamatan Bukit Kapur	56,400,000.00	56,400,000.00	100.00	0.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0.00	0.00	0.00	99,000,000.00
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	119,940,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	111,248,728.00	111,073,000.00	99.84	198,970,000.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Sungai Sembilan	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	0.00	189,565,500.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	192,991,040.00	192,650,000.00	99.82	197,000,000.00
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	572,279,981.76
Inspektorat	180,000,000.00	179,768,000.00	99.87	0.00
Jumlah	102,202,456,866.00	86,045,004,477.02	84.19	50,961,671,221.31

2. Belanja Modal Monumen

Tabel 5.2.92 Realisasi Belanja Modal Monumen Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sekretariat Daerah	90,000,000.00	86,000,000.00	95.56	96,000,000.00
Jumlah	90,000,000.00	86,000,000.00	95.56	96,000,000.00

3. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tabel 5.2.93 Realiasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	400,000,000.00	399,755,000.00	99.94	117,452,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	0.00	0.00	313,130,300.00
Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	149,450,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	214,431,000.00
Kecamatan Dumai Kota	300,000,000.00	299,680,000.00	99.89	0.00
Jumlah	700,000,000.00	699,435,000.00	99.92	794,463,300.00

4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Tabel 5.2.94 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1,492,648,720.00	492,374,000.00	32.99	832,897,000.00
Jumlah	1,492,648,720.00	492,374,000.00	32.99	832,897,000.00

Tabel 5.2.95 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,191,246,948.00	19,990,845,953.00	99.01	5,099,857,505.00
Dinas Kesehatan + RSUD	14,557,201,292.00	8,672,366,348.00	59.57	33,544,042,736.65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60,510,752,779.00	51,845,191,783.01	85.68	7,421,486,699.27
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0.00	0.00	0.00	210,142,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	189,565,500.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0.00	0.00	0.00	445,696,000.00
Dinas Perdagangan	3,400,000,000.00	3,149,243,739.68	0.00	0.00
Dinas Tenaga Kerja	49,990,400.00	49,990,265.00	100.00	0.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0.00	0.00	0.00	99,000,000.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	0.00	0.00	199,178,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	429,020,000.00

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	417,700,000.00	417,313,581.60	99.91	176,164,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200,000,000.00	199,690,000.00	99.85	909,973,600.00
Sekretariat Daerah	90,000,000.00	86,000,000.00	95.56	96,000,000.00
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	119,940,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	56,400,000.00	56,400,000.00	100.00	0.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
Kecamatan Dumai Kota	300,000,000.00	299,680,000.00	99.89	0.00
Kecamatan Dumai Selatan	111,248,728.00	111,073,000.00	99.84	198,970,000.00
Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	572,279,981.76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	192,991,040.00	192,650,000.00	99.82	197,000,000.00
Inspektorat	180,000,000.00	179,768,000.00	99.87	0.00
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4,227,574,399.00	2,072,600,806.73	49.03	2,656,715,498.63
Jumlah	104,485,105,586.00	87,322,813,477.02	83.57	52,685,031,521.31

5.2.b.4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Jumlah	90,178,025,211.00	73,340,485,070.99	81.33	56,397,085,845.08

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp90.178.025.211,00 dengan realisasi senilai Rp73.340.485.070,99 atau sebesar 81,33%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp16.943.399.225,91 atau sebesar 30,04% dari realisasi tahun lalu senilai Rp56.397.085.845,08

Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.96 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	56,892,393,902.00	45,936,016,531.14	80.74	34,933,495,062.25
Belanja Modal Bangunan Air	20,031,102,686.00	14,836,016,725.54	74.06	8,633,477,051.88
Belanja Modal Instalasi	570,000,000.00	568,692,000.00	99.77	5,558,571,775.98
Belanja Modal Jaringan	11,570,400,223.00	11,385,631,414.31	0.00	6,094,030,954.97
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1,114,128,400.00	614,128,400.00	55.12	1,177,511,000.00
Jumlah	90,178,025,211.00	73,340,485,070.99	81.33	56,397,085,845.08

Rincian Belanja Bangunan dan Gedung per akun SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Tabel 5.2.97 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	199,950,000.00	199,815,000.00	99.93	213,844,000.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,709,548,962.00	40,038,465,618.70	78.96	21,687,983,627.25
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,553,765,000.00	2,291,420,000.00	89.73	185,854,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	195,800,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	103,103,640.00	103,016,000.00	99.91	992,578,435.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	89,191,000.00
Dinas Perhubungan	900,000,000.00	885,000,586.00	98.33	198,650,000.00
Jumlah	1,653,658,602.00	1,488,330,604.70	90.00	1,676,966,512.25

	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	197,268,000.00	189,541,026.44	96.08	698,414,000.00
Kecamatan Dumai Barat	161,213,300.00	161,213,300.00	100.00	1,090,250,000.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	1,734,570,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	587,530,000.00	587,530,000.00	100.00	1,693,000,000.00
Kecamatan Medang Kampai	340,015,000.00	340,015,000.00	100.00	1,552,000,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	100.00	2,473,000,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	2,128,360,000.00
Jumlah	56,892,393,902.00	45,936,016,531.14	80.74	34,933,495,062.25

2. Belanja Modal Bangunan Air

Tabel 5.2.98 Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18,469,258,422.00	13,276,559,725.54	71.88	4,391,617,051.88
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	977,638,000.00	975,580,000.00	99.79	0.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	185,006,264.00	184,889,000.00	99.94	0.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	209,200,000.00	208,988,000.00	0.00	0.00
Kecamatan Bukit Kapur	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00	1,227,000,000.00
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	883,560,000.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	382,500,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	940,000,000.00
Kecamatan Dumai Kota	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	592,800,000.00
Jumlah	20,031,102,686.00	14,836,016,725.54	74.06	8,633,477,051.88

3. Belanja Modal Instalasi

Tabel 5.2.99 Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	370,000,000.00	368,904,000.00	99.70	2,224,651,633.13
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.00	0.00	0.00	1,915,295,142.85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	199,937,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	200,000,000.00	199,788,000.00	99.89	999,121,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	219,567,000.00
Jumlah	570,000,000.00	568,692,000.00	99.77	5,558,571,775.98

4. Belanja Modal Jaringan

Tabel 5.2.100 Realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	100,000,000.00	99,822,200.00	99.82	0.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11,466,077,300.00	11,283,091,214.31	98.40	5,974,030,954.97
Sekretariat Daerah	4,322,923.00	2,718,000.00	62.87	0.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
Jumlah	11,570,400,223.00	11,385,631,414.31	98.40	6,094,030,954.97

5. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD

Tabel 5.2.101 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1,114,128,400.00	614,128,400.00	55.12	1,177,511,000.00
Jumlah	1,114,128,400.00	614,128,400.00	55.12	1,177,511,000.00

Rincian Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.102 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	1,784,078,400.00	1,282,669,600.00	71.90	3,616,006,633.13
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,644,884,684.00	64,598,116,558.55	80.10	33,968,926,776.95
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3,531,403,000.00	3,267,000,000.00	92.51	185,854,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	0.00	0.00	395,737,000.00
Dinas Perhubungan	900,000,000.00	885,000,586.00	98.33	198,650,000.00
Sekretariat Daerah	4,322,923.00	2,718,000.00	62.87	0.00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	406,468,000.00	398,529,026.44	98.05	698,414,000.00
Dinas Perikanan	0.00	0.00	0.00	219,567,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	488,109,904.00	487,693,000.00	99.91	1,991,699,435.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	0.00	0.00	89,191,000.00
Kecamatan Dumai Barat	161,213,300.00	161,213,300.00	100.00	1,973,810,000.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	0.00	0.00	2,117,070,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	777,530,000.00	777,530,000.00	100.00	2,920,000,000.00
Kecamatan Medang Kampai	340,015,000.00	340,015,000.00	100.00	2,264,800,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	100.00	2,473,000,000.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	0.00	0.00	3,068,360,000.00
Kecamatan Dumai Kota	0.00	0.00	0.00	216,000,000.00
Jumlah	90,178,025,211.00	73,340,485,070.99	81.33	56,397,085,845.08

5.2.b.5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	7,628,959,068.00	4,669,915,366.00	61.21	6,231,743,208.00

Belanja Aset Tetap Lainnya Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp7.628.959.068,00 dengan realisasi senilai Rp4.669.915.366,00 atau sebesar 61,21%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp1.561.827.842,00 atau sebesar 25,06% dari realisasi tahun lalu senilai Rp6.231.743.208,00

Belanja Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.103 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	375,000,000.00	374,536,160.00	99.88	99,594,000.00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	39,829,500.00	39,822,562.00	99.98	130,184,700.00
Belanja Modal Hewan	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	471,425,368.00	468,715,500.00	99.43	260,116,900.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6,517,704,200.00	3,786,841,144.00	58.10	5,186,987,700.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0.00	0.00	0.00	554,859,908.00
Jumlah	7,628,959,068.00	4,669,915,366.00	61.21	6,231,743,208.00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per akun SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Tabel 5.2.104 Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	375,000,000.00	374,536,160.00	99.88	99,594,000.00
Jumlah	375,000,000.00	374,536,160.00	99.88	99,594,000.00

2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Tabel 5.2.105 Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Kecamatan Bukit Kapur	29,782,500.00	29,782,500.00	100.00	0.00
Kecamatan Sungai Sembilan	10,047,000.00	10,040,062.00	99.93	100,184,700.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Jumlah	39,829,500.00	39,822,562.00	99.98	130,184,700.00

3. Belanja Modal Hewan

Tabel 5.2.106 Realisasi Belanja Modal Hewan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00

4. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.2.107 Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Perhubungan	290,000,000.00	289,450,500.00	99.81	199,595,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	116,425,368.00	114,663,000.00	98.49	51,725,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0.00	0.00	0.00	8,796,900.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65,000,000.00	64,602,000.00	99.39	0.00
Jumlah	471,425,368.00	468,715,500.00	99.43	260,116,900.00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS

Tabel 5.2.108 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6,517,704,200.00	3,786,841,144.00	58.10	5,186,987,700.00
Jumlah	6,517,704,200.00	3,786,841,144.00	58.10	5,186,987,700.00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp6.517.704.200,00, yang terdiri dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS untuk Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta.

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-BOS senilai Rp3.786.841.144,00 ini merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp2.489.982.269,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Senilai Rp1.296.858.875,00.

Sedangkan untuk Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - BOS untuk Satuan Pendidikan Swasta adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.109 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Sekolah Swasta Tahun 2022

Uraian	Realisasi
Sekolah Dasar Swasta	568,288,200.00
Sekolah Menengah Pertama Swasta	248,656,200.00
Jumlah	816,944,400.00

6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD

Tabel 5.2.110 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BLUD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Kesehatan + RSUD	0.00	0.00	0.00	554,859,908.00
Jumlah	0.00	0.00	0.00	554,859,908.00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.111 Realisasi Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6,517,704,200.00	3,786,841,144.00	58.10	5,186,987,700.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65,000,000.00	64,602,000.00	99.39	0.00
Dinas Kesehatan + RSUD	0.00	0.00	0.00	554,859,908.00
Dinas Perhubungan	665,000,000.00	663,986,660.00	99.85	199,595,000.00
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	116,425,368.00	114,663,000.00	98.49	51,725,000.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	225,000,000.00	0.00	0.00	8,796,900.00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0.00	0.00	0.00	99,594,000.00
Kecamatan Dumai Barat	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Kecamatan Medang Kampai	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	10,047,000.00	10,040,062.00	99.93	100,184,700.00
Kecamatan Bukit Kapur	29,782,500.00	29,782,500.00	100.00	0.00
Jumlah	7,628,959,068.00	4,669,915,366.00	61.21	6,231,743,208.00

5.2.c Belanja Tidak Terduga

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	292,485,131.00	260,289,017.00	88.99	9,056,476,757.00

Belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah. Belanja Tak Terduga juga dianggarkan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, antara lain pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Tidak Terduga Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp292.485.131,00 dengan realisasi senilai Rp260.289.017,00 atau sebesar 88,99%, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp8.796.187.740,00 atau sebesar 97,13% dari realisasi tahun lalu senilai Rp9.056.476.757,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.2.112 Realisasi Belanja Tidak Terduga per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	260,289,017.00	9,056,476,757.00
Jumlah		260,289,017.00	9,056,476,757.00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.2.113 Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2022

No	Uraian	Realisasi
1.	Pengembalian Bankeu Tahun Anggaran 2019	35,680,898.00
2.	Pengembalian Dana Bos Tahun Anggaran 2011	197,137,500.00
3.	Pengembalian Kelebihan Bayar PBB	5,617,619.00
4.	Pengembalian Kelebihan Bayar BPHTB	21,853,000.00
Jumlah		260,289,017.00

Surplus/(Defisit)

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
(246,877,562,566.00)	(136,843,166,692.81)	55.43	(27,284,574,632.09)

Surplus terjadi apabila realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah dan sebaliknya terjadi defisit. Pada Tahun 2022 Kota Dumai menganggarkan defisit senilai Rp246.877.562.566,00 dengan realisasi defisit senilai Rp136.843.166.692,81 atau sebesar 55,43%, jika dibandingkan dengan realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp109.558.592.060,72 atau sebesar 401,54% dari realisasi tahun lalu defisit senilai Rp27.284.574.632,09

5.3 PEMBIAYAAN

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
275,730,748,879.25	262,260,776,307.14	95.11	195,481,309,973.34

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp275.730.748.879,25 dengan realisasi senilai Rp262.260.776.307,14 atau sebesar 95,11%. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp66.779.466.333,80 atau sebesar 34,16% dari realisasi tahun lalu senilai Rp195.481.309.973,34

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	168,196,735,341.25	168,196,735,341.25	100.00	195,481,309,973.34
Penerimaan Pinjaman Daerah	107,534,013,538.00	94,060,540,965.89	87.47	0.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
Jumlah	275,730,748,879.25	262,260,776,307.14	95.11	195,481,309,973.34

5.3.1.a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
168,196,735,341.25	168,196,735,341.25	100.00	195,481,309,973.34

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp168.196.735.341,25 dengan realisasi senilai Rp168.196.735.341,25 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021 mengalami penurunan senilai Rp27.284.574.632,09 atau sebesar 13,96% dari realisasi tahun lalu senilai Rp195.481.309.973,34

Tabel 5.3.4 Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34,033,697,264.80	34,033,697,264.80	100.00	195,481,309,973.17
Penghematan Belanja	107,404,824,529.58	107,404,824,529.58	100.00	0.00
Sisa Belanja Lainnya	26,758,213,546.87	26,758,213,546.87	100.00	0.17
Jumlah	168,196,735,341.25	168,196,735,341.25	100.00	195,481,309,973.34

5.3.1.b Penerimaan Pinjaman Daerah

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
107,534,013,538.00	94,060,540,965.89	87.47	0.00

Penerimaan Pinjaman Daerah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp107.534.013.538,00 dengan realisasi senilai Rp94.060.540.965,89 atau sebesar 87,47%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp94.060.540.965,89 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp0,00

Tabel 5.3.5 Penerimaan Pinjaman Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	107,534,013,538.00	94,060,540,965.89	87.47	0.00
Jumlah	107,534,013,538.00	94,060,540,965.89	87.47	0.00

Sesuai Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah antara PT. BPD Riau Kepri dan Pemerintah Kota Dumai dengan Perjanjian Nomor 12 Tanggal 08 Juni 2022 dihadapan Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn dan Surat dari PT. BPD Riau Kepri Nomor 40/KR.02/DMI/2023 Tanggal 21 Februari 2023 perihal Konfirmasi Hutang/Pinjaman Daerah, Pemerintah Kota Dumai mendapat fasilitas plafond pinjaman senilai Rp107.534.013.538,00. Selama Tahun 2022 realisasi Penerimaan Dana Pinjaman tersebut senilai Rp94.060.540.965,89.

5.3.1.c Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Tahun 2022			Tahun 2021
Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
0.00	3,500,000.00	100.00	0.00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp0,00 dengan realisasi senilai Rp3.500.000,00 atau sebesar 100,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.500.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp0,00

Tabel 5.3.6 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	0.00	3,500,000.00	100.00	0.00
Jumlah	0.00	3,500,000.00	100.00	0.00

Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Koperasi merupakan pembayaran atas pinjaman modal kerja oleh Koperasi Puteri Tujuh kepada Pemerintah Kota Dumai. Pada Tahun 2022 terdapat pelunasan sebesar Rp3.500.000,00. Penjelasan lebih lanjut terkait pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Koperasi Puteri Tujuh dijelaskan pada akun Investasi Non Permanen pada Neraca Pemerintah Kota Dumai.

5.3.2 Pengeluaran

Tahun 2022	Tahun 2021
------------	------------

Pembiayaan

Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00	0.00

Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00	0.00

5.3.2.a Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00	0.00

Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Kota Dumai Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp18.000.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%,. Bila dibandingkan dengan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari realisasi tahun lalu senilai Rp0,00

Besaran pembayaran cicilan pokok utang ditetapkan Sesuai Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah antara PT. BPD Riau Kepri dan Pemerintah Kota Dumai dengan Perjanjian Nomor 12 Tanggal 08 Juni 2022 dihadapan Notaris - PPAT Firman, S.H., M.Kn dan Surat dari PT. BPD Riau Kepri Nomor 40/KR.02/DMI/2023 Tanggal 21 Februari 2023 perihal Konfirmasi Hutang/Pinjaman Daerah.

Pembayaran atas cicilan pokok utang tersebut diajukan pada tanggal 26 Desember 2022 dengan SPM Nomor 0164/SPM/LS dan dicairkan pada tanggal 30 Desember 2022 melalui SP2D LS dengan nomor 04445/SP2D/LS.

Tabel 5.3.8 Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00	0.00
Jumlah	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00	0.00

Pembiayaan Neto

Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	257,730,748,879.25	244,260,776,307.14	94.77	195,481,309,973.34

Pembiayaan Neto Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp257.730.748.879,25 dengan realisasi senilai Rp244.260.776.307,14 atau sebesar 94,77%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 Pembiayaan Neto mengalami kenaikan senilai Rp48.779.466.333,80 atau sebesar 24,95% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	Tahun 2022			Tahun 2021
	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi
	10,853,186,313.25	107,417,609,614.33	989.73	168,196,735,341.25

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dianggarkan senilai Rp10.853.186.313,25 dengan realisasi senilai Rp107.417.609.614,33 atau sebesar 989,73%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan senilai Rp60.779.125.726,92 atau sebesar 36,14% jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai Rp168.196.735.341,25

Rincian SiLPA terikat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.9 Rincian SiLPA Terikat Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Dana Alokasi Khusus Penugasan 2019 bidang Pasar	606,615,802.00
Tunjangan Profesi Guru 2022	4,748,433,600.00
Tambahan Penghasilan Guru 2022	86,250,000.00
DID Kinerja Tahun Berjalan	14,608,867,785.00
Dana Insentif Daerah Tambahan 2020	1,242,495.00
Sisa Bantuan Keuangan 2022	102,160,723.00
Dana Alokasi Khusus 2022	141,623,000.99
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi 2022	12,554,535,313.37
Bantuan Operasional Kesehatan	1,554,848,059.00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	466,460,797.00
Usaha Kecil Menengah	417,358,000.00
Jumlah	35,288,395,575.36

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3.10 Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2022

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	64,077,200,180.96
Kas di Bendahara Pengeluaran	59,414,185.00
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00
Kas di BLUD	7,902,462,768.01
Kas BOS	90,136,905.00
Jumlah	72,129,214,038.97

Total SiLPA (Subtotal 1 + Subtotal 2)	107,417,609,614.33
--	---------------------------



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.4.a SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL

Realisasi 2022	Realisasi 2021
168,196,735,341.25	195,481,309,973.17

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah senilai Rp168.196.735.341,25.

5.4.a.1) PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN

Realisasi 2022	Realisasi 2021
168,196,735,341.25	195,481,309,973.34

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, yaitu senilai Rp168.196.735.341,25.

5.4.a.2) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)

Realisasi 2022	Realisasi 2021
107,417,609,614.33	168,196,735,341.25

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Dumai pada Tahun 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp107.417.595.429,33 yang diperoleh dari:

Uraian	Jumlah
Pendapatan	1,370,198,448,465.86
Belanja	1,507,041,615,158.67
Surplus/defisit	(136,843,166,692.81)
Penerimaan Pembiayaan	262,260,776,307.14
Penggunaan SAL	168,196,735,341.25
Penerimaan Pinjaman Daerah	94,060,540,965.89
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,500,000.00
Pengeluaran Pengeluaran	18,000,000,000.00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	244,260,776,307.14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	107,417,609,614.33

Rincian SiLPA terikat Tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Dana alokasi khusus Penugasan 2019 bidang pasar	606,615,802.00
Tunjangan Profesi Guru 2022	4,748,433,600.00
Tambahan Penghasilan Guru 2022	86,250,000.00
DID Kinerja Tahun Berjalan	14,608,867,785.00
Dana Insentif Daerah Tambahan 2020	1,242,495.00
Sisa Bantuan Keuangan 2022	102,160,723.00
Dana Alokasi Khusus 2022	141,623,000.99
Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi 2022	12,554,535,313.37
Bantuan Operasional Kesehatan	1,554,848,059.00
Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana	466,460,797.00
Usaha Kecil Menengah	417,358,000.00
Subtotal (1)	35,288,395,575.36

Rincian SiLPA Tidak Terikat Tahun 2022

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	64,077,200,180.96
Kas di Bendahara Pengeluaran	59,414,185.00
Kas di Bendahara Penerimaan	-
Kas di BLUD	7,902,462,768.01
Kas BOS	90,136,905.00
Subtotal (2)	72,129,214,038.97

Total SiLPA (Subtotal 1 + Subtotal 2)	107,417,609,614.33
---	---------------------------

5.4.a.3) KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA

Realisasi 2022	Realisasi 2021
0.00	0.17

Tidak ada Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2022

5.4.a.4) LAIN-LAIN

Realisasi 2022	Realisasi 2021
0.00	0.00

Tidak ada Koreksi Lain-lain Tahun 2022

5.4.b) SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Realisasi 2022	Realisasi 2021
107,417,609,614.33	168,196,735,341.25

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp107.417.595.429,33 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp168.196.735.341,25 maka mengalami penurunan senilai Rp60.779.139.911,92 atau sebesar 36,14%.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

1. Aset

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
3,107,562,211,336.55	3,089,664,538,438.08	17,897,672,898.47	0.58

Aset pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp3.107.562.211.336,55 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.089.664.538.438,08 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.897.672.898,47 atau sebesar 0,58%. Aset pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Rincian Aset

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Aset lancar	241,211,681,784.30	331,951,342,135.39	(90,739,660,351.09)	(27.34)
2	Investasi Jangka Panjang	51,088,523,186.33	58,002,848,837.39	(6,914,325,651.06)	(11.92)
3	Aset Tetap	2,769,498,572,429.53	2,679,041,994,881.42	90,456,577,548.11	3.38
5	Aset Lainnya	45,763,433,936.39	20,668,352,583.88	25,095,081,352.51	121.42
TOTAL		3,107,562,211,336.55	3,089,664,538,438.08	17,897,672,898.47	0.58

a. Aset Lancar

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
241,211,681,784.30	331,951,342,135.39	(90,739,660,351.09)	(27.34)

Aset Lancar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp241.211.681.784,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp331.951.342.135,39 maka mengalami penurunan senilai Rp90.739.660.351,09 atau sebesar 27,34%.

Aset Lancar Kota Dumai Tahun 2022 terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD - RSUD, Kas di Bendahara BOS, Kas Lainnya, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Persediaan, dan Beban dibayar dimuka dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.2 Rincian Aset Lancar

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Kas Di Kas Daerah	99,365,595,756.32	141,438,187,794.38	(42,072,592,038.06)	(29.75)
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	60,277,437.00	334,000.00	59,943,437.00	17,947.14
4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	7,902,462,768.01	26,691,058,326.87	(18,788,595,558.86)	(70.39)
5	Kas Di Bendahara BOS	115,792,949.51	68,938,982.00	46,853,967.51	67.96
6	Kas Lainnya	295,262,912.00	168,578,067.00	126,684,845.00	75.15
7	Piutang Pajak Daerah	123,461,182,102.15	119,990,864,839.45	3,470,317,262.70	2.89
8	Piutang Retribusi	1,938,872,529.09	1,906,918,879.09	31,953,650.00	1.68
9	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29,085,651,138.52	71,665,920,927.79	(42,580,269,789.27)	(59.41)
10	Piutang Transfer - DBH Provinsi	29,390,520,807.00	9,656,723,625.00	19,733,797,182.00	204.35
11	Penyisihan Piutang	(83,863,366,847.86)	(90,643,237,451.68)	6,779,870,603.82	(7.48)
12	Persediaan	33,459,430,232.56	50,892,554,145.49	(17,433,123,912.93)	(34.25)
13	Beban Dibayar Dimuka	0.00	114,500,000.00	(114,500,000.00)	(100.00)
Total		241,211,681,784.30	331,951,342,135.39	(90,739,660,351.09)	(27.34)

1) Kas Di Kas Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
99,365,595,756.32	141,438,187,794.38	(42,072,592,038.06)	(29.75)

Kas di Kas Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 disajikan senilai Rp99.365.595.756,32 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp141.438.187.794,38 maka mengalami penurunan senilai Rp42.072.592.038,06 atau sebesar 29,75%. Untuk rincian nilai Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kas di Bank

Tabel 5.5.3 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
GIRO					
1.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.110.92	99,365,595,755.32	141,438,187,794.38	(42,072,592,039.06)
No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
2.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.111.09	0.00	0.00	0.00
3.	Bank Riau Kepri Cabang Dumai	104.02.000.90	0.00	0.00	0.00

4.	Bank Syariah Indonesia	7038923522	1.00	0.00	1.00
5.	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	015901001396302	0.00	0.00	0.00
Jumlah			99,365,595,756.32	141,438,187,794.38	(42,072,592,038.06)

Sebagai tambahan informasi jika dibandingkan Kas di Kasda pada Neraca dengan Rekening Koran Kas Umum Daerah terdapat perbedaan sebagai berikut:

Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai (Rek 7038923522) terdapat perbedaan senilai Rp1,00 yang disebabkan adanya kekurangan pembayaran pajak bunga yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2022, tetapi sudah dibayar oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai ditahun berikutnya pada Tanggal 02 Februari 2023.

2. Deposito

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
	Deposito Bank Riau Kepri	Nomor 900/172/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 8 Agustus 2022	0.00	0.00	0.00
	Deposito Bank Riau Kepri	Nomor 900/249/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 22 November 2022	0.00	0.00	0.00
	Deposito BNI	Nomor 900/248/BPKAD-PERBEN Tanggal 21	0.00	0.00	0.00
	Deposito BSI	Nomor 900/248/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal	0.00	0.00	0.00
	Deposito BRI	Nomor 900/246/BPKAD-PERBEN Tanggal 21	0.00	0.00	0.00
	Deposito Mandiri	Nomor 900/245/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022	0.00	0.00	0.00
Jumlah			0.00	0.00	0.00

Saldo Deposito Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp0,00, seluruh Deposito telah ditutup dan dicairkan ke kas Daerah pada tahun berjalan. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang saldo Deposito adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.4 Rincian Deposito

No	Nama Bank	Saldo 2021	Saldo 2022		Saldo Akhir 2022
			Tambah	Kurang	
1	Deposito Bank Riau Kepri	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
2	Deposito Bank Riau Kepri	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
3	Deposito Bank BRI	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0.00
4	Deposito BSI	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
5	Deposito BNI	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00
6	Deposito Mandiri	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	0.00
Jumlah		0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	0.00

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 membuka beberapa deposito terhadap uang yang siap digunakan (*idle money*) pada bank yang berbeda untuk meningkatkan PAD Kota Dumai. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa deposito dan/atau investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat per 31 Desember. Pemerintah Kota Dumai telah mencairkan seluruh Deposito ke Rekening Kas Daerah. Untuk perhitungan nilai bunga deposito, ketentuan perjanjian antara Kuasa BUD dan pihak Bank adalah setara RUPS dengan masa berlakunya setiap 1 bulan yang diperpanjang secara otomatis, kecuali perjanjian akan diberhentikan. Adapun rincian redaksi nomor perjanjian deposito per Bank yaitu:

- Bank Riau Kepri Cabang Dumai
Bank Riau Kepri Cabang Dumai Nomor: 900/172/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 8 Agustus 2022 dan Nomor : 900/249/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 22 November 2022.
- Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai
Bank Negara Indonesia Nomor: 900/248/BPKAD-PERBEN Tanggal 21 November 2022
- Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai
Bank Syariah Indonesia Cabang Dumai Nomor:900/248/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022.
- Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Dumai
Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Cabang Dumai Nomor: 900/246/BPKAD-PERBEN Tanggal 21 November 2022
- Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Dumai
Bank Mandiri Persero, Tbk Cabang Dumai Nomor: 900/245/BPKAD-PERBEN/2022 Tanggal 21 November 2022

2) Kas Di Bendahara Penerimaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)

Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
0.00	0.00	0.00	0.00

Saldo Kas pada Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 disajikan senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka tidak mengalami perubahan.

3) Kas Di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
60,277,437.00	334,000.00	59,943,437.00	17,947.14

Akun ini merupakan saldo Kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan pada Tahun 2022, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2022 senilai Rp60.277.437,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, maka mengalami kenaikan senilai Rp59.943.437,00 atau sebesar 17.947,14%.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada SKPD dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp59.400.000,00 merupakan Koreksi oleh Bank Riau atas Pengembalian Dana / Kontrapos belanja hibah bantuan UMKM pada Dinas Koperasi UMKM yang belum terposting ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2022, tetapi sudah diposting oleh Bank Riau di tahun berikutnya pada Tanggal 06 Januari 2023 ke Kasda.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp877.437,00 merupakan saldo kas yang berasal dari Pajak Pusat dan kelebihan pembayaran belanja tagihan listrik yang belum disetor per 31 Desember 2022 dan telah disetor di Tahun 2023. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sebagai berikut:

Tabel 5.5.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	PPH Pasal 21	PPH Pasal 22	Tanggal Setor
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574,500.00	PPH Pasal 22	10 Januari 2023
2	Kecamatan Dumai Barat	288,702.00	PPH Pasal 22	20 Februari 2023
3	Kecamatan Dumai Selatan	50.00	PPH Pasal 21	03 Maret 2023
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14,185.00	Kelebihan Pembayaran Belanja Tagihan Listrik	03 Februari 2023
5	Dinas Koperasi UMKM	59,400,000.00	Kekurangan setor pengembalian Dana Bansos thn 2022	06 Januari 2023
Total		60,277,437.00		

4) Kas Di Badan Layanan Umum Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
7,902,462,768.01	26,691,058,326.87	(18,788,595,558.86)	(70.39)

Kas di Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp7.902.462.768,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp26.691.058.326,87 maka mengalami penurunan senilai Rp18.788.595.558,86 atau sebesar 70,39%.

Kas di BLUD tersebut dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD - RSUD dan BLUD - Puskesmas Kota Dumai tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara Umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 380/RSUD/2009 tentang Penetapan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 30 Desember 2009.

Kebijakan akuntansi untuk BLUD pada RSUD maupun Puskesmas mengacu pada Perwako Dumai Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai, sedangkan Perwako Dumai Nomor 18 Tahun 2016 tidak digunakan. Rincian saldo Kas di masing-masing BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.5.6 Rincian Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah Lainnya

No	Rekening Bank	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan / (Penurunan) Kas di Bank	
A. BLUD RSUD					
1	Bank Riau Kepri (Bend. Pengeluaran BLUD)	10-40-20014-3	5,697,255,079.76	23,906,808,068.76	(18,209,552,989.00)
2	Bank Riau Kepri (Bend. Penerimaan BLUD)	10-4020013-9	71,030,180.67	35,766,653.67	35,263,527.00
3	BRI Bend. Penerimaan BLUD	015901001671304	69,159.00	69,015.00	144.00
4	BSM Bend. Pengeluaran BLUD	05.700.72227/9009048787	0.00	0.00	0.00
5	BSI Bend. Penerimaan BLUD	05.700.68663/7009045796	40,991,048.65	41,561,048.65	(570,000.00)
B. BLUD PUSKESMAS:					
Kas di Bank					
6	BSI Bend. Penerimaan BLUD	05.700.69950/7009046849	405,520,224.01	405,628,624.01	(108,400.00)
7	Kas Bendahara Penerimaan BLUD		20,776,593.00	17,736,409.00	3,040,184.00
Kas BLUD RSUD			6,235,642,285.09	24,407,569,819.09	(18,171,927,534.00)
B					
BLUD PUSKESMAS:					
Kas di Bank					
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	172-00-0018560-5	144,243,934.68	253,850,408.04	(109,606,473.36)

2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	172-00-0018559-7	88,049,705.77	110,288,663.34	(22,238,957.57)
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	172-00-0018567-0	56,516,541.54	236,041,280.94	(179,524,739.40)
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	172-00-0018565-4	76,421,291.72	197,753,644.27	(121,332,352.55)
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	172-00-0018566-2	81,604,334.44	84,861,847.65	(3,257,513.21)
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	172-00-0018562-1	387,939,930.42	372,706,909.63	15,233,020.79
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	172-00-0018563-9	37,842,389.07	62,390,972.75	(24,548,583.68)
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	172-00-0018561-3	445,603,321.82	243,204,164.81	202,399,157.01
9	BLUD Puskesmas Purnama	172-00-0018564-7	48,082,256.72	112,072,170.16	(63,989,913.44)
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	172-00-0027962-2	237,976,533.74	489,594,996.19	(251,618,462.45)
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A	10-40-20117-7	62,445,243.00	120,723,450.00	(58,278,207.00)
Kas BLUD Puskesmas			1,666,725,482.92	2,283,488,507.78	(616,763,024.86)
Kas Tunai:					
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota		0.00	0.00	0.00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat		95,000.00	0.00	95,000.00
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur		0.00	0.00	0.00
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan		0.00	0.00	0.00
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai		0.00	0.00	0.00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu		0.00	0.00	0.00
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah		0.00	0.00	0.00
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti		0.00	0.00	0.00
9	BLUD Puskesmas Purnama		0.00	0.00	0.00
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur		0.00	0.00	0.00
11	UPT. Laboratorium Ari Bersih Kelas A		0.00	0.00	0.00
Jumlah Kas BLUD Puskesmas			1,666,820,482.92	2,283,488,507.78	(616,668,024.86)
JUMLAH KAS BLUD			7,902,462,768.01	26,691,058,326.87	(18,788,595,558.86)

5) Kas Di Bendahara BOS

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
115,792,949.51	68,938,982.00	46,853,967.51	67.96

Nilai akhir Kas di Bendahara BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp115.792.949,51 yang merupakan sisa Kas yang berada pada Bendahara Pengelola Dana BOS pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS dari masing-masing sekolah negeri pada Dinas Pendidikan Kota Dumai. Nilai Kas di Bendahara BOS mengalami peningkatan senilai Rp46.853.967,51 atau sebesar 67,96% dibandingkan Tahun 2021 yaitu senilai Rp68.938.982,00.

Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 menerima Dana BOS dengan 2 (dua) jenis yaitu BOS Reguler dan BOS Kinerja. Penerimaan dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022, serta Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28/P/2022 Tentang Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat PAUD senilai Rp610.000,00 (Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per satu peserta didik setiap satu tahun;
2. Tingkat SD senilai Rp910.000,00 (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) per satu peserta didik setiap satu tahun; dan
3. Tingkat SMP senilai Rp1.120.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per satu peserta didik setiap satu tahun.

Dalam mengelola Dana BOS, tiap sekolah tidak menggunakan sistem panjar, karena uang masuk per tahap dari Pusat ke rekening sekolah. Adapun penjelasan atas rincian saldo Kas Bendahara BOS senilai Rp115.792.949,51 sebagai berikut:

Tabel 5.5.7 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS

No	Keterangan	Saldo Kas BOS			Total
		Bank	Tunai		
			Bendahara Bos	Utang PFK	
1	BOS SD	73,360,784.00	0.00	24,757,918.51	98,118,702.51
2	BOS SMP	16,786,109.00	12,000.00	876,138.00	17,674,247.00
Jumlah		90,146,893.00	12,000.00	25,634,056.51	115,792,949.51

Saldo Kas di Bendahara BOS senilai Rp115.792.949,51, yang terdiri dari saldo Kas tunai senilai Rp25.646.056,51 dan saldo Kas di Bank senilai Rp90.146.893,00. Saldo Kas Tunai Senilai Rp25.634.056,51 merupakan Utang Pajak pada BOS Sekolah Dasar

Negeri dan BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri yang disetor di Tahun Anggaran 2023. Saldo Kas di Bendahara BOS di Bank terdiri dari Saldo Bos Reguler senilai Rp90.146.893,00 dan Saldo Bos Kinerja senilai Rp0,00.

Tabel 5.5.8 Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS Tahun 2022

NO	Keterangan	Saldo Kas			Total
		Tunai	Bank		
			Bos Reguler	Bos Kinerja	
1	BOS SD	24,757,918.51	73,360,784.00	0.00	98,118,702.51
2	BOS SMP	888,138.00	16,786,109.00	0.00	17,674,247.00
	TOTAL	25,646,056.51	90,146,893.00	0.00	115,792,949.51

Untuk rincian Kas di Bendahara BOS SD dapat dilihat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3 untuk Kas di Bendahara BOS SMP.

6) Kas lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
295,262,912.00	168,578,067.00	126,684,845.00	75.15

Saldo Kas Lainnya Tahun 2022 senilai Rp295.262.912,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 pada rekening Penerimaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 834 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang digunakan sebagai uang jaminan bongkar atas pajak reklame. Uang jaminan bongkar tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2020 akan menjadi hak Pemerintah Kota Dumai jika penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk rincian Kas lainnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

7) Piutang Pajak Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
123,461,182,102.15	119,990,864,839.45	3,470,317,262.70	2.89

Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp123.461.182.102,15 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp119.990.864.839,45 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.470.317.262,70 atau sebesar 2,89%. Rekapitulasi Piutang Pendapatan Pajak dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran 5 dan 7.

Akun Piutang Pajak Daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Daerah termasuk atas tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.9 Rincian Piutang Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Piutang Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	
				Rp	%
1	Piutang Pajak Hotel	598,487,121.00	426,474,376.00	172,012,745.00	40.33
2	Piutang Pajak Restoran	2,290,011,349.26	1,939,590,078.26	350,421,271.00	18.07
3	Piutang Pajak Hiburan	1,128,675,372.00	1,108,745,939.00	19,929,433.00	1.80
4	Piutang Pajak Reklame	875,696,586.00	673,674,710.00	202,021,876.00	29.99
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	638,416,866.70	648,294,656.00	(9,877,789.30)	(1.52)
6	Piutang Pajak Air Tanah	1,595,660,154.00	1,612,751,046.00	(17,090,892.00)	(1.06)
7	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99,244,672.00	99,244,672.00	0.00	0.00
8	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	116,231,846,111.19	113,475,195,762.19	2,756,650,349.00	2.43
9	Piutang Pajak Parkir	2,193,870.00	3,921,600.00	(1,727,730.00)	(44.06)
10	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	950,000.00	2,972,000.00	(2,022,000.00)	(68.03)
	Jumlah	123,461,182,102.15	119,990,864,839.45	3,470,317,262.70	2.89

a. Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp598.487.121,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp426.474.376,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp172.012.745,00 atau sebesar 40,33%.

Akun Piutang Pajak Hotel merupakan selisih antara nilai pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hotel Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.10 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Hotel	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2008	36,635,000.00	0.00	0.00	36,635,000.00
2	Tahun 2009	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00
3	Tahun 2010	103,162,900.00	0.00	23,781,600.00	79,381,300.00

4	Tahun 2011	28,353,056.00	0.00	0.00	28,353,056.00
5	Tahun 2012	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tahun 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Tahun 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Tahun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Tahun 2016	9,278,235.00	0.00	735,000.00	8,543,235.00
10	Tahun 2017	2,199,094.00	0.00	0.00	2,199,094.00
11	Tahun 2018	137,478,405.00	0.00	25,702,037.00	111,776,368.00
12	Tahun 2019	25,469,457.00	0.00	500,000.00	24,969,457.00
13	Tahun 2020	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00
14	Tahun 2021	74,133,229.00	0.00	56,056,166.00	18,077,063.00
15	Tahun 2022		5,246,803,968.00	4,967,851,420.00	278,952,548.00
	Jumlah	426,474,376.00	5,246,803,968.00	5,074,791,223.00	598,487,121.00

b. Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.290.011.349,26 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.939.590.078,26 maka mengalami kenaikan senilai Rp350.421.271,00 atau sebesar 0,18%.

Piutang Pajak Restoran merupakan selisih antara nilai pajak restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.11 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Restoran	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	1,713,000.00	0.00	0.00	1,713,000.00
2	Tahun 2010	32,063,963.00	0.00	43,800.00	32,020,163.00
3	Tahun 2011	18,120,796.00	0.00	0.00	18,120,796.00
4	Tahun 2012	2,063,500.00	0.00	57,600.00	2,005,900.00
5	Tahun 2013	4,107,900.00	0.00	180,100.00	3,927,800.00
6	Tahun 2014	31,797,995.00	0.00	2,134,836.00	29,663,159.00
7	Tahun 2015	9,963,799.00	0.00	761,300.00	9,202,499.00
8	Tahun 2016	428,157,444.00	0.00	9,085,000.00	419,072,444.00
9	Tahun 2017	50,078,467.26	0.00	0.00	50,078,467.26
10	Tahun 2018	154,291,518.00	0.00	194,500.00	154,097,018.00
11	Tahun 2019	514,884,413.00	0.00	1,110,500.00	513,773,913.00
12	Tahun 2020	216,738,551.00	0.00	104,000.00	216,634,551.00
13	Tahun 2021	475,608,732.00	0.00	117,857,517.00	357,751,215.00
14	Tahun 2022	0.00	11,706,887,077.00	11,224,936,653.00	481,950,424.00
	Jumlah	1,939,590,078.26	11,706,887,077.00	11,356,465,806.00	2,290,011,349.26

c. Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.128.675.372,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp1.108.745.939,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp19.929.433,00 atau sebesar 0,02%.

Akun Piutang Pajak Hiburan merupakan selisih antara nilai pajak hiburan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Hiburan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.12 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Hiburan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2010	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2	Tahun 2011	2,576,000.00	0.00	0.00	2,576,000.00
3	Tahun 2012	4,862,400.00	0.00	0.00	4,862,400.00
4	Tahun 2013	1,773,200.00	0.00	0.00	1,773,200.00
5	Tahun 2014	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
6	Tahun 2015	19,319,000.00	0.00	0.00	19,319,000.00
7	Tahun 2016	100,194,786.00	0.00	0.00	100,194,786.00
8	Tahun 2017	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
9	Tahun 2018	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Tahun 2019	779,506,063.00	0.00	10,000,000.00	769,506,063.00
11	Tahun 2020	7,119,063.00	0.00	1,800,000.00	5,319,063.00
12	Tahun 2021	185,695,427.00	0.00	14,662,281.00	171,033,146.00
13	Tahun 2022	0.00	1,984,330,294.00	1,937,938,580.00	46,391,714.00
	Jumlah	1,108,745,939.00	1,984,330,294.00	1,964,400,861.00	1,128,675,372.00

d. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp875.696.586,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp673.674.710,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp202.021.876,00 atau sebesar 29,99%.

Akun Piutang Pajak Reklame merupakan selisih antara nilai pajak reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Reklame Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.13 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Reklame	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
2	Tahun 2006	2,667,205.00	0.00	0.00	2,667,205.00
3	Tahun 2007	2,556,000.00	0.00	0.00	2,556,000.00
4	Tahun 2008	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00
5	Tahun 2009	2,992,720.00	0.00	0.00	2,992,720.00
6	Tahun 2010	3,768,000.00	0.00	0.00	3,768,000.00
7	Tahun 2011	15,923,530.00	0.00	0.00	15,923,530.00
8	Tahun 2012	25,095,875.00	0.00	0.00	25,095,875.00
9	Tahun 2013	69,644,900.00	0.00	0.00	69,644,900.00
10	Tahun 2014	161,517,990.00	0.00	0.00	161,517,990.00
11	Tahun 2015	44,420,003.00	0.00	0.00	44,420,003.00
12	Tahun 2016	110,436,972.00	0.00	0.00	110,436,972.00
13	Tahun 2017	42,429,403.00	0.00	351,540.00	42,077,863.00
14	Tahun 2018	22,064,094.00	0.00	518,985.00	21,545,109.00
15	Tahun 2019	23,129,875.00	0.00	4,380,000.00	18,749,875.00
16	Tahun 2020	100,373,562.00	0.00	0.00	100,373,562.00
17	Tahun 2021	44,824,581.00	0.00	31,330,991.00	13,493,590.00
18	Tahun 2022	0.00	3,150,473,531.00	2,911,870,139.00	238,603,392.00
Jumlah		673,674,710.00	3,150,473,531.00	2,948,451,655.00	875,696,586.00

e. Piutang Pajak Penerangan Jalan

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp638.416.866,70 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp648.294.656,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.877.789,30 atau sebesar 0,02%.

Akun Piutang Pajak Penerangan Jalan merupakan selisih antara nilai Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Penerangan Jalan Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.14 Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Pajak PPJ - Non PLN	102,007,898.00	11,629,278,576.06	11,639,156,365.36	92,130,108.70
2	Piutang Pajak PPJ - PLN	546,286,758.00	41,479,433,111.00	41,479,433,111.00	546,286,758.00
Jumlah		648,294,656.00	53,108,711,687.06	53,118,589,476.36	638,416,866.70

1. Piutang PPJ Non PLN

Tabel 5.5.15 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2012	5,423,400.00	0.00	0.00	5,423,400.00
2	Tahun 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tahun 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tahun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Tahun 2016	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tahun 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Tahun 2018	2,104,259.00	0.00	2,103,698.00	561.00
8	Tahun 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tahun 2020	11,143,758.00	2,806,145.00	11,143,758.00	2,806,145.00
4	Tahun 2021	83,336,481.00	0.00	33,651,776.00	49,684,705.00
5	Tahun 2022	0.00	11,626,472,431.06	11,592,257,133.36	34,215,297.70
Jumlah		102,007,898.00	11,629,278,576.06	11,639,156,365.36	92,130,108.70

Sebagai tambahan informasi dari mutasi tambah atas Piutang Pajak PPJ Non PLN tahun 2022 senilai Rp11.629.278.578,06

terdapat koreksi saldo awal tahun senilai Rp2.806.145 yang dikarenakan wajib pajak melaporkan omset yang terlalu rendah. Dari mutasi kurang 2022 senilai Rp11.639.156.365,35 Piutang pajak PPJ Non PLN selain pelunasan atas piutang tahun sebelumnya juga terdapat koreksi saldo awal senilai Rp11.143.758 yang dikarenakan ada wajib pajak yang sudah membayar tanpa mencantumkan nama usaha serta tanpa konfirmasi, sehingga tidak terpantau dan diketahui kemudian setelah dikirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan.

2. Piutang PPJ - PLN

Tabel 5.5.16 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN	Saldo akhir Piutang PPJ -PLN Tahun 2021	Mutasi		Saldo Akhir Piutang PPJ - PLN Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2018	546,286,758.00	0.00	0.00	546,286,758.00
2	Tahun 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Tahun 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tahun 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Tahun 2022	0.00	41,479,433,111.00	41,479,433,111.00	0.00
Jumlah		546,286,758.00	41,479,433,111.00	41,479,433,111.00	546,286,758.00

f. Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.595.660.154,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp1.612.751.046,00 maka mengalami penurunan senilai Rp17.090.892,0 atau sebesar 0,01%.

Akun Piutang Pajak Air Tanah merupakan selisih antara nilai pajak air tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Air Tanah Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.17 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Air Tanah	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2011	1,323,000.00	0.00	0.00	1,323,000.00
2	Tahun 2012	2,291,400.00	0.00	0.00	2,291,400.00
3	Tahun 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tahun 2014	2,902,500.00	0.00	0.00	2,902,500.00
5	Tahun 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Tahun 2016	6,063,000.00	0.00	0.00	6,063,000.00
7	Tahun 2017	277,031,845.00	0.00	0.00	277,031,845.00
8	Tahun 2018	4,728,661.00	0.00	0.00	4,728,661.00
9	Tahun 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Tahun 2020	26,339,569.00	0.00	16,070,590.00	10,268,979.00
11	Tahun 2021	1,292,071,071.00	0.00	20,319,925.00	1,271,751,146.00
12	Tahun 2022	0.00	1,200,318,522.00	1,181,018,899.00	19,299,623.00
Jumlah		1,612,751,046.00	1,200,318,522.00	1,217,409,414.00	1,595,660,154.00

g. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dan Tahun 2021 senilai Rp99.244.672,00, Tahun 2022 tidak ada penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun sebelumnya.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp116.231.846.111,19 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp113.475.195.762,19 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.756.650.349,00 atau sebesar 2,43%. Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan PBB - P2 pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 7.

Akun Piutang PBB – P2 merupakan selisih antara nilai PBB - P2 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Dumai dengan nilai yang dibayarkan oleh Wajib Pajak PBB – P2 termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang ada pada Badan Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.18 Rincian Piutang PBB Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 1994	191,636.00	0.00	0.00	191,636.00
2	Tahun 1995	289,915.00	0.00	0.00	289,915.00
3	Tahun 1996	39,502,677.00	0.00	0.00	39,502,677.00
4	Tahun 1997	57,404,494.00	0.00	3,023,985.00	54,380,509.00
5	Tahun 1998	102,299,758.00	0.00	3,060,626.00	99,239,132.00
6	Tahun 1999	96,940,592.00	0.00	20,566,603.00	76,373,989.00
7	Tahun 2000	85,624,241.00	0.00	14,317,241.00	71,307,000.00

8	Tahun 2001	919,115,193.72	0.00	19,488,929.00	899,626,264.72
9	Tahun 2002	946,659,871.78	0.00	48,640,747.00	898,019,124.78
10	Tahun 2003	200,297,530.54	0.00	55,390,964.00	144,906,566.54
11	Tahun 2004	233,781,214.74	0.00	65,048,016.00	168,733,198.74
12	Tahun 2005	933,159,590.82	0.00	92,241,842.00	840,917,748.82
13	Tahun 2006	1,600,060,948.69	0.00	115,244,545.00	1,484,816,403.69
14	Tahun 2007	2,605,260,863.64	0.00	155,210,653.00	2,450,050,210.64
15	Tahun 2008	2,807,003,074.73	0.00	158,046,083.00	2,648,956,991.73
16	Tahun 2009	4,302,614,097.18	0.00	156,565,244.00	4,146,048,853.18
17	Tahun 2010	7,395,931,651.04	0.00	186,393,109.00	7,209,538,542.04
18	Tahun 2011	7,676,685,324.40	0.00	223,690,283.00	7,452,995,041.40
19	Tahun 2012	7,574,150,860.71	0.00	209,291,798.00	7,364,859,062.71
20	Tahun 2013	7,427,743,126.24	0.00	200,910,031.00	7,226,833,095.24
21	Tahun 2014	5,646,933,716.11	0.00	212,176,772.00	5,434,756,944.11
22	Tahun 2015	5,710,111,414.24	0.00	225,504,878.00	5,484,606,536.24
23	Tahun 2016	2,848,711,880.61	0.00	242,699,664.00	2,606,012,216.61
24	Tahun 2017	7,242,694,340.00	0.00	671,034,624.00	6,571,659,716.00
25	Tahun 2018	11,082,711,715.00	0.00	1,633,441,291.00	9,449,270,424.00
26	Tahun 2019	10,971,568,553.00	0.00	1,571,437,237.00	9,400,131,316.00
27	Tahun 2020	11,738,752,537.00	0.00	1,705,069,616.00	10,033,682,921.00
28	Tahun 2021	13,228,994,945.00	0.00	2,031,418,432.00	11,197,576,513.00
29	Tahun 2022	0.00	143,893,836,264.00	131,117,272,702.00	12,776,563,562.00
	Jumlah	113,475,195,762.19	143,893,836,264.00	141,137,185,915.00	116,231,846,111.19

Sebagai tambahan informasi dari total mutasi kurang senilai Rp141.137.185.915,00 terdapat Penghapusan Piutang PBB senilai Rp6.310.615.717,00 yang dikarenakan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ganda, alamat objek pajak tidak dijumpai, objek dan subjek pajak tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penghapusan piutang PBB-P2.

i. Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.193.870,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp3.921.600,00 maka mengalami penurunan senilai Rp1.727.730,00 atau sebesar 44,06%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.19 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	1,204,200.00	0.00	0.00	1,204,200.00
2	Tahun 2021	2,717,400.00	0.00	2,708,400.00	9,000.00
	Jumlah	3,921,600.00	0.00	2,708,400.00	2,193,870.00

No	Piutang Pajak Parkir	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
3	Tahun 2022	0.00	760,692,273.00	759,711,603.00	980,670.00
	Jumlah	3,921,600.00	0.00	2,708,400.00	2,193,870.00

j. Piutang Pajak Sarang Burung Walet

Piutang Pajak Sarang Burung Walet pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp950.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp2.972.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.022.000,00 atau sebesar 68,03%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20 Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2020	-	0.00	0.00	0.00
2	Tahun 2021	2,972,000.00	0.00	2,722,000.00	250,000.00
3	Tahun 2022	0.00	97,436,475.00	96,736,475.00	700,000.00
	Jumlah	2,972,000.00	97,436,475.00	99,458,475.00	950,000.00

8) Piutang Retribusi

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1,938,872,529.09	1,906,918,879.09	31,953,650.00	1.68

Piutang Retribusi Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.938.872.529,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.906.918.879,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp31.953.650,00 atau sebesar 1,68%.

Akun Piutang Retribusi Daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan Piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Pengakuan saldo Piutang Retribusi tersebut hanya berdasarkan pengakuan tahun-tahun sebelumnya. Piutang Retribusi daerah ini terdapat pada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah yaitu:

Tabel 5.5.21 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)
----	-----------	------------	------------	----------------------

No	Nama Unit	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
1	Dinas Lingkungan Hidup	50,640,000.00	50,640,000.00	0.00	0.00
2	Dinas Perhubungan	65,509,400.00	33,555,750.00	31,953,650.00	95.23
3	Badan Pendapatan Daerah	1,822,723,129.09	1,822,723,129.09	0.00	0.00
	Jumlah	1,938,872,529.09	1,906,918,879.09	31,953,650.00	1.68

Rincian Piutang Retribusi berdasarkan jenis Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.22 Rincian Piutang Retribusi Daerah Per Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Retribusi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
a.	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50,640,000.00	50,640,000.00	0.00	0.00
b.	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	39,200,000.00	22,200,000.00	17,000,000.00	76.58
c.	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	780,000.00	7,140,000.00	(6,360,000.00)	(89.08)
d.	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	8,996,000.00	605,000.00	8,391,000.00	1,386.94
e.	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	16,533,400.00	3,610,750.00	12,922,650.00	357.89
f.	Piutang Retribusi Izin Gangguan	1,765,420,215.09	1,765,420,215.09	0.00	0.00
g.	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	57,302,914.00	57,302,914.00	0.00	0.00
	Jumlah	1,938,872,529.09	1,906,918,879.09	31,953,650.00	1.68

a. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp50.640.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp50.640.000,00 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang dan Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Lampiran 6.

b. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp39.200.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp22.200.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.000.000,00 atau sebesar 76,58%.

Tabel 5.5.23 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	22,200,000.00	39,200,000.00	22,200,000.00	39,200,000.00

c. Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha

Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp780.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp7.140.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp6.360.000,00 atau sebesar 89,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.24 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan tempat kegiatan usaha Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan tempat kegiatan usaha	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	7,140,000.00	780,000.00	7,140,000.00	780,000.00

d. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Khusus Parkir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp8.996.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp605.000,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp8.391.000,00 atau sebesar 1.386,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.25 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2022	605,000.00	8,996,000.00	605,000.00	8,996,000.00
	Jumlah	605,000.00	8,996,000.00	605,000.00	8,996,000.00

e. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp16.533.400,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.610.750,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.922.650,00 atau sebesar 357,89% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.26 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun 2022

No	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	

1	Tahun 2022	3,610,750.00	16,533,400.00	3,610,750.00	16,533,400.00
	Jumlah	3,610,750.00	16,533,400.00	3,610,750.00	16,533,400.00

f. Piutang Retribusi Izin Gangguan

Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.765.420.215,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.765.420.215,09 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.27 Rincian Piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi Izin Gangguan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2005	3,115,500.00	0.00	0.00	3,115,500.00
2	Tahun 2006	51,200,120.00	0.00	0.00	51,200,120.00
3	Tahun 2007	45,426,325.00	0.00	0.00	45,426,325.00
4	Tahun 2008	20,451,240.00	0.00	0.00	20,451,240.00
5	Tahun 2009	45,987,975.00	0.00	0.00	45,987,975.00
6	Tahun 2010	266,966,496.00	0.00	0.00	266,966,496.00
7	Tahun 2011	72,529,436.00	0.00	0.00	72,529,436.00
8	Tahun 2012	121,473,850.00	0.00	0.00	121,473,850.00
9	Tahun 2013	183,255,576.00	0.00	0.00	183,255,576.00
10	Tahun 2014	129,629,925.00	0.00	0.00	129,629,925.00
11	Tahun 2015	116,484,514.00	0.00	0.00	116,484,514.00
12	Tahun 2016	223,163,849.00	0.00	0.00	223,163,849.00
13	Tahun 2017	484,151,529.09	0.00	0.00	484,151,529.09
14	Tahun 2018	1,205,640.00	0.00	0.00	1,205,640.00
15	Tahun 2019	236,400.00	0.00	0.00	236,400.00
16	Tahun 2020	141,840.00	0.00	0.00	141,840.00
17	Tahun 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Tahun 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	1,765,420,215.09	0.00	0.00	1,765,420,215.09

g. Piutang Retribusi Peruntukan Tanah

Piutang Retribusi Peruntukan Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp57.302.914,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp57.302.914,00 maka tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.28 Rincian Piutang Retribusi Peruntukan Tanah Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Retribusi Peruntukan Tanah	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tahun 2009	26,832,482.00	0.00	0.00	26,832,482.00
2	Tahun 2010	30,470,432.00	0.00	0.00	30,470,432.00
3	Tahun 2021	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Tahun 2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	57,302,914.00	0.00	0.00	57,302,914.00

9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
29,085,651,138.52	71,665,920,927.79	(42,580,269,789.27)	(59.41)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 senilai Rp29.085.651.138,52 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp71.665.920.927,79 maka mengalami penurunan senilai Rp42.580.269.789,27 atau sebesar 59,41%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.29 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	25,299,174,025.00	68,027,364,818.00	(42,728,190,793.00)	(62.81)
2	Badan Pendapatan Daerah	3,209,395,253.15	3,347,127,430.15	(137,732,177.00)	(4.11)
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	486,000,000.00	0.00	486,000,000.00	100.00
4	PPKD	91,081,860.37	291,428,679.64	(200,346,819.27)	(68.75)
	Jumlah	29,085,651,138.52	71,665,920,927.79	(42,580,269,789.27)	(59.41)

Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

Tabel 5.5.30 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Daerah Berdasarkan Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2021	Mutasi	Tahun 2022
----	--------------------------------	------------	--------	------------

No	Keterangan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
a.	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0.00	486,000,000.00	0.00	486,000,000.00
b.	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	84,460,000.00	7,790,000.00	13,010,000.00	79,240,000.00
c.	Piutang Pendapatan BLUD - RSUD	67,852,173,968.00	24,778,459,005.00	67,530,780,048.00	25,099,852,925.00
d.	Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas	90,730,850.00	120,081,100.00	90,730,850.00	120,081,100.00
e.	Piutang Denda Pajak (Bapenda)	3,095,339,131.51	866,328,505.00	1,004,060,682.00	2,957,606,954.51
f.	Piutang Denda Retribusi (Bapenda)	251,788,298.64	0.00	0.00	251,788,298.64
g.	Piutang Lainnya	291,428,679.64	26,625,000.00	236,382,480.27	81,671,199.37
h.	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	-	9,410,661.00	0.00	9,410,661.00
	Jumlah	71,665,920,927.79	26,294,694,271.00	68,874,964,060.27	29,085,651,138.52

Rekapitulasi Piutang dan Penyisihan Piutang disajikan pada Lampiran 8, 9, 10, 11.

a. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Merupakan kontribusi tahunan oleh pihak kedua atas Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang sampai dengan akhir tahun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, yang terdiri dari:

1. Piutang Kontribusi BGS PT. Satwa Sarana Karunia

Piutang Kontribusi Tahunan BGS PT. Satwa Sarana Karunia per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp186.000.000,00 Piutang ini merupakan kontribusi tahunan yang harus dibayarkan oleh PT. Satwa Sarana Karunia berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Dumai yaitu Tanah dalam Bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang dibuat antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Satwa Sarana Karunia berdasarkan akta Notaris No. 03 Tanggal 06 Agustus 2021 dihadapan Notaris Apriliyani, S.H.,M.Kn. dalam perjanjian dijelaskan bahwa Kontribusi Tahunan senilai Rp186.000.000,00 harus dibayarkan setiap tahunnya. Namun per 31 Desember 2022 PT. Satwa Sarana Karunia belum menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

2. Piutang Kontribusi BGS PT. Mayatama Solusindo

Piutang Kontribusi BGS PT. Mayatama Solusindo per tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp300.000.000,00. Piutang ini merupakan kontribusi tahunan yang harus dibayarkan oleh PT. Mayatama Solusindo berdasarkan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Dumai yaitu Bahu Jalan dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) yang dibuat antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Mayatama Solusindo berdasarkan akta notaris No. 17 Tanggal 14 Februari 2022 dihadapan Notaris Apriliyani, S.H., M.Kn. Kontribusi tahunan ini harus dibayarkan PT. Mayatama solusindo setiap tahunnya senilai Rp300.000.000,00. Namun per 31 Desember 2022 PT. Mayatama solusindo belum menyetorkan Kontribusi tahunan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan per 31 Desember 2022 senilai Rp486.000.000,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp486.000.000,00 atau sebesar 100%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.31 Rincian Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	Keterangan	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	PT. Mayatama Solusindo	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00
2	PT. Satwa Sarana Karunia	0.00	186,000,000.00	0.00	186,000,000.00
	Jumlah	0.00	486,000,000.00	0.00	486,000,000.00

Atas Piutang Kontribusi Tahunan ini, PT. Satwa Sarana Karunia dan PT. Mayatama Solusindo telah menyetor kontribusi tahunan ke Rekening Kas Umum Daerah masing masing pada tanggal 13 Januari 2023 dan 21 Februari 2023.

b. Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)

Piutang BLUD - Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp79.240.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp84.460.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp5.220.000,00 atau sebesar 6,18%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.32 Rincian Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang Peningkatan Pemeriksaan Kualitas Air (BLUD UPT LABKES - Dinkes)	84,460,000.00	7,790,000.00	13,010,000.00	79,240,000.00
	Jumlah	84,460,000.00	7,790,000.00	13,010,000.00	79,240,000.00

c. Piutang Pendapatan BLUD-RSUD

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp25.099.852.925,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp67.852.173.968,00 maka mengalami penurunan senilai Rp42.752.321.043,00 atau sebesar 63,01%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.33 Rincian Piutang Pendapatan BLUD-RSUD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Perusahaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	BPJS(Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial)	17,634,005,824.00	8,097,792,933.00	9,536,212,891.00	117.76
2	Kemenkes RI	0.00	57,483,515,550.00	(57,483,515,550.00)	(100.00)
3	BKR (PT. Wilmar Group)	144,307,505.00	129,107,105.00	15,200,400.00	11.77
4	JAMPERSAL (Jaminan Persalinan)	0.00	20,457,576.00	(20,457,576.00)	(100.00)
5	JAMKESDA BENGKALIS	70,411,004.00	35,538,078.00	34,872,926.00	98.13
6	CAPD (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)	23,000,000.00	52,750,000.00	(29,750,000.00)	(56.40)
7	OBAT KRONIS	1,166,318,646.00	423,775,158.00	742,543,488.00	175.22
8	JAMKESKO (Jaminan Kesehatan Kota)	4,037,361,574.00	143,117,390.00	3,894,244,184.00	2,721.01
9	INHEALTH	21,809,668.00	1,622,828.00	20,186,840.00	1,243.93
10	AMBULANCE BPJS	133,887,000.00	82,258,800.00	51,628,200.00	62.76
12	PELINDO PEGAWAI (Pelabuhan Indonesia)	19,355,818.00	18,359,094.00	996,724.00	5.43
13	PELINDO PENSUNAN (pelabuhan Indonesia)	33,632,685.00	28,820,877.00	4,811,808.00	16.70
14	PLN (Perusahaan Listrik Negara)	42,281,252.00	40,589,405.00	1,691,847.00	4.17
No	Nama Perusahaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
15	Pertamina Bina Medika	310,647,555.00	200,530,737.00	110,116,818.00	54.91
16	PT. Nira Murni Konstruksi	79,552,900.00	79,552,900.00	0.00	0.00
17	PT. OWLEXA / HEALTHCARE	1,724,083.00	1,724,083.00	0.00	0.00
18	PT. KLK (Kuala Lumpur Kepong)	20,651,224.00	4,051,352.00	16,599,872.00	409.74
19	PT. SURYA MADISTRINDO	782,400.00	782,400.00	0.00	0.00
20	PT. Margie Andalan	19,060,829.00	19,060,829.00	0.00	0.00
21	Trauma Center (Jamsostek /Jaminan Sosial Tenaga Kerja)	143,822,044.00	15,161,649.00	128,660,395.00	848.59
22	PT.Murini Wood Indah Industry	0.00	1,588,193.00	(1,588,193.00)	(100.00)
23	CV. Akbar 77	21,953,545.00	48,589,615.00	(26,636,070.00)	(54.82)
24	PT. BANK BRI	74,469,021.00	74,469,021.00	0.00	0.00
25	PT. BANK RIAU KEPRI	0.00	10,446,932.00	(10,446,932.00)	(100.00)
27	Pendapatan Kerjasama (Sewa Kios)	42,100,000.00	42,100,000.00	0.00	0.00
28	SEWA KANTIN (RUANGAN)	6,680,000.00	10,320,000.00	(3,640,000.00)	(35.27)
29	Sewa Parkir	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
30	PT. Arafah Alam Sejahtera	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
31	Bumida	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00
32	Intibenua	6,229,450.00	6,229,450.00	0.00	0.00
33	PT. AAB	19,426,207.00	15,941,217.00	3,484,990.00	21.86
34	PT. APICAL KAO CHEMICALS	365,707.00	0.00	365,707.00	100.00
35	PT. Admedika (PATRA SK)	0.00	50,000.00	(50,000.00)	(100.00)
36	PT. Admedika (PLN)	9,213,909.00	3,037,312.00	6,176,597.00	203.36
37	PT. Admedika (BNI LIFE)	11,027,819.00	0.00	11,027,819.00	100.00
38	PT. SARANA AGRO NUSANTARA (SAN)	2,607,262.00	2,607,262.00	0.00	0.00
39	PT. SDS (Sari Dumai Sejati)	55,121,684.00	19,175,391.00	35,946,293.00	187.46
40	PT. SARI DUMAI OLEO	18,841,657.00	13,662,463.00	5,179,194.00	37.91
41	PT. APICAL	0.00	283,863.00	(283,863.00)	(100.00)
42	PT. KREASIJAYA ADHIKARYA	20,063,367.00	205,962.00	19,857,405.00	9,641.30
43	PT. MANDIRI INHEALTH	4,135,258.00	6,635,591.00	(2,500,333.00)	(37.68)
44	Pasien Umum	17,776,905.00	81,635,750.00	(63,858,845.00)	(78.22)
45	Pasien Perusahaan (PT. PLN)	0.00	20,278,746.00	(20,278,746.00)	(100.00)
47	Pasien BPJS	539,194,975.00	231,861,838.00	307,333,137.00	132.55
48	Pasien Non BPJS	251,614,156.00	278,779,487.00	(27,165,331.00)	(9.74)
49	Pasien Jamkesko	67,343,485.00	84,372,934.00	(17,029,449.00)	(20.18)
50	Pasien Jamkesda	2,742,310.00	0.00	2,742,310.00	100.00
51	Kemenkes	20,245,197.00	20,245,197.00	0.00	0.00
	TOTAL	25,099,852,925.00	67,852,173,968.00	(42,752,321,043.00)	(63.01)

Sebagai Tambahan informasi untuk perbedaan antara Jamkesko dengan Jampersal:

- 1 Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota) merupakan Suatu Penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pengorganisasiannya ditetapkan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- 2 Jampersal (Jaminan Persalinan) merupakan Program pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Kota Dumai yang mengelola dana kesehatan untuk menjamin persalinan bagi masyarakat dan tidak mampu di Kota Dumai dalam anggaran dan kurun waktu tertentu.

Tabel 5.5.34 Rincian Item Perbedaan Jamkesko dan Jampersal

No	Item Perbedaan	Jamkesko	Jampersal
1	Sumber Dana	APBD	APBN
2	Peserta	Masyarakat Kota Dumai yang tidak mampu (miskin) yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.	Ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

Rekapitulasi Piutang Pendapatan BLUD - RSUD beserta Penyisihan Piutang Tak tertagih dapat dilihat pada Lampiran 8 dan 9.

d. Piutang Pendapatan BLUD - Puskesmas

Piutang Pendapatan pada BLUD - Puskesmas yang sesuai dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 412/Dinkes/2014 Tanggal 5 Desember 2014. Piutang pada BLUD - Puskesmas Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp120.081.100,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp90.730.850,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp29.350.250,00 atau sebesar 32,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian 5.5.35 Rincian Piutang Pendapatan pada BLUD-Puskesmas Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Piutang Lainnya pada BLUD-Puskesmas	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang BPJS 2022:				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	5,340,000.00	0,00	5,340,000.00	0,00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	7,040,000.00	0,00	7,040,000.00	0,00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	32,435,000.00	0,00	32,435,000.00	0,00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	10,065,000.00	0,00	10,065,000.00	0,00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	14,417,850.00	0,00	14,417,850.00	0,00
h	BLUD Puskesmas Purnama	15,533,000.00	0,00	15,533,000.00	0,00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	5,900,000.00	0,00	5,900,000.00	0,00
2	Piutang BPJS 2022:				
a	BLUD Puskesmas Dumai Kota	0,00	1,230,000.00	0,00	1,230,000.00
b	BLUD Puskesmas Dumai Barat	0,00	40,111,100.00	0,00	40,111,100.00
c	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	0,00	10,759,000.00	0,00	10,759,000.00
d	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	0,00	29,420,000.00	0,00	29,420,000.00
e	BLUD Puskesmas Medang Kampai	0,00	0,00	0,00	0,00
f	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	0,00	3,205,000.00	0,00	3,205,000.00
g	BLUD Puskesmas Bukit Timah	0,00	5,700,000.00	0,00	5,700,000.00
h	BLUD Puskesmas Purnama	0,00	24,181,000.00	0,00	24,181,000.00
i	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0,00	5,475,000.00	0,00	5,475,000.00
	Jumlah	90,730,850.00	120,081,100.00	90,730,850.00	120,081,100.00

e. Piutang Denda Pajak

Piutang Denda Pajak pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.957.606.954,51 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.095.339.131,51 maka mengalami penurunan senilai Rp137.732.177,00 atau sebesar 4,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.36 Rincian Piutang Denda Pajak Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Denda Pajak	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Denda Pajak Hotel Tahun 2020	4,979,099.32	91,523,619.00	21,892,978.00	74,609,740.32
2	Denda Pajak Restoran Tahun 2020	241,236,672.20	170,374,808.00	50,568,239.00	361,043,241.20
3	Denda Pajak Hiburan Tahun 2020	117,378,883.59	41,541,086.00	35,629,981.00	123,289,988.59
4	Denda Pajak Reklame Tahun 2020	8,656,145.96	2,074,323.00	3,763,944.00	6,966,524.96
5	Denda Pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2018	2,719,248,264.44	533,298,331.00	862,809,160.00	2,389,737,435.44
6	Denda Pajak Parkir tahun 2020	64,911.00	6,408,522.00	6,473,205.00	228.00

7	Denda Pajak Air Tanah Tahun 2020	3,775,155.00	16,704,986.00	18,520,345.00	1,959,796.00
8	Denda Pajak Walet 2022	0.00	4,402,830.00	4,402,830.00	0.00
	Jumlah	3,095,339,131.51	866,328,505.00	1,004,060,682.00	2,957,606,954.51

f. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp251.788.298,64 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp251.788.298,64 maka tidak mengalami perubahan. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.37 Rincian Piutang Denda Retribusi Tahun 2022 dan 2021

No	SKPD	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Badan Pendapatan Daerah	251,788,298.64	251,788,298.64	0.00	0.00
	Jumlah	251,788,298.64	251,788,298.64	0.00	0.00

g. Piutang Lainnya Pada PPKD

Piutang Pendapatan BLUD-RSUD pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp81.671.199,37 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp291.428.679,64 maka mengalami kenaikan senilai Rp209.757.480,27 atau sebesar 71,98%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.38 Rincian Piutang Lainnya pada PPKD Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Lainnya pada PPKD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Piutang bunga Koperasi Putri Tujuh	7,653,399.37	0.00	0.00	7,653,399.37
2	Piutang PT Pembangunan Dumai	2,306,000.00	0.00	0.00	2,306,000.00
3	Piutang Lainnya Pihak Ketiga	227,382,480.27	26,625,000.00	227,382,480.27	26,625,000.00
4	Piutang Gaji PNS	54,086,800.00	0.00	9,000,000.00	45,086,800.00
	Jumlah	291,428,679.64	26,625,000.00	236,382,480.27	81,671,199.37

1. Piutang Bunga Koperasi Putri Tujuh

Piutang bunga pinjaman Koperasi Putri Tujuh per Tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp7.653.399,37. Piutang ini merupakan Piutang yang timbul atas Bunga Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh, yaitu sebesar 0,5% dari pokok pinjaman senilai Rp500.000.000,00 selama 10 Tahun (sejak Nopember 2001 hingga Desember 2011) senilai Rp25.570.066,02.

2. Piutang PT Pembangunan Dumai

Piutang PT Pembangunan Dumai senilai Rp2.306.000,00 merupakan sisa sewa gedung yang belum disetor ke Kas Daerah. Pendapatan sewa senilai Rp9.160.000,00, merupakan pendapatan sewa gedung Tahun 2012 s.d 2015 yang disetor ke Kas Daerah pada Tanggal 2 Februari 2017 senilai Rp9.070.000,00. Pendapatan sewa gedung Tahun 2016 s.d 2017 senilai Rp9.920.000,00 telah disetor pada tanggal 24 Januari 2018 senilai Rp7.704.000,00. Atas kedua penyeteroran tersebut, terdapat kekurangan setor senilai Rp2.306.000,00 yang baru diketahui Tahun 2020, sehingga sisa sewa gedung yang belum disetor per 31 Desember 2022 ke Kas Daerah senilai Rp2.306.000,00.

3. Piutang Lainnya Pihak Ketiga

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2022 senilai Rp26.625.000,00 mengalami penurunan senilai Rp200.757.480,27 atau sebesar 88,29% dari Tahun 2021 senilai Rp227.382.480,27. Penurunan ini disebabkan adanya reklasifikasi dari Piutang Lainnya Pihak Ketiga ke Aset Lainnya-Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Piutang ini merupakan klaim tuntutan ganti kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak ketiga a.n Sdr.A berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 900/946/2022 Tanggal 8 Desember 2022.

4. Piutang Gaji PNS

Piutang Gaji PNS Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp45.086.800,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp54.086.800,00 maka mengalami penurunan senilai Rp9.000.000 atau sebesar 16,64% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.39 Rincian Piutang Gaji PNS Tahun 2022 dan 2021

No	Nama	2022	2021	Peningkatan/ (Penurunan)	Keterangan
1	D F	45,086,800.00	54,086,800.00	(9,000,000.00)	Gaji, THR dan gaji 13 Maret 2019 s/d November 2020 Atas Nama D F
	Jumlah	45,086,800.00	54,086,800.00	(9,000,000.00)	

Rekapitulasi Piutang Tuntutan Ganti Rugi – Piutang Gaji PNS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 12.

h. Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp9.410.661,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023.

10) Piutang Transfer Antar Daerah

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
29,390,520,807.00	9,656,723,625.00	19,733,797,182.00	204.35

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Riau berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp29.390.520.807,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp9.656.723.625,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp19.733.797.182,00 atau sebesar 204,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.40 Rincian Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2022 dan 2021

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8,114,597,124.00	2,690,492,585.00	5,424,104,539.00	201.60
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3,404,791,983.00	2,004,702,813.00	1,400,089,170.00	69.84
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17,769,730,944.00	4,867,170,924.00	12,902,560,020.00	265.09
4	Pajak Air Permukaan	101,400,756.00	94,357,303.00	7,043,453.00	7.46
	Jumlah	29,390,520,807.00	9,656,723,625.00	19,733,797,182.00	204.35

Tabel 5.5.41 Rincian Mutasi Piutang Transfer-DBH Provinsi Tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai

No	Piutang Transfer-DBH Provinsi	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2,690,492,585.00	8,114,597,124.00	2,690,492,585.00	8,114,597,124.00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2,004,702,813.00	3,404,791,983.00	2,004,702,813.00	3,404,791,983.00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4,867,170,924.00	17,769,730,944.00	4,867,170,924.00	17,769,730,944.00
4	Pajak Air Permukaan	94,357,303.00	101,400,756.00	94,357,303.00	101,400,756.00
	Jumlah	9,656,723,625.00	29,390,520,807.00	9,656,723,625.00	29,390,520,807.00

11) Penyisihan Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021	(Peningkatan)/Penurunan	
		Rp	%
(83,863,366,847.86)	(90,643,237,451.68)	6,779,870,603.82	(7.48)

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai Piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 senilai minus Rp83.863.366.847,86 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp90.643.237.451,68 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.779.870.603,82 atau sebesar 7,48%. Penyisihan tersebut muncul akibat penerapan SAP berbasis akrual. Penentuan besaran penyisihan dan klasifikasi piutang tak tertagih telah disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 5.5.42 Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	(32,844,500.00)	(18,804,500.00)	(14,040,000.00)	74.66
2	BLUD RSUD	(3,986,825,003.90)	(16,155,543,705.00)	12,168,718,701.10	(75.32)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(50,640,000.00)	(50,640,000.00)	0.00	0.00
4	Badan Pendapatan Daerah	(79,793,057,343.96)	(74,418,249,246.68)	(5,374,808,097.28)	7.22

	Jumlah	(83,863,366,847.86)	(90,643,237,451.68)	6,779,870,603.82	(7.48)
--	--------	---------------------	---------------------	------------------	--------

Rincian Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 5,6,7,8,9,10, dan 11.

12) Beban dibayar Dimuka

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
0.00	114,500,000.00	(114,500,000.00)	(100.00)

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari premi asuransi yang telah dibayar tetapi belum dibebankan seluruhnya pada akhir tahun berjalan. Asuransi Dibayar Dimuka Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp114.500.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp114.500.000 atau sebesar 100% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.43 Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Sekretariat Daerah	0.00	114,500,000.00	(114,500,000.00)	(100.00)
	Jumlah	0.00	114,500,000.00	(114,500,000.00)	(100.00)

13) Persediaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
33,459,430,232.56	50,892,554,145.49	(17,433,123,912.93)	(34.25)

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp33.459.430.232,56 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp50.892.554.145,49 maka mengalami penurunan senilai Rp17.433.123.913 atau sebesar 34,25% Rekapitulasi Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 13.

Kebijakan Akuntansi Persediaan mengacu pada Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Perwako Dumai Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwako Dumai Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang tertuang dalam Kebijakan Nomor 16 tentang Akuntansi Persediaan. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa pengukuran persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Adapun rincian persediaan per SKPD di Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.44 Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,696,300.00	5,318,620.00	(1,622,320.00)	(30.50)
2	Dinas Kesehatan	14,206,644,251.56	14,392,757,261.87	(186,113,010.31)	(1.29)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	13,146,639,039.00	12,952,011,026.00	194,628,013.00	1.50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,173,655,123.00	22,641,163,018.62	(17,467,507,895.62)	(77.15)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,447,000.00	0.00	2,447,000.00	100.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1,666,700.00	1,053,990.00	612,710.00	58.13
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,209,600.00	9,295,650.00	(7,086,050.00)	(76.23)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7,663,200.00	311,850.00	7,351,350.00	2,357.34
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6,612,600.00	70,183,780.00	(63,571,180.00)	(90.58)
10	Dinas Tenaga Kerja	1,207,255.00	1,958,803.00	(751,548.00)	(38.37)
11	Dinas Lingkungan Hidup	302,824,078.00	61,314,478.00	241,509,600.00	393.89
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,324,200.00	252,571,766.00	(154,247,566.00)	(61.07)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110,673,069.00	187,839,061.00	(77,165,992.00)	(41.08)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,114,500.00	2,657,900.00	(543,400.00)	(20.44)
15	Dinas Perhubungan	213,247,973.00	147,053,788.00	66,194,185.00	45.01
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5,144,600.00	334,500.00	4,810,100.00	1,438.00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2,348,750.00	2,398,000.00	(49,250.00)	(2.05)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,791,400.00	7,332,800.00	1,458,600.00	19.89
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	252,600.00	277,200.00	(24,600.00)	(8.87)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,227,900.00	1,055,250.00	172,650.00	16.36

21	Dinas Perikanan	3,879,050.00	3,712,900.00	166,150.00	4.47
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,445,500.00	789,800.00	1,655,700.00	209.64
23	Dinas Perdagangan	861,800.00	2,040,780.00	(1,178,980.00)	(57.77)
24	Sekretariat Daerah	47,005,822.00	60,243,080.00	(13,237,258.00)	(21.97)
25	Sekretariat DPRD	12,355,000.00	15,389,500.00	(3,034,500.00)	(19.72)
26	Kecamatan Dumai Barat	1,730,000.00	2,745,985.00	(1,015,985.00)	(37.00)
27	Kecamatan Dumai Timur	725,100.00	160,650.00	564,450.00	351.35
28	Kecamatan Bukit Kapur	1,966,400.00	1,098,000.00	868,400.00	79.09
No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
29	Kecamatan Medang Kampai	799,700.00	1,047,710.00	(248,010.00)	(23.67)
30	Kecamatan Sungai Sembilan	2,820,700.00	436,825.00	2,383,875.00	545.73
31	Kecamatan Dumai Kota	304,800.00	1,021,300.00	(716,500.00)	(70.16)
32	Kecamatan Dumai Selatan	1,817,300.00	1,582,047.00	235,253.00	14.87
33	Inspektorat	4,803,640.00	4,498,500.00	305,140.00	6.78
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,299,800.00	5,418,100.00	(4,118,300.00)	(76.01)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,944,640.00	13,502,370.00	(6,557,730.00)	(48.57)
36	Badan Pendapatan Daerah	71,726,442.00	41,195,550.00	30,530,892.00	74.11
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	554,400.00	782,306.00	(227,906.00)	(29.13)
Jumlah		33,459,430,232.56	50,892,554,145.49	(17,433,123,912.93)	(34.25)

Dari total Persediaan per OPD senilai Rp29.624.460.779,82, Persediaan per OPD yang berasal dari Belanja Tak Terduga - Covid 19 (BTT - Covid 19) adalah senilai Rp5.925.661.246,10, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.44.a Rincian Persediaan per OPD yang berasal dari BTT

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	2,979,962,989.10
2	RSUD	2,402,666,957.00
3	BPBD	543,031,300.00
Jumlah		5,925,661,246.10

Persediaan pada Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 dan 2021 terdiri dari beberapa jenis persediaan sebagai berikut :

Tabel 5.5.45 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Barang Pakai Habis	33,459,430,232.56	50,892,554,145.49	(17,433,123,912.93)	(34.25)
2	Barang Tak Pakai Habis	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Barang Bekas Pakai	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		33,459,430,232.56	50,892,554,145.49	(17,433,123,912.93)	(34.25)

Tabel 5.5.46 Rincian Persediaan per Jenis Tahun 2022 dan 2021

No	Rincian Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bahan	19,033,706,436.15	20,532,964,223.73	(1,499,257,787.58)	(7.30)
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1,072,939,803.31	1,149,887,433.35	(76,947,630.04)	(6.69)
4	Obat-obatan	8,449,064,120.10	6,824,773,219.79	1,624,290,900.31	23.80
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	4,903,719,873.00	22,379,368,268.62	(17,475,648,395.62)	(78.09)
6	Natura dan Pakan	0.00	5,561,000.00	(5,561,000.00)	(100.00)
Jumlah		33,459,430,232.56	50,892,554,145.49	(17,433,123,912.93)	(34.25)

a. Persediaan Bahan

Persediaan Bahan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp19.033.706.436,15 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp20.532.964.223,73 maka mengalami penurunan senilai Rp1.499.257.787,58 atau sebesar 7,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.47 Rincian Persediaan Bahan Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	9,844,813,422.15	11,232,560,157.73	(1,387,746,735.58)	(12.35)

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
----	-----------	------------	------------	----------------------	--

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	8,577,664,214.00	8,912,068,988.00	(334,404,774.00)	(3.75)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	311,630,000.00	326,630,000.00	(15,000,000.00)	(4.59)
4	Dinas Lingkungan Hidup	295,615,700.00	58,200,078.00	237,415,622.00	407.93
No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	183,100.00	0.00	183,100.00	100.00
6	Inspektorat	3,800,000.00	3,505,000.00	295,000.00	8.42
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Badan Pendapatan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	19,033,706,436.15	20,532,964,223.73	(1,499,257,787.58)	(7.30)

b. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp1.072.939.803,31 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.149.887.433,35 maka mengalami penurunan senilai Rp76.947.630 atau sebesar 6,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.48 Rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,696,300.00	5,318,620.00	(1,622,320.00)	(30.50)
2	Dinas Kesehatan	219,374,178.31	303,598,333.35	(84,224,155.04)	(27.74)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	329,489,065.00	253,619,650.00	75,869,415.00	29.91
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,326,250.00	2,214,750.00	(888,500.00)	(40.12)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,447,000.00	0.00	2,447,000.00	100.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1,666,700.00	1,053,990.00	612,710.00	58.13
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,209,600.00	9,295,650.00	(7,086,050.00)	(76.23)
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7,663,200.00	311,850.00	7,351,350.00	2,357.34
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	6,612,600.00	3,133,780.00	3,478,820.00	111.01
10	Dinas Tenaga Kerja	1,207,255.00	1,958,803.00	(751,548.00)	(38.37)
11	Dinas Lingkungan Hidup	7,208,378.00	3,114,400.00	4,093,978.00	131.45
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	98,324,200.00	252,571,766.00	(154,247,566.00)	(61.07)
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	530,360.00	426,000.00	104,360.00	24.50
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,114,500.00	2,657,900.00	(543,400.00)	(20.44)
15	Dinas Perhubungan	213,247,973.00	147,053,788.00	66,194,185.00	45.01
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5,144,600.00	334,500.00	4,810,100.00	1,438.00
17	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2,348,750.00	2,398,000.00	(49,250.00)	(2.05)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8,791,400.00	7,332,800.00	1,458,600.00	19.89
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	69,500.00	277,200.00	(207,700.00)	(74.93)
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,227,900.00	1,055,250.00	172,650.00	16.36
21	Dinas Perikanan	3,879,050.00	3,712,900.00	166,150.00	4.47
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,445,500.00	789,800.00	1,655,700.00	209.64
23	Dinas Perdagangan	861,800.00	2,040,780.00	(1,178,980.00)	(57.77)
24	Sekretariat Daerah	47,005,822.00	60,243,080.00	(13,237,258.00)	(21.97)
25	Sekretariat DPRD	12,355,000.00	15,389,500.00	(3,034,500.00)	(19.72)
26	Kecamatan Dumai Barat	1,730,000.00	2,745,985.00	(1,015,985.00)	(37.00)
27	Kecamatan Dumai Timur	725,100.00	160,650.00	564,450.00	351.35
28	Kecamatan Bukit Kapur	1,966,400.00	1,098,000.00	868,400.00	79.09
29	Kecamatan Medang Kampai	799,700.00	1,047,710.00	(248,010.00)	(23.67)

30	Kecamatan Sungai Sembilan	2,820,700.00	436,825.00	2,383,875.00	545.73
31	Kecamatan Dumai Kota	304,800.00	1,021,300.00	(716,500.00)	(70.16)
No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
32	Kecamatan Dumai Selatan	1,817,300.00	1,582,047.00	235,253.00	14.87
33	Inspektorat	1,003,640.00	993,500.00	10,140.00	1.02
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,299,800.00	5,418,100.00	(4,118,300.00)	(76.01)
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6,944,640.00	13,502,370.00	(6,557,730.00)	(48.57)
36	Badan Pendapatan Daerah	71,726,442.00	41,195,550.00	30,530,892.00	74.11
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	554,400.00	782,306.00	(227,906.00)	(29.13)
Jumlah		1,072,939,803.31	1,149,887,433.35	(76,947,630.04)	(6.69)

c. Persediaan Obat - obatan

Persediaan Obat - obatan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp8.449.064.120,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp6.824.773.219,79 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.624.290.900,31 atau sebesar 23,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.49 Rincian Persediaan Obat - obatan Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	4,099,435,651.10	2,851,037,770.79	1,248,397,880.31	43.79
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	4,239,485,760.00	3,786,322,388.00	453,163,372.00	11.97
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110,142,709.00	187,413,061.00	(77,270,352.00)	(41.23)
Jumlah		8,449,064,120.10	6,824,773,219.79	1,624,290,900.31	23.80

d. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Persediaan untuk dijual/diserahkan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp4.903.719.873,00 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp22.379.368.268,62 maka mengalami penurunan senilai Rp17.475.648.395,62 atau sebesar 78,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.50 Rincian Persediaan untuk dijual/diserahkan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	43,021,000.00	0.00	43,021,000.00	100.00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,860,698,873.00	22,312,318,268.62	(17,451,619,395.62)	(78.22)
3	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	67,050,000.00	(67,050,000.00)	(100.00)
Jumlah		4,903,719,873.00	22,379,368,268.62	(17,475,648,395.62)	(78.09)

e. Persediaan Natura dan Pakan

Persediaan Natura dan Pakan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.561.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp5.561.000 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.51 Rincian Persediaan Natura dan Pakan per OPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama OPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
2	Dinas Kesehatan	0.00	5,561,000.00	(5,561,000.00)	(100.00)
Jumlah		0.00	5,561,000.00	(5,561,000.00)	(100.00)

b. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
51,088,523,186.33	58,002,848,837.39	(6,914,325,651.06)	(11.92)

Investasi Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp58.002.848.837,39 maka mengalami penurunan senilai Rp6.914.325.651 atau sebesar 11,92%. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.52 Investasi Jangka Panjang Tahun 2022 dan 2021

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
------------	------------	------------	---------------------

	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Dana Bergulir	8,620,480,000.00	8,623,980,000.00	(3,500,000.00)	(0.04)
Penyisihan Dana Bergulir	(8,620,480,000.00)	(8,390,980,000.00)	(229,500,000.00)	2.74
Investasi Permanen	51,088,523,186.33	57,769,848,837.39	(6,681,325,651.06)	(11.57)
Jumlah	51,088,523,186.33	58,002,848,837.39	(6,914,325,651.06)	(11.92)

1) Dana Bergulir

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
8,620,480,000.00	8,623,980,000.00	(3,500,000.00)	(0.04)

Dana Bergulir Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp8.620.480.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp8.623.980.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp3.500.000 atau sebesar 0,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.53 Rincian Dana Bergulir Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Peminjam	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp.	%
1	Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi				
	- Lembaga Ekonomi Kerakyatan	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	0.00	0.00
2	Pinjaman Kepada lembaga lainnya				
	- Koperasi Putri Tujuh	229,500,000.00	233,000,000.00	(3,500,000.00)	(1.50)
	- Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan	305,100,000.00	305,100,000.00	0.00	0.00
	- Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM	1,085,880,000.00	1,085,880,000.00	0.00	0.00
	Jumlah	8,620,480,000.00	8,623,980,000.00	(3,500,000.00)	(0.04)

a. Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan

Pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan (LEK) berlangsung sejak Tahun 2004 s.d. Tahun 2008, yang digunakan dalam rangka penyaluran dana bergulir kepada masyarakat/kelompok masyarakat. LEK merupakan lembaga penyalur dana bergulir kepada masyarakat. LEK berhak untuk menilai kelayakan peminjam dalam mengelola dana.

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.431.271.331,00, yang berada pada rekening penampung yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.54 Rincian Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2021	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2022
1	LEK Dumai qq Zulfikar 104-2-000279	30,280.00	0.00	28.00	30,308.00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	675,858,260.00	0.00	5,426,790.00	681,285,050.00
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1,643,576,786.00	69,248,533.00	26,826,497.00	1,739,651,816.00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10,273,507.00	0.00	30,650.00	10,304,157.00
	Jumlah	2,329,738,833.00	69,248,533.00	32,283,965.00	2,431,271,331.00

Adapun sepanjang Tahun 2022 terdapat penyetoran dari nasabah senilai Rp69.248.533,00 pada Rekening 10-40-70003-8, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.55 Rincian Penyetoran Nasabah Tahun 2022

No	Tanggal	Nama Nasabah	Nilai Pembayaran
1	22 Maret 2022	Iskandar	24,000,000.00
2	08 Juli 2022	Aidawati	12,000,000.00
3	30 Agustus 2022	Kamaruddin	17,520,000.00
4	06 September 2022	TRF Rek 60349470091	3,700,000.00
5	19 Desember 2022	Pelunasan Pokok LEK	11,428,533.00
6	19 Desember 2022	Pelunasan Bunga Pinjaman LEK	600,000.00
	Jumlah		69,248,533.00

b. Pinjaman Kepada Lembaga Lainnya

1. Pinjaman kepada Koperasi Putri Tujuh

Pinjaman yang diberikan kepada Koperasi Putri Tujuh adalah senilai Rp500.000.000,00 merupakan pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai pada November 2001. Dana tersebut digunakan oleh Koperasi Putri

Tujuh untuk membeli sebidang tanah yang akan dijual kembali kepada anggota koperasi. Nilai Pinjaman Koperasi Putri tujuh sampai dengan 31 Desember 2022 senilai Rp229.500.000,00.

Tabel 5.5.56 Rincian Penyetoran Nilai Pinjaman Koperasi Putri Tujuh Tahun 2022

No	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Pemberian Pinjaman Bulan November 2001	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
2	Pembayaran Tahun 2015	0.00	0.00	100,000,000.00	400,000,000.00
3	Pembayaran Tahun 2016	0.00	0.00	90,000,000.00	310,000,000.00
4	Pembayaran Tahun 2017	0.00	0.00	50,000,000.00	260,000,000.00
5	Pembayaran Tahun 2018	0.00	0.00	0.00	260,000,000.00
6	Pembayaran Tahun 2019	0.00	0.00	27,000,000.00	233,000,000.00
7	Pembayaran Tahun 2020	0.00	0.00	0.00	233,000,000.00
8	Pembayaran Tahun 2021	0.00	0.00	0.00	233,000,000.00
9	Pembayaran Tahun 2022	0.00	0.00	3,500,000.00	229,500,000.00

Pada Tanggal 04 Mei 2023, terdapat penyetoran ke Kas Umum daerah untuk pembayaran pinjaman Koperasi Putri Tujuh senilai Rp1.000.000,00.

2. Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima - Dinas Perdagangan

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Perdagangan merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp1.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh, Pinjaman kepada Pedagang Kaki Lima-Dinas Perdagangan Tahun 2022 senilai Rp305.100.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 tidak mengalami perubahan.

3. Pinjaman Modal Usaha-Dinas Koperasi dan UKM

Pinjaman kepada masyarakat melalui Dinas Koperasi dan UKM merupakan pinjaman modal usaha yang diberikan kepada Usaha Kecil. Pinjaman disalurkan pada Tahun 2007 dan 2008 dengan total senilai Rp2.250.000.000,00. Pinjaman yang diberikan dikelola oleh Koperasi Swamitra Putri Tujuh Hingga 31 Desember Tahun 2022 masih terdapat tunggakan senilai Rp1.085.880.000,00.

2) Penyisihan Dana Bergulir

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(8,620,480,000.00)	(8,390,980,000.00)	(229,500,000.00)	2.74

Nilai Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai minus Rp8.620.480.000,00. Nilai tersebut merupakan penyisihan dana bergulir senilai 100% atas dana bergulir yang jatuh tempo mulai lima tahun ke atas, yang terdiri dari penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK senilai Rp7.000.000.000,00, penyisihan pinjaman usaha kecil dan koperasi pada Dinas Perdagangan senilai Rp305.100.000,00 penyisihan investasi non permanen pada Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp1.085.880.000,00 penyisihan Koperasi Putri Tujuh senilai Rp229.500.000,00.

Tabel 5.5.57 Rincian Penyisihan Dana Bergulir

No	Penyisihan Dana Bergulir	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Penyisihan Investasi Non Permanen pada LEK	7,000,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000,000.00
2	Penyisihan Pinjaman Usaha Kecil dan Koperasi Pada Dinas Perdagangan	305,100,000.00	0.00	0.00	305,100,000.00
3	Penyisihan Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM	1,085,880,000.00	0.00	0.00	1,085,880,000.00
4	Penyisihan Koperasi Putri Tujuh	-	229,500,000.00	0.00	229,500,000.00
	JUMLAH	8,390,980,000.00	229,500,000.00	-	8,620,480,000.00

Atas pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Kerakyatan senilai Rp7.000.000.000,00 terdapat pengembalian senilai Rp2.431.271.331,00, yang berada pada rekening penampung yang ditempatkan pada Bank Riau Kepri Syariah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.58 Rincian Pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Tahun 2022 dan 2021

No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2021	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2022
1	LEK Dumai qq Zulfikar 104-2-000279	30,280.00	0.00	28.00	30,308.00
2	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70000-1	675,858,260.00	0.00	5,426,790.00	681,285,050.00
No	Nama Rekening	Saldo per 31 Desember 2021	Pengembalian dari Nasabah	Bagi Hasil Rekening Giro /Tabungan setelah dikurangi pajak	Saldo per 31 Desember 2022
3	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70003-8	1,643,576,786.00	69,248,533.00	26,826,497.00	1,739,651,816.00
4	LEK Dumai (Rek Penerima) 10-40-70004-1	10,273,507.00	0.00	30,650.00	10,304,157.00
	Jumlah	2,329,738,833.00	69,248,533.00	32,283,965.00	2,431,271,331.00

Empat rekening LEK tersebut merupakan rekening dengan specimen tandatangan Sdr. Zulfikar atau manager LEK periode terakhir. Empat rekening tersebut tidak dapat dilakukan penarikan dana, namun hanya digunakan sebagai penyetoran pengembalian dana bergulir oleh nasabah sejak tahun 2012.

Daftar Pinjaman dan Tunggakan Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan Periode Tahun 2007 dan Daftar Pinjaman dan Tunggakan Fasilitas Pengembangan UKM Keluarga Miskin Tahun 2007 terdapat dalam Lampiran 14 dan Lampiran 15.

3) **Investasi Permanen**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
51,088,523,186.33	57,769,848,837.39	(6,681,325,651.06)	(11.57)

Investasi Permanen Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp57.769.848.837,39 maka mengalami penurunan senilai Rp6.681.325.651 atau sebesar 11,57% dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
51,088,523,186.33	57,769,848,837.39	(6,681,325,651.06)	(11.57)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp51.088.523.186,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp57.769.848.837,39 maka mengalami penurunan senilai Rp6.681.325.651 atau sebesar 11,57% dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.59 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	PT. Bank Riau	5.203.000.000.00	5.203.000.000.00	0.00	0.00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	4.716.000.553.13	3.536.009.301.90	1.179.991.251.23	33.37
3	PT. Pembangunan Dumai	14.738.743.079.19	25.791.022.076.49	(11.052.278.997.30)	(42.85)
4	PT. Riau Air Line	5.400.000.000.00	5.400.000.000.00	0.00	0.00
5	PDAM Tirta Dumai Bersemai	21.030.779.554.00	17.839.817.459.00	3.190.962.095.00	17.89
Jumlah		51,088,523,186.33	57,769,848,837.39	(6,681,325,651.06)	(11.57)

1. **PT Bank Riau Kepri**

Nilai Penyertaan Modal pada Pemerintah Kota Dumai pada PT Bank Riau Kepri per Tahun 2022 senilai Rp5.203.000.000,00, yang terdiri dari 52.030 lembar saham dengan persentase kepemilikan sebesar 0,43%. penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT. Bank Riau Kepri, Tahun 2022 PT. Bank Riau Kepri telah membagikan dividen senilai Rp1.079.761.191,00 untuk tahun buku 2021 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Riau Kepri pada Tanggal 23 April 2022.

2. **PT Pelabuhan Dumai Berseri**

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pelabuhan Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp4.716.000.553,13 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.536.009.301,90 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.179.991.251,23 atau sebesar 33,37%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97% yang disajikan dengan menggunakan Metode Ekuitas (*Equity Method*).

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pelabuhan Dumai Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 8.217,600,000.00	Modal Saham
2	Laba/Rugi Ditahan	Rp (4,679,821,809.00)	Saldo Awal Laba (rugi) Ditahan
3	Laba/Rugi Periode Berjalan	Rp 1,533,142,801.00	Rugi Tahun Berjalan
4	Deviden	0.00	Saldo Awal Deviden
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp (352,561,259.00)	Saldo Koreksi Beban Laba (Rugi) Tahun lalu
6	Sharing Pendapatan BSJ	0.00	Sharing Pendapatan BSJ
Jumlah a		Rp 4,718,359,733.00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99.95%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 4,716,000,553.13	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

Pada Tahun 2022 PT.Pelabuhan Dumai Berseri memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan audit KAP Khairul. PT. Pelabuhan Dumai Berseri Tahun 2022 membukukan Laba bersih setelah Pajak Senilai Rp1.533.142.801,00. Peningkatan Laba bersih yang signifikan setelah tahun sebelumnya sempat mengalami kerugian akibat gelombang Covid-19, diperoleh dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. Pelabuhan Dumai Berseri dengan PT. Pelindo Cabang Dumai berupa:

1. Pemuatan Semen Bag (FOB) Semen Padang, Perjanjian Kerjasama kegiatan ini dimulai sejak tanggal 01 Mei 2022 s/d 01 April 2025.
2. Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal, Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan KSO PT.PDB dari PT. SLUP dimulai sejak Tanggal 19 Mei 2021 melalui SK Pelimpahan dari Dirjen Perhubungan Laut pada Tersus PT. Oleo Kimia Mas dan PT. Ivo Mas Tunggal.
3. KSO 1 (Satu) unit Kapal Tunda: Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan KSO Antara PT.PDB dan PT.PMS dimulai sejak tanggal 4 Januari 2022.
4. KSO antara PT.PDB dan PT. KBS supporting Pelayanan Jasa Tunda di Tersus Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal Milik PT.KBS dimulai sejak Tanggal 20 Maret 2022.

3. PT Pembangunan Dumai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PT Pembangunan Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp14.738.743.079,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp25.791.022.076,49 maka mengalami penurunan senilai Rp11.052.278.997 atau sebesar 42,85%, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,97%.

Sebagai tambahan informasi pada Tanggal 06 September 2022 sesuai Agenda RUPS-LB Walikota Dumai sebagai Pemilik Saham Utama BUMD PT Pembangunan Dumai memberhentikan Direktur Utama Saudara Bennedi Boiman, memberhentikan Komisaris Saudara Drs. H. Wan Fauzy Effendi dan Syahrinaldi, S.Sos, M.Si mengangkat Saudara Aditya Romas, SST sebagai Direktur, Saudara Sepranef Syamsir, AP, M.Si sebagai Komisaris. Perhitungan Nilai Penyertaan Modal Pada PT Pembangunan Dumai dengan Metode Ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022 (*Audited*) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.60 Rincian Penyertaan Modal PT Pembangunan Dumai Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 31,182,264,000.00	Modal Saham
2	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp (9,173,389,326.00)	Saldo Laba (rugi) Tahun Lalu
3	Lab a / (Rugi) Periode Berjalan	Rp (2,994,539,877.00)	Rugi Tahun Berjalan
4	Deviden	Rp0.00	Deviden yang sudah disetor
5	Koreksi Laba Ditahan	Rp (4,271,168,768.00)	Koreksi Laba/Rugi Ditahan
	Jumlah a	Rp 14,743,166,029.00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	99.97%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 14,738,743,079.19	Ekuitas Yang Diakui Senilai Kepemilikan

Berdasarkan hasil dari Laporan Auditor Independen KAP Boy Febrian memberikan Opini untuk Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan PT. Pembangunan, dengan basis opini sebagai berikut:

Pada saldo akun Kas dan Setara Kas untuk saldo Rekening Bank senilai Rp315.885.681,00 terdapat ketidaksesuaian antara pencatatan perusahaan senilai Rp315.88.681,00 dengan konfirmasi saldo Bank senilai Rp33.853.359,00. Juga terdapat saldo yang belum dibukukan yaitu Rp134.192.698,00.

Pada saldo akun Piutang tidak bisa dibuktikan kevaliditasan atas akun Piutang secara keseluruhan, dan nilai yang ditelusuri merupakan nilai yang materialitas senilai Rp1.85321.554,00 sebagaimana tertuang dalam catatan atas laporan keuangan PT. Pembangunan, Auditor tidak bisa mendapatkan konfirmasi atas jumlah piutang, prosedur alternatif juga tidak didapatkan sampai dengan Laporan Audit diterbitkan.

Perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum pada pencatatan Aset Tetap. Ditambah dengan dilakukannya koreksi secara material terhadap Aset Tetap secara internal dan merubah metode pencatatan. Mutasi biaya penyusutan akibat perhitungan ulang internal cukup material, dimana biaya penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp2820.299.531,00 sementara pada tahun 2021 biaya penyusutan sebesar Rp745.680.962,00.

Pada saldo akun Aset dalam proses senilai Rp5.397,003,395,00 sebagaimana tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Pembangunan merupakan transaksi yang terjadi sebelum Tahun 2022 Auditor tidak dapat menelusuri keberadaan Aset, prosedur alternatif juga tidak didapatkan sampai dengan Laporan Audit diterbitkan.

Saldo akun Kewajiban terdapat Hutang-hutang yang belum didapatkan kevaliditasannya atas Utang Usaha dan lain-lain, ditambah Utang Bank yang nilainya sangat besar dan sudah pernah dilakukan Restrukturisasi. Prosedur alternatif juga tidak didapatkan sampai dengan Laporan Audit diterbitkan.

Perusahaan belum mengakui Kewajiban Imbalan Pasca kerja dalam Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2022. Kewajiban tersebut harusnya diakui agar penerapannya sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Bab 23 dan undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

4. PT Riau Air Line

Nilai penyertaan modal pertama Pemerintah Kota Dumai pada Riau Airline dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2005 senilai Rp1.500.000.000,00 yang terdiri dari 1.500 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,00 perlembar saham melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline nomor: 27501-29000/RAL/2005. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2006 Pemerintah Kota Dumai kembali menambah penyertaan modal kepada Riau Airline senilai Rp3.900.000.000,00 yang terdiri dari 3.900 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 melalui sertifikat saham yang dikeluarkan PT Riau Airline Nomor: 51151-55050/RAL/2006. Persentase kepemilikan Pemerintah Kota Dumai pada PT Riau Airline per 31 Desember 2015 adalah sebesar 3,42% menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*).

Pada tanggal 12 Juli 2012 PT. Riau Airline dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. Riau Airline sehingga status pailit PT Riau Airline berakhir.

Tabel 5.5.61 Penyertaan Modal Pada Riau Airline

No.	Tahun	Jumlah
1	2005	Rp 1,500,000,000.00
2	2006	Rp 3,900,000,000.00
Jumlah		Rp 5,400,000,000.00

5. PDAM Tirta Dumai Bersemai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai per 31 Desember 2022 senilai Rp21.030.779.554,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp17.839.817.459,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.190.962.095,00 atau sebesar 17,89%, dengan persentase kepemilikan sebesar 100%. penilaian penyertaan modal pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dengan menggunakan metode ekuitas dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.62 Rincian Penyertaan Modal PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah	Keterangan
a	Modal dan Cadangan:		
1	Modal Awal (Aset)	Rp 53,303,392,000.00	
2	Modal Awal (Saham) yang telah ditempatkan dan disetor penuh	Rp 10,320,520,000.00	
	Jumlah Modal	Rp 63,623,912,000.00	
3	Saldo Awal Laba / (Rugi) Ditahan	Rp(45,784,094,541.00)	Saldo laba (rugi) Ditahan
4	Koreksi Laba Ditahan	Rp 680,107,379.00	Koreksi Saldo Laba Tahun Lalu
5	Laba / (Rugi) Berjalan	Rp 2,510,854,716.00	Laba Tahun Berjalan
	Jumlah a	Rp 21,030,779,554.00	Ekuitas Akhir 100%
b	Kepemilikan saham	100.00%	
c	Penyertaan Modal - Metode Ekuitas (a x b)	Rp 21,030,779,554.00	

Pada Tahun 2022 PDAM Tirta Dumai Bersemai mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan audit KAP Khairul. PDAM Tirta Dumai Bersemai Tahun 2022 membukukan Laba Bersih sebelum pajak senilai Rp2.510.854.716,00 Kenaikan Laba yang signifikan dari tahun sebelumnya didapat dari adanya peningkatan pertumbuhan pelanggan (Sambungan Langganan) sebesar 37,4% yang otomatis berdampak pada Peningkatan Air Terjual sebesar 100,2%.

c. Aset Tetap

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,769,498,572,429.53	2,679,041,994,881.42	90,456,577,548.11	3.38

Aset Tetap pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.769.498.572.429,53 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.679.041.994.881,42 maka mengalami kenaikan senilai Rp90.456.577.548,11 atau sebesar 3,38% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.5.63 Rincian Aset Tetap per Jenis Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah	663,869,747,203.42	661,486,214,865.96	2,383,532,337.46	0.36
2	Peralatan dan Mesin	847,100,176,538.41	776,533,030,032.11	70,567,146,506.30	9.09
3	Gedung dan Bangunan	1,081,480,906,107.57	1,014,947,165,081.88	66,533,741,025.69	6.56
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2,457,323,337,875.90	2,390,039,096,680.91	67,284,241,194.99	2.82

5	Aset Tetap Lainnya	59,805,527,274.44	56,223,639,963.74	3,581,887,310.70	6.37
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	259,619,088,807.87	217,661,117,431.33	41,957,971,376.54	19.28
7	Akumulasi Penyusutan	#####	(2,437,848,269,174.51)	(161,851,942,203.57)	6.64
	Jumlah	2,769,498,572,429.53	2,679,041,994,881.42	90,456,577,548.11	3.38

Peningkatan Aset Tetap per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	266,354,087,756.95
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0.00
	Transfer Masuk	13,202,873,425.65
	Reklasifikasi Masuk	30,425,078,619.08
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	18,406,619,325.26
	Hasil Inventarisasi	525,723,450.00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	9,977,000.00
	Koreksi Pencatatan	410,187,100.00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
	Jumlah (a)	329,334,546,676.94
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	12,650,158,732.81
	Transfer ke Asetnya	0.00
	Transfer Keluar	13,202,873,425.65
	Reklasifikasi Keluar	26,575,950,654.00
	Hibah/ Dana BOS (Perolehan lain yang sah)	24,397,044,112.79
	Hasil Inventarisasi	0.00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (ekstra)	0.00
	Koreksi Pencatatan	0.00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
	Jumlah (b)	76,826,026,925.26
	Kenaikan/(Penurunan) Akumulasi Penyusutan (c)	(162,051,942,203.58)
	Kenaikan/(Penurunan) = (a) - (b) + (c)	90,456,577,548.11

Keterangan:

1	Pengadaan adalah penambahan Aset Tetap akibat pengadaan yang dianggarkan dalam APBD Tahun berjalan, sedangkan penghapusan adalah kebalikannya yaitu pengurangan Aset Tetap karena dihapuskan.
2	Transfer dari KDP Tahun lalu adalah penambahan Aset Tetap akibat Aset Tetap yang dibangun (KDP) Tahun lalu telah selesai Tahun pelaporan, sedangkan transfer ke Aset Tetapnya adalah pengurangan Aset Tetap KDP akibat telah selesai Tahun pelaporan.
3	Transfer Masuk adalah penambahan Aset Tetap dari SKPD lain dalam satu entitas pelaporan, sedangkan Transfer Keluar adalah pengurangan Aset Tetap akibat penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain dalam satu entitas pelaporan.
4	Reklasifikasi Masuk adalah penambahan Aset Tetap dari jenis Aset Tetap yang lain atau Aset lainnya dalam satu SKPD, sedangkan Reklasifikasi Keluar adalah pengurangan Aset Tetap kepada jenis Aset Tetap yang lain atau Aset Lainnya dalam satu SKPD.
5	Penerimaan Hibah adalah penambahan Aset Tetap dari pemberian pihak luar entitas pelaporan tanpa memberikan apapun, sedangkan Pemberian Hibah adalah pengurangan Aset Tetap akibat memberikan Aset Tetap kepada pihak lain di luar entitas pelaporan.
6	Koreksi pencatatan adalah mengkoreksi pencatatan baik tambah/kurang dalam Laporan Keuangan (akun Aset Tetap) sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

No	Uraian	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	260,201,936,711.64
	Belanja Pegawai	162,491,100.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	17,007,164,105.31
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	55,686,767,894.68
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	756,319,347.50
	Masuk dari BM JIJ	2,451,333,902.24
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	531,169,222.00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0.00
	Jumlah ---1	336,797,182,283.37
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	(555,729,200.00)
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(951,672,548.50)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(2,000,551,036.24)
	Keluar ke aset JIJ	(3,849,170,808.14)
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	(150,802,500.00)
	Keluar ke aset KDP	(51,909,561,273.54)
	Keluar ke Aset Lainnya	(468,715,500.00)
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(2,532,867,870.00)

	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(8,024,023,790.00)
	Jumlah ---2	(70,443,094,526.42)
3	Selisih lebih/(kurang)	266,354,087,756.95

Rekapitulasi Daftar Aset Tetap, Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2022 terdapat pada Lampiran 16 dan 17.

Penjelasan Aset Tetap Kota Dumai dapat diuraikan per jenis Aset Tetap sebagai berikut:

1) **Tanah**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
663,869,747,203.42	661,486,214,865.96	2,383,532,337.46	0.36

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp663.869.747.203,42 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp661.486.214.865,96 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.383.532.337,46 atau sebesar 0,36%

Tanah Pemerintah Kota Dumai sebanyak 330 persil, 230 persil telah bersertifikat. Sisanya 100 persil dengan nilai Rp79.638.012.736,00 belum memiliki sertifikat. Dari 100 persil tanah tersebut terdapat 55 persil senilai Rp59.984.280.647,00 tidak dapat dilakukan sertifikasi disebabkan beberapa alasan yaitu:

- (1) Proses sertifikasi atas 22 persil aset tanah senilai Rp26.739.247.327,00 tidak dapat diterbitkan oleh BPN karena diindikasikan lokasi titik koordinat lahan berada di kawasan hutan, DAS, area 100 meter sempadan pantai, dan 100 meter dari as jalan BMN,
- (2) Tercatat dua persil aset tanah yang dicatat di KIB A merupakan aset eks PT CPI antara lain Tanah kantor Kelurahan Mekar Sari senilai Rp96.979.800,00 dan Tanah SDN 006 Mekar sari senilai 615.570.000,00. DJKN menyatakan bahwa seluruh barang yang diperoleh atau dibeli dan digunakan oleh KKKS PT CPI dalam kegiatan usaha hulu migas sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak kerja sama termasuk tanah adalah BMN. Selanjutnya DJKN menegaskan agar kantor pertanahan tidak menerbitkan hak-hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) BMN dimaksud, selain kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan, dan
- (3) Proses sertifikasi 31 persil tanah dengan total nilai Rp32.532.483.520 tidak dapat diterbitkan sertifikat dikarenakan daerah tersebut merupakan area konsesi eks PT CPI.

Pemerintah Kota Dumai bersama dengan DPRD Kota Dumai akan membahas dengan instansi terkait atas kejelasan status 55 persil tanah yang berlokasi di kawasan konsesi, kawasan hutan, area DAS, 100 meter sempadan pantai, dan 100 meter dari as jalan BMN.

Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.64 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,060,980,050.00	25,135,980,050.00	(75,000,000.00)	(0.30)
2	Dinas Kesehatan	10,485,918,870.00	9,580,131,870.00	905,787,000.00	9.45
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425,993,880,744.03	426,385,572,744.03	(391,692,000.00)	(0.09)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	100,788,000.00	100,788,000.00	0.00	0.00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,323,700,000.00	1,323,700,000.00	0.00	0.00
6	Dinas Tenaga Kerja	700,000,000.00	739,200,000.00	(39,200,000.00)	(5.30)
7	Dinas Lingkungan Hidup	2,905,000,000.00	2,905,000,000.00	0.00	0.00
No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,444,800,000.00	1,444,800,000.00	0.00	0.00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54,300,000.00	54,300,000.00	0.00	0.00
10	Dinas Perhubungan	13,774,037,079.33	9,650,306,000.00	4,123,731,079.33	42.73
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13,046,592,000.00	12,796,592,000.00	250,000,000.00	1.95
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106,624,000.00	106,624,000.00	0.00	0.00
13	Dinas Perikanan	6,759,158,571.00	6,759,158,571.00	0.00	0.00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,848,562,000.00	13,048,562,000.00	(200,000,000.00)	(1.53)
15	Dinas Perdagangan	8,300,883,840.00	7,952,693,840.00	348,190,000.00	4.38
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270,480,000.00	270,480,000.00	0.00	100.00
17	Sekretariat Daerah	69,980,087,020.00	69,940,887,020.00	39,200,000.00	0.06
18	Sekretariat DPRD	920,372,500.00	920,372,500.00	0.00	0.00
19	Kecamatan Dumai Barat	2,435,396,492.00	2,435,396,492.00	0.00	0.00
20	Kecamatan Dumai Timur	2,520,278,280.00	2,520,278,280.00	0.00	0.00
21	Kecamatan Bukit Kapur	818,462,650.00	818,462,650.00	0.00	0.00
22	Kecamatan Medang Kampai	492,320,000.00	492,320,000.00	0.00	0.00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	928,530,250.00	928,530,250.00	0.00	0.00
24	Kecamatan Dumai Kota	1,093,780,000.00	1,999,567,000.00	(905,787,000.00)	(45.30)

25	Kecamatan Dumai Selatan	3,088,853,550.00	3,088,853,550.00	0.00	0.00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	58,415,961,307.06	60,087,658,048.93	(1,671,696,741.87)	(2.78)
Jumlah		663,869,747,203.42	661,486,214,865.96	2,383,532,337.46	0.36

Peningkatan aset tetap tanah per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)		4,123,731,079.33
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu		0.00
Transfer Masuk		1,793,177,000.00
Reklasifikasi Masuk		0.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)		22,037,500.00
Hasil Inventarisasi		525,723,450.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstra)		0.00
Koreksi Pencatatan		410,187,100.00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0.00
Jumlah (a)		6,874,856,129.33
Pengurangan (b)		
Penghapusan		0.00
Transfer Ke Asetnya		0.00
Transfer Keluar		1,793,177,000.00
Reklasifikasi Keluar		0.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)		2,498,146,791.87
Hasil Inventarisasi		0.00
Koreksi Pencatatan		200,000,000.00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0.00
Jumlah (b)		4,491,323,791.87
Kenaikan/(Penurunan) --2		2,383,532,337.46
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	3,534,281,800.00
	Belanja Pegawai	0.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	62,741,879.33
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0.00
No	URAIAN	NILAI
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0.00
	Masuk dari BM JIJ	555,729,200.00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0.00
	Masuk dari Utang Pada Pihak Ketiga	0.00
	Jumlah ---1	4,152,752,879.33
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0.00
	Keluar ke aset Peralatan dan Mesin	0.00
	Keluar ke aset Gedung dan Bagunan	0.00
	Keluar ke aset JIJ	0.00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0.00
	Keluar ke aset KDP	0.00
	Keluar ke Aset Lainnya	0.00
	Keluar ke Ektrakomptabel	0.00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(29,021,800.00)
	Jumlah ---2	(29,021,800.00)
3	Selisih lebih/(kurang)	4,123,731,079.33

Tabel 5.5.65 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dan 2021

NO	SKPD	Tahun 2021	MUTASI		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,135,980,050.00	0.00	75,000,000.00	25,060,980,050.00
2	Dinas Kesehatan	9,580,131,870.00	905,787,000.00	0.00	10,485,918,870.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	426,385,572,744.03	0.00	391,692,000.00	425,993,880,744.03
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100,788,000.00	0.00	0.00	100,788,000.00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,323,700,000.00	0.00	0.00	1,323,700,000.00
6	Dinas Tenaga Kerja	739,200,000.00	0.00	39,200,000.00	700,000,000.00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2,905,000,000.00	0.00	0.00	2,905,000,000.00

8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,444,800,000.00	0.00	0.00	1,444,800,000.00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54,300,000.00	0.00	0.00	54,300,000.00
10	Dinas Perhubungan	9,650,306,000.00	4,123,731,079.33	0.00	13,774,037,079.33
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12,796,592,000.00	250,000,000.00	0.00	13,046,592,000.00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	106,624,000.00	0.00	0.00	106,624,000.00
13	Dinas Perikanan	6,759,158,571.00	0.00	0.00	6,759,158,571.00
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13,048,562,000.00	0.00	200,000,000.00	12,848,562,000.00
15	Dinas Perdagangan	7,952,693,840.00	598,190,000.00	250,000,000.00	8,300,883,840.00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	270,480,000.00	0.00	0.00	270,480,000.00
17	Sekretariat Daerah	69,940,887,020.00	39,200,000.00	0.00	69,980,087,020.00
18	Sekretariat DPRD	920,372,500.00	0.00	0.00	920,372,500.00
19	Kecamatan Dumai Barat	2,435,396,492.00	0.00	0.00	2,435,396,492.00
20	Kecamatan Dumai Timur	2,520,278,280.00	0.00	0.00	2,520,278,280.00
21	Kecamatan Bukit Kapur	818,462,650.00	0.00	0.00	818,462,650.00
22	Kecamatan Medang Kampai	492,320,000.00	0.00	0.00	492,320,000.00
23	Kecamatan Sungai Sembilan	928,530,250.00	0.00	0.00	928,530,250.00
24	Kecamatan Dumai Kota	1,999,567,000.00	0.00	905,787,000.00	1,093,780,000.00
25	Kecamatan Dumai Selatan	3,088,853,550.00	0.00	0.00	3,088,853,550.00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	60,087,658,048.93	986,969,850.00	2,658,666,591.87	58,415,961,307.06
	JUMLAH	661,486,214,865.96	6,903,877,929.33	4,520,345,591.87	663,869,747,203.42

Hibah Tanah dari PPKD ke KKP POLTEK PERIKANAN senilai Rp1.201.461.991,87 berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah NO.B.245/BRSDM/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan BAP NO.02/BA-PENELITIAN/2022 tanggal 16 Maret 2022. Hibah Tanah dari PPKD ke Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Dumai (BKGD) senilai Rp829.992.800,00 berdasarkan Surat Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Dumai (BKGD) NO.02/BKGD-SP/X/2022 tanggal 01 November 2022, Surat Persetujuan WALI KOTA NO.032/541/BPKAD-ASET tanggal 25 November 2022 dan SK HIBAH NO.900/928/2022 tanggal 28 November 2022.

Tabel 5.5.66 Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2022 dan 2021

NO	Aset Tanah	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	4,289,500,000.00	4,328,700,000.00	(39,200,000.00)	(0.91)
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	34,669,634,919.33	34,301,163,840.00	368,471,079.33	1.07
NO	Aset Tanah	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
3	Tanah untuk Bangunan Industri	22,528,873,500.00	22,528,873,500.00	0.00	0.00
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	129,799,131,233.00	129,874,131,233.00	(75,000,000.00)	(0.06)
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	100.00
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	5,916,082,447.00	5,894,044,947.00	22,037,500.00	0.37
7	Tanah Persil Lainnya	13,848,374,110.00	9,368,003,560.00	4,480,370,550.00	47.83
8	Tanah Basah	11,805,470,000.00	11,805,470,000.00	0.00	0.00
9	Tanah Kering	5,427,456,700.00	6,257,449,500.00	(829,992,800.00)	(13.26)
10	Tanah Hutan	2,539,997,350.06	3,741,459,341.93	(1,201,461,991.87)	(32.11)
11	Tanah Pertanian	5,283,770,000.00	5,483,770,000.00	(200,000,000.00)	(3.65)
12	Tanah Lapangan Olahraga	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
13	Tanah Lapangan Parkir	482,553,953.00	482,553,953.00	0.00	0.00
14	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	2,959,300,000.00	2,959,300,000.00	0.00	0.00
15	Tanah untuk Jalan	384,488,388,402.53	384,880,080,402.53	(391,692,000.00)	(0.10)
16	Tanah untuk Bangunan Air	39,280,426,588.50	39,280,426,588.50	0.00	0.00
17	Tanah untuk Bangunan Instalasi	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Tanah untuk Makam	100,788,000.00	100,788,000.00	0.00	0.00
	Jumlah	663,869,747,203.42	661,486,214,865.96	2,383,532,337.46	0.36

Rincian Hibah Tanah senilai Rp2.498.146.791,87 sebagai berikut:

Tabel 5.5.67 Rincian Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2022

No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
-----	--------	--------	----------	------------

1	TANAH HUTAN WISATA TELUK MAKMUR 1 PERSIL LUAS 53.944M3 TH 2012	1,201,461,991.87	KKP POLTEK PERIKANAN	BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH NO.B.245/BRSDM/III/2022 TGL.31.03.2022 BAP NO.02/BA-PENELITIAN/2022 TGL.16.03.2022 SURAT WALIKOTA DUMAI NO.032/404.1/BPKAD-ASET TGL.12.04.2022 TTG PERSETUJUAN HIBAH SK WALIKOTA DUMAI NO.032/537/2022 TTG PENGHAPUSAN BMD TGL.27.05.2022
No.	Barang	Jumlah	Hibah Ke	Keterangan
2	TANAH KOSONG YG SUDAH DIPERUNTUKKAN LUAS 45.604M2 TH2012 FASILITAS TANAH OLAH RAGA	829,992,800.00	BADAN KERJASAMA GEREJA-GEREJA KOTA DUMAI (BKGD)	BERDASARKAN SURAT KETUA BADAN KERJASAMA GEREJA-GEREJA KOTA DUMAI (BKGD) NO.02/BKGD-SP/X/2022 TGL.01.11.2022 SURAT PERSETUJUAN WALIKOTA NO.032/541/BPKAD-ASET TGL.25.11.2022 SK HIBAH NO.900/928/2022 TGL.28.11.2022
3	1.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) TANAH Rp75.000.000 SBB: -SDN 010 KAYU KAPUR Rp75.000.000 -SMPN 16 KOTA DUMAI Rp0	75,000,000.00	KABUPATEN BENGKALIS	BERDASARKAN SK HIBAH NO.900/1017/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 NHPD NO.53/NP/BPKAD-ASET/2022 DAN 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 BAST NO.54/BAST/BPKAD/2022 DAN 667/BAST/ASET/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1018/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
4	1.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) TANAH Rp394.674.000 SBB: -TANAH Jl. Bukit Abas Luas 24,018M2 TH2004 Bukit Kapur Rp336,252,000.00 -TANAH Jl. Bukit Abas II Luas 2,969M2 TH2004 Bukit Kapur	391,692,000.00	KABUPATEN BENGKALIS	BERDASARKAN SK HIBAH NO.900/1017/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 NHPD NO.53/NP/BPKAD-ASET/2022 DAN 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 BAST NO.54/BAST/BPKAD/2022 DAN 667/BAST/ASET/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1018/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
		2,498,146,791.87		

2) Peralatan dan Mesin

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
847,100,176,538.41	776,533,030,032.11	70,567,146,506.30	9.09

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp847.100.176.538,41 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp776.533.030.032,11 maka mengalami kenaikan senilai Rp70.567.146.506,30 atau sebesar 9,09%. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.68 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112,900,451,527.17	106,799,578,273.60	6,100,873,253.57	5.71
2	Dinas Kesehatan	356,641,001,800.13	317,699,426,105.13	38,941,575,695.00	12.26
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50,003,317,565.08	43,213,440,540.08	6,789,877,025.00	15.71
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,724,698,446.00	2,618,396,046.00	106,302,400.00	4.06
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3,475,494,420.00	3,423,377,528.00	52,116,892.00	1.52
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29,219,975,210.00	24,312,687,460.00	4,907,287,750.00	20.18
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	2,259,567,684.00	2,025,086,884.00	234,480,800.00	11.58
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3,014,245,550.00	2,897,745,550.00	116,500,000.00	4.02
9	Dinas Tenaga Kerja	5,329,395,507.00	5,045,506,318.00	283,889,189.00	5.63
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,193,888,792.00	2,193,888,792.00	0.00	0.00
11	Dinas Lingkungan Hidup	24,316,824,073.30	19,916,778,376.20	4,400,045,697.10	22.09
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,945,394,330.00	5,381,894,330.00	563,500,000.00	10.47
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,803,453,698.00	4,106,638,698.00	696,815,000.00	16.97
14	Dinas Perhubungan	52,026,425,784.99	52,828,821,642.36	(802,395,857.37)	(1.52)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9,199,025,455.17	8,764,271,642.16	434,753,813.01	4.96
16	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3,398,130,755.00	3,398,130,755.00	0.00	0.00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,599,425,400.00	6,087,325,809.00	512,099,591.00	8.41

18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2,742,860,844.00	2,391,655,444.00	351,205,400.00	14.68
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,073,904,553.00	4,486,282,473.00	587,622,080.00	13.10
20	Dinas Perikanan	4,311,748,193.20	5,348,286,193.20	(1,036,538,000.00)	(19.38)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13,265,210,468.20	13,671,003,468.20	(405,793,000.00)	(2.97)
22	Dinas Perdagangan	4,967,983,797.86	4,915,093,797.86	52,890,000.00	1.08
23	Sekretariat Daerah	62,011,381,238.00	59,202,605,676.00	2,808,775,562.00	4.74
24	Sekretariat DPRD	12,501,436,420.00	12,266,639,120.00	234,797,300.00	1.91
25	Kecamatan Dumai Barat	2,889,248,745.00	2,394,947,300.00	494,301,445.00	20.64
26	Kecamatan Dumai Timur	3,964,529,996.00	3,327,922,520.00	636,607,476.00	19.13
27	Kecamatan Bukit Kapur	2,892,773,885.00	2,772,876,585.00	119,897,300.00	4.32
28	Kecamatan Medang Kampai	4,251,612,136.00	4,221,142,136.00	30,470,000.00	0.72
29	Kecamatan Sungai Sembilan	3,077,734,882.00	3,164,994,820.00	(87,259,938.00)	(2.76)
30	Kecamatan Dumai Kota	3,760,204,637.34	2,877,979,637.34	882,225,000.00	30.65
31	Kecamatan Dumai Selatan	3,828,397,851.00	3,206,557,388.00	621,840,463.00	19.39
32	Inspektorat	4,674,851,059.00	4,200,648,209.00	474,202,850.00	11.29
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,607,740,589.00	7,283,165,395.00	324,575,194.00	4.46
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11,830,008,167.00	12,049,000,107.00	(218,991,940.00)	(1.82)
35	Badan Pendapatan Daerah	14,949,556,662.98	13,590,958,596.98	1,358,598,066.00	10.00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,448,276,416.00	4,448,276,416.00	0.00	0.00
Jumlah		847,100,176,538.41	776,533,030,032.11	70,567,146,506.30	9.09

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)	80,909,754,042.13
	Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0.00
	Transfer Masuk	6,484,830,100.00
	Reklasifikasi Masuk	68,870,000.00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	3,209,301,943.10
	Hasil Inventarisasi	0.00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	9,977,000.00
	Koreksi Pencatatan	0.00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
	Jumlah (a)	90,682,733,085.23
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	6,414,147,300.00
	Transfer Ke Asetnya	0.00
	Transfer Keluar	6,484,830,100.00
	Reklasifikasi Keluar	5,000,644,419.00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	2,215,964,759.93
	Hasil Inventarisasi	0.00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomtabel)	0.00
	Koreksi Pencatatan	0.00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
	Jumlah (b)	20,115,586,578.93
Kenaikan/(Penurunan) --2		70,567,146,506.30
No	URAIAN	Nilai
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	91,334,440,997.63
	Belanja Pegawai	162,491,100.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	266,967,485.14
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	0.00
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	107,222,326.50
	Masuk dari BM JJJ	459,874,000.00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	392,679,222.00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0.00
	Jumlah ---1	92,723,675,131.27
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0.00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	0.00

	Keluar ke Aset Gedung dan Bangunan	(217,663,134.00)
	Keluar ke Aset JIJ	(3,849,170,808.14)
	Keluar ke Aset Tetap Lainnya	(150,802,500.00)
	Keluar ke Aset KDP	(586,963,550.00)
	Keluar ke Aset Lainnya	-
	Keluar ke Ekstrakomptabel	(2,532,867,870.00)
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT dan pembayaran utang Tahun 2020	(4,476,453,227.00)
	Jumlah ---2	(11,813,921,089.14)
3	Selisih lebih/(kurang)	80,909,754,042.13

Adapun rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.69 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106,799,578,273.61	11,878,159,249.00	5,777,285,995.43	112,900,451,527.17
2	Dinas Kesehatan	72,509,313,862.97	9,070,062,585.00	1,021,574,455.00	80,557,801,992.97
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	245,190,112,242.17	33,434,976,807.00	2,541,889,242.00	276,083,199,807.17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	43,213,440,540.08	11,768,209,113.04	4,978,332,088.04	50,003,317,565.08
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,618,396,046.00	355,151,400.00	248,849,000.00	2,724,698,446.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3,423,377,528.00	52,116,892.00	0.00	3,475,494,420.00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24,312,687,460.00	6,838,287,300.00	1,930,999,550.00	29,219,975,210.00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,025,086,884.00	235,346,700.00	865,900.00	2,259,567,684.00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	2,897,745,550.00	116,500,000.00	0.00	3,014,245,550.00
10	Dinas Tenaga Kerja	5,045,506,318.00	283,889,189.00	0.00	5,329,395,507.00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,193,888,792.00	0.00	0.00	2,193,888,792.00

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
12	Dinas Lingkungan Hidup	19,916,778,376.20	5,663,881,697.10	1,263,836,000.00	24,316,824,073.30
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5,381,894,330.00	563,500,000.00	0.00	5,945,394,330.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,106,638,698.00	744,330,000.00	47,515,000.00	4,803,453,698.00
15	Dinas Perhubungan	52,828,821,642.34	3,421,799,044.23	4,224,194,901.59	52,026,425,784.98
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8,764,271,642.16	436,120,213.00	1,366,400.00	9,199,025,455.16
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3,398,130,755.00	0.00	0.00	3,398,130,755.00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6,087,325,809.00	3,104,521,000.00	2,592,421,409.00	6,599,425,400.00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2,391,655,444.00	367,866,800.00	16,661,400.00	2,742,860,844.00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,486,282,473.00	587,622,080.00	0.00	5,073,904,553.00
21	Dinas Perikanan	5,348,286,193.20	437,902,000.00	1,474,440,000.00	4,311,748,193.20
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13,671,003,468.20	239,007,000.00	644,800,000.00	13,265,210,468.20
23	Dinas Perdagangan	4,915,093,797.86	53,790,000.00	900,000.00	4,967,983,797.86
24	Sekretariat Daerah	59,202,605,676.00	5,274,121,162.00	2,465,345,600.00	62,011,381,238.00
25	Sekretariat DPRD	12,266,639,120.00	410,797,300.00	176,000,000.00	12,501,436,420.00
26	Kecamatan Dumai Barat	2,394,947,300.00	520,701,445.00	26,400,000.00	2,889,248,745.00
27	Kecamatan Dumai Timur	3,327,922,520.00	636,607,476.00	0.00	3,964,529,996.00
28	Kecamatan Bukit Kapur	2,772,876,585.00	169,959,809.00	50,062,509.00	2,892,773,885.00
29	Kecamatan Medang Kampai	4,221,142,136.00	49,640,000.00	19,170,000.00	4,251,612,136.00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	3,164,994,820.00	47,740,062.00	135,000,000.00	3,077,734,882.00
31	Kecamatan Dumai Kota	2,877,979,637.35	939,355,000.00	57,130,000.00	3,760,204,637.35
32	Kecamatan Dumai Selatan	3,206,557,388.00	631,112,463.00	9,272,000.00	3,828,397,851.00
33	Inspektorat	4,200,648,209.00	1,087,902,850.00	613,700,000.00	4,674,851,059.00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,283,165,395.00	447,692,194.00	123,117,000.00	7,607,740,589.00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	8,240,903,857.00	1,121,378,060.00	243,800,000.00	9,118,481,917.00
35B	Pengelola Barang Milik Daerah (PPKD)	3,808,096,250.00	112,500,000.00	1,209,070,000.00	2,711,526,250.00
36	Badan Pendapatan Daerah	13,590,958,596.98	1,394,107,284.00	35,509,218.00	14,949,556,662.98
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,448,276,416.00	0.00	0.00	4,448,276,416.00

	JUMLAH	776,533,030,032.11	102,496,654,174.36	31,929,507,668.07	847,100,176,538.41
--	---------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------

Terdapat 26 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp120.525.855,43 tidak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang. Dari jumlah total 26 unit Aset Tetap yang telah dinyatakan hilang, 23 unit telah dilengkapi dengan laporan kehilangan dari kepolisian, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.70 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Tidak Diketahui Keberadaannya

NO	Nama SKPD	Jenis Barang	Jumlah	Tahun Pembelian	Harga (Rp)
1	Kec. Dumai Kota	Sepeda Motor	1	2014	16,818,000.00
2	Kec. Dumai Kota	Kursi Manager	3	2012	2,970,000.00
3	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Staff	4	2012	2,279,200.00
4	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Staff	2	2013	1,074,700.00
5	Kec. Dumai Kota	Kursi Kerja Lurah	1	2012	1,000,000.00
6	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2013	2,300,000.00
7	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2013	2,300,000.00
8	Kec. Dumai Kota	Mesin Potong Rumput	1	2016	2,915,000.00
9	Kec. Dumai Kota	Sound Sistem Mobile	1	2014	2,805,000.00
10	Kec. Dumai Kota	Infokus	1	2012	6,325,000.00
11	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2011	6,855,571.43
12	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7,920,000.00
13	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7,920,000.00
14	Kec. Dumai Kota	Komputer	1	2012	7,920,000.00
15	Kec. Dumai Kota	Komputer PC	1	2015	7,969,500.00
16	Kec. Dumai Kota	Printer	1	2010	632,429.00
17	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9,992,000.00
18	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9,992,000.00
19	Kec. Dumai Timur	Sepeda Motor	1	2002	9,992,000.00
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sepeda Motor	1	2006	10,545,455.00
Jumlah			26		120,525,855.43

Atas Aset Tetap yang hilang tersebut belum dilakukan proses penyelesaian ganti rugi melalui penetapan MP TPTGR. Bidang Aset menyatakan bahwa BPKAD telah menyurati Inspektur Kota Dumai pada 4 Oktober 2022 terkait pemeriksaan Aset tetap yang hilang dan melaporkan hasilnya ke Wali Kota Dumai atau melalui BPKAD Kota Dumai untuk dapat diproses lebih lanjut. Sampai posisi 29 Mei 2023 belum didapatkan jawaban dari Inspektur Kota Dumai atas surat Kepala BPKAD tersebut

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.71 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	Aset Peralatan dan Mesin	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Besar	67,107,369,434.38	62,730,023,774.12	4,377,345,660.26	6.98
2	Alat Angkutan	144,324,223,629.30	131,713,502,913.20	12,610,720,716.10	9.57
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5,681,188,718.00	5,519,283,418.00	161,905,300.00	2.93
4	Alat Pertanian	5,991,898,299.00	5,991,898,299.00	0.00	0.00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	166,892,116,964.89	155,451,236,091.39	11,440,880,873.50	7.36
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16,262,561,068.83	14,905,622,726.83	1,356,938,342.00	9.10
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	243,237,423,627.19	211,385,703,705.19	31,851,719,922.00	15.07
8	Alat Laboratorium	53,069,479,963.02	51,970,580,881.92	1,098,899,081.10	2.11
9	Komputer	106,821,700,881.18	97,239,652,928.71	9,582,047,952.47	9.85
10	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	425,077,984.74	0.00	425,077,984.74	100.00
11	Alat Keselamatan Kerja	2,440,491,521.00	2,889,098,769.00	(448,607,248.00)	(15.53)
12	Alat Peraga	48,873,500.00	45,573,500.00	3,300,000.00	7.24
13	Peralatan Proses/Produksi	2,612,930,185.00	2,612,930,185.00	0.00	0.00
14	Rambu-rambu	24,932,520,837.57	25,089,953,432.43	(157,432,594.86)	(0.63)
15	Peralatan Olahraga	409,485,279.31	391,266,779.31	18,218,500.00	4.66
16	Peralatan dan Mesin BOS	6,842,834,645.01	8,596,702,628.01	(1,753,867,983.00)	(20.40)
Jumlah		847,100,176,538.41	776,533,030,032.11	70,567,146,506.30	9.09

a. Alat Besar

Alat Besar pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp67.107.369.434,38 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp62.730.023.774,12, maka mengalami kenaikan senilai Rp4.377.345.660,26 atau sebesar 6,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.72 Rincian Alat Besar

NO	Alat Besar	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Tractor	2,296,962,800.00	2,996,962,800.00	(700,000,000.00)	(23.36)

2	Grader	3,489,900,000.00	2,789,900,000.00	700,000,000.00	25.09
3	Excavator	20,598,349,388.00	16,503,349,388.00	4,095,000,000.00	24.81
4	Hauler	1,013,829,010.00	1,103,829,010.00	(90,000,000.00)	(8.15)
5	Compacting Equipment	3,457,575,000.00	3,361,560,000.00	96,015,000.00	2.86
6	Aggregate and Concrete Equipment	106,986,850.00	106,986,850.00	0.00	0.00
7	Loader	3,469,950,000.00	4,069,950,000.00	(600,000,000.00)	(14.74)
NO	Alat Besar	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
8	Alat Pengangkat	0.00	1,259,150,000.00	(1,259,150,000.00)	(100.00)
9	Mesin Proses	1,032,667,000.00	1,032,667,000.00	0.00	0.00
10	Alat Besar Darat Lainnya	2,672,976,997.00	2,672,976,997.00	0.00	0.00
11	Alat Penarik	34,980,000.00	34,980,000.00	0.00	0.00
12	Feeder	858,920,000.00	858,920,000.00	0.00	0.00
13	Compressor	25,500,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00
14	Electric Generating Set	6,363,869,368.00	6,349,060,868.00	14,808,500.00	0.23
15	Pompa	6,904,605,489.99	6,721,468,489.99	183,137,000.00	2.72
16	Unit Pemeliharaan Lapangan	39,163,945.00	0.00	39,163,945.00	100.00
17	Alat Pengolahan Air Kotor	4,340,310,633.13	4,340,310,633.13	(0.01)	(0.00)
18	Perlengkapan Kebakaran Hutan	3,836,881,350.00	3,164,286,350.00	672,595,000.00	21.26
19	Alat Bantu Lainnya	6,563,941,603.26	5,338,165,388.00	1,225,776,215.26	22.96
Jumlah		67,107,369,434.38	62,730,023,774.12	4,377,345,660.26	6.98

b. Alat Angkutan

Alat Angkutan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp144.324.223.629,30 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp131.713.502.913,20, maka mengalami kenaikan senilai Rp12.610.720.716,10 atau sebesar 9,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.73 Rincian Alat Angkutan

NO	Alat Angkutan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38,794,246,319.00	39,064,029,798.00	(269,783,479.00)	(0.69)
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	34,270,026,050.00	34,539,052,550.00	(269,026,500.00)	(0.78)
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24,230,786,711.30	18,745,416,664.20	5,485,370,047.10	29.26
4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10,475,769,543.00	9,084,749,893.00	1,391,019,650.00	15.31
5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4,631,321,412.00	2,480,927,414.00	2,150,393,998.00	86.68
6	Kendaraan Bermotor Khusus	27,515,157,600.00	23,387,020,600.00	4,128,137,000.00	17.65
7	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	340,247,400.00	345,637,400.00	(5,390,000.00)	(1.56)
8	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	533,842,600.00	533,842,600.00	0.00	0.00
9	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	521,065,000.00	521,065,000.00	0.00	0.00
10	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2,959,258,394.00	2,959,258,394.00	0.00	0.00
11	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	52,502,600.00	52,502,600.00	0.00	0.00
Jumlah		144,324,223,629.30	131,713,502,913.20	12,610,720,716.10	9.57

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp5.681.188.718,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.519.283.418,00, maka mengalami penurunan senilai Rp161.905.300,00 atau sebesar 2,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.74 Rincian Alat Bengkel dan Alat Ukur

NO	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada	1,095,070,250.00	1,067,542,250.00	27,528,000.00	2.58
2	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	41,482,000.00	41,482,000.00	0.00	0.00
3	Perkakas Bengkel Listrik	51,008,750.00	51,008,750.00	0.00	0.00
4	Perkakas Bengkel Service	75,349,800.00	75,349,800.00	0.00	0.00
5	Perkakas Pengangkat Bermesin	5,170,000.00	5,170,000.00	0.00	0.00
6	Perkakas Bengkel Kayu	62,019,000.00	44,597,000.00	17,422,000.00	39.07
7	Perkakas Bengkel Khusus	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00

8	Peralatan Las	5,250,000.00	7,900,000.00	(2,650,000.00)	(33.54)
9	Perkakas Pabrik Es	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00
10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	249,904,000.00	51,602,500.00	198,301,500.00	384.29
11	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
12	Perkakas Bengkel Listrik	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
13	Perkakas Pengangkat	40,535,000.00	40,535,000.00	0.00	0.00
14	Perkakas Standard (Standard Tools)	48,100,000.00	48,100,000.00	0.00	0.00
15	Perkakas Khusus (Special Tools)	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
16	Perkakas Bengkel Kerja	11,780,000.00	11,780,000.00	0.00	0.00
17	Peralatan Tukang Besi	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00
18	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting	13,514,000.00	13,514,000.00	0.00	0.00
19	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
20	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	25,905,000.00	25,905,000.00	0.00	0.00
21	Alat Ukur Universal	1,147,700,170.00	1,230,871,170.00	(83,171,000.00)	(6.76)
22	Universal Tester	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
23	Alat Ukur/Pembanding	21,325,000.00	21,325,000.00	0.00	0.00
24	Alat Ukur Lain-Lain	324,475,500.00	324,475,500.00	0.00	0.00
NO	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
25	Alat Timbangan/Biara	4,474,800.00	0.00	4,474,800.00	100.00
26	Anak Timbangan/Biara	277,494,800.00	277,494,800.00	0.00	0.00
27	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	69,850,000.00	69,850,000.00	0.00	0.00
28	Specific Set	1,406,834,750.00	1,406,834,750.00	0.00	0.00
29	Alat Pengukur Keadaan Alam	29,920,000.00	29,920,000.00	0.00	0.00
30	Alat Ukur Lainnya	578,625,898.00	578,625,898.00	0.00	0.00
Jumlah		5,681,188,718.00	5,519,283,418.00	161,905,300.00	2.93

d. Alat Pertanian

Alat Pertanian pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp5.991.898.299,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.991.898.299,00, maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.75 Rincian Alat Pertanian

NO	Alat Pertanian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	4,892,636,047.00	4,892,636,047.00	0.00	0.00
2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	53,280,252.00	53,280,252.00	0.00	0.00
3	Alat Panen	51,069,000.00	51,069,000.00	0.00	0.00
4	Alat Processing	580,400,000.00	580,400,000.00	0.00	0.00
5	Alat Pasca Panen	42,850,000.00	42,850,000.00	0.00	0.00
6	Alat Produksi Perikanan	127,810,000.00	127,810,000.00	0.00	0.00
7	Alat-Alat Peternakan	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
8	Alat Pengolahan Lainnya	231,353,000.00	231,353,000.00	0.00	0.00
Jumlah		5,991,898,299.00	5,991,898,299.00	0.00	0.00

e. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp166.892.116.964,89 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp155.451.236.091,39, maka mengalami penurunan senilai Rp11.440.880.873,50 atau sebesar 7,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.76 Rincian Alat Kantor dan Rumah Tangga

NO	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Mesin ketik	1,024,930,120.00	993,320,120.00	31,610,000.00	3.18
2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	777,539,500.00	785,479,500.00	(7,940,000.00)	(1.01)
3	Alat Reproduksi (Penggandaan)	4,252,240,670.00	4,222,888,670.00	29,352,000.00	0.70
4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	17,085,662,369.67	16,327,833,760.67	757,828,609.00	4.64
5	Alat Kantor Lainnya	22,459,841,693.66	14,761,831,988.66	7,698,009,705.00	52.15

6	Mebel	47,547,760,075.35	46,219,733,455.35	1,328,026,620.00	2.87
7	Alat Pengukur Waktu	47,967,650.00	38,287,650.00	9,680,000.00	25.28
8	Alat Pembersih	3,929,398,797.00	3,917,754,897.00	11,643,900.00	0.30
9	Alat Pendingin	19,924,747,304.61	19,495,470,882.61	429,276,422.00	2.20
10	Alat Dapur	1,688,977,678.64	1,561,345,781.64	127,631,897.00	8.17
11	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35,744,620,633.03	34,934,727,550.03	809,893,083.00	2.32
12	Alat Pemadam Kebakaran	3,965,829,803.00	4,056,021,303.00	(90,191,500.00)	(2.22)
13	Meja Kerja Pejabat	1,790,560,613.42	1,766,484,313.42	24,076,300.00	1.36
14	Meja Rapat Pejabat	1,209,464,037.16	1,168,747,849.66	40,716,187.50	3.48
15	Kursi Kerja Pejabat	1,949,629,802.50	1,731,937,152.50	217,692,650.00	12.57
16	Kursi Rapat Pejabat	148,360,000.00	148,360,000.00	0.00	0.00
17	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	79,548,449.08	81,948,449.08	(2,400,000.00)	(2.93)
18	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	457,732,466.00	457,732,466.00	0.00	0.00
19	Lemari dan Arsip Pejabat	2,807,305,301.77	2,781,330,301.77	25,975,000.00	0.93
Jumlah		166,892,116,964.89	155,451,236,091.39	11,440,880,873.50	7.36

f. Alat Studio dan Komunikasi

Alat Studio dan Komunikasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp16.262.561.068,83 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp14.905.622.726,83 maka mengalami penurunan senilai Rp1.356.938.342,00 atau sebesar 9,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.77 Rincian Alat Studio dan Komunikasi

NO	Alat Studio dan Komunikasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan Studio Audio	4,030,604,842.00	4,009,337,364.00	21,267,478.00	0.53
2	Peralatan Studio Video dan Film	5,566,678,748.16	4,978,573,138.16	588,105,610.00	11.81
3	Peralatan Studio Gambar	189,916,398.00	181,683,445.00	8,232,953.00	4.53
4	Peralatan Cetak	14,925,000.00	4,425,000.00	10,500,000.00	237.29
5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	386,406,300.00	308,502,200.00	77,904,100.00	25.25
6	Alat Studio Lainnya	1,461,879,401.00	1,192,811,200.00	269,068,201.00	22.56
7	Alat Komunikasi Telephone	2,389,034,099.00	2,010,166,599.00	378,867,500.00	18.85
8	Alat Komunikasi Radio SSB	190,929,864.00	190,929,864.00	0.00	0.00
9	Alat Komunikasi Radio HF/FM	50,372,090.00	50,372,090.00	0.00	0.00
10	Alat Komunikasi Radio VHF	67,711,000.00	67,711,000.00	0.00	0.00
11	Alat Komunikasi Radio UHF	182,356,500.00	182,356,500.00	0.00	0.00
12	Alat Komunikasi Sosial	13,108,300.00	13,108,300.00	0.00	0.00
13	Alat-Alat Sandi	28,313,000.00	28,313,000.00	0.00	0.00
14	Alat Komunikasi Khusus	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	100.00
15	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	119,079,500.00	119,079,500.00	0.00	0.00
16	Alat Komunikasi Lainnya	352,079,750.00	352,079,750.00	0.00	0.00
17	Peralatan Pemancar MF/MW	1,292,500.00	0.00	1,292,500.00	100.00
18	Peralatan Pemancar VHF/FM	45,676,500.00	45,676,500.00	0.00	0.00
19	Peralatan Antena VHF/FM	6,125,000.00	6,125,000.00	0.00	0.00
20	Peralatan Antena UHF	68,385,000.00	68,385,000.00	0.00	0.00
21	Peralatan Antena SHF/Parabola	17,231,500.00	17,231,500.00	0.00	0.00
22	Switcher Antena	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
23	Switcher/Menara Antena	533,659,216.67	533,659,216.67	0.00	0.00
24	Peralatan Antena Penerima VHF	8,900,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00
25	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF	194,820,000.00	194,820,000.00	0.00	0.00
26	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF	99,000,000.00	99,000,000.00	0.00	0.00
27	Sumber Tenaga	215,579,500.00	215,579,500.00	0.00	0.00
28	Peralatan Pemancar Lainnya	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
29	Distance Measuring Equipment (DME)	15,197,060.00	15,197,060.00	0.00	0.00
Jumlah		16,262,561,068.83	14,905,622,726.83	1,356,938,342.00	9.10

g. Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp243.237.423.627,19 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp211.385.703.705,19 maka mengalami penurunan senilai Rp31.851.719.922,00 atau sebesar 15,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.78 Rincian Alat Kedokteran dan Kesehatan

NO	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Kedokteran Umum	66,157,920,312.64	57,797,512,032.64	8,360,408,280.00	14.46
2	Alat Kedokteran Gigi	6,528,180,063.00	5,048,983,138.00	1,479,196,925.00	29.30
3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	125,575,971.00	125,575,971.00	0.00	0.00
4	Alat Kedokteran Bedah	38,358,705,279.47	33,691,896,593.47	4,666,808,686.00	13.85
5	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	11,822,252,225.56	11,819,602,225.56	2,650,000.00	0.02
6	Alat Kedokteran THT	3,054,616,349.49	3,044,626,349.49	9,990,000.00	0.33
7	Alat Kedokteran Mata	4,888,820,117.50	4,413,220,117.50	475,600,000.00	10.78
8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	8,089,488,867.00	7,426,218,867.00	663,270,000.00	8.93
NO	Alat Kedokteran dan Kesehatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
9	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	1,507,851,695.00	1,507,851,695.00	0.00	0.00
10	Alat Kedokteran Anak	10,086,933,656.00	10,016,998,656.00	69,935,000.00	0.70
11	Alat Kedokteran Poliklinik	4,720,532,592.00	4,720,865,592.00	(333,000.00)	(0.01)
12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	2,953,913,591.00	2,951,915,591.00	1,998,000.00	0.07
13	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	11,554,094,332.00	11,554,094,332.00	0.00	0.00
14	Alat Kedokteran Jantung	14,256,818,235.00	5,822,702,235.00	8,434,116,000.00	100.00
15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	16,110,432,327.00	11,077,213,327.00	5,033,219,000.00	45.44
16	Alat Kedokteran Transfusi Darah	100,125,600.00	100,125,600.00	0.00	0.00
17	Alat Kedokteran Radioterapi	917,982,694.00	875,425,294.00	42,557,400.00	100.00
18	Alat Kedokteran Nuklir	799,795,793.00	799,795,793.00	0.00	0.00
19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	375,610,696.00	375,610,696.00	0.00	0.00
20	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5,009,367,043.97	5,009,367,043.97	0.00	0.00
21	Alat Kedokteran Jiwa	56,527,500.00	56,527,500.00	0.00	0.00
22	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	149,490,000.00	149,490,000.00	0.00	0.00
23	Alat Kedokteran ICU	4,639,017,194.78	4,407,017,196.78	231,999,998.00	5.26
24	Alat Kedokteran ICCU	17,983,315,530.00	17,983,315,530.00	0.00	0.00
25	Alat Kedokteran Bedah Jantung	110,431,090.00	110,431,090.00	0.00	0.00
26	Alat Kedokteran Anestesi	3,619,739,236.50	3,619,739,236.50	0.00	0.00
27	Alat Kedokteran Lainnya	1,864,235,200.00	224,843,600.00	1,639,391,600.00	729.13
28	Alat Kesehatan Olahraga	245,067,961.00	245,067,961.00	0.00	0.00
29	Alat Kesehatan Umum Lainnya	7,150,582,474.28	6,409,670,441.28	740,912,033.00	11.56
Jumlah		243,237,423,627.19	211,385,703,705.19	31,851,719,922.00	15.07

h. Alat Laboratorium

Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp53.069.479.963,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp51.970.580.881,92 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.098.899.081,10 atau sebesar 2,1% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.79 Rincian Alat Laboratorium

NO	Alat Laboratorium	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	2,037,605,452.00	2,037,605,452.00	0.00	0.00
2	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	126,800,000.00	126,800,000.00	0.00	0.00
3	Alat Laboratorium Hidrokimia	213,000,000.00	213,000,000.00	0.00	0.00
4	Alat Laboratorium Model Hidrolika	257,890,946.00	257,890,946.00	0.00	0.00
5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	121,424,900.00	121,424,900.00	0.00	0.00
6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	2,825,836,000.00	2,825,836,000.00	0.00	0.00
7	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	134,200,000.00	134,200,000.00	0.00	0.00
8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	673,588,000.00	673,588,000.00	0.00	0.00
9	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	900,180,000.00	1,094,880,000.00	(194,700,000.00)	(17.78)
10	Alat Laboratorium Umum	7,569,642,591.00	6,346,276,957.00	1,223,365,634.00	19.28
11	Alat Laboratorium Mikrobiologi	8,987,321,595.00	8,987,321,595.00	0.00	0.00
12	Alat Laboratorium Kimia	4,812,500.00	4,812,500.00	0.00	0.00
13	Alat Laboratorium Patologi	1,568,447,697.00	1,568,447,697.00	0.00	0.00

14	Alat Laboratorium Immunologi	775,999,400.00	775,999,400.00	0.00	0.00
15	Alat Laboratorium Hematologi	2,183,034,925.00	2,183,034,925.00	0.00	0.00
16	Alat Laboratorium Film	113,350,000.00	113,350,000.00	0.00	0.00
17	Alat Laboratorium Fisika	463,063,500.00	194,603,000.00	268,460,500.00	100.00
18	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	48,712,000.00	48,712,000.00	0.00	0.00
19	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	87,120,000.00	87,120,000.00	0.00	0.00
20	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	334,125,000.00	334,125,000.00	0.00	0.00
21	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	61,500,000.00	61,500,000.00	0.00	0.00
22	Alat Laboratorium Pertanian	690,850,080.00	690,850,080.00	0.00	0.00
NO	Alat Laboratorium	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
23	Alat Laboratorium Elektronika dan Dava	59,070,000.00	59,070,000.00	0.00	0.00
24	Alat Laboratorium Oseanografi	34,430,000.00	34,430,000.00	0.00	0.00
25	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	10,903,000.00	10,903,000.00	0.00	0.00
26	Alat Laboratorium Biologi	265,160,500.00	0.00	265,160,500.00	100.00
27	Alat Laboratorium Geofisika	2,585,000.00	2,585,000.00	0.00	0.00
28	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	291,200,000.00	291,200,000.00	0.00	0.00
29	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	61,600,000.00	61,600,000.00	0.00	0.00
30	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	605,400,000.00	605,400,000.00	0.00	0.00
31	Alat Laboratorium Lain	1,939,297,956.00	1,939,297,956.00	0.00	0.00
32	Unit Alat Laboratorium Lainnya	1,600,554,329.00	2,166,350,529.00	(565,796,200.00)	(26.12)
33	Analytical Instrument	46,167,000.00	46,167,000.00	0.00	0.00
34	Instrument Probe/Sensor	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00
35	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	716,534,280.00	716,534,280.00	0.00	0.00
36	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	448,957,320.00	448,957,320.00	0.00	0.00
37	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	1,310,687,000.00	1,310,687,000.00	0.00	0.00
38	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00
39	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	228,200,000.00	228,200,000.00	0.00	0.00
40	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	822,276,069.40	822,276,069.40	0.00	0.00
41	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	1,604,718,002.72	1,604,718,002.72	0.00	0.00
42	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	823,806,524.01	823,806,524.01	0.00	0.00
43	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	762,431,624.47	762,431,624.47	0.00	0.00
44	Alat Peraga PAUD/TK	408,069,700.00	84,642,700.00	323,427,000.00	382.11
45	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	9,564,930,537.42	9,785,948,890.32	(221,018,352.90)	(2.26)
46	Assembly/Counting System	62,300,000.00	62,300,000.00	0.00	0.00
47	Peralatan Hidrologi	28,349,000.00	28,349,000.00	0.00	0.00
48	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	101,503,934.00	101,503,934.00	0.00	0.00
49	Alat Laboratorium Kualitas Udara	430,048,000.00	430,048,000.00	0.00	0.00
50	Laboratorium Lingkungan	74,800,000.00	74,800,000.00	0.00	0.00
51	Alat Laboratorium Penunjang	515,558,600.00	515,558,600.00	0.00	0.00
52	Pemesinan: Electrical Workshop	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00
53	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	36,432,000.00	36,432,000.00	0.00	0.00
54	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00
Jumlah		53,069,479,963.02	51,970,580,881.92	1,098,899,081.10	2.11

i. Komputer

Komputer pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp106.821.700.881,18 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp97.239.652.928,71 maka mengalami kenaikan senilai Rp9.582.047.952,47 atau sebesar 9,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.80 Rincian Komputer

NO	Komputer	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Komputer Jaringan	3,210,454,260.00	2,958,270,260.00	252,184,000.00	8.52
2	Personal Computer	59,693,449,031.78	54,612,698,013.78	5,080,751,018.00	9.30
3	Komputer Unit Lainnya	5,951,301,171.00	5,802,732,111.00	148,569,060.00	2.56

4	Peralatan Mainframe	2,750,505,483.16	2,714,428,683.16	36,076,800.00	1.33
5	Peralatan Mini Computer	201,831,000.00	200,411,000.00	1,420,000.00	0.71
6	Peralatan Personal Computer	18,564,834,651.33	12,722,045,140.33	5,842,789,511.00	45.93
7	Peralatan Jaringan	5,423,097,794.54	5,383,022,320.54	40,075,474.00	0.74
8	Peralatan Komputer Lainnya	11,026,227,489.37	12,846,045,399.90	(1,819,817,910.53)	(14.17)
Jumlah		106,821,700,881.18	97,239,652,928.71	9,582,047,952.47	9.85

j. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp425.077.984,74 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp425.077.984,74 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.81 Rincian Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

NO	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Sumur Pemboran	425,077,984.74	0.00	425,077,984.74	100.00
Jumlah		425,077,984.74	0.00	425,077,984.74	100.00

k. Alat Keselamatan Kerja

Alat Keselamatan Kerja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.440.491.521,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.889.098.769,00 maka mengalami penurunan senilai Rp448.607.248,00 atau sebesar 15,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.82 Rincian Alat Keselamatan Kerja

NO	Alat Keselamatan Kerja	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Radiasi	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Alat Deteksi Lainnya	68,180,250.00	68,180,250.00	0.00	0.00
3	Topi Kerja	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
4	Sepatu Lapangan	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	0.00
5	Alat Pelindung Lainnya	1,098,721,821.00	1,098,721,821.00	0.00	0.00
6	Alat Penolong	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
7	Alat Pendukung Pencarian	952,621,000.00	952,621,000.00	0.00	0.00
8	Alat SAR Lainnya	261,239,000.00	261,239,000.00	0.00	0.00
9	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Penanganan Bandar Udara	37,179,450.00	485,786,698.00	(448,607,248.00)	(92.35)
Jumlah		2,440,491,521.00	2,889,098,769.00	(448,607,248.00)	(15.53)

l. Alat Peraga

Alat Peraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp48.873.500,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp45.573.500,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.300.000,00 atau sebesar 7,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.83 Rincian Alat Peraga

NO	Alat Peraga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Alat Peraga Pelatihan	1,523,500.00	1,523,500.00	0.00	0.00
2	Alat Peraga Percontohan	47,350,000.00	44,050,000.00	3,300,000.00	7.49
Jumlah		48,873,500.00	45,573,500.00	3,300,000.00	7.24

m. Peralatan Proses/Produksi

Peralatan Proses/Produksi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.612.930.185,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.612.930.185,00 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.84 Rincian Peralatan Proses/Produksi

NO	Peralatan Proses/Produksi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Heat Generating Equipment	2,612,930,185.00	2,612,930,185.00	0.00	0.00
Jumlah		2,612,930,185.00	2,612,930,185.00	0.00	0.00

n. Rambu-Rambu

Rambu-rambu pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp24.932.520.837,57 jika dibandingkan dengan Tahun

2021 senilai Rp25.089.953.432,43 maka mengalami penurunan senilai Rp157.432.594,86 atau sebesar 0,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.85 Rincian Rambu-rambu

NO	Rambu-rambu	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rambu Bersuar	7,619,368,184.71	8,036,532,806.20	(417,164,621.49)	(5.19)
2	Rambu Tidak Bersuar	16,483,249,652.86	16,223,517,626.23	259,732,026.63	1.60
3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	829,903,000.00	829,903,000.00	0.00	0.00
Jumlah		24,932,520,837.57	25,089,953,432.43	(157,432,594.86)	(0.63)

o. Peralatan Olahraga

Peralatan Olahraga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp409.485.279,31 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp391.266.779,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp18.218.500,00 atau sebesar 4,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.86 Rincian Peralatan Olahraga

NO	Peralatan Olahraga	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Peralatan Olahraga Atletik	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2	Peralatan Permainan	375,643,300.14	364,924,800.14	10,718,500.00	2.94
3	Peralatan Senam	13,100,000.00	2,600,000.00	10,500,000.00	403.85
4	Peralatan Olahraga Lainnya	19,741,979.17	22,741,979.17	(3,000,000.00)	(13.19)
Jumlah		409,485,279.31	391,266,779.31	18,218,500.00	4.66

p. Peralatan dan Mesin BOS

Peralatan dan Mesin BOS pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp6.842.834.645,01 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp8.596.702.628,01 maka mengalami penurunan senilai Rp1.753.867.983,00 atau sebesar 20,40%.

3) Gedung dan Bangunan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1,081,480,906,107.57	1,014,947,165,081.88	66,533,741,025.69	6.56

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.081.480.906.107,57 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.014.947.165.081,88 maka mengalami kenaikan senilai Rp66.533.741.025,69 atau sebesar 6,56% Adapun penjelasan atas peningkatan Aset Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.87 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	442,008,900,904.92	427,029,801,760.87	14,979,099,144.05	3.51
2	Dinas Kesehatan	103,411,124,339.56	104,352,343,722.63	(941,219,383.07)	(0.90)
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	172,836,388,511.83	143,407,954,259.31	29,428,434,252.52	20.52
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36,537,344,803.85	28,625,612,944.62	7,911,731,859.23	27.64
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9,310,425,605.51	9,310,425,605.51	0.00	0.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1,580,780,061.88	1,388,686,311.88	192,093,750.00	13.83
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,682,837,160.00	2,682,837,160.00	0.00	0.00
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5,380,826,430.07	3,538,625,847.00	1,842,200,583.07	52.06
10	Dinas Tenaga Kerja	4,499,129,671.00	4,554,139,406.00	(55,009,735.00)	(1.21)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,285,460,003.60	1,285,460,003.60	0.00	0.00
12	Dinas Lingkungan Hidup	6,804,882,475.00	6,944,832,475.00	(139,950,000.00)	(2.02)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899,370,000.00	899,370,000.00	0.00	0.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,399,771,000.00	2,399,771,000.00	0.00	0.00
15	Dinas Perhubungan	27,701,945,925.76	26,984,673,730.07	717,272,195.70	2.66

16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,155,754,317.76	1,155,754,317.76	0.00	0.00
No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	3,755,970,225.83	4,826,415,845.83	(1,070,445,620.00)	(22.18)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	505,585,000.00	3,431,180,000.00	(2,925,595,000.00)	(85.26)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	33,216,984,076.58	27,066,893,018.21	6,150,091,058.37	22.72
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,530,870,362.36	4,530,870,362.36	0.00	0.00
21	Dinas Perikanan	5,848,164,810.00	5,848,164,810.00	0.00	0.00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,084,968,507.00	11,885,278,507.00	199,690,000.00	1.68
23	Dinas Perdagangan	24,405,396,574.14	21,256,152,834.46	3,149,243,739.68	14.82
24	Sekretariat Daerah	77,639,782,483.49	73,385,707,023.49	4,254,075,460.00	5.80
25	Sekretariat DPRD	23,065,137,240.00	23,065,137,240.00	0.00	0.00
26	Kecamatan Dumai Barat	5,713,990,544.17	5,713,990,544.17	0.00	0.00
27	Kecamatan Dumai Timur	7,116,941,779.38	7,116,941,779.38	0.00	0.00
28	Kecamatan Bukit Kapur	5,833,945,963.61	5,702,641,963.61	131,304,000.00	2.30
29	Kecamatan Medang Kampai	3,373,348,540.54	3,373,348,540.54	0.00	0.00
30	Kecamatan Sungai Sembilan	4,470,742,409.46	4,470,742,409.46	(0.00)	(0.00)
31	Kecamatan Dumai Kota	3,992,961,331.17	3,693,281,331.17	299,680,000.00	8.11
32	Kecamatan Dumai Selatan	7,990,275,616.08	7,879,202,616.08	111,073,000.00	1.41
33	Inspektorat	5,792,427,827.07	5,469,278,827.07	323,149,000.00	5.91
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,683,731,972.26	7,683,731,972.26	0.00	0.00
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	13,987,630,135.76	12,331,078,439.60	1,656,551,696.16	13.43
36	Badan Pendapatan Daerah	7,312,361,897.94	6,992,090,872.94	320,271,025.00	4.58
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,664,747,600.00	4,664,747,600.00	0.00	0.00
Jumlah		1,081,480,906,107.57	1,014,947,165,081.88	66,533,741,025.69	6.56

Peningkatan aset Tetap gedung dan bangunan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
Pembelian (Harga perolehan BM+BBJ+BP)		53,681,356,350.33
Transfer dari KDP Tahun2 Lalu		0.00
Transfer Masuk		4,924,866,325.65
Reklasifikasi Masuk		29,941,510,125.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)		3,049,362,882.16
Hasil Inventarisasi		0.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel		0.00
Koreksi Pencatatan		0.00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0.00
Jumlah (a)		91,597,095,683.14

Pengurangan (b)		
Penghapusan		6,221,121,432.80
Transfer Ke Asetnya		0.00
Transfer Keluar		4,924,866,325.66
Reklasifikasi Keluar		0.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)		13,917,366,898.99
Hasil Inventarisasi		0.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel		0.00
Koreksi Pencatatan		0.00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0.00
Jumlah (b)		25,063,354,657.45
Kenaikan/(Penurunan) --2		66,533,741,025.69
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	87,322,813,477.02
	Belanja Pegawai	0.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	10,686,057,882.57
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	217,663,134.00
	Masuk dari BM Gedung dan Bangunan	208,667,200.00

	Masuk dari BM JIJ	1,435,730,702.24
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	138,490,000.00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0.00
	Jumlah ---1	100,009,422,395.83
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	0.00
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(107,222,326.50)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	0.00
	Keluar ke Aset JIJ	0.00
	Keluar ke Aset Aset Tetap Lainnya	0.00
	Keluar ke Aset KDP	(45,038,504,519.00)
	Keluar ke Aset Lainnya	0.00
	Keluar ke Ekstrakomtabel	0.00
	Keluar ke Persediaan/Tidak Masuk AT	(1,182,339,200.00)
	Jumlah ---2	(46,328,066,045.50)
3	Selisih lebih/(kurang)	53,681,356,350.33

Tabel 5.5.88 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	427,029,801,760.87	22,363,954,560.00	7,384,855,415.95	442,008,900,904.92
2	Dinas Kesehatan	104,352,343,722.63	900,981,200.00	1,842,200,583.07	103,411,124,339.56
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	143,407,954,259.32	29,968,212,091.52	539,777,839.00	172,836,388,511.84
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28,625,612,944.62	54,926,697,079.81	47,014,965,220.58	36,537,344,803.85
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9,310,425,605.51	0.00	0.00	9,310,425,605.51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1,388,686,311.88	192,093,750.00	0.00	1,580,780,061.88
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,682,837,160.00	0.00	0.00	2,682,837,160.00
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3,538,625,847.00	1,842,200,583.07	0.00	5,380,826,430.07
10	Dinas Tenaga Kerja	4,554,139,406.00	49,990,265.00	105,000,000.00	4,499,129,671.00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,285,460,003.60	0.00	0.00	1,285,460,003.60
12	Dinas Lingkungan Hidup	6,944,832,475.00	0.00	139,950,000.00	6,804,882,475.00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	899,370,000.00	0.00	0.00	899,370,000.00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,399,771,000.00	0.00	0.00	2,399,771,000.00
15	Dinas Perhubungan	26,984,673,730.06	9,816,228,220.03	9,098,956,024.34	27,701,945,925.75
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,155,754,317.76	0.00	0.00	1,155,754,317.76
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4,826,415,845.83	0.00	1,070,445,620.00	3,755,970,225.83
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,431,180,000.00	0.00	2,925,595,000.00	505,585,000.00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	27,066,893,018.21	7,191,286,058.36	1,041,195,000.00	33,216,984,076.57
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,530,870,362.36	0.00	0.00	4,530,870,362.36
21	Dinas Perikanan	5,848,164,810.00	0.00	0.00	5,848,164,810.00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11,885,278,507.00	199,690,000.00	0.00	12,084,968,507.00
23	Dinas Perdagangan	21,256,152,834.46	3,149,243,739.67	0.00	24,405,396,574.14
24	Sekretariat Daerah	73,385,707,023.49	4,482,555,460.00	228,480,000.00	77,639,782,483.49
25	Sekretariat DPRD	23,065,137,240.00	0.00	0.00	23,065,137,240.00
26	Kecamatan Dumai Barat	5,713,990,544.17	0.00	0.00	5,713,990,544.17
27	Kecamatan Dumai Timur	7,116,941,779.38	0.00	0.00	7,116,941,779.38
28	Kecamatan Bukit Kapur	5,702,641,963.61	131,304,000.00	0.00	5,833,945,963.61
29	Kecamatan Medang Kampai	3,373,348,540.54	0.00	0.00	3,373,348,540.54
30	Kecamatan Sungai Sembilan	4,470,742,409.46	0.00	0.00	4,470,742,409.46
31	Kecamatan Dumai Kota	3,693,281,331.17	299,680,000.00	0.00	3,992,961,331.17
32	Kecamatan Dumai Selatan	7,879,202,616.08	111,073,000.00	0.00	7,990,275,616.08
NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
33	Inspektorat	5,469,278,827.07	323,149,000.00	0.00	5,792,427,827.07
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,683,731,972.26	0.00	0.00	7,683,731,972.26
35	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12,331,078,439.60	1,656,551,696.16	0.00	13,987,630,135.76

36	Badan Pendapatan Daerah	6,992,090,872.94	320,271,025.00	0.00	7,312,361,897.94
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,664,747,600.00	0.00	0.00	4,664,747,600.00
	Jumlah	1,014,947,165,081.88	137,925,161,728.63	71,391,420,702.94	1,081,480,906,107.57

Di dalam Aset Gedung dan Bangunan Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp1.081.480.906.107,57 terdapat 32 item Gedung Bangunan yang berada diatas Tanah Pinjam Pakai. Daftar Gedung dan Bangunan Pinjam Pakai pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 yang terdapat dalam Lampiran 18.

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.89 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	Aset Gedung dan Bangunan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung	1,062,371,348,721.41	996,378,025,182.13	65,993,323,539.29	6.62
2	Monumen	2,732,696,656.68	2,786,646,656.68	(53,950,000.00)	(1.94)
3	Bangunan Menara	1,332,113,159.80	1,332,113,159.80	0.00	0.00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15,044,747,569.69	14,450,380,083.29	594,367,486.40	4.11
	Jumlah	1,081,480,906,107.57	1,014,947,165,081.88	66,533,741,025.69	6.56

a. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.062.371.348.721,41 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp996.378.025.182,13 maka mengalami kenaikan senilai Rp65.993.323.539,29 atau sebesar 6,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.90 Rincian Bangunan Gedung

NO	Bangunan Gedung	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Gedung Kantor	628,185,594,459.55	612,719,880,314.12	15,465,714,145.43	2.52
2	Bangunan Gudang	11,421,700,114.31	9,750,157,824.51	1,671,542,289.80	17.14
3	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	866,184,834.36	866,184,834.36	0.00	0.00
4	Bangunan Gedung Instalasi	176,999,974.00	176,999,974.00	0.00	0.00
5	Bangunan Gedung Laboratorium	1,263,462,319.45	1,263,462,319.45	0.00	0.00
6	Bangunan Kesehatan	175,713,623,624.75	149,465,030,345.31	26,248,593,279.44	17.56
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13,178,976,033.93	10,756,772,766.17	2,422,203,267.76	22.52
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15,754,922,861.93	15,129,211,536.93	625,711,325.00	4.14
9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	69,988,972,347.41	58,732,482,644.56	11,256,489,702.85	19.17
10	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	15,483,808,000.00	15,198,393,000.00	285,415,000.00	1.88
11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	29,864,694,093.82	26,911,650,354.14	2,953,043,739.68	10.97
12	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5,121,987,536.97	4,740,002,150.97	381,985,386.00	8.06
13	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1,207,060,000.00	1,207,060,000.00	0.00	0.00
14	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	166,832,000.00	166,832,000.00	0.00	0.00
15	Bangunan Gedung Perpustakaan	1,525,382,440.00	1,525,382,440.00	0.00	0.00
16	Bangunan Gedung Museum	199,637,000.00	199,637,000.00	0.00	0.00
17	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	7,228,199,660.34	7,228,199,660.34	(0.00)	(0.00)
18	Bangunan Pengujian Kelaikan	1,718,795,601.12	1,718,795,601.12	(0.00)	(0.00)
19	Bangunan Terbuka	808,703,000.00	622,291,000.00	186,412,000.00	29.96
20	Bangunan Industri	329,853,000.00	329,853,000.00	0.00	0.00
21	Bangunan Peternakan/Perikanan	2,028,133,000.00	2,028,133,000.00	0.00	0.00
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	15,593,153,948.09	15,403,612,921.65	189,541,026.44	1.23
23	Bangunan Fasilitas Umum	4,200,441,214.79	3,373,226,785.12	827,214,429.67	24.52
24	Bangunan Parkir	5,415,834,564.00	5,090,911,982.50	324,922,581.50	6.38
25	Taman	16,542,591,244.68	16,492,706,244.68	49,885,000.00	0.30
NO	Bangunan Gedung	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
26	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4,155,556,100.00	2,126,063,000.00	2,029,493,100.00	95.46
27	Rumah Negara Golongan I	7,145,841,795.00	7,004,035,000.00	141,806,795.00	2.02
28	Rumah Negara Golongan II	17,289,403,662.47	16,704,077,387.55	585,326,274.92	3.50
29	Rumah Negara Golongan III	4,755,092,626.13	4,755,092,626.13	0.00	0.00
30	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	2,495,171,900.00	2,355,273,350.00	139,898,550.00	5.94
31	Asrama	933,959,625.86	725,833,980.05	208,125,645.81	28.67
32	Rumah Tidak Bersusun	995,922,037.00	995,922,037.00	0.00	0.00

33	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	614,858,101.46	614,858,101.46	0.00	0.00
Jumlah		1,062,371,348,721.41	996,378,025,182.13	65,993,323,539.29	6.62

b. Monumen

Monumen pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.732.696.656,68 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.786.646.656,68 maka mengalami penurunan senilai Rp53.950.000,00 atau sebesar 1,94% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.91 Rincian Monumen

NO	Monumen	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Candi	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00
2	Tugu	1,660,405,901.00	1,714,355,901.00	(53,950,000.00)	(3.15)
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1,052,790,755.68	1,052,790,755.68	(0.00)	(0.00)
Jumlah		2,732,696,656.68	2,786,646,656.68	(53,950,000.00)	(1.94)

c. Bangunan Menara

Bangunan Menara pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.332.113.159,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.332.113.159,80 maka tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.92 Rincian Monumen

NO	Bangunan Menara	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	274,015,000.00	274,015,000.00	0.00	0.00
2	Bangunan Menara Telekomunikasi	535,882,259.80	535,882,259.80	0.00	0.00
3	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	522,215,900.00	522,215,900.00	0.00	0.00
Jumlah		1,332,113,159.80	1,332,113,159.80	0.00	0.00

d. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Tugu Titik Kontrol/Pasti pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp15.044.747.569,69 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp14.450.380.083,29 maka mengalami kenaikan senilai Rp594.367.486,40 atau sebesar 4,11% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.93 Rincian Tugu Titik Kontrol/Pasti

NO	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Pagar	11,446,866,916.69	10,852,499,430.29	594,367,486.40	5.48
2	Tugu/Tanda Batas Lainnya	3,597,880,653.00	3,597,880,653.00	0.00	0.00
Jumlah		15,044,747,569.69	14,450,380,083.29	594,367,486.40	4.11

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,457,323,337,875.90	2,390,039,096,680.91	67,284,241,194.99	2.82

Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp2.457.323.337.875,90 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.390.039.096.680,91 maka mengalami kenaikan senilai Rp67.284.241.194,99 atau sebesar 2,82% Peningkatan Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.94 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2,848,164,489.93	2,943,657,210.93	(95,492,721.00)	(3.24)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,292,610,963,951.11	2,234,190,695,151.71	58,420,268,799.40	2.61
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	25,895,861,800.00	22,341,413,500.00	3,554,448,300.00	15.91
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364,787,000.00	364,787,000.00	0.00	0.00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
6	Dinas Tenaga Kerja	869,910,000.00	869,910,000.00	0.00	0.00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6,548,123,000.00	6,548,123,000.00	0.00	0.00

8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
9	Dinas Perhubungan	81,320,886,085.37	79,468,485,068.78	1,852,401,016.59	2.33
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	14,890,000.00	(14,890,000.00)	(100.00)
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5,669,201,645.89	5,451,167,145.89	218,034,500.00	4.00
12	Dinas Perikanan	1,878,389,186.00	1,878,389,186.00	0.00	0.00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5,501,045,627.00	5,013,352,627.00	487,693,000.00	9.73
14	Dinas Perdagangan	122,152,598.60	122,152,598.60	0.00	0.00
15	Sekretariat Daerah	5,540,271,000.00	5,540,271,000.00	0.00	0.00
16	Kecamatan Dumai Barat	4,127,985,572.00	3,919,772,272.00	208,213,300.00	5.31
17	Kecamatan Dumai Timur	2,615,530,000.00	2,615,530,000.00	0.00	0.00
18	Kecamatan Bukit Kapur	6,158,706,650.00	5,181,176,650.00	977,530,000.00	18.87
19	Kecamatan Medang Kampai	3,459,719,000.00	2,923,684,000.00	536,035,000.00	18.33
20	Kecamatan Sungai Sembilan	4,399,250,500.00	3,259,250,500.00	1,140,000,000.00	34.98
21	Kecamatan Dumai Kota	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	0.00
22	Kecamatan Dumai Selatan	3,538,166,770.00	3,538,166,770.00	0.00	0.00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,122,546,000.00	3,122,546,000.00	0.00	0.00
25	Badan Pendapatan Daerah	291,433,000.00	291,433,000.00	0.00	0.00
26	Inspektorat	199,744,000.00	199,744,000.00	0.00	0.00
	Jumlah	2,457,323,337,875.90	2,390,039,096,680.91	67,284,241,194.99	2.82

Peningkatan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)		72,490,649,950.62
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu		0.00
Transfer Masuk		
Reklasifikasi Masuk		414,698,494.08
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)		0.00
URAIAN		
Hasil Inventarisasi		0.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel		0.00
Koreksi Pencatatan		0.00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0.00
Jumlah (a)		72,905,348,444.70
Pengurangan (b)		
Penghapusan		14,890,000.00
Transfer Ke Asetnya		0.00
Transfer Keluar		0.00
Reklasifikasi Keluar		95,492,721.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)		5,510,724,528.71
Hasil Inventarisasi		0.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel		0.00
Koreksi Pencatatan		0.00
Koreksi Rekon Saldo Awal		0.00
Jumlah (b)		5,621,107,249.71
Kenaikan/(Penurunan) --2		67,284,241,194.99

No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	73,340,485,070.99
	Belanja Pegawai	0.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	4,859,216,778.27
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	3,849,170,808.14
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0.00
	Masuk dari BM JIJ	0.00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0.00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	82,048,872,657.40
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke Aset Tanah	(555,729,200.00)
	Keluar ke Aset Peralatan dan Mesin	(459,874,000.00)
	Keluar ke Aset Gedung dan Bagunan	(1,644,397,902.24)

	Keluar ke Aset JIJ	0.00
	Keluar ke Aset Tetap Lainnya	0.00
	Keluar ke Aset KDP	(6,284,093,204.54)
	Keluar ke Aset Lainnya	0.00
	Keluar ke Ekstrakomptabel	0.00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(614,128,400.00)
	Jumlah ---2	(9,558,222,706.78)
3	Selisih lebih/(kurang)	72,490,649,950.62

Tabel 5.5.95 Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	2,943,657,210.93	0.00	95,492,721.00	2,848,164,489.93
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,234,190,695,151.71	69,514,008,821.59	11,093,740,022.19	2,292,610,963,951.11
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	22,341,413,500.00	3,554,448,300.00	0.00	25,895,861,800.00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	364,787,000.00	0.00	0.00	364,787,000.00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
6	Dinas Tenaga Kerja	869,910,000.00	0.00	0.00	869,910,000.00
7	Dinas Lingkungan Hidup	6,548,123,000.00	0.00	0.00	6,548,123,000.00
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
9	Dinas Perhubungan	79,468,485,068.78	4,352,679,603.45	2,500,278,586.86	81,320,886,085.37
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14,890,000.00	0.00	14,890,000.00	0.00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5,451,167,145.89	407,575,526.44	189,541,026.44	5,669,201,645.89
12	Dinas Perikanan	1,878,389,186.00	0.00	0.00	1,878,389,186.00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5,013,352,627.00	487,693,000.00	0.00	5,501,045,627.00
14	Dinas Perdagangan	122,152,598.61	0.00	0.00	122,152,598.61
15	Sekretariat Daerah	5,540,271,000.00	0.00	0.00	5,540,271,000.00
16	Kecamatan Dumai Barat	3,919,772,272.00	208,213,300.00	0.00	4,127,985,572.00
17	Kecamatan Dumai Timur	2,615,530,000.00	0.00	0.00	2,615,530,000.00
18	Kecamatan Bukit Kapur	5,181,176,650.00	977,530,000.00	0.00	6,158,706,650.00
19	Kecamatan Medang Kampai	2,923,684,000.00	536,035,000.00	0.00	3,459,719,000.00
20	Kecamatan Sungai Sembilan	3,259,250,500.00	1,140,000,000.00	0.00	4,399,250,500.00
21	Kecamatan Dumai Kota	216,000,000.00	0.00	0.00	216,000,000.00
22	Kecamatan Dumai Selatan	3,538,166,770.00	0.00	0.00	3,538,166,770.00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,122,546,000.00	0.00	0.00	3,122,546,000.00
25	Badan Pendapatan Daerah	291,433,000.00	0.00	0.00	291,433,000.00
26	Inspektorat	199,744,000.00	0.00	0.00	199,744,000.00
	JUMLAH	2,390,039,096,680.91	81,178,183,551.48	13,893,942,356.49	2,457,323,337,875.90

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.96 Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

NO	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Jalan dan Jembatan	2,050,428,373,359.50	2,014,772,889,175.97	35,655,484,183.53	1.77
2	Bangunan Air	280,583,043,816.55	262,863,394,552.97	17,719,649,263.58	6.74
3	Instalasi	18,042,963,734.76	17,843,175,734.76	199,788,000.00	1.12
4	Jaringan	107,981,508,665.09	94,559,637,217.21	13,421,871,447.88	14.19
5	Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	287,448,300.00	0.00	287,448,300.00	100.00
	Jumlah	2,457,323,337,875.90	2,390,039,096,680.91	67,284,241,194.99	2.82

Sebagai Tambahan Catatan pada tahun 2022 Pemerintah Kota Dumai melakukan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT. Mayatama Solusindo berupa Tanah Bahu Jalan dilingkungan Pemerintah Kota Dumai sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor: 17 Tanggal 14 Februari 2022 dihadapan Notaris dan PPAT Aprilliyani, SH.,M.Kn. Rincian Tanah bahu jalan yang digunakan dalam Perjanjian ini terdapat dalam Lampiran 19.

5) **Aset Tetap Lainnya**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
59,805,527,274.44	56,223,639,963.74	3,581,887,310.70	6.37

Aset Tetap Lainnya pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp59.805.527.274,44 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp56.223.639.963,74 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.581.887.310,70 atau sebesar 6,37%. Peningkatan Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.97 Rincian Aset Tetap lainnya per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50,777,361,070.79	47,223,464,560.09	3,553,896,510.70	7.53
2	Dinas Kesehatan	74,515,000.00	74,515,000.00	0.00	0.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12,527,500.00	12,527,500.00	0.00	0.00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250,018,000.00	250,018,000.00	0.00	0.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,915,000.00	13,915,000.00	0.00	0.00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3,579,000.00	3,579,000.00	0.00	0.00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
8	Dinas Tenaga Kerja	34,120,000.00	34,120,000.00	0.00	0.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1,084,216,000.00	1,084,216,000.00	0.00	0.00
11	Dinas Perhubungan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	2,768,700.00	(2,768,700.00)	(100.00)
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1,298,620,270.00	1,298,620,270.00	0.00	0.00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,142,224,633.65	4,141,247,633.65	977,000.00	0.02
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,154,901,000.00	1,154,901,000.00	0.00	0.00
16	Sekretariat Daerah	280,779,000.00	280,779,000.00	0.00	0.00
17	Sekretariat DPRD	302,562,600.00	302,562,600.00	0.00	0.00
18	Kecamatan Dumai Barat	32,752,000.00	32,752,000.00	0.00	0.00
19	Kecamatan Dumai Timur	39,149,500.00	39,149,500.00	0.00	0.00
20	Kecamatan Bukit Kapur	34,534,500.00	4,752,000.00	29,782,500.00	626.74
21	Kecamatan Medang Kampai	54,552,000.00	54,552,000.00	0.00	0.00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	123,651,700.00	123,651,700.00	0.00	0.00
23	Kecamatan Dumai Kota	62,805,000.00	62,805,000.00	0.00	0.00
24	Kecamatan Dumai Selatan	6,957,500.00	6,957,500.00	0.00	0.00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
26	Badan Pendapatan Daerah	3,036,000.00	3,036,000.00	0.00	0.00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00
	Jumlah	59,805,527,274.44	56,223,639,963.74	3,581,887,310.70	6.37

Kenaikan Aset Tetap Lainnya per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Penambahan (a)	
Pembelian (Harga perolehan BM + BBJ + BP)	3,828,936,144.00
Transfer dari KDP Tahun-tahun Lalu	0.00
Transfer Masuk	0.00
Reklasifikasi Masuk	0.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	977,000.00
Hasil Inventarisasi	0.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
Jumlah (a)	3,829,913,144.00
Pengurangan (b)	
Penghapusan	0.00
Transfer Ke Asetnya	0.00
Transfer Keluar	0.00
Reklasifikasi Keluar	2,768,700.00
Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang sah)	245,257,133.30
Hasil Inventarisasi	0.00
Koreksi Kebijakan Akuntansi (Ekstrakomptabel)	0.00
Koreksi Pencatatan	0.00
Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
Jumlah (b)	248,025,833.30

Kenaikan/(Penurunan) --2		3,581,887,310.70
No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	4,669,915,366.00
	Belanja Pegawai	0.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	0.00
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan dan Mesin	150,802,500.00
	Masuk dari BM Gedung dan Bagunan	0.00
	Masuk dari BM JIJ	0.00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0.00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	
	Jumlah ---1	4,820,717,866.00
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0.00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	(384,576,222.00)
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	(138,490,000.00)
	Keluar ke aset JIJ	0.00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0.00
	Keluar ke aset KDP	0.00
No	URAIAN	NILAI
	Keluar ke Aset Lainnya	(468,715,500.00)
	Keluar ke Ekstrakompabel	0.00
	Keluar ke Pembayaran Hutang BLUD Tahun 2018	0.00
	Jumlah ---2	(991,781,722.00)
3	Selisih lebih/(kurang)	3,828,936,144.00

Tabel 5.5.98 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	47,223,464,560.09	3,937,643,644.00	383,747,133.30	50,777,361,070.79
2	Dinas Kesehatan	74,515,000.00	0.00	0.00	74,515,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12,527,500.00	0.00	0.00	12,527,500.00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	250,018,000.00	0.00	0.00	250,018,000.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13,915,000.00	0.00	0.00	13,915,000.00
6	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	3,579,000.00	0.00	0.00	3,579,000.00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8	Dinas Tenaga Kerja	34,120,000.00	0.00	0.00	34,120,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1,084,216,000.00	0.00	0.00	1,084,216,000.00
11	Dinas Perhubungan	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

NO	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,768,700.00	0.00	2,768,700.00	0.00
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1,298,620,270.00	0.00	0.00	1,298,620,270.00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,141,247,633.65	977,000.00	0.00	4,142,224,633.65
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,154,901,000.00	0.00	0.00	1,154,901,000.00
16	Sekretariat Daerah	280,779,000.00	0.00	0.00	280,779,000.00
17	Sekretariat DPRD	302,562,600.00	0.00	0.00	302,562,600.00
18	Kecamatan Dumai Barat	32,752,000.00	0.00	0.00	32,752,000.00
19	Kecamatan Dumai Timur	39,149,500.00	0.00	0.00	39,149,500.00
20	Kecamatan Bukit Kapur	4,752,000.00	29,782,500.00	0.00	34,534,500.00
21	Kecamatan Medang Kampai	54,552,000.00	0.00	0.00	54,552,000.00
22	Kecamatan Sungai Sembilan	123,651,700.00	0.00	0.00	123,651,700.00
23	Kecamatan Dumai Kota	62,805,000.00	0.00	0.00	62,805,000.00
24	Kecamatan Dumai Selatan	6,957,500.00	0.00	0.00	6,957,500.00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
26	Badan Pendapatan Daerah	3,036,000.00	0.00	0.00	3,036,000.00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
	Jumlah	56,223,639,963.74	3,968,403,144.00	386,515,833.30	59,805,527,274.44

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya adalah pada tabel berikut:

Tabel 5.5.99 Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Buku Umum	28,823,055,114.76	28,822,078,114.76	977,000.00	0.00
2	Buku Filsafat	128,649,853.00	128,649,853.00	0.00	0.00
3	Buku Agama	507,306,644.65	507,306,644.65	0.00	0.00
4	Buku Ilmu Sosial	575,197,696.50	575,197,696.50	0.00	0.00
5	Buku Ilmu Bahasa	693,987,783.50	693,987,783.50	0.00	0.00
6	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1,474,535,122.00	1,474,535,122.00	0.00	0.00
7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2,969,740,369.00	2,969,740,369.00	0.00	0.00
8	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	526,082,015.00	526,082,015.00	0.00	0.00
9	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	294,742,913.00	294,742,913.00	0.00	0.00
10	Buku Laporan	5,170,000.00	5,170,000.00	0.00	0.00
NO	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
11	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	567,146,166.70	664,019,500.00	(96,873,333.30)	(14.59)
12	Bahan Kartografi	12,473,350.00	12,473,350.00	0.00	0.00
13	Alat Musik	3,275,372,928.33	3,245,590,428.33	29,782,500.00	0.92
14	Lukisan	13,250,000.00	13,250,000.00	0.00	0.00
15	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	552,273,200.00	552,623,200.00	(350,000.00)	(0.06)
16	Pahatan	170,084,000.00	170,084,000.00	0.00	0.00
17	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	7,700,000.00	7,700,000.00	0.00	0.00
18	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3,023,440,130.00	3,023,440,130.00	0.00	0.00
19	Ternak Potong	247,911,000.00	247,911,000.00	0.00	0.00
20	Tanaman	1,591,171,000.00	1,591,171,000.00	0.00	0.00
21	Aset Tetap Dalam Renovasi	498,100,000.00	498,100,000.00	0.00	0.00
22	Aset Tetap Lainnya BOS	13,848,137,988.00	10,199,786,844.00	3,648,351,144.00	35.77
	Jumlah	59,805,527,274.44	56,223,639,963.74	3,581,887,310.70	6.37

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
259,619,088,807.87	217,661,117,431.33	41,957,971,376.54	19.28

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan dan atau belum memiliki nilai manfaat hingga tahun anggaran berakhir Per 31 Desember 2022, KDP Pemerintah Kota Dumai senilai Rp259.619.088.807,87 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp217.661.117.431,33 maka mengalami kenaikan senilai Rp41.957.971.376,54 atau sebesar 19,28%. Adapun rincian KDP per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.100 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10,767,667,384.33	10,336,821,563.33	430,845,821.00	4.17
2	Dinas Kesehatan	158,207,761.00	158,207,761.00	0.00	0.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0.00	19,209,954,807.00	(19,209,954,807.00)	0.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244,269,682,052.54	184,130,776,240.00	60,138,905,812.54	32.66
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	639,033,950.00	290,679,500.00	348,354,450.00	119.84
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47,500,000.00	47,500,000.00	0.00	0.00
7	Dinas Tenaga Kerja	288,685,000.00	288,685,000.00	0.00	0.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49,500,000.00	49,500,000.00	0.00	0.00
9	Dinas Perhubungan	842,985,100.00	543,274,000.00	299,711,100.00	55.17
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49,830,000.00	49,830,000.00	0.00	0.00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170,403,560.00	170,394,560.00	9,000.00	0.01
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,561,475,000.00	1,561,475,000.00	0.00	0.00

13	Sekretariat Daerah	147,970,000.00	147,970,000.00	0.00	0.00
14	Sekretariat DPRD	626,149,000.00	626,149,000.00	0.00	0.00
15	Badan Pendapatan Daerah	0.00	49,900,000.00	(49,900,000.00)	(100.00)
Jumlah		259,619,088,807.87	217,661,117,431.33	41,957,971,376.54	19.28

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdapat dalam Lampiran 20. Adapun, penjelasan atas penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN		NILAI
Penambahan (a)		
	Pembelian (Harga Perolehan BM + BBJ + BP)	51,319,660,190.54
	Transfer dari KDP Tahun-Tahun Lalu	0.00
	Transfer Masuk	0.00
	Reklasifikasi Masuk	0.00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	12,124,940,000.00
URAIAN		NILAI
	Hasil Inventarisasi	0.00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0.00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
	Jumlah (a)	63,444,600,190.54
Pengurangan (b)		
	Penghapusan	0.00
	Transfer Ke Asetnya	0.00
	Transfer Keluar	0.00
	Reklasifikasi Keluar	21,477,044,814.00
	Hibah / Dana BOS (Perolehan Lain yang Sah)	9,584,000.00
	Hasil Inventarisasi	0.00
	Koreksi Kebijakan Akuntansi Ekstrakomptabel	0.00
	Koreksi Rekon Saldo Awal	0.00
	Jumlah (b)	21,486,628,814.00
Kenaikan/(Penurunan) --2		41,957,971,376.54

No	URAIAN	NILAI
1	Penambahan dari:	
	Belanja Modal	0.00
	Belanja Pegawai	0.00
	Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	1,132,180,080.00
	Masuk dari BM Tanah	0.00
	Masuk dari BM Peralatan & Mesin	51,469,131,452.54
	Masuk dari BM Gedung & Bgn	440,429,821.00
	Masuk dari BM JIJ	0.00
	Masuk dari BM Aset Tetap Lainnya	0.00
	Masuk dari Utang Pihak Ketiga	0.00
	Jumlah ---1	53,041,741,353.54
2	Pengurangan karena:	
	Keluar ke aset Tanah	0.00
	Keluar ke aset Peralatan & Mesin	0.00
	Keluar ke aset Gedung & Bgn	0.00
	Keluar ke aset JIJ	0.00
	Keluar ke aset Aset Tetap Lainnya	0.00
	Keluar ke aset KDP	0.00
	Keluar ke Aset Lainnya	0.00
	Keluar ke Ekstra Comptabel	0.00
	Keluar ke persediaan/tidak masuk AT	(1,722,081,163.00)
	Jumlah ---2	(1,722,081,163.00)
3	Selisih lebih/(kurang)	51,319,660,190.54

Tabel 5.5.101 Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama SKPD	Tahun 2021	Mutasi		Tahun 2022
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10,336,821,563.34	440,429,821.00	9,584,000.00	10,767,667,384.34
2	Dinas Kesehatan	158,207,761.00	0.00	0.00	158,207,761.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	19,209,954,807.00	0.00	19,209,954,807.00	0.00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	184,130,776,239.99	64,028,291,982.54	3,889,386,170.00	244,269,682,052.53

5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	290,679,500.00	348,354,450.00	0.00	639,033,950.00
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	47,500,000.00	0.00	0.00	47,500,000.00
7	Dinas Tenaga Kerja	288,685,000.00	0.00	0.00	288,685,000.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00
9	Dinas Perhubungan	543,274,000.00	299,711,100.00	0.00	842,985,100.00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49,830,000.00	0.00	0.00	49,830,000.00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	170,394,560.00	49,894,000.00	49,885,000.00	170,403,560.00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,561,475,000.00	0.00	0.00	1,561,475,000.00
13	Sekretariat Daerah	147,970,000.00	0.00	0.00	147,970,000.00
14	Sekretariat DPRD	626,149,000.00	0.00	0.00	626,149,000.00
15	Badan Pendapatan Daerah	49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	0.00
	JUMLAH	217,661,117,431.33	65,166,681,353.54	23,208,709,977.00	259,619,088,807.87

Perbandingan Aset Tetap Menurut Neraca dan Barang Milik Daerah (BMD) per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran 21.

7) Akumulasi Penyusutan

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
#####	(2,437,848,269,174.51)	(161,851,942,203.57)	6.64

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan dan tercatat sebagai lawan Akun Aset Tetap (*Contra Account*).

Hingga 31 Desember 2022 nilai Akumulasi Penyusutan aset tetap senilai minus Rp2.599.700.211.378,08 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp2.437.848.269.174,51 maka mengalami kenaikan senilai Rp161.851.942.203,57 atau sebesar 6,64%

Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2022	(2,437,848,269,174.51)
Beban Penyusutan Per 31 Desember 2022	(181,536,477,699.71)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	19,684,535,496.14
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(2,599,700,211,378.08)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai minus Rp2.599.700.211.378,08 terdiri dari Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2022 senilai minus Rp2.437.848.269.174,51, Beban Penyusutan Tahun 2022 senilai minus Rp181.536.477.699,71 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp19.684.535.496,14. adapun rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.102 Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(174,621,679,069.60)	(157,611,797,937.01)	(17,009,881,132.60)	10.79
2	Dinas Kesehatan dan RSUD	(286,165,813,805.89)	(245,753,540,666.13)	(40,412,273,139.76)	16.44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	#####	(1,668,383,164,502.85)	(80,477,055,672.70)	4.82
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(12,276,614,899.05)	(9,543,520,561.35)	(2,733,094,337.70)	28.64
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(3,570,854,602.27)	(3,378,579,606.40)	(192,274,995.87)	5.69
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(16,136,579,099.66)	(12,729,733,455.72)	(3,406,845,643.94)	26.76
7	Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik	(2,206,021,214.00)	(1,978,553,312.57)	(227,467,901.43)	11.50
8	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(4,040,793,901.28)	(3,123,098,135.38)	(917,695,765.90)	29.38
9	Dinas Tenaga Kerja	(6,855,946,720.68)	(6,518,599,269.48)	(337,347,451.20)	5.18
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2,306,102,923.14)	(2,188,109,562.50)	(117,993,360.64)	5.39
11	Dinas Lingkungan Hidup	(23,398,067,345.09)	(22,377,813,777.72)	(1,020,253,567.37)	4.56
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5,316,658,745.05)	(5,043,640,520.93)	(273,018,224.13)	5.41
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(3,666,591,131.74)	(3,231,081,207.80)	(435,509,923.94)	13.48
14	Dinas Perhubungan	(71,985,214,724.97)	(69,237,771,765.64)	(2,747,442,959.33)	3.97
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(8,152,403,807.15)	(7,350,271,530.98)	0.00	0.00
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(4,279,476,616.16)	(4,360,841,246.27)	81,364,630.11	(1.87)

17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3,876,288,512.86)	(6,284,067,019.50)	2,407,778,506.64	(38.32)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(8,168,469,045.19)	(7,363,413,700.86)	(805,055,344.33)	10.93
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4,862,666,102.83)	(4,142,393,679.99)	(720,272,422.85)	17.39
20	Dinas Perikanan	(6,306,300,187.64)	(7,377,170,280.31)	1,070,870,092.67	(14.52)
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(15,503,568,427.37)	(15,084,072,236.86)	(419,496,190.52)	2.78
22	Dinas Perdagangan	(11,134,809,721.42)	(10,432,645,589.35)	(702,164,132.06)	6.73
23	Sekretariat Daerah	(79,932,816,453.80)	(76,708,948,864.20)	(3,223,867,589.60)	4.20
24	Sekretariat DPRD	(18,396,186,418.58)	(17,768,374,071.67)	(627,812,346.90)	3.53
25	Kecamatan Dumai Barat	(3,734,665,841.85)	(3,025,701,622.11)	(708,964,219.74)	23.43
26	Kecamatan Dumai Timur	(5,042,210,087.59)	(4,213,981,121.77)	(828,228,965.82)	19.65
27	Kecamatan Bukit Kapur	(5,082,644,779.19)	(4,259,885,676.83)	(822,759,102.36)	19.31
28	Kecamatan Medang Kampai	(4,804,343,131.02)	(4,199,270,361.88)	(605,072,769.14)	14.41
29	Kecamatan Sungai Sembilan	(3,956,837,490.81)	(3,371,042,984.75)	(585,794,506.06)	17.38
30	Kecamatan Dumai Kota	(2,895,569,087.38)	(2,513,975,204.66)	(381,593,882.72)	15.18
31	Kecamatan Dumai Selatan	(4,201,542,253.69)	(3,376,241,162.65)	(825,301,091.04)	24.44
32	Inspektorat	(5,352,339,527.65)	(4,792,794,784.63)	(559,544,743.02)	11.67
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(8,707,332,024.71)	(8,129,224,051.73)	(578,107,972.98)	7.11
34	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(14,180,831,220.31)	(13,439,875,988.33)	(740,955,231.98)	5.51
35	Badan Pendapatan Daerah	(14,086,067,678.86)	(13,150,970,979.10)	(935,096,699.76)	7.11
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5,635,684,604.08)	(5,404,102,734.62)	(231,581,869.46)	4.29
Jumlah		#####	(2,437,848,269,174.51)	(161,851,942,203.58)	6.64

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per jenis Aset adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.103 Rincian Akumulasi Penyusutan Per Jenis Aset Tetap

No	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan 2022	Akumulasi Penyusutan 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Kenaikan	%
1	Peralatan dan Mesin	(634,233,489,960.86)	(569,417,149,424.80)	(64,816,340,536.06)	11.38
2	Gedung dan Bangunan	(208,228,735,596.91)	(194,749,964,276.02)	(13,478,771,320.90)	6.92
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	#####	(1,673,681,155,473.69)	(83,556,830,346.62)	4.99
Jumlah		#####	(2,437,848,269,174.51)	(161,851,942,203.57)	6.64

d. Aset Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
45,763,433,936.39	20,668,352,583.88	25,095,081,352.51	121.42

Aset Lainnya Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp45.763.433.936,39 jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp20.668.352.583,88 maka mengalami kenaikan senilai Rp25.095.081.352,51 atau sebesar 121,42%. Aset Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF). Rincian Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.104 Rincian Aset Lainnya

No	Keterangan	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Tagihan Penjualan Angsuran	69,300,000.00	69,300,000.00	0.00	0.00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1,073,670,980.27	846,288,500.00	227,382,480.27	26.87
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	9,030,597,849.07	18,004,828,933.15	(8,974,231,084.08)	(49.84)
4	Aset Tidak Berwujud	7,430,279,868.09	6,964,930,368.09	465,349,500.00	6.68
5	Aset Lain-lain	23,258,105,780.09	16,550,872,161.10	6,707,233,618.99	40.52
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6,341,856,161.84)	(5,871,337,443.09)	(470,518,718.74)	8.01
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(21,177,088,977.29)	(15,896,529,935.37)	(5,280,559,041.92)	33.22
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	32,420,424,598.00	0.00	32,420,424,598.00	100.00
JUMLAH		45,763,433,936.39	20,668,352,583.88	25,095,081,352.51	121.42

1) **Tagihan Penjualan Angsuran**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
69,300,000.00	69,300,000.00	0.00	0.00

Tagihan Penjualan Angsuran Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp69.300.000,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Tagihan Penjualan Angsuran tidak mengalami perubahan. Saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp69.300.000,00 tersebut merupakan tagihan penjualan Mobil Nissan Terrano Grandroast XTR BM 1957 RS.

2) **Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1,073,670,980.27	846,288,500.00	227,382,480.27	26.87

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp1.073.670.980,27 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp846.288.500,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp227.382.480,27 atau sebesar 26,87%. Perubahan tersebut dikarenakan reklasifikasi dari Piutang Lain-lain PAD yang Sah ke Aset Lainnya senilai Rp227.382.480,27. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.105 Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

No	Keterangan	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	846,288,500.00	846,288,500.00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga	227,382,480.27	0.00
Jumlah		1,073,670,980.27	846,288,500.00

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap Saudara I.S atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Pemerintah Kota Dumai terhadap pihak Ketiga. Rincian Tuntutan Ganti Kerugian Pihak Ketiga terdapat dalam Lampiran 22.

3) **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
9,030,597,849.07	18,004,828,933.15	(8,974,231,084.08)	(49.84)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp9.030.597.849,07 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp18.004.828.933,15 maka mengalami penurunan senilai Rp8.974.231.084 atau sebesar 49,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.106 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Nama Mitra	Saldo 2022	Saldo 2021
1	PT. Panca Belia Primakarsa	1,218,240,000.00	1,218,240,000.00
2	PT. Pelabuhan Dumai Berseri	0.00	8,974,231,084.08
3	PT. Satwa Sarana Karunia	7,812,357,849.07	7,812,357,849.07
Jumlah		9,030,597,849.07	18,004,828,933.15

a. PT Panca Belia Primakarsa

Sebidang tanah seluas 13.645,75 m² dengan nilai Rp1.218.240.000,00 di Kelurahan Rimba Sekampung yang dikelola oleh PT Panca Belia Primakarsa dengan perubahan perjanjian terakhir Nomor 500/EK/2002/314 Tanggal 20 Agustus 2002 yang di atasnya didirikan Pasar dan Komplek Pertokoan Pasar Pulau Payung. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah selama 20 tahun setelah operasional dan 2,5 Tahun masa pembangunan, dihitung sejak Tahun 2002. Dalam kontrak perjanjian menyatakan bahwa Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan kompensasi berupa 14 Unit Los Ikan, 11 Unit Los Daging dan 60 Unit Los Sayur serta 1 unit kantor UPTD (Lantai III) dengan total senilai Rp1.218.240.000,00 dan setelah perjanjian berakhir Pemerintah Kota Dumai berhak mendapatkan bangunan beserta isinya.

b. PT. Pelabuhan Dumai Berseri

Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Pelabuhan Dumai Berseri Nomor 13/DISHUB/2018 dan Nomor 003/PT PDB-PEMKO DUMAI/05/2018 tanggal 3 Mei 2018, objek perjanjian KSP ini adalah barang milik daerah yang berada pada pengguna Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai. Perjanjian Kerjasama ini berakhir ditahun 2022 sesuai dengan isi perjanjian yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ditandatangani, yang diperkuat dengan Surat Wali Kota Dumai nomor: 032/BPKAD/146.1 perihal pemutusan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) barang milik daerah antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT. Pelabuhan Dumai Berseri. Dinas Perhubungan telah melakukan Reklasifikasi akun Kemitraan Dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya berada dibagian Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp8.974.231.084,08

Tabel 5.5.107 Rincian PT. Pelabuhan Dumai Berseri

Keterangan	2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
			RP	%
Harga Perolehan Aset Kemitraan Pihak Ketiga	0.00	8,974,231,084.08	(8,974,231,084.08)	(100.00)
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	0.00	(1,679,234,084.29)	1,679,234,084.29	(100.00)
Nilai Buku	0.00	7,294,996,999.79	(7,294,996,999.79)	(100.00)

c. PT. Satwa Sarana Karunia

Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kota Dumai dengan PT Satwa Sarana Karunia berdasarkan Akta Notaris Parilliyani, S.H, M.Kn Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2021. Objek perjanjian BGS ini adalah barang milik daerah berupa tanah seluas 351.089,3 m2 di Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai yang berada pada Pengelola (PPKD) Kota Dumai. Perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dengan Kontribusi tahunan kepada Pemerintah Kota Dumai senilai Rp186.000.000,00.

4) Aset Tidak Berwujud

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
7,430,279,868.09	6,964,930,368.09	465,349,500.00	6.68

Aset tidak berwujud pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp7.430.279.868,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp6.964.930.368,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp465.349.500,00 atau sebesar 6,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.108 Rincian Aset Tidak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,685,240,939.37	3,710,140,939.37	(24,900,000.00)	(0.67)
2	Dinas Kesehatan	433,920,000.00	433,920,000.00	0.00	0.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64,602,000.00	0.00	64,602,000.00	100.00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	44,950,000.00	44,950,000.00	0.00	0.00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	69,960,000.00	69,960,000.00	0.00	0.00
7	Dinas Perhubungan	1,301,609,500.00	982,522,000.00	319,087,500.00	32.48
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	696,943,065.72	590,383,065.72	106,560,000.00	18.05
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104,450,000.00	104,450,000.00	0.00	0.00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	181,506,050.00	181,506,050.00	0.00	0.00
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8,796,900.00	8,796,900.00	0.00	100.00
12	Dinas Perikanan	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00
13	Sekretariat Daerah	77,985,000.00	77,985,000.00	0.00	0.00
14	Inspektorat	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00
16	Badan Pendapatan Daerah	402,507,413.00	402,507,413.00	0.00	0.00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235,309,000.00	235,309,000.00	0.00	0.00
	Jumlah	7,430,279,868.09	6,964,930,368.09	465,349,500.00	6.68

5) Aset Lain-Lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
23,258,105,780.09	16,550,872,161.10	6,707,233,618.99	40.52

Aset Lain-Lain pada pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp23.258.105.780,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp16.550.872.161,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp6.707.233.618,99 atau sebesar 40,52% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.109 Rincian Aset Lain-Lain

No	Jenis Aset Lain-lain	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Aset Rusak Berat/Usang	22,799,745,780.09	15,796,299,161.10	7,003,446,618.99	44.34
2	Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	458,360,000.00	754,573,000.00	(296,213,000.00)	(39.26)
Jumlah		23,258,105,780.09	16,550,872,161.10	6,707,233,618.99	40.52

a. Aset Rusak Berat/Usang

Jumlah Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp22.799.745.780,09 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp15.796.299.161,10 maka mengalami kenaikan senilai Rp7.003.446.618,99 atau sebesar 44,34%. dengan rincian per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.5.110 Rincian Aset Rusak Berat

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116,617,780.00	116,617,780.00	0.00	0.00
2	Dinas Kesehatan	6,499,433,643.19	4,317,273,243.19	2,182,160,400.00	50.54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	696,550,000.00	696,550,000.00	0.00	0.00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	424,194,000.00	424,194,000.00	0.00	0.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	185,725,000.00	207,671,546.00	(21,946,546.00)	(10.57)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	10,898,500.00	10,898,500.00	0.00	0.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	124,705,000.00	124,705,000.00	0.00	0.00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83,000,000.00	83,000,000.00	0.00	0.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.00	1.00	0.00	0.00
11	Dinas Perhubungan	4,695,657,419.91	2,428,327,963.91	2,267,329,456.00	93.37
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	25,102,000.00	25,102,000.00	0.00	0.00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,561,903,309.00	0.00	2,561,903,309.00	100.00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	36,292,856.00	36,292,856.00	0.00	0.00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	355,380,591.00	355,380,591.00	0.00	0.00
15	Dinas Perikanan	1,029,122,750.00	1,029,122,750.00	0.00	0.00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	388,750,000.00	388,750,000.00	0.00	0.00
17	Sekretariat Daerah	87,500,000.00	87,500,000.00	0.00	0.00
18	Sekretariat DPRD	2,816,161,050.00	2,816,161,050.00	0.00	0.00
19	Kecamatan Dumai Barat	195,462,821.00	195,462,821.00	0.00	0.00
20	Kecamatan Bukit Kapur	59,479,440.00	59,479,440.00	0.00	0.00
21	Kecamatan Medang Kampai	41,700,000.00	27,700,000.00	14,000,000.00	50.54
22	Kecamatan Sungai Sembilan	400,085,960.00	400,085,960.00	0.00	0.00
23	Kecamatan Dumai Kota	27,094,000.00	27,094,000.00	0.00	0.00
24	Kecamatan Dumai Selatan	107,277,944.00	107,277,944.00	0.00	0.00
25	Inspektorat	153,246,267.00	153,246,267.00	0.00	0.00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	475,394,050.00	475,394,050.00	0.00	0.00
27	Badan Pendapatan Daerah	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,195,011,398.00	1,195,011,398.00	0.00	0.00
Jumlah		22,799,745,780.09	15,796,299,161.10	7,003,446,618.99	44.34

b. Aset yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

Jumlah Aset Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp458.360.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp754.573.000,00 maka mengalami penurunan senilai Rp458.360.000,00 atau sebesar 39,26%. Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga merupakan Aset Dinas PUPR yang akan diserahkan ke masyarakat. Rincian Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.5.111 Rincian Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga

No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
1	Pembetonan jalan masuk komplek rumah dinas kejaksaan negeri kota dumai kel.bukit datuk	31,250,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No	Nama Barang / Jenis Barang	Harga Perolehan	Nama SKPD
2	Pembangunan Rumah Masyarakat Miskin Kota dumai	427,110,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jumlah		458,360,000.00	

6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(6,341,856,161.84)	(5,871,337,443.09)	(470,518,718.74)	8.01

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai minus Rp6.341.856.161,84 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp5.871.337.443,09 maka mengalami kenaikan senilai Rp470.518.718,74 atau sebesar 8,01%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.112 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3,644,951,151.87)	(3,566,596,070.62)	(78,355,081.25)	2.20
2	Dinas Kesehatan	(302,982,500.00)	(249,902,500.00)	(53,080,000.00)	21.24
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15,312,500.00)	(10,937,500.00)	(4,375,000.00)	40.00
4	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(44,950,000.00)	(44,950,000.00)	0.00	0.00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras	(43,725,000.00)	(26,235,000.00)	(17,490,000.00)	66.67
6	Dinas Perhubungan	(620,071,250.00)	(412,519,125.00)	(207,552,125.00)	50.31
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(584,694,940.72)	(545,123,690.72)	(39,571,250.00)	7.26
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(104,450,000.00)	(85,787,500.00)	(18,662,500.00)	21.75
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(158,817,793.75)	(113,441,281.25)	(45,376,512.50)	40.00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1,099,612.50)	(1,099,612.50)	0.00	0.00
11	Dinas Perikanan	(46,000,000.00)	(46,000,000.00)	0.00	0.00
12	Sekretariat Daerah	(77,985,000.00)	(77,985,000.00)	0.00	0.00
13	Inspektorat	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)	0.00	0.00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(49,000,000.00)	(49,000,000.00)	0.00	0.00
15	Badan Pendapatan Daerah	(402,507,413.00)	(396,451,163.01)	(6,056,249.99)	1.53
16	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(235,309,000.00)	(235,309,000.00)	0.00	0.00
JUMLAH		(6,341,856,161.84)	(5,871,337,443.09)	(470,518,718.74)	8.01

7) Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
(21,177,088,977.29)	(14,217,295,851.08)	(6,959,793,126.21)	48.95

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai minus Rp21.177.088.977,29 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp14.217.295.851,08 maka mengalami Kenaikan senilai Rp6.959.793.126,21 atau sebesar 48,95% dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.113 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Per SKPD

No	Nama SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(116,617,780.00)	(116,617,780.00)	0.00	0.00
2	Dinas Kesehatan	(6,499,433,643.19)	(4,317,093,833.19)	(2,182,339,810.00)	50.55
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(856,976,000.00)	(910,013,530.00)	53,037,530.00	(5.83)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(424,194,000.00)	(424,194,000.00)	0.00	0.00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(181,621,000.00)	(203,423,546.00)	21,802,546.00	(10.72)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1,200,000.00)	(1,200,000.00)	0.00	0.00
7	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(10,898,500.00)	(10,898,500.00)	0.00	0.00
8	Dinas Lingkungan Hidup	(124,705,000.00)	(124,705,000.00)	0.00	0.00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(83,000,000.00)	(83,000,000.00)	0.00	0.00
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.00)	(1.00)	0.00	0.00
11	Dinas Perhubungan	(3,591,763,657.10)	(1,290,618,731.98)	(2,301,144,925.12)	178.30
12	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	(25,102,000.00)	(25,102,000.00)	0.00	0.00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2,510,939,709.00)	0.00	(2,510,939,709.00)	100.00
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(36,292,856.00)	(36,292,856.00)	0.00	0.00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(355,380,591.00)	(355,380,591.00)	0.00	0.00
16	Dinas Perikanan	(555,544,630.00)	(538,139,670.00)	(17,404,960.00)	3.23
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(332,499,999.9980)	(328,333,333.34)	(4,166,666.66)	1.27
18	Sekretariat Daerah	(87,500,000.00)	(87,500,000.00)	0.00	0.00
19	Sekretariat DPRD	(2,740,478,550.00)	(2,738,227,550.00)	(2,251,000.00)	0.08
20	Kecamatan Dumai Barat	(176,852,001.00)	(176,314,441.00)	(537,560.00)	0.30
21	Kecamatan Bukit Kapur	(59,479,440.00)	(59,479,440.00)	0.00	0.00
22	Kecamatan Medang Kampai	(41,700,000.00)	(27,700,000.00)	(14,000,000.00)	50.54
23	Kecamatan Sungai Sembilan	(400,085,960.00)	(398,237,388.58)	(1,848,571.42)	0.46
24	Kecamatan Dumai Kota	(27,094,000.00)	(27,094,000.00)	0.00	0.00
25	Kecamatan Dumai Selatan	(107,277,944.00)	(107,277,944.00)	0.00	0.00
26	Inspektorat	(153,246,267.00)	(153,246,267.00)	0.00	0.00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	(475,394,050.00)	(475,394,050.00)	0.00	0.00
28	Badan Pendapatan Daerah	(6,800,000.00)	(6,800,000.00)	0.00	0.00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(1,195,011,398.00)	(1,195,011,398.00)	0.00	0.00
	Jumlah	(21,177,088,977.29)	(14,217,295,851.08)	(6,959,793,126.21)	48.95

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain pada Pemerintah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.114 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(21,016,662,977.29)	(14,003,832,321.08)	(7,012,830,656.21)	50.08
2	Akumulasi Penyusutan Aset yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga	(160,426,000.00)	(213,463,530.00)	53,037,530.00	(24.85)
	Jumlah	(21,177,088,977.29)	(14,217,295,851.08)	(6,959,793,126.21)	48.95

8) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
32,420,424,598.00	0.00	32,420,424,598.00	100.00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Kota Dumai adalah senilai Rp32.420.424.598,00 berdasarkan surat Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.115 Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

NO	JENIS PENERIMAAN	TOTAL
1	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan Ke 4, DBH PPH PASAL 21 Tahun 2022	3,280,894,794.00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan Ke 4, DBH PPH PASAL 25/29 OP Tahun 2022	142,376,503.00
3	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	12,356,755.00
4	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perhutanan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	299,179,880.00
5	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perkebunan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	2,054,655.00
6	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Minyak Dan Gas Bumi Non Tunai Triwulan Ke 4 Tahun 2022	2,436,519,026.00
7	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Sektor Lainnya Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	411,920.00
8	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Perhutanan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	11,634,472.00
9	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan BP Perkebunan Non Tunai Minggu ke 18 Tahun 2022	91,290.00
10	Dana Bagi Hasil BP Pajak Bumi Dan Bangunan Minyak Dan Gas Bumi Non Tunai Triwulan Ke 4 Tahun 2022	81,221,242.00
11	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai Tahap Ke 3 Tahun 2022	472,605,805.00
12	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai- TDF Tahap Ke 3 Tahun 2022	344,421,402.00
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	9,484,496,424.00
14	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 15 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	5,529,726,188.00
15	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	316,157,673.00
16	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	347,049,210.00
17	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 30 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	424,886,708.00
18	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 30 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	5,050,665,087.00
19	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	7,083,198.00
20	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi 0,5 % Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	84,177,718.00
21	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	312,759,995.00
22	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	907,084,322.00
23	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba Dan Batubara Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2021	1,344,425,198.00
24	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	211,753,211.00
25	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	32,285.00
26	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	909,282,946.00
27	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai-TDF Triwulan ke 4 Tahun 2022	407,076,691.00
	J U M L A H	32,420,424,598.00

2. Kewajiban

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
119,078,674,818.75	115,127,076,949.31	3,951,597,869.44	3.43

Kewajiban Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp119.078.674.818,75 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp115.127.076.949,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp3.951.597.869,44 atau sebesar 3,43% dengan rincian sebagai berikut:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
43,018,133,852.86	115,127,076,949.31	(72,108,943,096.45)	(62.63)

Kewajiban Jangka Pendek Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp43.018.133.852,86 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp115.127.076.949,31 maka mengalami penurunan senilai Rp72.108.943.096,45 atau sebesar 62,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.116 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	26,497,308.51	1,783,762.00	24,713,546.51	1,385.47
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya	295,284,900.00	168,578,067.00	126,706,833.00	100.00
Pendapatan Diterima Dimuka	1,386,340,133.35	1,049,253,734.31	337,086,399.04	32.13
Utang Belanja	41,310,011,511.00	113,907,461,386.00	(72,597,449,875.00)	(63.73)
Jumlah	43,018,133,852.86	115,127,076,949.31	(72,108,943,096.45)	(62.63)

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%

26,497,308.51	1,783,762.00	24,713,546.51	1,385.47
---------------	--------------	---------------	----------

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp26.497.308,51 merupakan Pajak yang belum disetor per 31 Desember 2022 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.116 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Nama SKPD	Nilai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dana BOS	25,634,056.51
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	574,500.00
Kecamatan Dumai Barat	288,702.00
Kecamatan Dumai Selatan	50.00
Total	26,497,308.51

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
295,284,900.00	168,578,067.00	126,706,833.00	75.16

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp295.284.900,00 merupakan Saldo Kas pada Rekening penampungan Jasa Bongkar Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Dumai senilai Rp295.262.912,00 dan Bunga Dana BOS senilai Rp21.988,00 yang belum disetor ke Kas Daerah Kota Dumai, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp168.578.067,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp126.706.833,00 atau sebesar 75,16%.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
1,386,340,133.35	1,049,253,734.31	337,086,399.04	32.13

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya Kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian Barang/Jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pendapatan diterima dimuka senilai Rp1.386.340.133,35 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.049.253.734,31 maka mengalami kenaikan senilai Rp337.086.399,04 atau sebesar 32,13%.

Tabel 5.5.117 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan / Penurunan	
			Rp	%
Sewa lahan atau tempat	607,189,435.00	536,808,400.00	70,381,035.00	13.11
Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak ketiga atas Pajak Reklame Diterima Dimuka	779,150,698.35	512,445,334.31	266,705,364.04	52.05
Jumlah	1,386,340,133.35	1,049,253,734.31	337,086,399.04	32.13

Untuk rincian Pendapatan Diterima Dimuka lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 23.

4) Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
41,310,011,511.00	113,907,461,386.00	(72,597,449,875.00)	(63.73)

Utang Belanja pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp41.310.011.511,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp113.907.461.386,00 maka mengalami penurunan senilai Rp72.597.449.875,00 atau sebesar 63,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.118 Rincian Utang Belanja

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
			Rp	%
Utang Belanja Pegawai	1,193,065,598.00	45,532,167.00	1,147,533,431.00	2,520.27
Utang Belanja Barang dan Jasa	4,906,049,480.00	9,344,776,653.00	(4,438,727,173.00)	(47.50)
Utang Belanja Pegawai BLUD	17,328,762,835.00	54,056,743,612.00	(36,727,980,777.00)	(67.94)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	17,035,625,368.00	47,080,036,656.00	(30,044,411,288.00)	(63.82)
Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
Utang Belanja Modal BLUD	846,508,230.00	3,380,372,298.00	(2,533,864,068.00)	(74.96)

JUMLAH	41,310,011,511.00	113,907,461,386.00	(72,597,449,875.00)	(63.73)
---------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------

a. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan Kewajiban Akrual yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun yang terdiri dari:

1. Utang Belanja Gaji Pokok ASN/Gaji Pokok PNS atas nama Drs.Rozali Umar pada Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Dumai.
2. Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Dumai sesuai dengan SK Walikota Dumai Nomor : 973/962/2022 Tahun 2022.

Jumlah utang belanja pegawai pada SKPD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.5.119 Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Utang Beban Pegawai	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Perhubungan	1,042,830,094.00	45,532,167.00	997,297,927.00	2,190.32
2	Dinas Koperasi UMKM	150,235,504.00	0.00	150,235,504.00	100.00
	Jumlah	1,193,065,598.00	45,532,167.00	1,147,533,431.00	2,520.27

b. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja barang dan jasa merupakan Kewajiban Akrual yang muncul akibat dari penggunaan atas Jasa Listrik, Telpn, Air, Langganan TV/Internet, Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP, Insentif Tenaga Kesehatan vaksinator serta penanganan COVID- 19 yang belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, Rincian Utang belanja barang dan jasa pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.5.120 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2022 dan 2021

No	Utang Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Dinas Kesehatan	4,417,974,590.00	8,411,524,403.00	(3,993,549,813.00)	(47.48)
2	Dinas Perhubungan	368,509,082.00	812,318,693.00	(443,809,611.00)	(54.63)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	11,472,897.00	6,182,329.00	5,290,568.00	85.58
5	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	8,947,999.00	8,188,822.00	759,177.00	9.27
6	Dinas Tenaga Kerja	0.00	8,013,973.00	(8,013,973.00)	100.00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7,096,146.00	6,914,639.00	181,507.00	2.62
8	Dinas Lingkungan Hidup	9,944,025.00	6,095,974.00	3,848,051.00	63.12
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,431,289.00	8,545,844.00	1,885,445.00	22.06
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	4,662,390.00	(4,662,390.00)	(100.00)
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2,108,535.00	13,163,712.00	(11,055,177.00)	(83.98)
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	16,465,789.00	5,689,670.00	10,776,119.00	189.40
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,907,364.00	8,016,396.00	(5,109,032.00)	(63.73)
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,816,842.00	6,785,864.00	1,030,978.00	15.19
15	Dinas Perikanan	12,619,295.00	12,409,990.00	209,305.00	1.69
16	Dinas Perdagangan	15,155,627.00	0.00	15,155,627.00	100.00
17	Sekretariat DPRD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	100.00
18	Kecamatan Dumai Barat	0.00	4,976,840.00	(4,976,840.00)	(100.00)
19	Kecamatan Dumai Timur	0.00	5,165,775.00	(5,165,775.00)	(100.00)
20	Kecamatan Bukit Kapur	0.00	4,691,515.00	(4,691,515.00)	(100.00)
21	Kecamatan Medang Kampai	0.00	3,038,494.00	(3,038,494.00)	(100.00)
22	Kecamatan Dumai Selatan	0.00	6,791,330.00	(6,791,330.00)	(100.00)
	Jumlah	4,906,049,480.00	9,344,776,653.00	(4,438,727,173.00)	(47.50)

Untuk rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan lebih lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 24.

c. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD senilai Rp17.328.762.835,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.121 Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas Kota Dumai Tahun 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	100.00
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	33,293,100.00	3,204,000.00	30,089,100.00	939.11
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	9,309,000.00	3,360,000.00	5,949,000.00	177.05
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	28,315,000.00	18,443,000.00	9,872,000.00	53.53
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	8,285,000.00	0.00	8,285,000.00	100.00
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	4,040,000.00	7,072,000.00	(3,032,000.00)	(42.87)
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	18,683,040.00	14,417,850.00	4,265,190.00	29.58
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	82,510,190.00	0.00	82,510,190.00	100.00
10	BLUD Puskesmas Purnama	36,053,660.00	12,518,000.00	23,535,660.00	188.01
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	4,380,000.00	4,720,000.00	(340,000.00)	(7.20)
12	UPT. Lab Kualitas Air Kelas A	9,519,000.00	9,928,000.00	(409,000.00)	(4.12)
13	BLUD RSUD	17,093,290,845.00	53,983,080,762.00	(36,889,789,917.00)	(68.34)
	Total	17,328,762,835.00	54,056,743,612.00	(36,727,980,777.00)	(67.94)

Rincian Utang Belanja Pegawai BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 25 s.d Lampiran 28.

d. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD

Merupakan utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.122 Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Kota Dumai Tahun 2022

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				RP	%
1	BLUD RSUD	16,968,833,651.00	45,203,734,489.00	(28,234,900,838.00)	(62.46)
2	BLUD Puskesmas	66,791,717.00	1,876,302,167.00	(1,809,510,450.00)	(96.44)
	Total	17,035,625,368.00	47,080,036,656.00	(30,044,411,288.00)	(63.82)

Untuk Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada Lampiran 29 s.d. Lampiran 31

e. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 senilai Rp846.508.230,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp3.380.372.298,00 maka mengalami penurunan senilai Rp2.533.864.068,00 atau sebesar 74,96% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.123 Rincian Utang Belanja Modal BLUD RSUD

No	Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan	
				Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	751,804,600.00	2,306,369,898.00	(1,554,565,298.00)	(67.40)
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94,703,630.00	459,874,000.00	(365,170,370.00)	(79.41)
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0.00	614,128,400.00	(614,128,400.00)	(100.00)
	Jumlah	846,508,230.00	3,380,372,298.00	(2,533,864,068.00)	(74.96)

Rincian Utang Belanja Modal BLUD RSUD per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 32.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
76,060,540,965.89	0.00	76,060,540,965.89	100.00

Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah

2022	2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%

76,060,540,965.89	0.00	76,060,540,965.89	100.00
-------------------	------	-------------------	--------

Utang kepada Lembaga Keuangan Bank Jangka Menengah merupakan utang kepada Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri atas kredit pinjaman daerah, berdasarkan Akad atas perjanjian kredit Nomor: 12 TGL08/06/2022 dan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Daerah dikantor Notaris-PPAT Firman,SH.,M.Kn. dengan keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Jumlah Plafond Fasilitas Pembiayaan adalah senilai Rp107.534.013.538,00.
2. Jumlah Penarikan Pembiayaan senilai Rp94.060.540.965,89 dan pengembalian pokok pada tanggal 30 Desember 2022 senilai Rp18.000.000.000,00 sehingga baki debet pembiayaan per 30 Desember 2022 sebesar Rp76.060.540.965,89.
3. Jangka waktu pinjaman selama 32 Bulan terhitung mulai tanggal 08 Juni 2022 s.d 31 Desember 2024.
4. Pembayaran Bunga/Bagi Hasil setiap bulan yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah dihitung setelah tanggal pencairan pembiayaan dilakukan.
5. Jadwal angsuran pembiayaan pinjaman daerah sampai dengan jatuh tempo seperti berikut:
 - a. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap I senilai Rp18.000.000.000,00 telah dibayar pada tanggal 30 Desember 2022
 - b. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap II senilai Rp45.000.000.000,00 akan dibayar pada bulan Desember 2023
 - c. Pembayaran Angsuran Pokok Tahap III senilai Rp31.060.540.965,89 akan dibayar pada bulan Desember 2024

3. Ekuitas

Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,988,483,536,517.80	2,974,537,461,488.77	13,946,075,029.03	0.47

Ekuitas pada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022 adalah senilai Rp2.988.483.536.517,80 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp2.974.537.461.488,77 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.946.075.029,03 atau sebesar 0,47% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.5.124 Rincian Ekuitas

Ekuitas Awal	Rp	2,974,537,461,488.77
Surplus/Defisit LO	Rp	(4,912,296,937.03)
Penyesuaian / Mutasi :		
Penambahan	Rp	19,132,959,865.06
Pengurangan	Rp	(274,587,899.00)
Ekuitas Akhir	Rp	2,988,483,536,517.80

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci ada pada Catatan atas Laporan Keuangan di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5. 6. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/(Defisit)-LO Pemerintah Kota Dumai.

1 Pendapatan - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1,404,760,236,811.95	1,372,376,641,914.38	32,383,594,897.57	2.36

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 senilai Rp1.404.760.236.811,95 mengalami kenaikan senilai Rp32.383.594.897,57 atau sebesar 2,36% jika dibandingkan Tahun 2021 senilai Rp1.372.376.641.914,38 dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.1 Perbandingan Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	429,802,097,071.52	426,299,014,021.79	3,503,083,049.73	0.82
Pendapatan Transfer	958,348,926,927.00	889,269,161,050.39	69,079,765,876.61	7.77
Lain-lain Pendapatan yang Sah	16,609,212,813.43	56,808,466,842.20	(40,199,254,028.77)	(70.76)
Jumlah	1,404,760,236,811.95	1,372,376,641,914.38	32,383,594,897.57	2.36

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
429,802,097,071.52	426,299,014,021.79	3,503,083,049.73	0.82

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun 2022 dan Tahun 2021. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 senilai Rp429.802.097.071,52 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp426.299.014.021,79. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan senilai Rp3.503.083.049,73 atau sebesar 0,82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.2 Perbandingan Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	235,710,177,866.02	195,616,934,382.69	40,093,243,483.33	20.50
Pendapatan Retribusi Daerah	32,238,321,945.17	23,688,650,046.46	8,549,671,898.71	36.09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,079,761,191.00	1,415,125,255.00	(335,364,064.00)	(23.70)
Lain-lain PAD yang Sah	160,773,836,069.33	205,578,304,337.64	(44,804,468,268.31)	(21.79)
Jumlah	429,802,097,071.52	426,299,014,021.79	3,503,083,049.73	0.82

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
235,710,177,866.02	195,616,934,382.69	40,093,243,483.33	20.50

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Dumai.

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan yang diterima pada Tahun 2022 (SKPD) dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2022 terealisasi senilai Rp235.710.177.866,02 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp195.616.934.382,69. Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan senilai Rp40.093.243.483,33 atau sebesar 20,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.3 Perbandingan Pendapatan Pajak – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Hotel	5,246,803,968.00	4,254,135,688.00	992,668,280.00	23.33
Pajak Restoran	11,706,887,077.00	9,321,329,460.00	2,385,557,617.00	25.59
Pajak Hiburan	1,984,330,294.00	952,102,028.00	1,032,228,266.00	108.42
Pajak Reklame	2,883,768,166.96	1,941,742,376.69	942,025,790.27	48.51
Pajak Penerangan Jalan	53,105,905,542.06	49,467,546,601.00	3,638,358,941.06	7.36
Pajak Parkir	760,692,273.00	691,186,812.00	69,505,461.00	10.06
Pajak Air Tanah	1,200,318,522.00	2,271,126,489.00	(1,070,807,967.00)	(47.15)
Pajak Sarang Burung Walet	97,436,475.00	90,270,560.00	7,165,915.00	7.94
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	143,736,884,996.00	106,124,903,919.00	37,611,981,077.00	35.44
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14,987,150,552.00	20,502,590,449.00	(5,515,439,897.00)	(26.90)
Jumlah	235,710,177,866.02	195,616,934,382.69	40,093,243,483.33	20.50

Tabel 5.6.1.3a Rincian Pendapatan Pajak – LO Berdasarkan Pengakuan Tahun 2022

Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan yang Diakui Berdasarkan Hak	Berdasarkan Realisasi	Pendapatan Pajak LO
Pajak Hotel	5,246,803,968.00	0.00	5,246,803,968.00
Pajak Restoran	11,706,887,077.00	0.00	11,706,887,077.00
Pajak Hiburan	1,984,330,294.00	0.00	1,984,330,294.00
Pajak Reklame	2,883,768,166.96	0.00	2,883,768,166.96
Pajak Penerangan Jalan PLN	41,479,433,111.00	0.00	41,479,433,111.00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	11,626,472,431.06	0.00	11,626,472,431.06
Pajak Parkir	760,692,273.00	0.00	760,692,273.00
Pajak Air Tanah	1,200,318,522.00	0.00	1,200,318,522.00
Pajak Sarang Burung Walet	97,436,475.00	0.00	97,436,475.00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	143,736,884,996.00	0.00	143,736,884,996.00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0.00	14,987,150,552.00	14,987,150,552.00
Jumlah	220,723,027,314.02	14,987,150,552.00	235,710,177,866.02

Realisasi Pendapatan Pajak per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	5,246,803,968.00	4,254,135,688.00	992,668,280.00	23.33
Jumlah	5,246,803,968.00	4,254,135,688.00	992,668,280.00	23.33

2. Pajak Restoran

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	11,706,887,077.00	9,321,329,460.00	2,385,557,617.00	25.59
Jumlah	11,706,887,077.00	9,321,329,460.00	2,385,557,617.00	25.59

3. Pajak Hiburan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	1,984,330,294.00	952,102,028.00	1,032,228,266.00	108.42
Jumlah	1,984,330,294.00	952,102,028.00	1,032,228,266.00	108.42

4. Pajak Reklame

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	2,883,768,166.96	1,941,742,376.69	942,025,790.27	48.51
Jumlah	2,883,768,166.96	1,941,742,376.69	942,025,790.27	48.51

5. Pajak Penerangan Jalan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	53,105,905,542.06	49,467,546,601.00	3,638,358,941.06	7.36
Jumlah	53,105,905,542.06	49,467,546,601.00	3,638,358,941.06	7.36

7. Pajak Parkir

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	760,692,273.00	691,186,812.00	69,505,461.00	10.06
Jumlah	760,692,273.00	691,186,812.00	69,505,461.00	10.06

8. Pajak Air Tanah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	1,200,318,522.00	2,271,126,489.00	(1,070,807,967.00)	(47.15)
Jumlah	1,200,318,522.00	2,271,126,489.00	(1,070,807,967.00)	(47.15)

9. Pajak Sarang Burung Walet

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	97,436,475.00	90,270,560.00	7,165,915.00	7.94
Jumlah	97,436,475.00	90,270,560.00	7,165,915.00	7.94

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	143,736,884,996.00	106,124,903,919.00	37,611,981,077.00	35.44
Jumlah	143,736,884,996.00	106,124,903,919.00	37,611,981,077.00	35.44

12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	14,987,150,552.00	20,502,590,449.00	(5,515,439,897.00)	(26.90)
Jumlah	14,987,150,552.00	20,502,590,449.00	(5,515,439,897.00)	(26.90)

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
32,238,321,945.17	23,688,650,046.46	8,549,671,898.71	36.09

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 9 SKPD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Dumai. Pemungutan retribusi daerah Pemerintah Kota Dumai didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Tahun 2022 senilai Rp32.238.321.945,17, jika dibandingkan Tahun 2021 terealisasi senilai Rp23.688.650.046,46 Pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan senilai Rp8.549.671.898,71 atau sebesar 36,09% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.4 Perbandingan Pendapatan Retribusi – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6,363,880,145.17	0.00	6,363,880,145.17	100.00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	18,160,000.00	24,680,000.00	(6,520,000.00)	(26.42)
Dinas Lingkungan Hidup	717,640,000.00	775,275,000.00	(57,635,000.00)	(7.43)
Dinas Perhubungan	23,876,748,100.00	18,357,066,946.46	5,519,681,153.54	30.07
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	525,197,100.00	556,449,100.00	(31,252,000.00)	(5.62)
Dinas Perikanan	26,009,600.00	7,885,000.00	18,124,600.00	229.86
Dinas Perdagangan	681,737,000.00	571,789,000.00	109,948,000.00	19.23
Sekretariat Daerah Kota Dumai	28,950,000.00	38,250,000.00	(9,300,000.00)	(24.31)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	3,357,255,000.00	(3,357,255,000.00)	(100.00)
Jumlah	32,238,321,945.17	23,688,650,046.46	8,549,671,898.71	36.09

Masing – masing realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO Tahun 2022 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.6.1.5 Retribusi Jasa Umum – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	717,640,000.00	775,275,000.00	(57,635,000.00)	(7.43)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	444,750,000.00	113,159,000.00	331,591,000.00	293.03
Retribusi Pelayanan Pasar	393,516,000.00	183,991,000.00	209,525,000.00	113.88
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	178,702,750.00	71,080,550.00	107,622,200.00	151.41
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	251,221,000.00	203,602,000.00	47,619,000.00	23.39

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	525,197,100.00	556,449,100.00	(31,252,000.00)	(5.62)
Jumlah	2,511,026,850.00	1,903,556,650.00	607,470,200.00	31.91

b. Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.6.1.6 Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157,000,000.00	38,250,000.00	118,750,000.00	310.46
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0.00	184,196,000.00	(184,196,000.00)	(100.00)
Retribusi Terminal	135,328,000.00	48,950,000.00	86,378,000.00	176.46
Retribusi Tempat Khusus Parkir	22,979,780,300.00	18,091,319,546.46	4,888,460,753.54	27.02
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	100.00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah	26,009,600.00	7,885,000.00	18,124,600.00	229.86
Retribusi Rumah Potong Hewan	18,160,000.00	24,680,000.00	(6,520,000.00)	(26.42)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	138,137,050.00	32,557,850.00	105,579,200.00	324.28
Jumlah	23,483,364,950.00	18,427,838,396.46	5,055,526,553.54	27.43

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.6.1.7 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.00	3,348,255,000.00	(3,348,255,000.00)	(100.00)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	37,000,000.00	9,000,000.00	28,000,000.00	311.11
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6,206,880,145.17	0.00	6,206,880,145.17	100.00
Jumlah	6,243,930,145.17	3,357,255,000.00	2,886,675,145.17	85.98

Realisasi Pendapatan Retribusi per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	717,640,000.00	775,275,000.00	(57,635,000.00)	(7.43)
Jumlah	717,640,000.00	775,275,000.00	(57,635,000.00)	(7.43)

2. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	444,750,000.00	113,159,000.00	331,591,000.00	293.03
Jumlah	444,750,000.00	113,159,000.00	331,591,000.00	293.03

3. Retribusi Pelayanan Pasar

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	393,516,000.00	183,991,000.00	209,525,000.00	113.88
Jumlah	393,516,000.00	183,991,000.00	209,525,000.00	113.88

4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	178,702,750.00	71,080,550.00	107,622,200.00	151.41
Jumlah	178,702,750.00	71,080,550.00	107,622,200.00	151.41

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	251,221,000.00	203,602,000.00	47,619,000.00	23.39
Jumlah	251,221,000.00	203,602,000.00	47,619,000.00	23.39

6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	525,197,100.00	556,449,100.00	(31,252,000.00)	(5.62)
Jumlah	525,197,100.00	556,449,100.00	(31,252,000.00)	(5.62)

7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	157,000,000.00	38,250,000.00	118,750,000.00	310.46
Jumlah	157,000,000.00	38,250,000.00	118,750,000.00	310.46

8. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	0.00	184,196,000.00	(184,196,000.00)	(100.00)
Jumlah	0.00	184,196,000.00	(184,196,000.00)	(100.00)

9. Retribusi Terminal

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	135,328,000.00	48,950,000.00	86,378,000.00	176.46
Jumlah	135,328,000.00	48,950,000.00	86,378,000.00	176.46

10. Retribusi Tempat Khusus Parkir

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	22,979,780,300.00	18,091,319,546.46	4,888,460,753.54	27.02
Jumlah	22,979,780,300.00	18,091,319,546.46	4,888,460,753.54	27.02

11. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	100.00
Jumlah	28,950,000.00	0.00	28,950,000.00	100.00

12. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	26,009,600.00	7,885,000.00	18,124,600.00	229.86
Jumlah	26,009,600.00	7,885,000.00	18,124,600.00	229.86

13. Retribusi Rumah Potong Hewan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	18,160,000.00	24,680,000.00	(6,520,000.00)	(26.42)
Jumlah	18,160,000.00	24,680,000.00	(6,520,000.00)	(26.42)

14. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	138,137,050.00	32,557,850.00	105,579,200.00	324.28
Jumlah	138,137,050.00	32,557,850.00	105,579,200.00	324.28

15. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	3,348,255,000.00	(3,348,255,000.00)	(100.00)
Jumlah	0.00	3,348,255,000.00	(3,348,255,000.00)	(100.00)

16. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37,000,000.00	9,000,000.00	28,000,000.00	311.11
Jumlah	37,000,000.00	9,000,000.00	28,000,000.00	311.11

17. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
Jumlah	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00

18. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6,206,880,145.17	0.00	6,206,880,145.17	100.00
Jumlah	6,206,880,145.17	0.00	6,206,880,145.17	100.00

3) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO**

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1,079,761,191.00	1,415,125,255.00	(335,364,064.00)	(23.70)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Dumai dengan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.079.761.191,00 mengalami penurunan senilai Rp335.364.064,00 atau sebesar 23,70% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.415.125.255,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2022

Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1,079,761,191.00	1,415,125,255.00	(335,364,064.00)	(23.70)
Jumlah	1,079,761,191.00	1,415,125,255.00	(335,364,064.00)	(23.70)

Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	(%)
PT Bank Riau Kepri	1,079,761,191.00	1,316,194,590.00	236,433,399.00	17.96
PT Pembangunan Dumai		98,930,665.00	98,930,665.00	100.00
Jumlah	1,079,761,191.00	1,415,125,255.00	(335,364,064.00)	(23.70)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2022 bersumber dari pembagian Dividen dari PT. Bank Riau Kepri

4) **Lain-lain PAD yang Sah - LO**

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
160,773,836,069.33	205,578,304,337.64	(44,804,468,268.31)	(21.79)

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2022 senilai Rp160.773.836.069,33 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp205.578.304.337,64 mengalami penurunan senilai Rp44.804.468.268,31 atau sebesar 21,79%.

Tabel 5.6.1.9 Perbandingan Lain – Lain PAD – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2,962,000.00	3,452,000.00	(490,000.00)	(14.19)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,142,102,300.00	432,859,972.33	709,242,327.67	163.85
Hasil Kerja Sama Daerah	1,999,999,999.00	0.00	1,999,999,999.00	100.00
Jasa Giro	3,540,712,219.01	4,697,811,210.09	(1,157,098,991.08)	(24.63)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF-LO	9,410,661.00	0.00	9,410,661.00	100.00
Pendapatan Bunga	793,646,059.95	1,135,241,649.19	(341,595,589.24)	(30.09)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1,612,966,852.39	6,391,677,976.42	(4,778,711,124.03)	(74.76)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1,732,181,976.00	3,619,846,565.51	(1,887,664,589.51)	(52.15)
Pendapatan dari Pengembalian	145,945,024.84	230,291,915.00	(84,346,890.16)	(36.63)
Pendapatan dari BLUD	149,793,908,977.14	189,067,123,049.10	(39,273,214,071.96)	(20.77)
Jumlah	160,773,836,069.33	205,578,304,337.64	(44,804,468,268.31)	(21.79)

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LO per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a) **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - PPKD**

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2,962,000.00	3,452,000.00	(490,000.00)	(14.19)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1,142,102,300.00	299,859,972.33	842,242,327.67	280.88
Jasa Giro	3,540,712,219.01	4,697,811,210.09	(1,157,098,991.08)	(24.63)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF-LO	9,410,661.00	0.00	9,410,661.00	100.00
Pendapatan Bunga	793,646,059.95	1,135,241,649.19	(341,595,589.24)	(30.09)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1,612,966,852.39	6,391,677,976.42	(4,778,711,124.03)	(74.76)

Pendapatan dari Pengembalian	145,945,024.84	230,291,915.00	(84,346,890.16)	(36.63)
Jumlah	7,247,745,117.19	12,758,334,723.03	(5,510,589,605.84)	(43.19)

Sebagai tambahan informasi atas pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan senilai Rp1.142.102.300,00 terdiri dari Kontribusi Tetap hasil Bangun Guna Serah (BGS) oleh PT. Mayatama Solusindo senilai Rp300.000.000,00 dan PT. Satwa Sarana Karunia senilai Rp186.000.000,00. Sementara untuk sisanya senilai Rp656.102.300,00 merupakan pendapatan Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

Hasil Bangun Guna Serah (BGS) PT. Mayatama Solusindo senilai Rp300.000.000,00 merupakan pembayaran atas kontribusi tetap Tahun 2022 yang telah di setor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Tanggal 21 Februari 2023. Hasil Bangun Guna Serah (BGS) PT. Satwa Sarana Karunia senilai Rp186.000.000,00 merupakan pembayaran atas kontribusi tetap Tahun 2022 yang telah di setor pada Tanggal 13 Januari 2023. Atas pembayaran tersebut telah diakui sebagai Piutang BGS per 31 Desember 2022.

b) Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan dari BLUD	149,793,908,977.14	189,067,123,049.10	(39,273,214,071.96)	(20.77)
Jumlah	149,793,908,977.14	189,067,123,049.10	(39,273,214,071.96)	(20.77)

c) Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1,732,181,976.00	3,619,846,565.51	(1,887,664,589.51)	(52.15)
Jumlah	1,732,181,976.00	3,619,846,565.51	(1,887,664,589.51)	(52.15)

e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0.00	133,000,000.00	(133,000,000.00)	(100.00)
Jumlah	0.00	133,000,000.00	(133,000,000.00)	(100.00)

f) Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Hasil Kerja Sama Daerah	1,999,999,999.00	0.00	1,999,999,999.00	100.00
Jumlah	1,999,999,999.00	0.00	1,999,999,999.00	100.00

b. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
958,348,926,927.00	889,269,161,050.39	69,079,765,876.61	7.77

Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari pembagian hasil Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Dumai. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 adalah senilai Rp958.348.926.927,00, jika dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 senilai Rp889.269.161.050,39 mengalami kenaikan senilai Rp69.079.765.876,61 atau sebesar 7,77%.

Pendapatan Transfer - LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Rincian realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.10 Perbandingan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	790,780,529,327.00	731,422,367,681.00	59,358,161,646.00	8.12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	20,360,896,000.00	31,603,245,000.00	(11,242,349,000.00)	(35.57)
Pendapatan Bagi Hasil	138,791,251,600.00	118,255,548,369.39	20,535,703,230.61	17.37
Bantuan Keuangan	8,416,250,000.00	7,988,000,000.00	428,250,000.00	5.36
Jumlah	958,348,926,927.00	889,269,161,050.39	69,079,765,876.61	7.77

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
790,780,529,327.00	731,422,367,681.00	59,358,161,646.00	8.12

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2022 senilai Rp790.780.529.327,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp731.422.367.681,00 mengalami kenaikan senilai 59.358.161.646,00 atau sebesar 8,12%. Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.11 Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	200,062,780,224.00	145,468,956,587.00	54,593,823,637.00	37.53
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	427,742,257,138.00	429,427,931,000.00	(1,685,673,862.00)	(0.39)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61,389,147,488.00	92,602,935,776.00	(31,213,788,288.00)	(33.71)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101,586,344,477.00	63,922,544,318.00	37,663,800,159.00	58.92
Jumlah	790,780,529,327.00	731,422,367,681.00	59,358,161,646.00	8.12

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
200,062,780,224.00	145,468,956,587.00	54,593,823,637.00	37.53

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2022 senilai Rp200.062.780.224,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp145.468.956.587,00 mengalami kenaikan senilai 54.593.823.637,00 atau sebesar 37,53%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.12 Perbandingan Dana Bagi Hasil – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
PBB	31,951,411,123.00	32,489,986,139.00	(538,575,016.00)	(1.66)
PPh Pasal 21	29,803,909,794.00	28,458,745,600.00	1,345,164,194.00	4.73
PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	2,407,482,999.00	907,558,300.00	1,499,924,699.00	165.27
Cukai Hasil Tembakau (CHT)	75,125.00	7,105.00	68,020.00	957.35
SDA Minyak Bumi	108,985,949,109.00	65,037,087,400.00	43,948,861,709.00	67.58
SDA Gas Bumi	9,561,705,711.00	1,732,767,313.00	7,828,938,398.00	451.82
SDA Mineral dan Batubara-Royalty	5,456,699,515.00	2,011,059,867.00	3,445,639,648.00	171.33
SDA Kehutanan-PSDH	9,725,482,637.00	13,157,244,713.00	(3,431,762,076.00)	(26.08)
SDA Kehutanan-DR	2,170,064,211.00	1,674,500,150.00	495,564,061.00	29.59
Jumlah	200,062,780,224.00	145,468,956,587.00	54,593,823,637.00	37.53

b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
427,742,257,138.00	429,427,931,000.00	(1,685,673,862.00)	(0.39)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Desember 2022 senilai Rp427.742.257.138,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp429.427.931.000,00 mengalami penurunan senilai Rp1.685.673.862,00 atau sebesar 0,39%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.13 Perbandingan Dana Alokasi Umum – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAU	427,742,257,138.00	429,427,931,000.00	(1,685,673,862.00)	(0.39)
Jumlah	427,742,257,138.00	429,427,931,000.00	(1,685,673,862.00)	(0.39)

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
61,389,147,488.00	92,602,935,776.00	(31,213,788,288.00)	(33.71)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2022 senilai Rp61.389.147.488,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp92.602.935.776,00 mengalami penurunan senilai Rp31.213.788.288,00 atau sebesar 33,71%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.14 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1,374,823,000.00	1,164,180,030.00	210,642,970.00	18.09
Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10,715,841,000.00	13,973,518,877.00	(3,257,677,877.00)	(23.31)
Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10,329,665,000.00	7,420,333,655.00	2,909,331,345.00	39.21
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	470,885,000.00	0.00	470,885,000.00	100.00
Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	302,130,900.00	497,949,500.00	(195,818,600.00)	(39.32)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar	0.00	6,961,322,360.00	(6,961,322,360.00)	(100.00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0.00	2,612,930,185.00	(2,612,930,185.00)	(100.00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	2,793,306,235.00	2,604,123,885.00	189,182,350.00	7.26
Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0.00	33,250,090,451.00	(33,250,090,451.00)	(100.00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB	5,073,521,108.00	740,017,000.00	4,333,504,108.00	585.60
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	7,326,130,000.00	0.00	7,326,130,000.00	100.00
Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0.00	684,582,499.00	(684,582,499.00)	(100.00)
Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0.00	2,221,395,747.00	(2,221,395,747.00)	(100.00)
Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0.00	4,569,233,064.00	(4,569,233,064.00)	(100.00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	6,068,554,005.00	0.00	6,068,554,005.00	100.00
Bidang Air Minum-Penugasan	0.00	4,556,055,598.00	(4,556,055,598.00)	(100.00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4,775,800,000.00	0.00	4,775,800,000.00	100.00
Bidang Sanitasi-Penugasan	0.00	1,660,233,500.00	(1,660,233,500.00)	(100.00)
Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	12,158,491,240.00	3,994,119,110.00	8,164,372,130.00	204.41
Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0.00	4,121,535,315.00	(4,121,535,315.00)	(100.00)
Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0.00	1,571,315,000.00	(1,571,315,000.00)	(100.00)
Jumlah	61,389,147,488.00	92,602,935,776.00	(31,213,788,288.00)	(33.71)

c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
101,586,344,477.00	63,922,544,318.00	37,663,800,159.00	58.92

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2022 senilai Rp101.586.344.477,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp63.922.544.318,00 mengalami kenaikan senilai 37.663.800.159,00 atau sebesar 58,92%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.15 Perbandingan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	39,790,809,140.00	0.00	39,790,809,140.00	100.00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	720,000,000.00	0.00	720,000,000.00	100.00
TPG PNSD	51,967,177,370.00	55,565,896,000.00	(3,598,718,630.00)	(6.48)
Tamsil Guru PNSD	1,558,500,000.00	528,000,000.00	1,030,500,000.00	195.17
BOP PAUD	0.00	2,761,200,000.00	(2,761,200,000.00)	(100.00)
BOP Pendidikan Kesetaraan	0.00	248,850,000.00	(248,850,000.00)	(100.00)
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4,119,961,607.00	0.00	4,119,961,607.00	100.00
BOKKB-BOKB	2,133,478,400.00	1,812,823,476.00	320,654,924.00	17.69
Dana Pelayanan AdministrasiKependudukan	0.00	1,514,289,842.00	(1,514,289,842.00)	(100.00)
Dana Pelayanan Kepariwisata	0.00	99,692,000.00	(99,692,000.00)	(100.00)
Fasilitasi Penanaman Modal	254,403,060.00	326,122,000.00	(71,718,940.00)	(21.99)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	289,414,900.00	575,671,000.00	(286,256,100.00)	(49.73)
Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	752,600,000.00	490,000,000.00	262,600,000.00	53.59
Jumlah	101,586,344,477.00	63,922,544,318.00	37,663,800,159.00	58.92

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
----------------	----------------	-------------------------	---

Lainnya - Dana Insentif Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
20,360,896,000.00	31,603,245,000.00	(11,242,349,000.00)	(35.57)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp20.360.896.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp31.603.245.000,00 mengalami penurunan senilai Rp11.242.349.000,00 atau sebesar 35,57%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.16 Perbandingan Dana Insentif Daerah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dana Insentif Daerah (DID)	20,360,896,000.00	31,603,245,000.00	(11,242,349,000.00)	(35.57)
Jumlah	20,360,896,000.00	31,603,245,000.00	(11,242,349,000.00)	(35.57)

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
147,207,501,600.00	126,243,548,369.39	20,963,953,230.61	16.61

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 senilai Rp147.207.501.600,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp126.243.548.369,39,00 mengalami kenaikan senilai Rp20.963.953.230,61,00 atau sebesar 16,61%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Transfer Antar Daerah Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	138,791,251,600.00	118,255,548,369.39	20,535,703,230.61	17.37
Bantuan Keuangan	8,416,250,000.00	7,988,000,000.00	428,250,000.00	5.36
Jumlah	147,207,501,600.00	126,243,548,369.39	20,963,953,230.61	16.61

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
138,791,251,600.00	118,255,548,369.39	20,535,703,230.61	17.37

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2022 senilai Rp138.791.251.600,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp118.255.548.369,39 mengalami kenaikan senilai 20.535.703.230,61 atau sebesar 17,37%. Berikut ini adalah rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.17 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pajak Kendaraan Bermotor	28,395,979,012.00	32,683,466,124.39	(4,287,487,112.39)	(13.12)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23,321,728,811.00	19,359,137,791.00	3,962,591,020.00	20.47
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	62,314,762,949.00	45,121,720,867.00	17,193,042,082.00	38.10
Pajak Air Permukaan	1,139,183,222.00	1,157,395,723.00	(18,212,501.00)	(1.57)
Pajak Rokok	23,619,597,606.00	19,933,827,864.00	3,685,769,742.00	18.49
Jumlah	138,791,251,600.00	118,255,548,369.39	20,535,703,230.61	17.37

b) Bantuan Keuangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
8,416,250,000.00	7,988,000,000.00	428,250,000.00	5.36

Realisasi Bantuan Keuangan per 31 Desember 2022 senilai Rp8.416.250.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp7.988.000.000,00 mengalami kenaikan senilai 428.250.000,00 atau sebesar 5,36%. Berikut ini adalah rincian realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kota Dumai per 31 Desember 2022:

Tabel 5.6.1.18 Perbandingan Bantuan Keuangan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	8,416,250,000.00	7,988,000,000.00	428,250,000.00	5.36
Jumlah	8,416,250,000.00	7,988,000,000.00	428,250,000.00	5.36

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
16,609,212,813.43	56,808,466,842.20	(40,199,254,028.77)	(70.76)

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun 2022 adalah senilai Rp16.609.212.813,43 mengalami penurunan senilai Rp40.199.254.028,77 atau sebesar 70,76% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp56.808.466.842,20. Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.19 Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah	16,609,212,813.43	16,112,703,842.20	496,508,971.23	3.08
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	40,695,763,000.00	(40,695,763,000.00)	(100.00)
Jumlah	16,609,212,813.43	56,808,466,842.20	(40,199,254,028.77)	(70.76)

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 adalah senilai Rp16.609.212.813,43 mengalami kenaikan senilai Rp496.508.971,23 atau sebesar 3,08% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp16.112.703.842,20. Berikut rincian dari Pendapatan Hibah:

Tabel 5.6.1.20 Perbandingan Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2,794,469,206.85	13,312,730,660.00	(10,518,261,453.15)	(79.01)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	306,559,000.00	2,687,463,182.20	(2,380,904,182.20)	(88.59)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	143,381,000.00	112,510,000.00	30,871,000.00	27.44
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	785,601,988.58	0.00	785,601,988.58	100.00
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	12,579,201,618.00	0.00	12,579,201,618.00	100.00
Jumlah	16,609,212,813.43	16,112,703,842.20	496,508,971.23	3.08

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Berikut adalah SKPD yang menerima Hibah dari Pemerintah Lainnya serta keterangan aset yang diterima adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.21 Rincian Pendapatan Hibah – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

SKPD	Realisasi 2021	Keterangan
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1,521,711,486.00	Hibah Masuk dari Kementerian PUPR
Dinas Kesehatan	306,471,446.00	Hibah Masuk dari Kementerian Kesehatan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12,124,940,000.00	Hibah dari Dewan FTJSP
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	310,541,785.71	Hibah dari BNPB
Dinas Lingkungan Hidup	191,250,000.00	Hibah Masuk dari Bank Riau
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	306,559,000.00	Hibah Dari Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	331,214,132.00	Hibah Masuk dari Pemerintah Pusat
Dinas Perhubungan	324,530,357.14	Hibah Masuk dari Kementerian Perhubungan
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	100,000,000.00	Hibah Lapangan Tenis dari The Zuri
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	977,000.00	Hibah Buku dari Founder Komunitas Merangkai Aksara
Sekretariat Daerah Kota Dumai	353,284,618.00	Hibah Masuk dari Masjid Agung Al Mannan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	594,351,988.58	Hibah dari pengurus Masjid Jami'atul Muslimin
Inspektorat	143,381,000.00	Hibah Masuk Kelompok Masyarakat
Jumlah	16,609,212,813.43	

Daftar Pendapatan Hibah dapat dilihat pada Lampiran 33.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0.00	40,695,763,000.00	(40,695,763,000.00)	(100.00)

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Tahun 2022 adalah senilai Rp0,00 mengalami penurunan senilai Rp40.695.763.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp40.695.763.000,00. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Lain-lain Pendapatan dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6.1.22 Perbandingan Lain-lain Pendapatan – LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hibah Dana BOS	0.00	40,695,763,000.00	(40,695,763,000.00)	(100.00)
Jumlah	0.00	40,695,763,000.00	(40,695,763,000.00)	(100.00)

2. Beban - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1,399,193,113,871.93	1,348,648,467,648.14	50,544,646,223.79	3.75

Beban - LO merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun berjalan, dengan realisasi Beban-LO Kota Dumai selama Tahun 2022 adalah senilai Rp1.399.193.113.871,93, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.348.648.467.648,14 mengalami kenaikan senilai Rp50.544.646.223,79 atau sebesar 3,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.1 Rincian Beban-LO

Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Operasi	1,398,932,824,854.93	1,342,545,256,777.14	56,387,568,077.79	4.20
Beban Tak Terduga	260,289,017.00	6,103,210,871.00	(5,842,921,854.00)	(95.74)
Jumlah	1,399,193,113,871.93	1,348,648,467,648.14	50,544,646,223.79	3.75

a. Beban Operasi

Realisasi Beban Operasi Kota Dumai selama Tahun 2022 adalah senilai Rp1.399.193.113.871,93 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp1.348.648.467.648,14, mengalami kenaikan senilai Rp50.544.646.223,79, atau sebesar 3,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.2 Rincian Beban Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	613,745,405,027.00	624,362,020,295.00	(10,620,901,268.00)	(1.70)
Beban Barang dan Jasa	534,009,973,169.57	500,306,843,431.15	33,703,129,738.42	6.74
Beban	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga	1,060,377,070.00	0.00	1,060,377,070.00	100.00
Beban Hibah	42,565,151,769.26	15,192,998,932.38	27,372,152,836.88	180.16
Beban Bantuan Sosial	12,911,808,100.00	0.00	12,911,808,100.00	100.00
Beban Penyisihan Piutang	12,458,576,669.68	20,948,535,335.61	(12,181,949,246.83)	(58.15)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	182,181,533,049.42	181,734,858,783.00	446,958,266.42	0.25
Jumlah	1,398,932,824,854.93	1,342,545,256,777.14	56,387,568,077.79	4.20

1. Beban Pegawai

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
613,745,405,027.00	624,362,020,295.00	(10,620,901,268.00)	(1.70)

Beban Pegawai yang bersumber dari Belanja APBD diakui pada saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang bersumber dari kekurangan pembayaran atas Belanja APBD tahun sebelumnya dan Belanja yang bersumber dari BLUD diakui pada saat timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas. Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2022 senilai Rp613.745.405,027 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp624.362.020.295,00 mengalami penurunan senilai Rp10.620.901.268,00 atau sebesar 1,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.3 Rincian Beban Pegawai LO

Beban Pegawai	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Gaji dan Tunjangan ASN	274,011,724,548.00	264,398,713,084.00	9,613,011,464.00	3.64
Tambahan Penghasilan PNS	184,476,904,079.00	176,126,304,790.00	8,350,599,289.00	4.74
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	67,295,285,950.00	70,662,436,970.00	(3,367,151,020.00)	(4.77)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15,996,033,321.00	16,005,055,941.00	(9,022,620.00)	(0.06)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	955,752,317.00	867,676,247.00	88,076,070.00	10.15
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801,600,000.00	731,600,000.00	70,000,000.00	9.57
Beban Pegawai Blud	70,208,104,812.00	95,570,233,263.00	(25,362,128,451.00)	(26.54)
Jumlah	613,745,405,027.00	624,362,020,295.00	(10,616,615,268.00)	(1.70)

Tabel 5.6.2.3.a Rincian Beban Berdasarkan Timbulnya Beban

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Gaji dan Tunjangan ASN	273,861,489,044.00	150,235,504.00	274,011,724,548.00

Tambahan Penghasilan PNS	184,476,904,079.00	0.00	184,476,904,079.00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66,252,455,856.00	1,042,830,094.00	67,295,285,950.00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15,996,033,321.00	0.00	15,996,033,321.00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	955,752,317.00	0.00	955,752,317.00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801,600,000.00	0.00	801,600,000.00
Beban Pegawai Blud	52,896,298,477.00	17,311,806,335.00	70,208,104,812.00
Jumlah	595,240,533,094.00	18,504,871,933.00	613,745,405,027.00

Tabel 5.6.2.4 Rincian Beban Pegawai LO per SKPD Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	229,987,353,709.00	227,753,032,016.00	2,234,321,693.00	0.98
Dinas Kesehatan	152,590,580,591.00	172,064,521,717.00	(19,473,941,126.00)	(11.32)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,312,693,579.00	8,515,568,986.00	(202,875,407.00)	(2.38)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	3,524,583,879.00	2,913,595,784.00	610,988,095.00	20.97
Satuan Polisi Pamong Praja	5,969,554,432.00	5,789,623,800.00	179,930,632.00	3.11
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,364,369,706.00	3,346,390,439.00	17,979,267.00	0.54
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,079,912,413.00	2,918,130,710.00	161,781,703.00	5.54
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3,389,596,313.00	2,444,452,733.00	945,143,580.00	38.66
Dinas Tenaga Kerja	3,619,827,108.00	3,320,726,325.00	299,100,783.00	9.01
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,274,910,701.00	4,201,731,728.00	73,178,973.00	1.74
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8,261,260,341.00	8,147,896,570.00	113,363,771.00	1.39
Dinas Lingkungan Hidup	4,541,158,409.00	4,735,894,605.00	(194,736,196.00)	(4.11)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4,173,534,256.00	4,135,893,930.00	37,640,326.00	0.91
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,041,688,521.00	3,213,453,866.00	(171,765,345.00)	(5.35)
Dinas Perhubungan	8,640,143,653.00	7,805,223,677.00	834,919,976.00	10.70
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,021,175,726.00	3,967,129,673.00	54,046,053.00	1.36
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,590,773,077.00	5,681,926,295.00	(91,153,218.00)	(1.60)
Dinas Kepemudaan OlahRaga dan Pariwisata	3,409,499,984.00	3,344,478,624.00	65,021,360.00	1.94
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,253,331,350.00	3,044,823,851.00	208,507,499.00	6.85
Dinas Perikanan	3,047,806,860.00	3,251,680,551.00	(203,873,691.00)	(6.27)
Dinas Perdagangan	4,284,292,738.00	4,409,131,250.00	(124,838,512.00)	(2.83)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4,347,259,024.00	4,182,089,184.00	165,169,840.00	3.95
Sekretariat Daerah Kota Dumai	18,679,576,055.00	18,968,627,929.00	(289,051,874.00)	(1.52)
Sekretariat DPRD	20,863,062,287.00	20,611,886,830.00	251,175,457.00	1.22
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	5,192,968,080.00	5,092,410,156.00	100,557,924.00	1.97
Badan Pendapatan Daerah	15,223,209,827.00	15,025,168,368.00	198,041,459.00	1.32
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	26,993,557,043.00	26,551,353,968.00	442,203,075.00	1.67
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,162,067,688.00	4,032,250,692.00	129,816,996.00	3.22
Inspektorat	8,770,566,096.00	8,660,759,916.00	109,806,180.00	1.27
Kecamatan Dumai Barat	4,887,807,465.00	4,663,012,638.00	224,794,827.00	4.82
Kecamatan Dumai Timur	5,366,498,858.00	4,808,084,451.00	558,414,407.00	11.61
Kecamatan Dumai Selatan	5,349,931,632.00	5,188,567,035.00	161,364,597.00	3.11
Kecamatan Dumai Kota	5,559,762,761.00	5,262,294,201.00	297,468,560.00	5.65
Kecamatan Bukit Kapur	6,792,345,050.00	6,194,690,269.00	597,654,781.00	9.65
Kecamatan Medang Kampai	4,885,249,307.00	4,661,124,823.00	224,124,484.00	4.81
Kecamatan Sungai Sembilan	6,293,496,508.00	5,454,392,705.00	839,103,803.00	15.38
Jumlah	613,745,405,027.00	624,362,020,295.00	(10,616,615,268.00)	(1.70)

Realisasi Beban Pegawai LO Per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Gaji dan Tunjangan ASN

Tabel 5.6.2.5 Gaji dan Tunjangan ASN per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	115,866,747,496.00	109,607,991,163.00	6,258,756,333.00	5.71
Dinas Kesehatan	46,160,358,111.00	44,338,165,658.00	1,822,192,453.00	4.11
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,035,992,649.00	4,332,922,594.00	(296,929,945.00)	(6.85)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,811,468,079.00	1,539,293,883.00	272,174,196.00	17.68

Satuan Polisi Pamong Praja	3,044,886,232.00	3,057,993,720.00	(13,107,488.00)	(0.43)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,852,081,277.00	1,831,923,658.00	20,157,619.00	1.10
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,531,595,485.00	1,489,105,874.00	42,489,611.00	2.85
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,691,915,293.00	1,276,703,727.00	415,211,566.00	32.52
Dinas Tenaga Kerja	1,896,039,953.00	1,755,111,248.00	140,928,705.00	8.03
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,255,882,488.00	2,199,000,089.00	56,882,399.00	2.59
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4,474,556,617.00	4,487,359,422.00	(12,802,805.00)	(0.29)
Dinas Lingkungan Hidup	2,307,013,648.00	2,525,572,039.00	(218,558,391.00)	(8.65)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,978,416,101.00	1,982,126,556.00	(3,710,455.00)	(0.19)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,510,462,587.00	1,672,198,906.00	(161,736,319.00)	(9.67)
Dinas Perhubungan	4,271,860,671.00	4,409,864,372.00	(138,003,701.00)	(3.13)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,915,306,770.00	1,965,311,344.00	(50,004,574.00)	(2.54)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,722,318,797.00	2,757,633,258.00	(35,314,461.00)	(1.28)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,760,159,906.00	1,773,535,646.00	(13,375,740.00)	(0.75)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,726,048,827.00	1,681,981,117.00	44,067,710.00	2.62
Dinas Perikanan	1,557,320,318.00	1,762,800,790.00	(205,480,472.00)	(11.66)
Dinas Perdagangan	2,353,000,762.00	2,494,326,642.00	(141,325,880.00)	(5.67)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2,415,402,220.00	2,315,892,455.00	99,509,765.00	4.30
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8,042,081,295.00	8,115,674,803.00	(73,593,508.00)	(0.91)
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	2,592,353,901.00	2,452,828,454.00	139,525,447.00	5.69
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2,357,785,046.00	2,428,129,130.00	(70,344,084.00)	(2.90)
Badan Pendapatan Daerah	4,239,027,893.00	3,993,847,702.00	245,180,191.00	6.14
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	21,241,098,008.00	21,111,876,690.00	129,221,318.00	0.61
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,949,781,992.00	1,909,651,999.00	40,129,993.00	2.10
Inspektorat	3,643,073,816.00	3,465,354,799.00	177,719,017.00	5.13
Kecamatan Dumai Barat	2,632,972,353.00	2,556,412,091.00	76,560,262.00	2.99
Kecamatan Dumai Timur	2,844,446,077.00	2,538,532,411.00	305,913,666.00	12.05
Kecamatan Dumai Selatan	2,792,878,216.00	2,780,155,618.00	12,722,598.00	0.46
Kecamatan Dumai Kota	2,935,612,338.00	2,880,320,396.00	55,291,942.00	1.92
Kecamatan Bukit Kapur	3,614,944,973.00	3,341,266,560.00	273,678,413.00	8.19
Kecamatan Medang Kampai	2,625,860,942.00	2,553,140,323.00	72,720,619.00	2.85
Kecamatan Sungai Sembilan	3,360,973,411.00	3,014,707,947.00	346,265,464.00	11.49
Jumlah	274,011,724,548.00	264,398,713,084.00	9,613,011,464.00	3.64

b. Tambahan Penghasilan PNS

Tabel 5.6.2.6 Tambahan Penghasilan PNS per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	62,898,987,813.00	61,565,463,813.00	1,333,524,000.00	2.17
Dinas Kesehatan	35,464,288,454.00	31,785,722,796.00	3,678,565,658.00	11.57
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,130,716,930.00	3,173,016,392.00	(42,299,462.00)	(1.33)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,571,285,800.00	1,256,154,901.00	315,130,899.00	25.09
Satuan Polisi Pamong Praja	2,822,503,200.00	2,666,440,080.00	156,063,120.00	5.85
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,441,248,429.00	1,482,746,781.00	(41,498,352.00)	(2.80)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,476,856,928.00	1,357,564,836.00	119,292,092.00	8.79
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,626,206,020.00	1,096,349,006.00	529,857,014.00	48.33
Dinas Tenaga Kerja	1,646,692,155.00	1,499,395,077.00	147,297,078.00	9.82
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,995,628,213.00	1,874,381,639.00	121,246,574.00	6.47
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,625,993,724.00	3,512,733,148.00	113,260,576.00	3.22
Dinas Lingkungan Hidup	2,053,724,761.00	2,133,428,583.00	(79,703,822.00)	(3.74)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,162,418,155.00	2,121,067,374.00	41,350,781.00	1.95
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,385,935,934.00	1,421,584,960.00	(35,649,026.00)	(2.51)
Dinas Perhubungan	3,135,442,888.00	3,064,919,305.00	70,523,583.00	2.30
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,871,098,956.00	1,792,451,729.00	78,647,227.00	4.39
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,750,385,030.00	2,759,987,326.00	(9,602,296.00)	(0.35)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,603,340,078.00	1,519,912,978.00	83,427,100.00	5.49
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,460,622,923.00	1,293,092,734.00	167,530,189.00	12.96

Dinas Perikanan	1,422,576,542.00	1,433,609,761.00	(11,033,219.00)	(0.77)
Dinas Perdagangan	1,845,121,976.00	1,814,231,058.00	30,890,918.00	1.70
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1,866,636,804.00	1,800,976,729.00	65,660,075.00	3.65
Sekretariat Daerah Kota Dumai	9,434,802,412.00	9,812,849,719.00	(378,047,307.00)	(3.85)
Sekretariat DPRD	1,845,575,065.00	1,713,402,435.00	132,172,630.00	7.71
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2,648,003,534.00	2,479,161,026.00	168,842,508.00	6.81
Badan Pendapatan Daerah	3,025,732,323.00	2,759,880,340.00	265,851,983.00	9.63
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,515,839,035.00	3,841,043,278.00	(325,204,243.00)	(8.47)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,114,967,696.00	2,038,678,693.00	76,289,003.00	3.74
Inspektorat	5,008,733,030.00	5,138,905,117.00	(130,172,087.00)	(2.53)
Kecamatan Dumai Barat	2,161,670,112.00	1,995,780,547.00	165,889,565.00	8.31
Kecamatan Dumai Timur	2,442,972,781.00	2,180,812,040.00	262,160,741.00	12.02
Kecamatan Dumai Selatan	2,442,889,416.00	2,313,192,817.00	129,696,599.00	5.61
Kecamatan Dumai Kota	2,487,420,423.00	2,283,603,805.00	203,816,618.00	8.93
Kecamatan Bukit Kapur	3,084,840,077.00	2,728,286,709.00	356,553,368.00	13.07
Kecamatan Medang Kampai	2,161,108,365.00	2,039,364,500.00	121,743,865.00	5.97
Kecamatan Sungai Sembilan	2,844,638,097.00	2,376,112,758.00	468,525,339.00	19.72
Jumlah	184,476,904,079.00	176,126,304,790.00	8,350,599,289.00	4.74

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tabel 5.6.2.7 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	51,221,618,400.00	56,579,577,040.00	(5,357,958,640.00)	(9.47)
Dinas Kesehatan	757,829,214.00	370,400,000.00	387,429,214.00	104.60
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1,145,984,000.00	1,009,630,000.00	136,354,000.00	13.51
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	141,830,000.00	118,147,000.00	23,683,000.00	20.05
Satuan Polisi Pamong Praja	102,165,000.00	65,190,000.00	36,975,000.00	56.72
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	71,040,000.00	31,720,000.00	39,320,000.00	123.96
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	71,460,000.00	71,460,000.00	0.00	0.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	71,475,000.00	71,400,000.00	75,000.00	0.11
Dinas Tenaga Kerja	77,095,000.00	66,220,000.00	10,875,000.00	16.42
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	23,400,000.00	128,350,000.00	(104,950,000.00)	(81.77)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	160,710,000.00	147,804,000.00	12,906,000.00	8.73
Dinas Lingkungan Hidup	180,420,000.00	76,893,983.00	103,526,017.00	134.63
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	32,700,000.00	32,700,000.00	0.00	0.00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	145,290,000.00	119,670,000.00	25,620,000.00	21.41
Dinas Perhubungan	1,232,840,094.00	330,440,000.00	902,400,094.00	273.09
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	234,770,000.00	208,040,600.00	26,729,400.00	12.85
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	118,069,250.00	164,305,711.00	(46,236,461.00)	(28.14)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	46,000,000.00	51,030,000.00	(5,030,000.00)	(9.86)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	66,659,600.00	69,750,000.00	(3,090,400.00)	(4.43)
Dinas Perikanan	67,910,000.00	55,270,000.00	12,640,000.00	22.87
Dinas Perdagangan	86,170,000.00	100,573,550.00	(14,403,550.00)	(14.32)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	65,220,000.00	65,220,000.00	0.00	0.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	512,580,000.00	374,060,000.00	138,520,000.00	37.03
Sekretariat DPRD	227,500,000.00	239,000,000.00	(11,500,000.00)	(4.81)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	187,179,500.00	185,120,000.00	2,059,500.00	1.11
Badan Pendapatan Daerah	7,092,809,642.00	7,541,133,486.00	(448,323,844.00)	(5.95)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2,236,620,000.00	1,598,434,000.00	638,186,000.00	39.93
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,318,000.00	83,920,000.00	13,398,000.00	15.97
Inspektorat	118,759,250.00	56,500,000.00	62,259,250.00	110.19
Kecamatan Dumai Barat	93,165,000.00	110,820,000.00	(17,655,000.00)	(15.93)
Kecamatan Dumai Timur	79,080,000.00	88,740,000.00	(9,660,000.00)	(10.89)
Kecamatan Dumai Selatan	114,164,000.00	95,218,600.00	18,945,400.00	19.90
Kecamatan Dumai Kota	136,730,000.00	98,370,000.00	38,360,000.00	39.00
Kecamatan Bukit Kapur	92,560,000.00	125,137,000.00	(32,577,000.00)	(26.03)
Kecamatan Medang Kampai	98,280,000.00	68,620,000.00	29,660,000.00	43.22
Kecamatan Sungai Sembilan	87,885,000.00	63,572,000.00	24,313,000.00	38.24

Jumlah	67,295,285,950.00	70,662,436,970.00	(3,367,151,020.00)	(4.77)
--------	-------------------	-------------------	--------------------	--------

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

5.6.2.8 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat DPRD	15,996,033,321.00	16,005,055,941.00	(9,022,620.00)	(0.06)
Jumlah	15,996,033,321.00	16,005,055,941.00	(9,022,620.00)	(0.06)

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

5.6.2.9 Tabel Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Komunikasi Dan Informatika	0.00	1,326,000.00	(1,326,000.00)	(100.00)
Dinas Perhubungan	0.00	0.00	0.00	100.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	90,112,348.00	136,043,407.00	(45,931,059.00)	(33.76)
Badan Pendapatan Daerah	865,639,969.00	730,306,840.00	135,333,129.00	18.53
Jumlah	955,752,317.00	867,676,247.00	88,076,070.00	10.15

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada Badan Pendapatan Daerah merupakan beban insentif KDH/WKDH atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Tabel 5.6.2.10 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Sekretariat Daerah Kota Dumai	600,000,000.00	530,000,000.00	70,000,000.00	13.21
Sekretariat DPRD	201,600,000.00	201,600,000.00	0.00	0.00
Jumlah	801,600,000.00	731,600,000.00	70,000,000.00	9.57

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH merupakan Beban Operasional Bagi Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH.

g. Beban Pegawai BLUD

Tabel 5.6.2.11 Beban Gaji BLUD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	70,208,104,812.00	95,570,233,263.00	(25,362,128,451.00)	(26.54)
Jumlah	70,208,104,812.00	95,570,233,263.00	(25,362,128,451.00)	(26.54)

2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
534,009,973,169.57	500,306,843,431.15	33,703,129,738.42	6.74

Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2022 adalah senilai Rp534.009.973.169,57, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp500.306.843.431,15 mengalami kenaikan senilai Rp33.703.129.738,42 atau sebesar 6,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.12 Rincian Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Barang	120,823,186,174.47	81,508,355,976.82	39,314,830,197.65	48.23
Beban Jasa	205,797,851,206.05	212,708,424,110.50	(6,910,572,904.45)	(3.25)
Beban Pemeliharaan	48,850,772,485.57	36,825,902,971.70	12,024,869,513.87	32.65
Beban Perjalanan Dinas	52,881,607,692.00	45,106,900,776.00	7,774,706,916.00	17.24
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,139,900,300.00	6,088,260,000.00	7,051,640,300.00	115.82
Beban Barang dan Jasa BOS	31,947,871,800.00	29,942,171,389.00	2,005,700,411.00	6.70
Beban Barang dan Jasa BLUD	60,568,783,511.48	88,126,828,207.13	(27,558,044,695.65)	(31.27)
Jumlah	534,009,973,169.57	500,306,843,431.15	33,703,129,738.42	6.74

Tabel 5.6.2.12.a Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Pengakuannya

Beban Barang dan Jasa	Konsumsi Aset	Kewajiban	Beban
Beban Barang	120,823,186,174.47	0.00	120,823,186,174.47
Beban Jasa	200,893,401,726.05	4,904,449,480.00	205,797,851,206.05
Beban Pemeliharaan	48,850,772,485.57	0.00	48,850,772,485.57
Beban Perjalanan Dinas	52,881,607,692.00	0.00	52,881,607,692.00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13,139,900,300.00	0.00	13,139,900,300.00
Beban Barang dan Jasa BOS	31,947,871,800.00	0.00	31,947,871,800.00
Beban Barang dan Jasa BLUD	44,670,128,760.48	15,898,654,751.00	60,568,783,511.48

Jumlah	513,206,868,938.57	20,803,104,231.00	534,009,973,169.57
--------	--------------------	-------------------	--------------------

Tabel 5.6.2.12.b Rincian Beban Barang dan Jasa Berdasarkan Konsumsi Aset

1. Beban Barang

Beban Barang yang diakui saat pengeluaran kas, pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	118,767,455,304.69
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	2,532,867,870.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	1,829,869,492.00
Beban Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(2,307,006,492.22)
Jumlah Beban	120,823,186,174.47

2. Beban Jasa

Beban Jasa yang diakui saat pengeluaran kas, dan pengurangan beban atas pelunasan Utang tahun sebelumnya	205,303,947,881.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	2,413,661.00
Beban Jasa yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(4,412,959,815.95)
Jumlah Beban	200,893,401,726.05

3. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan yang diakui saat pengeluaran kas	57,011,334,399.19
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	178,974,800.00
Beban Pemeliharaan yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(8,339,536,713.62)
Jumlah Beban	48,850,772,485.57

4. Beban Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas	52,881,607,692.00
Beban Perjalanan Dinas yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0.00
Jumlah Beban	52,881,607,692.00

5. Beban Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban yang diakui pada saat pengeluaran kas	13,137,750,300.00
Belanja Modal berupa hadiah perlombaan yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	2,150,000.00
Jumlah Beban	13,139,900,300.00

6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban yang diakui pada saat Pengesahan Belanja oleh BUD (SPB)	31,947,871,800.00
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	0.00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	0.00
Jumlah Beban	31,947,871,800.00

7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD yang diakui saat pengesahan Belanja oleh BUD (SP2B), pengakuan beban atas Persediaan tahun sebelumnya, serta pengurangan beban atas pelunasan utang tahun sebelumnya	46,649,945,505.00
Beban Barang yang berasal dari Belanja Modal yang nilainya dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0.00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria Aet Tetap	993,600.00
Belanja Barang yang dikapitalisir ke Aset Tetap	(1,980,810,344.52)
Jumlah Beban	44,670,128,760.48

Jumlah Beban Barang dan Jasa Saat Terjadinya Konsumsi Aset (1 s.d 7)	513,206,868,938.57
---	---------------------------

Tabel 5.6.2.13 Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60,846,949,233.00	63,411,130,210.11	(2,564,180,977.11)	(4.04)
Dinas Kesehatan	174,602,686,653.69	204,278,835,345.82	(29,742,940,409.13)	(14.56)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	81,937,175,140.62	41,406,603,184.00	40,530,571,956.62	97.88
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	12,079,026,814.00	6,037,231,859.00	6,041,794,955.00	100.08
Satuan Polisi Pamong Praja	2,601,462,619.00	2,452,870,075.00	148,592,544.00	6.06
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,935,124,175.00	4,150,278,045.76	(1,215,153,870.76)	(29.28)
Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1,723,342,433.00	2,031,523,212.00	(308,180,779.00)	(15.17)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	3,032,490,944.00	3,096,331,085.00	(63,840,141.00)	(2.06)
Dinas Tenaga Kerja	2,580,915,686.00	1,230,964,182.00	1,349,951,504.00	109.67
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2,227,699,697.00	2,509,719,391.00	(282,019,694.00)	(11.24)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	6,651,148,470.00	8,970,167,889.00	(2,319,019,419.00)	(25.85)
Dinas Lingkungan Hidup	15,727,397,380.00	15,025,156,891.00	702,240,489.00	4.67
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	3,035,558,276.00	3,471,852,272.00	(436,293,996.00)	(12.57)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4,253,225,091.00	3,711,197,576.00	542,027,515.00	14.61
Dinas Perhubungan	31,612,867,217.26	29,661,981,605.96	1,950,885,611.30	6.58
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6,736,530,547.00	7,191,327,698.00	(454,797,151.00)	(6.32)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,281,254,529.00	1,558,095,012.00	723,159,517.00	46.41
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	4,082,447,944.00	3,184,905,792.00	897,542,152.00	28.18
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1,317,823,214.00	1,530,547,098.00	(212,723,884.00)	(13.90)
Dinas Perikanan	2,513,306,345.00	2,621,443,080.00	(108,136,735.00)	(4.13)
Dinas Perdagangan	2,444,906,852.00	2,421,003,867.00	23,902,985.00	0.99
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1,715,596,737.00	1,607,798,207.00	107,798,530.00	6.70
Sekretariat Daerah Kota Dumai	29,365,501,128.00	22,956,941,770.50	6,408,559,357.50	27.92
Sekretariat DPRD	21,426,893,500.00	15,477,438,613.00	5,949,454,887.00	38.44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	4,001,283,445.00	3,536,440,853.00	464,842,592.00	13.14
Badan Pendapatan Daerah	7,622,722,377.00	5,280,089,480.00	2,342,632,897.00	44.37
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	12,943,810,729.00	9,054,525,522.00	3,889,285,207.00	42.95
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3,488,427,391.00	3,883,343,952.00	(394,916,561.00)	(10.17)
Inspektorat	3,534,995,660.00	3,234,861,214.00	300,134,446.00	9.28
Kecamatan Dumai Barat	3,304,109,508.00	2,616,583,476.00	687,526,032.00	26.28
Kecamatan Dumai Timur	4,385,260,967.00	3,702,115,129.00	683,145,838.00	18.45
Kecamatan Dumai Selatan	4,088,155,079.00	3,736,559,431.00	351,595,648.00	9.41
Kecamatan Dumai Kota	4,323,270,739.00	6,198,170,927.00	(1,874,900,188.00)	(30.25)
Kecamatan Bukit Kapur	3,493,202,993.00	3,474,273,581.00	18,929,412.00	0.54
Kecamatan Medang Kampai	2,106,000,274.00	2,720,688,770.00	(614,688,496.00)	(22.59)
Kecamatan Sungai Sembilan	2,987,403,382.00	2,873,847,135.00	113,556,247.00	3.95
Jumlah	534,009,973,169.57	500,306,843,431.15	33,703,129,738.42	6.74

a. Beban Barang

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
120,823,186,174.47	81,508,355,976.82	39,314,830,197.65	48.23

Beban Barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pencatatan Barang Kota Dumai menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai Beban Barang. Hingga pada akhir periode Beban Persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari Beban Operasional. Realisasi Beban Barang selama Tahun 2022 senilai Rp120.823.186.174,47 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp81.508.355.976,82 mengalami kenaikan senilai Rp39.314.830.197,65 atau sebesar 48,23%.

Tabel 5.6.2.14 Rincian Beban Barang LO

Beban Barang	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------------	----------

Beban Barang Pakai Habis	116,519,764,911.93	77,400,829,447.71	39,118,935,464.22	50.54
Beban Barang Tak Habis Pakai	4,303,421,262.54	4,107,526,529.11	195,894,733.43	4.77
Jumlah	120,823,186,174.47	81,508,355,976.82	39,314,830,197.65	48.23

Tabel 5.6.2.15 Perbandingan Beban Barang LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6,259,537,461.00	5,746,835,993.11	512,701,467.89	8.92
Dinas Kesehatan	36,059,276,783.31	23,057,142,677.95	13,002,134,105.36	56.39
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37,855,839,194.62	14,724,581,744.00	23,131,257,450.62	157.09
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,645,087,902.00	287,629,273.00	2,357,458,629.00	819.62
Satuan Polisi Pamong Praja	356,914,386.00	436,253,108.00	(79,338,722.00)	(18.19)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	752,271,060.00	2,207,272,992.76	(1,455,001,932.76)	(65.92)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133,376,551.00	194,977,338.00	(61,600,787.00)	(31.59)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	557,329,909.00	565,669,715.00	(8,339,806.00)	(1.47)
Dinas Tenaga Kerja	937,910,403.00	179,900,557.00	758,009,846.00	421.35
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	572,882,196.00	802,190,708.00	(229,308,512.00)	(28.59)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	941,964,068.00	1,727,895,655.00	(785,931,587.00)	(45.48)
Dinas Lingkungan Hidup	2,279,500,099.00	1,553,797,868.00	725,702,231.00	46.71
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,792,271,076.00	1,689,687,982.00	102,583,094.00	6.07
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,362,496,614.00	1,302,292,437.00	60,204,177.00	4.62
Dinas Perhubungan	4,369,149,237.54	6,835,219,980.00	(2,466,070,742.46)	(36.08)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	913,082,975.00	794,071,795.00	119,011,180.00	14.99
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	603,121,760.00	347,171,516.00	255,950,244.00	73.72
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,381,389,471.00	955,007,258.00	426,382,213.00	44.65
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164,830,114.00	230,552,353.00	(65,722,239.00)	(28.51)
Dinas Perikanan	527,976,437.00	891,711,335.00	(363,734,898.00)	(40.79)
Dinas Perdagangan	138,477,490.00	124,805,309.00	13,672,181.00	10.95
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	242,558,550.00	170,532,700.00	72,025,850.00	42.24
Sekretariat Daerah Kota Dumai	5,084,424,959.00	3,816,387,067.00	1,268,037,892.00	33.23
Sekretariat DPRD	4,197,282,886.00	3,807,588,649.00	389,694,237.00	10.23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	671,055,400.00	622,734,887.00	48,320,513.00	7.76
Badan Pendapatan Daerah	2,019,221,392.00	1,346,404,585.00	672,816,807.00	49.97
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,422,088,480.00	1,423,641,335.00	998,447,145.00	70.13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	513,598,391.00	450,244,802.00	63,353,589.00	14.07
Inspektorat	412,389,360.00	356,704,104.00	55,685,256.00	15.61
Kecamatan Dumai Barat	525,465,013.00	356,095,061.00	169,369,952.00	47.56
Kecamatan Dumai Timur	611,847,159.00	632,249,113.00	(20,401,954.00)	(3.23)
Kecamatan Dumai Selatan	753,132,213.00	716,041,614.00	37,090,599.00	5.18
Kecamatan Dumai Kota	642,004,410.00	1,149,255,958.00	(507,251,548.00)	(44.14)
Kecamatan Bukit Kapur	1,034,489,069.00	727,940,857.00	306,548,212.00	42.11
Kecamatan Medang Kampai	507,778,480.00	762,173,775.00	(254,395,295.00)	(33.38)
Kecamatan Sungai Sembilan	581,165,225.00	515,693,875.00	65,471,350.00	12.70
Jumlah	120,823,186,174.47	81,508,355,976.82	39,314,830,197.65	48.23

Daftar Beban Barang dapat dilihat pada Lampiran 34.

1. Beban Barang Pakai Habis

Tabel 5.6.2.16 Beban Barang Pakai Habis per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,492,087,854.00	5,746,835,993.11	(1,254,748,139.11)	(21.83)
Dinas Kesehatan	35,578,991,418.31	19,021,416,948.84	16,557,574,469.47	87.05
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37,855,839,194.62	14,724,581,744.00	23,131,257,450.62	157.09
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,645,087,902.00	287,629,273.00	2,357,458,629.00	819.62
Satuan Polisi Pamong Praja	356,914,386.00	436,253,108.00	(79,338,722.00)	(18.19)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	752,271,060.00	2,207,062,992.76	(1,454,791,932.76)	(65.92)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	132,510,651.00	194,977,338.00	(62,466,687.00)	(32.04)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	557,329,909.00	565,459,715.00	(8,129,806.00)	(1.44)

Dinas Tenaga Kerja	937,910,403.00	179,900,557.00	758,009,846.00	421.35
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	572,882,196.00	802,190,708.00	(229,308,512.00)	(28.59)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	911,664,068.00	1,727,895,655.00	(816,231,587.00)	(47.24)
Dinas Lingkungan Hidup	2,279,500,099.00	1,553,797,868.00	725,702,231.00	46.71
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1,792,271,076.00	1,689,687,982.00	102,583,094.00	6.07
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,314,981,614.00	1,302,292,437.00	12,689,177.00	0.97
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	2,640,113,845.00	6,806,071,980.00	(4,165,958,135.00)	(61.21)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	911,716,575.00	794,071,795.00	117,644,780.00	14.82
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	570,322,960.00	347,171,516.00	223,151,444.00	64.28
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,364,728,071.00	955,007,258.00	409,720,813.00	42.90
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	164,830,114.00	230,552,353.00	(65,722,239.00)	(28.51)
Dinas Perikanan	527,976,437.00	890,894,435.00	(362,917,998.00)	(40.74)
Dinas Perdagangan	137,577,490.00	124,805,309.00	12,772,181.00	10.23
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	242,558,550.00	170,532,700.00	72,025,850.00	42.24
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4,995,114,959.00	3,803,115,067.00	1,191,999,892.00	31.34
Sekretariat DPRD	4,197,282,886.00	3,798,709,449.00	398,573,437.00	10.49
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	670,430,400.00	622,734,887.00	47,695,513.00	7.66
Badan Pendapatan Daerah	1,983,712,174.00	1,346,404,585.00	637,307,589.00	47.33
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,422,088,480.00	1,423,641,335.00	998,447,145.00	70.13
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	513,598,391.00	450,244,802.00	63,353,589.00	14.07
Inspektorat	407,539,360.00	356,704,104.00	50,835,256.00	14.25
Kecamatan Dumai Barat	525,465,013.00	356,095,061.00	169,369,952.00	47.56
Kecamatan Dumai Timur	611,847,159.00	632,249,113.00	(20,401,954.00)	(3.23)
Kecamatan Dumai Selatan	743,860,213.00	697,320,514.00	46,539,699.00	6.67
Kecamatan Dumai Kota	637,674,410.00	1,148,712,358.00	(511,037,948.00)	(44.49)
Kecamatan Bukit Kapur	987,311,889.00	727,940,857.00	259,371,032.00	35.63
Kecamatan Medang Kampai	502,608,480.00	762,173,775.00	(259,565,295.00)	(34.06)
Kecamatan Sungai Sembilan	581,165,225.00	515,693,875.00	65,471,350.00	12.70
Jumlah	116,519,764,911.93	77,400,829,447.71	39,118,935,464.22	50.54

2. Beban Barang Tak Habis Pakai

Tabel 5.6.2.17 Beban Barang Tak Habis Pakai per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,767,449,607.00	0.00	1,767,449,607.00	100.00
Dinas Kesehatan	480,285,365.00	4,035,725,729.11	(3,555,440,364.11)	(88.10)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	865,900.00	0.00	865,900.00	100.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	30,300,000.00	0.00	30,300,000.00	100.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47,515,000.00	0.00	47,515,000.00	100.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	210,000.00	(210,000.00)	(100.00)
Dinas Sosial	0.00	210,000.00	(210,000.00)	(100.00)
Dinas Perhubungan	1,729,035,392.54	29,148,000.00	1,699,887,392.54	5,831.92
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,366,400.00	0.00	1,366,400.00	100.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32,798,800.00	0.00	32,798,800.00	100.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	16,661,400.00	0.00	16,661,400.00	100.00
Dinas Perdagangan	900,000.00	0.00	900,000.00	100.00
Dinas Perikanan	0.00	816,900.00	(816,900.00)	(100.00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	89,310,000.00	13,272,000.00	76,038,000.00	572.92
Sekretariat DPRD	0.00	8,879,200.00	(8,879,200.00)	(100.00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	625,000.00	0.00	625,000.00	100.00
Badan Pendapatan Daerah	35,509,218.00	0.00	35,509,218.00	100.00
Inspektorat	4,850,000.00	0.00	4,850,000.00	100.00
Kecamatan Dumai Selatan	9,272,000.00	18,721,100.00	(9,449,100.00)	(50.47)
Kecamatan Dumai Kota	4,330,000.00	543,600.00	3,786,400.00	696.54
Kecamatan Bukit Kapur	47,177,180.00	0.00	47,177,180.00	100.00
Kecamatan Medang Kampai	5,170,000.00	0.00	5,170,000.00	100.00

Jumlah	4,303,421,262.54	4,107,526,529.11	195,894,733.43	4.77
--------	------------------	------------------	----------------	------

b. Beban Jasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
205,797,851,206.05	212,708,424,110.50	(6,910,572,904.45)	(3.25)

Beban Jasa diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah dan juga saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Beban Jasa Kota Dumai Tahun 2022 terealisasi senilai Rp205.797.851.206,05, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp212.708.424.110,50 mengalami penurunan senilai Rp6.910.572.904,45 atau sebesar 3,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.18 Rincian Beban Jasa Menurut Jenisnya

Beban Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Jasa Kantor	166,304,708,221.00	178,415,775,002.00	(12,111,066,781.00)	(6.79)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19,939,210,125.00	20,639,208,341.50	(699,998,216.50)	(3.39)
Beban Sewa Tanah	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4,180,106,860.00	2,954,888,260.00	1,225,218,600.00	41.46
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	877,927,837.00	2,215,125,012.00	(1,337,197,175.00)	(60.37)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	290,000,000.00	150,650,000.00	139,350,000.00	92.50
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1,847,647,400.00	1,598,788,900.00	248,858,500.00	15.57
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9,527,764,598.05	3,544,537,831.00	5,983,226,767.05	168.80
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	11,000,000.00	(11,000,000.00)	(100.00)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2,770,486,165.00	3,178,450,764.00	(407,964,599.00)	(12.84)
Jumlah	205,797,851,206.05	212,708,424,110.50	(6,910,572,904.45)	(3.25)

Tabel 5.6.2.19 Perbandingan Beban Jasa LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,862,148,056.00	25,975,172,923.00	(5,113,024,867.00)	(19.68)
Dinas Kesehatan	67,440,813,708.00	84,221,991,126.00	(16,781,177,418.00)	(19.92)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13,998,086,315.00	11,345,494,451.00	2,652,591,864.00	23.38
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,356,784,801.00	1,026,571,638.00	330,213,163.00	32.17
Satuan Polisi Pamong Praja	1,530,418,230.00	1,302,644,773.00	227,773,457.00	17.49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,046,686,672.00	972,084,345.00	74,602,327.00	7.67
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,096,120,000.00	1,160,233,945.00	(64,113,945.00)	(5.53)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,538,933,530.00	1,543,336,087.00	(4,402,557.00)	(0.29)
Dinas Tenaga Kerja	1,090,871,972.00	662,366,200.00	428,505,772.00	64.69
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	948,628,270.00	1,015,416,998.00	(66,788,728.00)	(6.58)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,168,626,245.00	3,198,171,351.00	(29,545,106.00)	(0.92)
Dinas Lingkungan Hidup	8,675,020,548.00	8,138,358,997.00	536,661,551.00	6.59
Dinas Kependudukan dan catatan Sipil	802,722,696.00	1,126,184,580.00	(323,461,884.00)	(28.72)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,526,614,420.00	1,209,899,161.00	316,715,259.00	26.18
Dinas Perhubungan	19,567,482,683.05	17,407,803,937.00	2,159,678,746.05	12.41
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,863,283,623.00	5,221,873,094.00	(358,589,471.00)	(6.87)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	905,990,474.00	772,647,535.00	133,342,939.00	17.26
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	2,022,353,332.00	1,424,590,196.00	597,763,136.00	41.96
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	578,180,258.00	535,488,085.00	42,692,173.00	7.97
Dinas Perikanan	1,241,869,084.00	1,158,264,926.00	83,604,158.00	7.22
Dinas Perdagangan	1,860,124,448.00	1,670,329,077.00	189,795,371.00	11.36
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1,041,418,192.00	959,948,397.00	81,469,795.00	8.49
Sekretariat Daerah Kota Dumai	15,481,200,535.00	11,727,444,406.50	3,753,756,128.50	32.01
Sekretariat DPRD	3,498,981,176.00	3,303,765,042.00	195,216,134.00	5.91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,253,224,460.00	1,296,821,000.00	(43,596,540.00)	(3.36)
Badan Pendapatan Daerah	2,797,922,911.00	2,266,126,652.00	531,796,259.00	23.47
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5,650,002,949.00	4,068,670,500.00	1,581,332,449.00	38.87

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,741,274,400.00	2,204,618,000.00	(463,343,600.00)	(21.02)
Inspektorat	514,600,300.00	576,952,000.00	(62,351,700.00)	(10.81)
Kecamatan Dumai Barat	2,509,128,149.00	2,046,401,667.00	462,726,482.00	22.61
Kecamatan Dumai Timur	3,480,861,073.00	2,793,000,136.00	687,860,937.00	24.63
Kecamatan Dumai Selatan	2,805,010,655.00	2,349,645,192.00	455,365,463.00	19.38
Kecamatan Dumai Kota	3,163,749,006.00	2,500,652,979.00	663,096,027.00	26.52
Kecamatan Bukit Kapur	2,221,805,714.00	2,109,873,837.00	111,931,877.00	5.31
Kecamatan Medang Kampai	1,298,605,130.00	1,271,179,568.00	27,425,562.00	2.16
Kecamatan Sungai Sembilan	2,218,307,191.00	2,144,401,309.00	73,905,882.00	3.45
Jumlah	205,797,851,206.05	212,708,424,110.50	(6,910,572,904.45)	(3.25)

1. Beban Jasa Kantor

Tabel 5.6.2.20 Rincian Beban Jasa Kantor per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20,699,696,281.00	25,390,635,924.00	(4,690,939,643.00)	(18.48)
Dinas Kesehatan	40,110,034,319.00	59,426,098,680.00	(19,316,064,361.00)	(32.50)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8,969,308,955.00	7,913,872,491.00	1,055,436,464.00	13.34
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1,346,488,627.00	926,571,638.00	419,916,989.00	45.32
Satuan Polisi Pamong Praja	1,523,808,630.00	1,300,314,150.00	223,494,480.00	17.19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,034,016,112.00	965,651,606.00	68,364,506.00	7.08
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,096,120,000.00	1,160,233,945.00	(64,113,945.00)	(5.53)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1,483,719,934.00	1,470,461,755.00	13,258,179.00	0.90
Dinas Tenaga Kerja	903,171,028.00	660,690,040.00	242,480,988.00	36.70
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	942,778,270.00	999,016,998.00	(56,238,728.00)	(5.63)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,958,535,045.00	2,723,435,151.00	235,099,894.00	8.63
Dinas Lingkungan Hidup	8,601,644,812.00	8,080,030,595.00	521,614,217.00	6.46
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	802,722,696.00	1,126,184,580.00	(323,461,884.00)	(28.72)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,526,614,420.00	1,204,629,161.00	321,985,259.00	26.73
Dinas Perhubungan	18,097,613,403.00	16,575,854,988.00	1,521,758,415.00	9.18
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4,566,622,823.00	5,118,373,094.00	(551,750,271.00)	(10.78)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	905,990,474.00	769,047,535.00	136,942,939.00	17.81
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,812,322,596.00	1,286,617,096.00	525,705,500.00	40.86
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	573,432,476.00	532,688,085.00	40,744,391.00	7.65
Dinas Perikanan	1,066,229,084.00	1,087,381,926.00	(21,152,842.00)	(1.95)
Dinas Perdagangan	1,764,824,448.00	1,640,850,177.00	123,974,271.00	7.56
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1,036,694,272.00	955,609,497.00	81,084,775.00	8.49
Sekretariat Daerah Kota Dumai	13,819,049,115.00	10,780,719,889.00	3,038,329,226.00	28.18
Sekretariat DPRD	3,021,047,046.00	2,485,687,541.00	535,359,505.00	21.54
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,209,550,000.00	1,288,533,000.00	(78,983,000.00)	(6.13)
Badan Pendapatan Daerah	2,314,165,761.00	2,070,593,652.00	243,572,109.00	11.76
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,975,110,649.00	3,510,825,500.00	1,464,285,149.00	41.71
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,069,125,900.00	1,279,648,000.00	(210,522,100.00)	(16.45)
Inspektorat	477,043,300.00	546,577,000.00	(69,533,700.00)	(12.72)
Kecamatan Dumai Barat	2,502,348,336.00	2,042,725,887.00	459,622,449.00	22.50
Kecamatan Dumai Timur	3,480,013,273.00	2,790,900,136.00	689,113,137.00	24.69
Kecamatan Dumai Selatan	2,803,315,055.00	2,348,145,192.00	455,169,863.00	19.38
Kecamatan Dumai Kota	3,141,547,606.00	2,485,057,139.00	656,490,467.00	26.42
Kecamatan Bukit Kapur	2,184,405,714.00	2,082,973,837.00	101,431,877.00	4.87
Kecamatan Medang Kampai	1,294,790,570.00	1,264,737,808.00	30,052,762.00	2.38
Kecamatan Sungai Sembilan	2,190,807,191.00	2,124,401,309.00	66,405,882.00	3.13
Jumlah	166,304,708,221.00	178,415,775,002.00	(12,111,066,781.00)	(6.79)

Daftar Beban Jasa Kantor dapat dilihat pada Lampiran 35.

2. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Tabel 5.6.2.21 Rincian Beban Iuran Jaminan/Asuransi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3,114,720.00	0.00	3,114,720.00	100.00
Dinas Kesehatan	19,800,340,458.00	20,410,623,927.00	(610,283,469.00)	(2.99)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,635,360.00	1,146,960.00	3,488,400.00	304.14
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,796,174.00	0.00	2,796,174.00	100.00
Satuan Polisi Pamong Praja	6,609,600.00	2,330,623.00	4,278,977.00	183.60
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12,670,560.00	6,432,739.00	6,237,821.00	96.97
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9,913,596.00	1,624,332.00	8,289,264.00	510.32
Dinas Tenaga Kerja	3,895,944.00	1,676,160.00	2,219,784.00	132.43
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,411,200.00	1,411,200.00	0.00	0.00
Dinas Lingkungan Hidup	41,290,714.00	30,683,402.00	10,607,312.00	34.57
Dinas Perhubungan	1,878,660.00	1,379,700.00	498,960.00	36.16
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	5,447,736.00	0.00	5,447,736.00	100.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	4,723,920.00	4,338,900.00	385,020.00	8.87
Sekretariat Daerah Kota Dumai	19,784,520.00	149,649,517.50	(129,864,997.50)	(86.78)
Sekretariat DPRD	734,130.00	21,297,501.00	(20,563,371.00)	(96.55)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,017,360.00	0.00	1,017,360.00	100.00
Badan Pendapatan Daerah	1,806,300.00	0.00	1,806,300.00	100.00
Kecamatan Dumai Barat	6,779,813.00	3,675,780.00	3,104,033.00	84.45
Kecamatan Dumai Timur	847,800.00	0.00	847,800.00	100.00
Kecamatan Dumai Selatan	1,695,600.00	0.00	1,695,600.00	100.00
Kecamatan Dumai Kota	4,001,400.00	1,995,840.00	2,005,560.00	100.49
Kecamatan Medang Kampai	3,814,560.00	941,760.00	2,872,800.00	305.05
Jumlah	19,939,210,125.00	20,639,208,341.50	(699,998,216.50)	(3.39)

3. Beban Sewa Tanah

Tabel 5.6.2.22 Beban Sewa Tanah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100.00
Jumlah	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	100.00

Beban Sewa Tanah ini merupakan sewa Rumah Tunggu untuk kelahiran yang beralamat di Jl. Tegalega Dumai

4. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.23 Beban Peralatan dan Mesin

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	82,300,000.00	60,121,260.00	22,178,740.00	36.89
Dinas Kesehatan	129,815,460.00	157,150,000.00	(27,334,540.00)	(17.39)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2,802,752,000.00	1,968,464,000.00	834,288,000.00	42.38
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	45,300,000.00	61,450,000.00	(16,150,000.00)	(26.28)
Dinas Tenaga Kerja	11,200,000.00	0.00	11,200,000.00	100.00
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	106,900,000.00	70,675,000.00	36,225,000.00	51.26
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	3,645,000.00	(3,645,000.00)	(100.00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0.00	390,000.00	(390,000.00)	(100.00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1,000,000.00	31,500,000.00	(30,500,000.00)	(96.83)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	81,127,000.00	26,900,000.00	54,227,000.00	201.59
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	150,000.00	1,400,000.00	(1,250,000.00)	(89.29)
Dinas Perikanan	19,700,000.00	47,100,000.00	(27,400,000.00)	(58.17)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	833,190,000.00	423,075,000.00	410,115,000.00	96.94
Sekretariat DPRD	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00	100.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7,567,100.00	8,288,000.00	(720,900.00)	(8.70)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	38,205,300.00	32,530,000.00	5,675,300.00	17.45
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	54,000,000.00	(54,000,000.00)	(100.00)
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Timur	0.00	600,000.00	(600,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Kota	7,200,000.00	7,600,000.00	(400,000.00)	(5.26)
Kecamatan Sungai Sembilan	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
Jumlah	4,180,106,860.00	2,954,888,260.00	1,225,218,600.00	41.46

5. Beban Jasa Sewa Gedung

Tabel 5.6.2.24 Beban Jasa Sewa Gedung per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57,037,055.00	422,010,000.00	(364,972,945.00)	(86.48)
Dinas Kesehatan	139,800,000.00	1,374,670,012.00	(1,234,870,012.00)	(89.83)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100.00
Dinas Tenaga Kerja	22,855,000.00	0.00	22,855,000.00	100.00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,350,000.00	14,900,000.00	(13,550,000.00)	(90.94)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12,150,000.00	41,050,000.00	(28,900,000.00)	(70.40)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	4,880,000.00	(4,880,000.00)	(100.00)
Dinas Lingkungan Hidup	555,000.00	0.00	555,000.00	100.00
Dinas Perhubungan	162,000,000.00	60,000,000.00	102,000,000.00	170.00
Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(100.00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	(100.00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	47,260,000.00	2,400,000.00	44,860,000.00	1,869.17
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,597,782.00	1,400,000.00	3,197,782.00	228.41
Dinas Perikanan	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(100.00)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	265,809,500.00	115,615,000.00	150,194,500.00	129.91
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	59,987,000.00	0.00	59,987,000.00	100.00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33,626,500.00	106,700,000.00	(73,073,500.00)	(68.49)
Kecamatan Bukit Kapur	37,400,000.00	26,900,000.00	10,500,000.00	39.03
Kecamatan Sungai Sembilan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah	877,927,837.00	2,215,125,012.00	(1,337,197,175.00)	(60.37)

6. Beban Sewa Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.25 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20,000,000.00	3,000,000.00	17,000,000.00	566.67
Dinas Kesehatan	3,000,000.00	10,500,000.00	(7,500,000.00)	(71.43)
Dinas Sosial	0.00	4,250,000.00	(4,250,000.00)	(100.00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	200.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	100.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	245,000,000.00	122,400,000.00	122,600,000.00	100.16
Sekretariat DPRD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Badan Pendapatan Daerah	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
Kecamatan Dumai Timur	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Kota	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
Jumlah	290,000,000.00	150,650,000.00	139,350,000.00	92.50

7. Beban Jasa Konsultasi Kontruksi

Tabel 5.6.2.26 Beban Jasa Konsultasi Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	99,800,000.00	0.00	99,800,000.00	100.00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1,617,100,000.00	1,456,011,000.00	161,089,000.00	11.06
Dinas Lingkungan Hidup	19,980,000.00	0.00	19,980,000.00	100.00
Dinas Sosial	0.00	5,550,000.00	(5,550,000.00)	(100.00)
Dinas Perhubungan	0.00	17,779,000.00	(17,779,000.00)	(100.00)
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0.00	79,970,000.00	(79,970,000.00)	(100.00)
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	95,300,000.00	29,478,900.00	65,821,100.00	223.28
Sekretariat Daerah Kota Dumai	10,367,400.00	10,000,000.00	367,400.00	3.67
Inspektorat	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	100.00
Jumlah	1,847,647,400.00	1,598,788,900.00	248,858,500.00	15.57

8. Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Tabel 5.6.2.27 Rincian Beban Jasa Konsultansi Non Kontruksi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
------	----------------	----------------	-------------------------	---

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	6,555,725,328.00	2,403,828,482.00	4,151,896,846.00	172.72
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	598,290,000.00	0.00	598,290,000.00	100.00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0.00	100,000,000.00	(100,000,000.00)	(100.00)
Dinas Tenaga Kerja	79,750,000.00	0.00	79,750,000.00	100.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89,630,000.00	0.00	89,630,000.00	100.00
Dinas Perhubungan	1,224,361,620.05	570,290,249.00	654,071,371.05	114.69
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	223,660,800.00	0.00	223,660,800.00	100.00
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	67,696,000.00	28,703,100.00	38,992,900.00	135.85
Dinas Perikanan	0.00	13,783,000.00	(13,783,000.00)	(100.00)
Badan Pendapatan Daerah	288,450,850.00	162,533,000.00	125,917,850.00	77.47
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	395,200,000.00	265,400,000.00	129,800,000.00	48.91
Kecamatan Dumai Kota	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
Jumlah	9,527,764,598.05	3,544,537,831.00	5,983,226,767.05	168.80

9. Beban Basiswa Pendidikan PNS

Tabel 5.6.2.28 Beban Basiswa Pendidikan PNS

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	11,000,000.00	(11,000,000.00)	(100.00)
Jumlah	0.00	11,000,000.00	(11,000,000.00)	(100.00)

10. Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.6.2.29 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	99,405,739.00	(99,405,739.00)	(100.00)
Dinas Kesehatan	542,298,143.00	439,120,025.00	103,178,118.00	23.50
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0.00	361,600,000.00	(361,600,000.00)	(100.00)
Dinas Tenaga Kerja	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	100.00
Dinas Lingkungan Hidup	11,550,022.00	240,000,000.00	(12,449,978.00)	(51.87)
Dinas Perhubungan	81,629,000.00	182,500,000.00	(100,871,000.00)	(55.27)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	72,000,000.00	67,000,000.00	5,000,000.00	7.46
Dinas Perikanan	155,940,000.00	0.00	155,940,000.00	100.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	288,000,000.00	125,985,000.00	162,015,000.00	128.60
Sekretariat DPRD	464,000,000.00	796,780,000.00	(332,780,000.00)	(41.77)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	35,090,000.00	0.00	35,090,000.00	100.00
Badan Pendapatan Daerah	192,000,000.00	33,000,000.00	159,000,000.00	481.82
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	181,500,000.00	259,915,000.00	(78,415,000.00)	(30.17)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	638,522,000.00	753,270,000.00	(114,748,000.00)	(15.23)
Inspektorat	32,457,000.00	30,375,000.00	2,082,000.00	6.85
Kecamatan Medang Kampai	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	(100.00)
Kecamatan Sungai Sembilan	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	100.00
Jumlah	2,770,486,165.00	3,178,450,764.00	(407,964,599.00)	(12.84)

c. Beban Pemeliharaan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
48,850,772,485.57	36,825,902,971.70	12,024,869,513.87	32.65

Beban Pemeliharaan diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Pemeliharaan selama Tahun 2022 senilai Rp48.850.772.485,57, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp36.825.902.971,70 mengalami kenaikan senilai Rp12.024.869.513,87 atau sebesar 32,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.30 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	528,442,173.00	50,286,500.00	478,155,673.00	950.86

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19,019,310,782.95	17,185,126,089.00	1,834,184,693.95	10.67
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	6,586,920,664.06	5,386,815,382.70	1,200,105,281.36	22.28
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,705,098,865.56	14,016,890,000.00	8,688,208,865.56	61.98
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11,000,000.00	186,785,000.00	(175,785,000.00)	(94.11)
Jumlah	48,850,772,485.57	36,825,902,971.70	12,024,869,513.87	32.65

Tabel 5.6.2.30.a Perbandingan Beban Pemeliharaan Berdasarkan Timbulnya Beban

a. Beban Pemeliharaan Tanah

Pemeliharaan Tanah	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
2,446,840,139.69	0.00	29,021,800.00	(1,947,419,766.69)	528,442,173.00
Jumlah	0.00	29,021,800.00	(1,947,419,766.69)	528,442,173.00

b. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
19,048,947,782.95	0.00	0.00	(29,637,000.00)	19,019,310,782.95
19,048,947,782.95	0.00	0.00	(29,637,000.00)	19,019,310,782.95

c. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Tetap (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
12,356,427,610.99	(192,093,750.00)	149,953,000.00	(5,727,366,196.93)	6,586,920,664.06
12,356,427,610.99	(192,093,750.00)	149,953,000.00	(5,727,366,196.93)	6,586,920,664.06

d. Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
23,148,118,865.56	0.00	0.00	(443,020,000.00)	22,705,098,865.56
23,148,118,865.56	0.00	0.00	(443,020,000.00)	22,705,098,865.56

e. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap Neraca	Belanja Modal Yang Bukan Merupakan Aset Teta (Persediaan)	Beban Barang Yang Dikapitalisir ke Aset Tetap	Beban
11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00

Tabel 5.6.2.31 Perbandingan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210,955,500.00	203,209,700.00	7,745,800.00	3.81
Dinas Kesehatan	4,370,270,202.90	2,100,985,615.74	2,269,284,587.16	108.01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24,117,080,101.00	13,535,818,363.00	10,581,261,738.00	78.17
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	196,323,440.00	187,751,613.00	8,571,827.00	4.57
Satuan Polisi Pamong Praja	275,274,000.00	302,431,400.00	(27,157,400.00)	(8.98)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312,985,055.00	417,135,063.00	(104,150,008.00)	(24.97)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109,622,160.00	125,086,129.00	(15,463,969.00)	(12.36)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	159,930,761.00	141,830,316.00	18,100,445.00	12.76
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Tenaga Kerja	220,269,767.00	160,390,300.00	59,879,467.00	37.33
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107,113,000.00	176,262,900.00	(69,149,900.00)	(39.23)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	734,386,198.00	1,445,801,420.00	(711,415,222.00)	(49.21)
Dinas Lingkungan Hidup	3,968,848,384.00	3,811,343,107.00	157,505,277.00	4.13
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	169,878,000.00	241,062,350.00	(71,184,350.00)	(29.53)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166,841,799.00	138,900,044.00	27,941,755.00	20.12
Dinas Perhubungan	6,107,723,008.67	3,991,037,490.96	2,116,685,517.71	53.04
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	177,434,600.00	286,279,678.00	(108,845,078.00)	(38.02)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177,966,476.00	170,599,681.00	7,366,795.00	4.32
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	130,647,500.00	385,205,850.00	(254,558,350.00)	(66.08)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	280,731,600.00	322,287,600.00	(41,556,000.00)	(12.89)

Dinas Perikanan	273,855,830.00	203,188,099.00	70,667,731.00	34.78
Dinas Perdagangan	152,115,500.00	204,046,380.00	(51,930,880.00)	(25.45)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	192,928,500.00	168,241,500.00	24,687,000.00	14.67
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1,687,215,653.00	1,670,604,320.00	16,611,333.00	0.99
Sekretariat DPRD	847,816,237.00	556,173,497.00	291,642,740.00	52.44
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	473,696,960.00	321,064,058.00	152,632,902.00	47.54
Badan Pendapatan Daerah	503,607,898.00	413,535,357.00	90,072,541.00	21.78
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	500,784,300.00	557,847,350.00	(57,063,050.00)	(10.23)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275,182,750.00	248,641,800.00	26,540,950.00	10.67
Inspektorat	604,957,000.00	195,241,550.00	409,715,450.00	209.85
Kecamatan Dumai Barat	139,565,962.00	94,781,800.00	44,784,162.00	47.25
Kecamatan Dumai Timur	195,456,335.00	158,654,880.00	36,801,455.00	23.20
Kecamatan Dumai Selatan	374,425,411.00	413,047,925.00	(38,622,514.00)	(9.35)
Kecamatan Dumai Kota	352,876,525.00	2,349,821,310.00	(1,996,944,785.00)	(84.98)
Kecamatan Bukit Kapur	69,169,000.00	413,823,850.00	(344,654,850.00)	(83.29)
Kecamatan Medang Kampai	164,152,350.00	567,824,200.00	(403,671,850.00)	(71.09)
Kecamatan Sungai Sembilan	48,684,722.00	145,946,475.00	(97,261,753.00)	(66.64)
Jumlah	48,850,772,485.57	36,825,902,971.70	12,024,869,513.87	32.65

1. Beban Pemeliharaan Tanah

Tabel 5.6.2.32 Beban Pemeliharaan Tanah per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	99,885,000.00	0.00	99,885,000.00	100
Dinas Lingkungan Hidup	399,535,373.00	0.00	399,535,373.00	100
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	0.00	50,286,500.00	(50,286,500.00)	(100.00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29,021,800.00	0.00	29,021,800.00	100
Jumlah	528,442,173.00	50,286,500.00	478,155,673.00	950.86

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.33 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	210,955,500.00	203,209,700.00	7,745,800.00	3.81
Dinas Kesehatan	1,316,746,750.00	962,908,230.00	353,838,520.00	36.75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,268,329,101.00	1,451,535,363.00	(183,206,262.00)	(12.62)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	196,323,440.00	187,751,613.00	8,571,827.00	4.57
Satuan Polisi Pamong Praja	275,274,000.00	289,886,400.00	(14,612,400.00)	(5.04)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	312,985,055.00	417,135,063.00	(104,150,008.00)	(24.97)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109,622,160.00	125,086,129.00	(15,463,969.00)	(12.36)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	159,930,761.00	137,775,000.00	22,155,761.00	16.08
Dinas Tenaga Kerja	220,269,767.00	160,390,300.00	59,879,467.00	37.33

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	107,113,000.00	143,326,900.00	(36,213,900.00)	(25.27)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	300,111,198.00	291,875,000.00	8,236,198.00	2.82
Dinas Lingkungan Hidup	3,548,713,011.00	3,654,538,107.00	(105,825,096.00)	(2.90)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	169,878,000.00	241,062,350.00	(71,184,350.00)	(29.53)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	166,841,799.00	138,900,044.00	27,941,755.00	20.12
Dinas Perhubungan	4,800,889,661.95	3,179,209,159.00	1,621,680,502.95	51.01
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	167,434,600.00	206,779,678.00	(39,345,078.00)	(19.03)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177,966,476.00	170,599,681.00	7,366,795.00	4.32
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	130,647,500.00	190,750,350.00	(60,102,850.00)	(31.51)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230,975,850.00	222,362,600.00	8,613,250.00	3.87
Dinas Perikanan	79,628,950.00	71,811,550.00	7,817,400.00	10.89
Dinas Perdagangan	139,925,500.00	166,858,600.00	(26,933,100.00)	(16.14)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	148,449,500.00	161,841,500.00	(13,392,000.00)	(8.27)

Sekretariat Daerah Kota Dumai	1,687,215,653.00	1,163,051,720.00	524,163,933.00	45.07
Sekretariat DPRD	412,491,137.00	390,512,497.00	21,978,640.00	5.63
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	249,131,960.00	321,064,058.00	(71,932,098.00)	(22.40)
Badan Pendapatan Daerah	492,607,898.00	413,535,357.00	79,072,541.00	19.12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	360,262,500.00	557,847,350.00	(197,584,850.00)	(35.42)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	275,182,750.00	248,641,800.00	26,540,950.00	10.67
Inspektorat	251,244,000.00	195,241,550.00	56,002,450.00	28.68
Kecamatan Dumai Barat	139,565,962.00	94,781,800.00	44,784,162.00	47.25
Kecamatan Dumai Timur	195,456,335.00	158,654,880.00	36,801,455.00	23.20
Kecamatan Dumai Selatan	232,099,411.00	243,277,925.00	(11,178,514.00)	(4.59)
Kecamatan Dumai Kota	253,035,525.00	236,199,310.00	16,836,215.00	7.13
Kecamatan Bukit Kapur	69,169,000.00	99,153,850.00	(29,984,850.00)	(30.24)
Kecamatan Medang Kampai	114,152,350.00	231,624,200.00	(117,471,850.00)	(50.72)
Kecamatan Sungai Sembilan	48,684,722.00	55,946,475.00	(7,261,753.00)	(12.98)
Jumlah	19,019,310,782.95	17,185,126,089.00	1,834,184,693.95	10.67

3. Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

Tabel 5.6.2.34 Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.00	0.00	0.00	100.00
Dinas Kesehatan	2,874,023,452.90	942,741,385.74	1,931,282,067.16	204.86
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	517,854,000.00	1,102,043,000.00	(584,189,000.00)	(53.01)
Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	12,545,000.00	(12,545,000.00)	(100.00)
Dinas Sosial	0.00	4,055,316.00	(4,055,316.00)	(100.00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	32,936,000.00	(32,936,000.00)	(100.00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	334,390,000.00	1,153,926,420.00	(819,536,420.00)	(71.02)
Dinas Lingkungan Hidup	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00	100.00
Dinas Perhubungan	1,112,131,481.16	413,926,331.96	698,205,149.20	168.68
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10,000,000.00	79,500,000.00	(69,500,000.00)	(87.42)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0.00	144,169,000.00	(144,169,000.00)	(100.00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49,755,750.00	99,925,000.00	(50,169,250.00)	(50.21)
Dinas Perikanan	194,226,880.00	131,376,549.00	62,850,331.00	47.84
Dinas Perdagangan	12,190,000.00	37,187,780.00	(24,997,780.00)	(67.22)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	44,479,000.00	6,400,000.00	38,079,000.00	594.98
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0.00	507,552,600.00	(507,552,600.00)	(100.00)
Sekretariat DPRD	435,325,100.00	165,661,000.00	269,664,100.00	162.78
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	224,565,000.00	0.00	224,565,000.00	100.00

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	111,500,000.00	0.00	111,500,000.00	100.00
Inspektorat	353,713,000.00	0.00	353,713,000.00	100.00
Kecamatan Dumai Selatan	142,326,000.00	0.00	142,326,000.00	100.00
Kecamatan Dumai Kota	99,841,000.00	0.00	99,841,000.00	100.00
Kecamatan Bukit Kapur	0.00	314,670,000.00	(314,670,000.00)	(100.00)
Kecamatan Medang Kampai	50,000,000.00	148,200,000.00	(98,200,000.00)	(66.26)
Kecamatan Sungai Sembilan	0.00	90,000,000.00	(90,000,000.00)	(100.00)
Jumlah	6,586,920,664.06	5,386,815,382.70	1,200,105,281.36	22.28

4. Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.35 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	179,500,000.00	195,336,000.00	(15,836,000.00)	(8.11)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22,330,897,000.00	10,982,240,000.00	11,348,657,000.00	103.34
Dinas Perhubungan	194,701,865.56	397,902,000.00	(203,200,134.44)	(51.07)
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	169,770,000.00	(169,770,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Kota	0.00	2,083,642,000.00	(2,083,642,000.00)	(100.00)
Kecamatan Medang Kampai	0.00	188,000,000.00	(188,000,000.00)	(100.00)

Jumlah	22,705,098,865.56	14,016,890,000.00	8,688,208,865.56	61.98
--------	-------------------	-------------------	------------------	-------

5. Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.6.2.36 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	156,805,000.00	(156,805,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Kota	0.00	29,980,000.00	(29,980,000.00)	(100.00)
Badan Pendapatan Daerah	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	100.00
Jumlah	11,000,000.00	186,785,000.00	(175,785,000.00)	(94.11)

d. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
52,881,607,692.00	45,106,900,776.00	7,774,706,916.00	17.24

Beban Perjalanan Dinas diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi senilai Rp52.881.607.692,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp45.106.900.776,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.774.706.916,00 atau sebesar 17,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.37 Tabel Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52,881,607,692.00	45,106,900,776.00	7,774,706,916.00	17.24
Jumlah	52,881,607,692.00	45,106,900,776.00	7,774,706,916.00	17.24

Tabel 5.6.2.38 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,497,936,416.00	1,437,340,205.00	60,596,211.00	4.22
Dinas Kesehatan	6,087,392,448.00	6,761,387,719.00	(673,995,271.00)	(9.97)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,402,169,530.00	1,800,708,626.00	(398,539,096.00)	(22.13)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	920,830,671.00	385,279,335.00	535,551,336.00	139.00
Satuan Polisi Pamong Praja	434,356,003.00	411,540,794.00	22,815,209.00	5.54
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	823,181,388.00	553,785,645.00	269,395,743.00	48.65
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	384,223,722.00	551,225,800.00	(167,002,078.00)	(30.30)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	637,696,744.00	501,394,967.00	136,301,777.00	27.18
Dinas Tenaga Kerja	331,863,544.00	228,307,125.00	103,556,419.00	45.36

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	593,326,231.00	505,368,785.00	87,957,446.00	17.40
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,806,171,959.00	2,590,769,463.00	(784,597,504.00)	(30.28)
Dinas Lingkungan Hidup	804,028,349.00	666,656,919.00	137,371,430.00	20.61
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	270,686,504.00	414,917,360.00	(144,230,856.00)	(34.76)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1,034,672,258.00	1,054,855,934.00	(20,183,676.00)	(1.91)
Dinas Perhubungan	1,568,512,288.00	1,427,920,198.00	140,592,090.00	9.85
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	775,229,349.00	889,103,131.00	(113,873,782.00)	(12.81)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	594,175,819.00	267,676,280.00	326,499,539.00	121.98
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	435,947,341.00	420,102,488.00	15,844,853.00	3.77
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	285,141,242.00	438,219,060.00	(153,077,818.00)	(34.93)
Dinas Perikanan	469,604,994.00	368,278,720.00	101,326,274.00	27.51
Dinas Perdagangan	294,189,414.00	421,823,101.00	(127,633,687.00)	(30.26)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	238,691,495.00	309,075,610.00	(70,384,115.00)	(22.77)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	6,137,159,981.00	5,166,005,977.00	971,154,004.00	18.80
Sekretariat DPRD	12,882,813,201.00	7,809,911,425.00	5,072,901,776.00	64.95
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1,603,306,625.00	1,295,820,908.00	307,485,717.00	23.73
Badan Pendapatan Daerah	2,301,970,176.00	1,254,022,886.00	1,047,947,290.00	83.57
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,370,935,000.00	3,004,366,337.00	1,366,568,663.00	45.49

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	958,371,850.00	979,839,350.00	(21,467,500.00)	(2.19)
Inspektorat	2,003,049,000.00	2,105,963,560.00	(102,914,560.00)	(4.89)
Kecamatan Dumai Barat	97,450,384.00	119,304,948.00	(21,854,564.00)	(18.32)
Kecamatan Dumai Timur	97,096,400.00	118,211,000.00	(21,114,600.00)	(17.86)
Kecamatan Dumai Selatan	155,586,800.00	240,824,700.00	(85,237,900.00)	(35.39)
Kecamatan Dumai Kota	141,390,798.00	196,940,680.00	(55,549,882.00)	(28.21)
Kecamatan Bukit Kapur	167,739,210.00	222,635,037.00	(54,895,827.00)	(24.66)
Kecamatan Medang Kampai	135,464,314.00	119,511,227.00	15,953,087.00	13.35
Kecamatan Sungai Sembilan	139,246,244.00	67,805,476.00	71,440,768.00	105.36
Jumlah	52,881,607,692.00	45,106,900,776.00	7,774,706,916.00	17.24

Tabel 5.6.2.39 Rincian Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	41,461,250,602.00	33,992,198,176.00	7,469,052,426.00	21.97
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,925,999,090.00	10,719,097,600.00	206,901,490.00	1.93
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	453,618,000.00	246,450,000.00	207,168,000.00	84.06
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40,740,000.00	149,155,000.00	(108,415,000.00)	(72.69)
Jumlah	52,881,607,692.00	45,106,900,776.00	7,774,706,916.00	17.24

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
13,139,900,300.00	6,088,260,000.00	7,051,640,300.00	115.82

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat merupakan Beban periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi senilai Rp13.139.900.300,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp6.088.260.000,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.051.640.300,00 atau sebesar 115,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.40 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12,977,300,300.00	6,088,260,000.00	6,889,040,300.00	113.15
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	162,600,000.00	0.00	162,600,000.00	100.00
Jumlah	13,139,900,300.00	6,088,260,000.00	7,051,640,300.00	115.82

Tabel 5.6.2.41 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	68,500,000.00	106,400,000.00	(37,900,000.00)	(35.62)
Dinas Kesehatan	76,150,000.00	10,500,000.00	65,650,000.00	625.24
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,564,000,000.00	0.00	4,564,000,000.00	100.00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	6,960,000,000.00	4,150,000,000.00	2,810,000,000.00	67.71
Satuan Polisi Pamong Praja	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	100.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	138,600,000.00	344,100,000.00	(205,500,000.00)	(59.72)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5,750,000.00	10,480,000.00	(4,730,000.00)	(45.13)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0.00	7,530,000.00	(7,530,000.00)	(100.00)
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	855,000,000.00	(855,000,000.00)	(100.00)
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0.00	5,250,000.00	(5,250,000.00)	(100.00)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	100.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	112,110,300.00	0.00	112,110,300.00	100.00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8,940,000.00	4,000,000.00	4,940,000.00	123.50
Sekretariat Daerah Kota Dumai	975,500,000.00	576,500,000.00	399,000,000.00	69.21
Kecamatan Dumai Barat	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	100.00
Kecamatan Dumai Selatan	0.00	17,000,000.00	(17,000,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Kota	23,250,000.00	1,500,000.00	21,750,000.00	1,450.00
Jumlah	12,977,300,300.00	6,088,260,000.00	6,889,040,300.00	113.15

Tabel 5.6.2.42 Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	162,600,000.00	0.00	162,600,000.00	100.00
Jumlah	162,600,000.00	0.00	162,600,000.00	100.00

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Tabel 5.6.2.43 Beban Barang dan Jasa BOS

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	31,947,871,800.00	29,942,171,389.00	2,005,700,411.00	6.70
Jumlah	31,947,871,800.00	29,942,171,389.00	2,005,700,411.00	6.70

Beban Barang dan Jasa BOS senilai Rp31.947.871.800,00 ini merupakan Beban Barang dan Jasa BOS pada Sekolah Dasar Negeri senilai Rp22.480.447.836,00 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Senilai Rp9.467.423.964,00.

g. Beban Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5.6.2.44 Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	60,568,783,511.48	88,126,828,207.13	(27,558,044,695.65)	(31.27)
Jumlah	60,568,783,511.48	88,126,828,207.13	(27,558,044,695.65)	(31.27)

Tabel 5.6.2.45 Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Blud Puskesmas Dumai Kota	1,140,379,200.00	828,445,189.00	311,934,011.00	37.65
Blud Puskesmas Dumai Barat	598,082,667.00	580,418,448.00	17,664,219.00	3.04
Blud Puskesmas Bukit Kapur	723,602,396.00	644,854,627.00	78,747,769.00	12.21
Blud Puskesmas Sungai Sembilan	1,461,738,475.00	1,283,338,546.00	178,399,929.00	13.90
Blud Puskesmas Medang Kampai	533,358,167.00	506,820,774.00	26,537,393.00	5.24
Blud Puskesmas Bumi Ayu	645,332,795.00	551,375,607.00	93,957,188.00	17.04
Blud Puskesmas Bukit Timah	349,427,829.00	320,576,950.00	28,850,879.00	9.00
Blud Puskesmas Jayamukti	1,374,894,745.00	1,294,250,001.00	80,644,744.00	6.23
Blud Puskesmas Purnama	639,989,834.00	572,278,477.00	67,711,357.00	11.83
Blud Puskesmas Bukit Kayu Kapur	981,033,243.00	809,582,682.00	171,450,561.00	21.18
Upt Laboratorium Kesehatan Dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	109,475,737.00	30,966,950.00	78,508,787.00	253.52
Blud RSUD	52,011,468,423.48	80,703,919,956.13	(28,692,451,532.65)	(35.55)
Jumlah	60,568,783,511.48	88,126,828,207.13	(27,558,044,695.65)	(31.27)

3. Beban Bunga

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	1,060,377,070.00	0.00	1,060,377,070.00	100.00

Beban Bunga diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Bunga per 31 Desember 2022 senilai Rp1.060.377.070,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp1.060.377.070,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.46 Beban Bunga Tahun 2022

Beban Bunga	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	1,060,377,070.00	0.00	1,060,377,070.00	100.00
Jumlah	1,060,377,070.00	0.00	1,060,377,070.00	100.00

Beban Bunga ini merupakan Beban Yang Timbul dari konsumsi aset Senilai Rp.1.060.377.070,00

a. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Tabel 5.6.2.47 Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,060,377,070.00	0.00	1,060,377,070.00	100.00
Jumlah	1,060,377,070.00	0.00	1,060,377,070.00	100.00

4. Beban Hibah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	42,565,151,769.26	15,192,998,932.38	27,372,152,836.88	180.16

Beban Hibah diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Hibah per 31 Desember 2022 senilai Rp42.565.151.769,26, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp15.192.998.932,38 maka mengalami kenaikan senilai Rp27.372.152.836,88 atau sebesar 180,16% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi beban Hibah ini merupakan Aset yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai kemudian dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya peraturan terbaru tentang Tapal Batas Wilayah. Beban Hibah ini merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset.

Tabel 5.6.2.48 Rincian Beban Hibah Tahun 2022

Beban Hibah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	20,805,043,143.96	1,642,170,682.38	19,162,872,461.58	1,166.92
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5,146,225,835.15	765,000,000.00	4,381,225,835.15	572.71
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	14,294,319,990.15	10,466,265,450.00	3,828,054,540.15	36.58
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	0.00	0.00
Jumlah	42,565,151,769.26	15,192,998,932.38	27,372,152,836.88	180.16

Tabel 5.6.2.49 Beban Hibah LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,215,679,734.09	3,291,450,000.00	4,924,229,734.09	149.61
Dinas Kesehatan	200,000,000.00	600,000,000.00	(400,000,000.00)	(66.67)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7,471,608,924.14	775,770,682.38	6,695,838,241.76	863.12
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158,825,350.00	0.00	158,825,350.00	100.00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2,869,562,800.00	2,639,562,800.00	230,000,000.00	8.71
Dinas Sosial	0.00	155,000,000.00	(155,000,000.00)	(100.00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,517,125,951.00	1,216,098,150.00	1,301,027,801.00	106.98
Dinas Perhubungan	8,881,963,186.01	466,400,000.00	8,415,563,186.01	1,804.37
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,227,097,182.00	2,000,000,000.00	(772,902,818.00)	(38.65)
Dinas Perikanan	547,560,000.00	418,717,300.00	128,842,700.00	30.77
Sekretariat Daerah Kota Dumai	8,444,273,850.15	3,630,000,000.00	4,814,273,850.15	132.62
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,031,454,791.87	0.00	2,031,454,791.87	100.00
Jumlah	42,565,151,769.26	15,192,998,932.38	27,372,152,836.88	180.16

Daftar Beban Hibah dapat dilihat pada Lampiran 36.

1. Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Tabel 5.6.2.50 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0.00	400,000,000.00	(400,000,000.00)	(100.00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6,679,351,973.08	775,770,682.38	5,903,581,290.70	761.00
Dinas Perhubungan	8,881,963,186.01	466,400,000.00	8,415,563,186.01	1,804.37
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4,042,265,993.00	0.00	4,042,265,993.00	100.00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1,201,461,991.87	0.00	1,201,461,991.87	100.00
Jumlah	20,805,043,143.96	1,642,170,682.38	19,162,872,461.58	1,166.92

2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Tabel 5.6.2.51 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,195,143,534.09	0.00	4,195,143,534.09	100.00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	792,256,951.06	0.00	792,256,951.06	100.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	158,825,350.00	0.00	158,825,350.00	100.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	0.00	765,000,000.00	(765,000,000.00)	(100.00)
Jumlah	5,146,225,835.15	765,000,000.00	4,381,225,835.15	572.71

3. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia

Tabel 5.6.2.52 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4,020,536,200.00	3,291,450,000.00	729,086,200.00	22.15
Dinas Kesehatan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	550,000,000.00	320,000,000.00	230,000,000.00	71.88
Dinas Sosial	0.00	155,000,000.00	(155,000,000.00)	(100.00)
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	2,517,125,951.00	1,216,098,150.00	1,301,027,801.00	106.98
Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	1,227,097,182.00	2,000,000,000.00	(772,902,818.00)	(38.65)
Dinas Perikanan	547,560,000.00	418,717,300.00	128,842,700.00	30.77
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4,402,007,857.15	2,865,000,000.00	1,537,007,857.15	53.65
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	829,992,800.00	0.00	829,992,800.00	100.00
Jumlah	14,294,319,990.15	10,466,265,450.00	3,828,054,540.15	36.58

4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Tabel 5.6.2.53 Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	0.00	0.00
Jumlah	2,319,562,800.00	2,319,562,800.00	0.00	0.00

5. Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
12,911,808,100.00	0.00	12,911,808,100.00	100.00

Beban Bantuan Sosial diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Realisasi Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 senilai Rp12.911.808.100,00, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp12.911.808.100,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Beban Bantuan Sosial ini merupakan beban yang timbul dari Konsumsi Aset senilai Rp12.911.807.100

Tabel 5.6.2.54 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2022

Beban Bansos	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	12,438,808,100.00	0.00	12,438,808,100.00	100.00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	473,000,000.00	0.00	473,000,000.00	100.00
Jumlah	12,911,808,100.00	0.00	12,911,808,100.00	100.00

a. Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

Tabel 5.6.2.55 Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	9,744,000,000.00	0.00	9,744,000,000.00	100.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	459,600,000.00	0.00	459,600,000.00	100.00
Dinas Perhubungan	237,000,000.00	0.00	237,000,000.00	100.00
Dinas Perikanan	664,208,100.00	0.00	664,208,100.00	100.00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1,334,000,000.00	0.00	1,334,000,000.00	100.00
Jumlah	12,438,808,100.00	0.00	12,438,808,100.00	100.00

b. Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Tabel 5.6.2.56 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perikanan	473,000,000.00	0.00	473,000,000.00	100.00
Jumlah	473,000,000.00	0.00	473,000,000.00	100.00

6. Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
12,458,576,669.68	20,948,535,335.61	(8,489,958,665.93)	(40.53)

Beban Penyisihan Piutang diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyisihan Piutang berasal dari piutang sebelum Tahun 2022 dan pada Tahun 2021 yang disisihkan sesuai dengan kualifikasi umur piutang sesuai Kebijakan Akuntansi. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 senilai Rp12.458.576.669,68 dan Tahun 2021 senilai Rp20.948.535.335,61 jika dibandingkan maka mengalami penurunan senilai Rp8.489.958.665,93 atau sebesar 40,53% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.57 Rincian Beban Penyisihan Piutang LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	8,510,355,764.23	6,792,259,475.61	1,718,096,288.62	25.29
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	242,170,324.55	112,078,364.50	130,091,960.05	116.07
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3,706,050,580.90	14,044,197,495.50	(10,338,146,914.60)	(73.61)
Jumlah	12,458,576,669.68	20,948,535,335.61	(8,489,958,665.93)	(40.53)

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Tabel 5.6.2.58 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	8,510,355,764.23	6,792,259,475.61	1,718,096,288.62	25.29
Jumlah	8,510,355,764.23	6,792,259,475.61	1,718,096,288.62	25.29

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Tabel 5.6.2.59 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pendapatan Daerah	242,170,324.55	112,078,364.50	130,091,960.05	116.07
Jumlah	242,170,324.55	112,078,364.50	130,091,960.05	116.07

c. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Tabel 5.6.2.60 Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	3,706,050,580.90	14,044,197,495.50	(10,338,146,914.60)	(73.61)
Jumlah	3,706,050,580.90	14,044,197,495.50	(10,338,146,914.60)	(73.61)

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
182,181,533,049.42	181,734,858,783.00	446,674,266.42	0.25

Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Beban Penyusutan dan Amortisasi berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum Tahun 2022 dan Belanja Modal pada Tahun 2022. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada posisi per 31 Desember 2022 senilai Rp182.181.533.049,42 dan Tahun 2021 senilai Rp181.734.858.783,00 jika dibandingkan maka mengalami kenaikan senilai Rp446.674.266,42 atau sebesar 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6.2.61 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2022 dan Tahun 2021

Beban Penyusutan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	75,268,000,151.22	73,048,688,992.66	2,219,311,158.56	3.04
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19,701,131,584.01	18,996,054,086.73	705,077,497.28	3.71
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	86,567,345,964.48	88,923,896,456.47	(2,356,550,491.99)	(2.65)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	149,636,587.21	287,079,762.14	(137,443,174.93)	(47.88)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	495,418,762.50	479,139,485.00	16,279,277.50	3.40
Jumlah	182,181,533,049.42	181,734,858,783.00	446,674,266.42	0.25

Tabel 5.6.2.62 Beban Penyusutan dan Amortisasi LO Tahun 2022 dan Tahun 2021 per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23,441,833,839.74	23,179,679,538.32	262,154,301.42	1.13
Dinas Kesehatan	40,525,983,434.05	40,161,694,442.03	364,288,992.02	0.91
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,235,361,582.56	85,069,399,572.00	(2,834,037,989.44)	(3.33)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,624,495,903.31	2,597,720,603.87	26,775,299.44	1.03

Satuan Polisi Pamong Praja	177,518,995.87	220,821,861.03	(43,302,865.16)	(19.61)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,821,341,629.65	2,496,646,528.22	2,324,695,101.43	93.11
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36,967,901.43	88,818,849.83	(51,850,948.40)	(58.38)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	267,839,857.22	206,742,848.15	61,097,009.07	29.55
Dinas Tenaga Kerja	218,587,451.20	239,581,702.51	(20,994,251.31)	(8.76)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	117,993,360.65	146,784,725.64	(28,791,364.99)	(19.61)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1,037,114,957.16	944,170,852.19	92,944,104.97	9.84
Dinas Lingkungan Hidup	1,787,161,870.27	1,912,461,407.30	(125,299,537.03)	(6.55)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	273,018,224.12	214,164,049.12	58,854,175.00	27.48
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	435,509,923.94	412,629,945.51	22,879,978.43	5.54
Dinas Perhubungan	6,209,209,384.98	6,814,551,384.30	(605,341,999.32)	(8.88)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	841,703,526.17	910,447,795.80	(68,744,269.63)	(7.55)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	585,762,724.29	436,422,769.36	149,339,954.93	34.22
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	927,002,728.54	873,607,904.83	53,394,823.71	6.11
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	601,220,070.32	509,222,571.10	91,997,499.22	18.07
Dinas Perikanan	297,374,867.33	285,201,898.48	12,172,968.85	4.27
Dinas Perdagangan	702,164,132.07	741,834,815.99	(39,670,683.92)	(5.35)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	168,385,702.50	236,003,943.03	(67,618,240.53)	(28.65)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	4,423,386,788.34	4,865,304,670.04	(441,917,881.70)	(9.08)
Sekretariat DPRD	783,601,346.91	786,749,783.34	(3,148,436.43)	(0.40)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	457,417,087.96	536,332,871.04	(78,915,783.08)	(14.71)
Badan Pendapatan Daerah	940,105,133.04	1,004,688,528.38	(64,583,395.34)	(6.43)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,744,296,923.57	1,808,034,303.44	(63,737,379.87)	(3.53)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	231,581,869.46	231,318,119.26	263,750.20	0.11
Inspektorat	466,994,743.02	503,480,416.84	(36,485,673.82)	(7.25)
Kecamatan Dumai Barat	717,285,129.74	483,179,032.59	234,106,097.15	48.45
Kecamatan Dumai Timur	690,846,322.96	369,532,208.53	321,314,114.43	86.95
Kecamatan Dumai Selatan	822,311,091.04	604,171,431.40	218,139,659.64	36.11
Kecamatan Dumai Kota	405,679,597.01	268,621,283.78	137,058,313.23	51.02
Kecamatan Bukit Kapur	822,759,102.36	559,947,533.43	262,811,568.93	46.94

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Medang Kampai	619,072,769.14	489,991,118.07	129,081,651.07	26.34
Kecamatan Sungai Sembilan	722,643,077.50	524,897,474.25	197,745,603.25	37.67
Jumlah	182,181,533,049.42	181,734,858,783.00	446,674,266.42	0.25

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel 5.6.2.63 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14,983,774,879.13	14,350,035,560.02	633,739,319.11	4.42
Dinas Kesehatan	35,405,570,584.86	35,656,792,973.35	(251,222,388.49)	(0.70)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,499,590,092.88	2,396,071,270.28	103,518,822.60	4.32
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	194,354,430.72	222,155,671.43	(27,801,240.71)	(12.51)
Satuan Polisi Pamong Praja	154,270,923.60	200,156,232.15	(45,885,308.55)	(22.92)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,756,438,314.24	2,433,742,582.81	2,322,695,731.43	95.44
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36,967,901.43	88,818,849.83	(51,850,948.40)	(58.38)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	171,303,578.40	188,588,472.15	(17,284,893.75)	(9.17)
Dinas Tenaga Kerja	102,496,266.04	121,792,650.00	(19,296,383.96)	(15.84)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94,084,261.91	127,332,586.90	(33,248,324.99)	(26.11)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	520,485,776.77	517,338,842.04	3,146,934.73	0.61
Dinas Lingkungan Hidup	1,642,232,283.17	1,459,880,070.20	182,352,212.97	12.49
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	256,348,385.00	197,494,210.00	58,854,175.00	29.80
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	388,079,460.00	365,920,590.71	22,158,869.29	6.06
Dinas Perhubungan	3,127,559,336.99	3,575,188,469.46	(447,629,132.47)	(12.52)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	781,553,725.83	883,298,171.84	(101,744,446.01)	(11.52)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	481,816,774.29	355,997,235.96	125,819,538.33	35.34
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	156,510,501.78	175,972,892.50	(19,462,390.72)	(11.06)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	465,226,150.57	373,228,651.35	91,997,499.22	24.65
Dinas Perikanan	102,799,236.71	97,547,351.93	5,251,884.78	5.38
Dinas Perdagangan	264,084,278.57	314,241,388.07	(50,157,109.50)	(15.96)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	93,135,200.71	139,344,528.84	(46,209,328.13)	(33.16)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	3,173,805,102.80	3,638,741,309.95	(464,936,207.15)	(12.78)
Sekretariat DPRD	399,204,918.58	402,353,355.01	(3,148,436.43)	(0.78)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	331,270,077.61	409,568,745.71	(78,298,668.10)	(19.12)
Badan Pendapatan Daerah	796,734,967.33	863,273,691.82	(66,538,724.49)	(7.71)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,202,808,457.43	1,299,028,110.56	(96,219,653.13)	(7.41)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162,358,476.10	162,094,725.90	263,750.20	0.16
Inspektorat	362,451,435.71	403,588,071.43	(41,136,635.72)	(10.19)
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kecamatan Dumai Barat	293,683,753.57	197,277,556.42	96,406,197.15	48.87
Kecamatan Dumai Timur	343,731,871.81	227,930,563.03	115,801,308.78	50.81
Kecamatan Dumai Selatan	393,284,493.18	292,044,171.22	101,240,321.96	34.67
Kecamatan Dumai Kota	328,246,978.73	193,888,665.50	134,358,313.23	69.30
Kecamatan Bukit Kapur	244,711,123.58	200,201,594.65	44,509,528.93	22.23
Kecamatan Medang Kampai	302,457,408.00	281,834,611.14	20,622,796.86	7.32
Kecamatan Sungai Sembilan	254,568,743.19	235,924,568.50	18,644,174.69	7.90
Jumlah	75,268,000,151.22	73,048,688,992.66	2,219,311,158.56	3.04

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 5.6.2.64 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8,354,803,835.61	8,580,413,368.30	(225,609,532.69)	(2.63)
Dinas Kesehatan	4,995,949,326.93	4,408,489,167.24	587,460,159.69	13.33
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	624,775,910.32	515,531,849.31	109,244,061.01	21.19
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	184,769,061.30	182,669,493.28	2,099,568.02	1.15
Satuan Polisi Pamong Praja	23,104,072.27	20,521,628.88	2,582,443.39	12.58
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53,232,575.41	53,232,575.41	0.00	0.00
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	96,223,778.82	17,841,876.00	78,381,902.82	439.31
Dinas Tenaga Kerja	79,772,685.16	81,470,552.51	(1,697,867.35)	(2.08)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23,909,098.74	19,452,138.74	4,456,960.00	22.91
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	236,799,514.18	225,702,878.18	11,096,636.00	4.92
Dinas Lingkungan Hidup	135,708,507.10	138,507,507.10	(2,799,000.00)	(2.02)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16,669,839.12	16,669,839.12	0.00	0.00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47,330,463.94	46,609,354.80	721,109.14	1.55
Dinas Perhubungan	534,808,502.30	531,407,027.92	3,401,474.38	0.64
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20,578,550.34	20,683,998.96	(105,448.62)	(0.51)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,111,700.00	61,390,783.40	(51,279,083.40)	(83.53)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	578,063,549.67	452,792,416.84	125,271,132.83	27.67
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90,617,407.25	90,617,407.25	0.00	0.00
Dinas Perikanan	114,906,164.34	111,644,530.27	3,261,634.07	2.92
Dinas Perdagangan	432,393,427.28	416,641,779.20	15,751,648.08	3.78
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	75,250,501.79	96,659,414.19	(21,408,912.40)	(22.15)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	1,236,667,460.54	1,213,649,135.09	23,018,325.45	1.90
Sekretariat DPRD	382,145,428.33	382,145,428.33	0.00	0.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	125,813,677.02	126,430,792.00	(617,114.98)	(0.49)
Badan Pendapatan Daerah	131,215,530.71	123,203,951.56	8,011,579.15	6.50
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	238,287,316.14	211,430,542.88	26,856,773.26	12.70

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	69,223,393.36	69,223,393.36	0.00	0.00
Inspektorat	97,885,173.98	93,234,212.08	4,650,961.90	4.99
Kecamatan Dumai Barat	104,021,388.97	101,622,588.97	2,398,800.00	2.36
Kecamatan Dumai Timur	116,161,451.15	116,524,645.50	(363,194.35)	(0.31)
Kecamatan Dumai Selatan	147,353,935.86	148,622,598.18	(1,268,662.32)	(0.85)
Kecamatan Dumai Kota	72,032,618.28	72,032,618.28	0.00	0.00
Kecamatan Bukit Kapur	107,203,813.78	105,890,773.78	1,313,040.00	1.24
Kecamatan Medang Kampai	60,041,211.14	60,093,106.93	(51,895.79)	(0.09)
Kecamatan Sungai Sembilan	83,300,712.88	83,000,712.89	299,999.99	0.36
Jumlah	19,701,131,584.01	18,996,054,086.73	705,077,497.28	3.71

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Tabel 5.6.2.65 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	71,204,112.26	61,602,726.11	9,601,386.15	15.59
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,101,828,379.36	82,142,704,992.41	(3,040,876,613.05)	(3.70)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	2,245,372,411.29	2,192,895,439.16	52,476,972.13	2.39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,295,740.00	5,296,370.00	1,999,370.00	37.75
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00
Dinas Tenaga Kerja	18,828,500.00	18,828,500.00	0.00	0.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	275,662,999.55	196,962,465.30	78,700,534.25	39.96
Dinas Lingkungan Hidup	9,221,080.00	314,073,830.00	(304,852,750.00)	(97.06)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Dinas Perhubungan	2,300,523,951.57	2,374,651,364.64	(74,127,413.07)	(3.12)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	372,250.00	(372,250.00)	(100.00)
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	192,428,677.09	243,742,982.99	(51,314,305.90)	(21.05)
Dinas Perikanan	62,264,506.28	58,605,056.28	3,659,450.00	6.24
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perdagangan	5,686,426.22	10,951,648.72	(5,265,222.50)	(48.08)
Sekretariat Daerah Kota Dumai	12,914,225.00	12,914,225.00	0.00	0.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	333,333.33	333,333.33	0.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	6,098,385.00	6,098,385.00	0.00	0.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	303,201,150.00	297,575,650.00	5,625,500.00	1.89
Inspektorat	6,658,133.33	6,658,133.33	0.00	0.00
Kecamatan Dumai Barat	319,042,427.20	183,741,327.20	135,301,100.00	73.64
Kecamatan Dumai Timur	230,953,000.00	25,077,000.00	205,876,000.00	820.98
Kecamatan Dumai Selatan	281,672,662.00	163,504,662.00	118,168,000.00	72.27
Kecamatan Dumai Kota	5,400,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00
Kecamatan Bukit Kapur	470,844,165.00	253,855,165.00	216,989,000.00	85.48
Kecamatan Medang Kampai	256,574,150.00	148,063,400.00	108,510,750.00	73.29
Kecamatan Sungai Sembilan	382,925,050.00	202,275,050.00	180,650,000.00	89.31
Jumlah	86,567,345,964.48	88,923,896,456.47	(2,356,550,491.99)	(2.65)

d. Beban Penyusutan Aset Lainnya

Tabel 5.6.2.66 Beban Penyusutan Aset Lainnya

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	179,410.00	6,507,075.33	(6,327,665.33)	(97.24)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,167,200.00	15,091,460.00	(5,924,260.00)	(39.26)
Satuan Polisi Pamong Praja	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4,166,666.66	4,166,666.67	(0.01)	(0.00)
Dinas Perhubungan	38,765,469.12	237,279,897.28	(198,514,428.16)	(83.66)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75,171,750.00	0.00	75,171,750.00	100.00
Dinas Perikanan	17,404,960.00	17,404,960.00	0.00	0.00
Sekretariat DPRD	2,251,000.00	2,251,000.00	0.00	0.00
Kecamatan Dumai Barat	537,560.00	537,560.00	0.00	0.00
Kecamatan Sungai Sembilan	1,848,571.43	3,697,142.86	(1,848,571.43)	(50.00)
Jumlah	149,636,587.21	287,079,762.14	(137,443,174.93)	(47.88)

e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tabel 5.6.2.67 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	103,255,125.00	249,230,610.00	(145,975,485.00)	(58.57)
Dinas Kesehatan	53,080,000.00	28,302,500.00	24,777,500.00	87.55
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00
Dinas Tenaga Kerja	17,490,000.00	17,490,000.00	0.00	0.00
Dinas Perhubungan	207,552,125.00	96,024,625.00	111,527,500.00	116.14
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	39,571,250.00	6,465,625.00	33,105,625.00	512.03
SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,662,500.00	18,662,500.00	0.00	0.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0.00	1,099,612.50	(1,099,612.50)	(100.00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45,376,512.50	45,376,512.50	0.00	0.00
Badan Pendapatan Daerah	6,056,250.00	12,112,500.00	(6,056,250.00)	(50.00)
Jumlah	495,418,762.50	479,139,485.00	16,279,277.50	3.40

b. Beban Tak Terduga

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
260,289,017.00	6,103,210,871.00	(5,842,921,854.00)	(95.74)

Tabel 5.6.2.68 Beban Tak Terduga

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	260,289,017.00	6,103,210,871.00	(5,842,921,854.00)	(95.74)
Jumlah	260,289,017.00	6,103,210,871.00	(5,842,921,854.00)	(95.74)

Beban Tak Terduga diakui pada saat saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Konsumsi Aset). Realisasi Beban Tak Terduga pada Tahun 2022 adalah senilai Rp260.289.017,00 sedangkan realisasi pada Tahun 2021 senilai Rp6.103.210.871,00 jika dibandingkan mengalami penurunan senilai Rp5.842.921.854,00 atau sebesar 95,74%.

Tabel 5.6.2.68.a Rincian Beban Tak Terduga

Uraian	Tanggal	Jumlah
Pembayaran Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan	19 April 2022	35,680,898.00
Setoran Pengembalian Sisa Dana Bantuan	7 Juni 2022	197,137,500.00
Pengembalian Kelebihan Bayar PBB	19 Oktober 2022	1,261,714.00
Pengembalian Kelebihan Bayar (double) BPHTB	19 Oktober 2022	10,541,450.00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar SPPT PBB	19 Oktober 2022	1,588,607.00
Pengembalian Kelebihan Bayar SPPT-PBB Tahun	19 Oktober 2022	840,128.00
Pengembalian Kelebihan Bayar BPHTB	19 Oktober 2022	4,270,500.00
Pengembalian Kelebihan Bayar SPPT-PBB Tahun	19 Oktober 2022	230,320.00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar BPHTB	19 Oktober 2022	4,323,500.00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar SPPT-PBB	19 Oktober 2022	697,172.00
Pengembalian Kesalahan double Pembayaran BPHTB	20 Oktober 2022	2,717,550.00
Pengembalian Kelebihan/Kesalahan Bayar SPPT-PBB	6 Desember 2022	999,678.00
Total		260,289,017.00

3 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
5,567,122,940.02	23,728,174,266.24	(18,161,051,326.22)	(76.54)

Surplus dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2022 senilai Rp5.567.122.940,02, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 Surplus senilai Rp23.728.174.266,24 maka mengalami penurunan senilai Rp18.161.051.326,22 atau sebesar 76,54%

4 Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
(10,479,419,877.05)	(18,358,694,247.11)	7,879,274,370.06	(42.92)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2022 senilai Rp10.479.419.877,05 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp18.358.694.247,11 maka mengalami penurunan senilai Rp7.879.274.370,06 atau sebesar 42,92%.

Tabel 5.6.2.69 Rincian Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	5,251,255,346.23	1,463,468,896.94	3,787,786,449.29	258.82

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	15,730,675,223.28	19,822,163,144.05	(4,091,487,920.77)	(20.64)
Jumlah	(10,479,419,877.05)	(18,358,694,247.11)	7,879,274,370.06	(42.92)

a. Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	880,302,000.00	1,463,468,896.94	(583,166,896.94)	(39.85)
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang	4,370,953,346.23	0.00	4,370,953,346.23	100.00
Jumlah	5,251,255,346.23	1,463,468,896.94	3,787,786,449.29	258.82

(1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin	867,828,187.72	1,463,468,896.94	(595,640,709.22)	(40.70)
Surplus Penjualan Aset Lainnya	12,473,812.28	0.00	12,473,812.28	100.00
Jumlah	880,302,000.00	1,463,468,896.94	(583,166,896.94)	(39.85)

Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	61,635,599.64	0.00	61,635,599.64	100.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	173,417,284.34	0.00	173,417,284.34	100.00
Satuan Polisi Pamong Praja	4,505,000.00	0.00	4,505,000.00	100.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,325,862.97	0.00	70,325,862.97	100.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	139,931,000.00	0.00	139,931,000.00	100.00
Dinas Lingkungan Hidup	15,194,581.21	0.00	15,194,581.21	100.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	150,373,536.51	0.00	150,373,536.51	100.00
Sekretariat DPRD	97,253,000.00	0.00	97,253,000.00	100.00

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	44,860,000.00	0.00	44,860,000.00	100.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	62,662,323.05	1,463,468,896.94	(1,400,806,573.89)	(95.72)
Kecamatan Dumai Barat	771,000.00	0.00	771,000.00	100.00
Kecamatan Dumai Kota	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	100.00
Kecamatan Sungai Sembilan	45,257,000.00	0.00	45,257,000.00	100.00
Jumlah	867,828,187.72	1,463,468,896.94	(595,640,709.22)	(40.70)

Tabel 5.6.2.69.a Penjelasan Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin LO

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Total
Dinas Kesehatan	630,519,300.00	630,519,300.00	61,635,599.64	61,635,599.64
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,225,194,500.00	1,225,194,500.00	173,417,284.34	173,417,284.34
Satuan Polisi Pamong Praja	21,946,546.00	21,946,546.00	4,505,000.00	4,505,000.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,668,000,000.00	1,668,000,000.00	70,325,862.97	70,325,862.97
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	614,500,000.00	614,500,000.00	139,931,000.00	139,931,000.00
Dinas Lingkungan Hidup	372,586,000.00	372,586,000.00	15,194,581.21	15,194,581.21
Sekretariat Daerah Kota Dumai	610,085,500.00	610,085,500.00	150,373,536.51	150,373,536.51
Sekretariat DPRD	176,000,000.00	176,000,000.00	97,253,000.00	97,253,000.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	122,492,000.00	122,492,000.00	44,860,000.00	44,860,000.00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	570,420,000.00	570,420,000.00	62,662,323.05	62,662,323.05
Kecamatan Dumai Barat	26,400,000.00	26,400,000.00	771,000.00	771,000.00
Kecamatan Dumai Kota	52,800,000.00	52,800,000.00	1,642,000.00	1,642,000.00
Kecamatan Sungai Sembilan	135,000,000.00	135,000,000.00	45,257,000.00	45,257,000.00
JUMLAH	6,225,943,846.00	6,225,943,846.00	867,828,187.72	867,828,187.72

Surplus Penjualan Aset Lainnya per SKPD

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Perhubungan	12,473,812.28	0.00	12,473,812.28	100.00
Jumlah	12,473,812.28	0.00	12,473,812.28	100.00

Tabel 5.6.2.69.b Penjelasan Surplus Penjualan Aset Lainnya

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Total
Dinas Perhubungan	281,870,354.00	281,870,354.00	12,473,812.28	12,473,812.28

JUMLAH	281,870,354.00	281,870,354.00	12,473,812.28	12,473,812.28
---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

(2) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen per SKPD:

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,370,953,346.23	0.00	4,370,953,346.23	100.00
Jumlah	4,370,953,346.23	0.00	4,370,953,346.23	100.00

Surplus senilai 4.370.953.346,23 ini merupakan Kenaikan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pelabuhan Dumai Berseri dan PDAM Tirta Dumai Bersemai, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

b. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

1) Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4,678,396,225.98	6,478,794,739.75	(1,800,398,513.77)	(27.79)
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang	11,052,278,997.30	13,343,368,404.30	(2,291,089,407.00)	(17.17)
Jumlah	15,730,675,223.28	19,822,163,144.05	(4,091,487,920.77)	(20.64)

a) Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	2,119,388,281.86	(2,119,388,281.86)	(100.00)
Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan	4,667,795,156.84	3,749,141,723.18	918,653,433.66	24.50
Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10,601,069.14	0.00	10,601,069.14	100.00
Defisit Penjualan Aset Lainnya	0.00	610,264,734.71	(610,264,734.71)	(100.00)
Jumlah	4,678,396,225.98	6,478,794,739.75	(1,800,398,513.77)	(27.79)

Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	926,794,300.00	(926,794,300.00)	(100.00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	0.00	1,192,593,981.86	(1,192,593,981.86)	(100.00)
Jumlah	0.00	2,119,388,281.86	(2,119,388,281.86)	(100.00)

Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,016,457,354.09	0.00	1,016,457,354.09	100.00
Dinas Kesehatan	0.00	2,494,054,238.71	(2,494,054,238.71)	(100.00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	309,396,389.73	0.00	309,396,389.73	100.00
Dinas Lingkungan Hidup	134,352,000.00	1,255,087,484.47	(1,120,735,484.47)	(89.30)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,389,336,283.93	0.00	2,389,336,283.93	100.00
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	664,391,929.09	0.00	664,391,929.09	100.00
Sekretariat Daerah Kota Dumai	153,861,200.00	0.00	153,861,200.00	100.00
Jumlah	4,667,795,156.84	3,749,141,723.18	918,653,433.66	24.50

Tabel 5.6.2.70 Penjelasan Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan - LO

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Total
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,399,827,032.80	372,829,678.71	10,540,000.00	1,016,457,354.09
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	486074400	160,097,210.27	16,580,800.00	309,396,389.73
Dinas Lingkungan Hidup	139,950,000.00	5,598,000.00	0.00	134,352,000.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,925,595,000.00	461,536,021.93	74,722,694.14	2,389,336,283.93
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	1,041,195,000.00	259,763,070.91	117,040,000.00	664,391,929.09
Sekretariat Daerah Kota Dumai	228,480,000.00	69,988,800.00	4,630,000.00	153,861,200.00
JUMLAH	6,221,121,432.80	1,329,812,781.82	223,513,494.14	4,667,795,156.84

Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
------	----------------	----------------	-------------------------	---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10,601,069.14	0.00	10,601,069.14	100.00
Jumlah	10,601,069.14	0.00	10,601,069.14	100.00

Tabel 5.6.2.71 Penjelasan Defisit Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi - LO

SKPD	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Jual	Defisit
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14,890,000.00	3,908,625.00	380,305.86	10,601,069.14
JUMLAH	14,890,000.00	3,908,625.00	380,305.86	10,601,069.14

Defisit Penjualan Aset Lainnya per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Dinas Kesehatan	0.00	610,264,734.71	(610,264,734.71)	(100.00)
Jumlah	0.00	610,264,734.71	(610,264,734.71)	(100.00)

b) Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen per SKPD:

SKPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah-PPKD	11,052,278,997.30	13,343,368,404.30	(2,291,089,407.00)	(17.17)
Jumlah	11,052,278,997.30	13,343,368,404.30	(2,291,089,407.00)	(17.17)

Defisit ini merupakan Penurunan Nilai Investasi permanen pada BUMD PT. Pembangunan Dumai, untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada Akun Investasi Permanen di Laporan Neraca.

5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
0.00	0.00	0.00	0.00

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada Tahun 2022 senilai Rp,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp,00 maka tidak mengalami perubahan.

6 Surplus/(Defisit) - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
(4,912,296,937.03)	5,369,480,019.14	(10,281,776,956.17)	(191.49)

Jumlah Defisit senilai Rp4.912.296.937,03 Total Pendapatan-LO selama Tahun 2022 senilai Rp1.404.760.236.811,95 sementara total Beban selama Tahun 2022 senilai Rp1.399.193.113.871,93, sedangkan Surplus dari Kegiatan Operasional selama Tahun 2022 senilai Rp5.567.122.940,02 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional selama Tahun 2022 senilai Rp10.479.419.877,05



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5. 7 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas Pemerintah Kota Dumai disusun berdasarkan pendapatan yang benar-benar telah diterima dan belanja yang telah terealisasi/yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu juga pendapatan serta belanja pada BLUD RSUD, BLUD Puskesmas, dan Dana BOS telah dikonsolidasikan ke dalam Laporan Arus Kas ini. Laporan arus kas meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

5. 7. 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	122,251,612,218.83	170,101,395,346.27	(47,849,783,127.44)	(28.13)

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kota Dumai selama satu periode akuntansi. Mutasi antar kas tidak termasuk dalam arus kas aktivitas operasi, sehingga pengembalian sisa Uang Persediaan Tahun 2022 dan sisa uang muka kepada SKPD Tahun 2022 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD tidak dapat dikategorikan dalam aktivitas operasi.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2022 senilai Rp122.251.612.218,83 merupakan selisih antara arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasional Pemerintah Kota Dumai selama Tahun 2022, sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp170.101.395.346,27 mengalami penurunan senilai Rp47.849.783.127,44 atau sebesar 28,13%. Adapun rincian arus masuk kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Pajak Daerah	226,332,093,315.36	185,979,625,987.00	40,352,467,328.36	21.70
Penerimaan Retribusi Daerah	32,206,368,295.17	23,776,863,396.46	8,429,504,898.71	35.45
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,079,761,191.00	1,415,125,255.00	(335,364,064.00)	(23.70)
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	203,278,362,717.33	153,082,950,820.26	50,195,411,897.07	32.79
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	57,079,079,012.00	61,856,297,144.00	(4,777,218,132.00)	(7.72)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	110,563,276,614.00	83,612,659,443.00	26,950,617,171.00	32.23
Penerimaan Dana Alokasi Umum	427,742,257,138.00	429,427,931,000.00	(1,685,673,862.00)	(0.39)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	162,975,491,965.00	156,525,480,094.00	6,450,011,871.00	4.12
Penerimaan Dana Penyesuaian	20,360,896,000.00	31,603,245,000.00	(11,242,349,000.00)	(35.57)
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	119,057,454,418.00	108,598,824,744.39	10,458,629,673.61	9.63
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0.00	40,705,721,968.00	(40,705,721,968.00)	(100.00)
Penerimaan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	8,416,250,000.00	7,988,000,000.00	428,250,000.00	5.36
Jumlah	1,369,091,290,665.86	1,284,572,724,852.11	84,518,565,813.75	6.58

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pegawai	649,325,852,373.00	587,860,841,072.00	61,465,011,301.00	10.46
Pembayaran Barang	559,998,434,987.95	481,698,811,775.84	78,299,623,212.11	16.25
Pembayaran Bunga	1,060,377,070.00	-	1,060,377,070.00	100.00
Pembayaran Hibah	23,282,916,899.08	35,855,199,901.00	(12,572,283,001.92)	(35.06)
Pembayaran Bantuan Sosial	12,911,808,100.00	0.00	12,911,808,100.00	100.00
Pembayaran Tak Terduga	260,289,017.00	9,056,476,757.00	(8,796,187,740.00)	(97.13)
Jumlah	1,246,839,678,447.03	1,114,471,329,505.84	132,368,348,941.19	11.88

5. 7. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%

(259,094,778,911.64)	(197,385,969,978.36)	(61,708,808,933.28)	31.26
----------------------	----------------------	---------------------	-------

Arus kas bersih dari aktivitas investasi (aset non keuangan) mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan Tahun 2022 senilai minus Rp259.094.778.911,64 bila dibanding dengan Tahun 2021 senilai minus Rp197.385.969.978,36 mengalami penurunan senilai Rp61.708.808.933,28 atau sebesar 31,26% dengan rincian:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	880,302,000.00	2,187,764,625.00	(1,307,462,625.00)	(59.76)
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	226,855,800.00	244,595,148.03	(17,739,348.03)	(7.25)
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	1,107,157,800.00	2,432,359,773.03	(1,325,201,973.03)	(54.48)

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Perolehan Tanah	3,534,281,800.00	17,000,000.00	3,517,281,800.00	20,689.89
Perolehan Peralatan dan Mesin	91,334,440,997.63	84,262,101,427.00	7,072,339,570.63	8.39
Perolehan Gedung dan Bangunan	87,322,813,477.02	52,910,399,271.31	34,412,414,205.71	65.04
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	73,340,485,070.99	56,397,085,845.08	16,943,399,225.91	30.04
Perolehan Aset Tetap Lainnya	4,201,199,866.00	5,971,626,308.00	(1,770,426,442.00)	(29.65)
Perolehan Aset lainnya	468,715,500.00	260,116,900.00	208,598,600.00	100.00
Jumlah	260,201,936,711.64	199,818,329,751.39	60,383,606,960.25	30.22

5. 7. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
76,064,040,965.89	0.00	76,064,040,965.89	100.00

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang dan utang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai Rp76.064.040.965,89,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp0,00 maka mengalami kenaikan senilai Rp76.064.040.965,89 atau sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	94,060,540,965.89	0.00	94,060,540,965.89	100.00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
Jumlah	94,064,040,965.89	0.00	94,064,040,965.89	0.00

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	18,000,000,000.00	0.00	18,000,000,000.00	100.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Pengembalian Sisa Dana DPPID	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	18,000,000,000.00	0.00	18,000,000,000.00	0.00

5. 7. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	151,420,379.51	158,417,065.84	(6,996,686.33)	(4.42)

Aktivitas keluar masuk aktivitas transitoris adalah aktivitas kas yang tidak mempengaruhi anggaran, namun mempengaruhi nilai kas. Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) merupakan aktivitas transitoris karena telah diperhitungkan dalam nilai belanja yang telah dikeluarkan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris pada Tahun 2022 senilai Rp151.420.379,51 Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp158.417.065,84 mengalami penurunan senilai Rp6.996.686,33 atau sebesar 4.42%. Rincian dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Arus Masuk Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73,477,946,218.93	64,985,014,845.00	8,492,931,373.93	13.07
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) lainnya	295,262,912.00	168,578,067.00	126,684,845.00	100.00
Penambahan Kas yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0.00	0.00	-	-
Penyesuaian Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD RSUD Tahun Sebelumnya	0.00	0.17	(0.17)	(100.00)
Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD	63,476.00		63,476.00	100.00
Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD	21,988.00	0.00	21,988.00	100.00
Jumlah	73,773,294,594.93	65,153,592,912.17	8,619,701,682.76	13.23

Arus Keluar Kas

URAIAN	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73,451,448,910.42	64,983,231,083.00	8,468,217,827.42	13.03
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2021	1,783,762.00	11,944,763.33	(10,161,001.33)	(85.07)
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1	168,578,067.00	0.00	168,578,067.00	100.00
Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Tabungan Dana BOS ke RKUD	63,476.00	0.00	63,476.00	100.00
Jumlah	73,621,874,215.42	64,995,175,846.33	8,626,698,369.09	13.27

5. 7. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	(60,627,705,347.41)	(27,126,157,566.25)	(33,501,547,781.16)	123.50

Kenaikan (penurunan) Bersih Kas Tahun 2022 adalah senilai minus Rp60.627.705.347,41. Bila dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai minus Rp27.126.157.566,25 mengalami penurunan senilai Rp33.501.547.781,16 atau sebesar 123,50%.

5. 7. 6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	168,367,097,170.25	195,493,254,736.50	(27,126,157,566.25)	(13.88)

Saldo Awal Kas Tahun 2022 senilai Rp168.367.097.170,25. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp195.493.254.736,50 mengalami penurunan senilai Rp27.126.157.566,25 atau sebesar 13,88%. Saldo Awal Kas terdiri dari Saldo awal kas di Kas Daerah senilai Rp141.438.187.794,38, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp334.000,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp26.691.058.326,87, Kas Dana BOS sebesar Rp68.938.982,00 dan Kas Lainnya Rp168.578.067,00

5. 7. 7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
	107,739,391,822.84	168,367,097,170.25	(60,627,705,347.41)	(36.01)

Saldo Akhir Kas di BUD dan Saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 senilai Rp107.739.391.822,84 terdiri dari kas di Kas Daerah senilai Rp99.365.595.756,32, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp60.263.252,00, Kas di BLUD RSUD senilai Rp7.902.462.768,01, Kas Dana BOS senilai Rp115.792.949,51 dan Kas Lainnya senilai Rp295.262.912,00. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp168.367.097.170,25 mengalami penurunan senilai minus

No	Rincian	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2022	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	99,365,595,756.32	141,438,187,794.38
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	60,277,437.00	334,000.00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
4	Kas di BLUD RSUD	6,235,642,285.09	24,407,569,819.09
5	Puskesmas Dumai Kota	144,243,934.68	253,850,408.04
6	Puskesmas Dumai Barat	88,144,705.77	110,288,663.34
7	Puskesmas Bukit Kapur	56,516,541.54	236,041,280.94
8	Puskesmas Sungai Sembilan	76,421,291.72	197,753,644.27
9	Puskesmas Medang Kampai	81,604,334.44	84,861,847.65
10	Puskesmas Bumi Ayu	387,939,930.42	372,706,909.63
11	Puskesmas Bukit Timah	37,842,389.07	62,390,972.75
12	Puskesmas Jayamukti	445,603,321.82	243,204,164.81
13	Puskesmas Purnama	48,082,256.72	112,072,170.16
14	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	237,976,533.74	489,594,996.19
15	UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kls A	62,445,243.00	120,723,450.00
16	Kas Dana BOS	115,792,949.51	68,938,982.00
17.	Kas Lainnya	295,262,912.00	168,578,067.00
	Jumlah	107,739,391,822.84	168,367,097,170.25



PEMERINTAH KOTA DUMAI
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5. 8 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

5. 8. 1. Ekuitas Awal

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,974,537,461,488.77	2,957,502,181,459.58	17,035,280,029.19	0.58

Saldo Awal Ekuitas Tahun 2022 adalah senilai Rp2.974.537.461.488,77 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp2.957.502.181.459,58 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp17.035.280.029,19 atau sebesar 0,58%.

5. 8. 2. Surplus/(Defisit) - LO

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(4,912,296,937.03)	5,369,480,019.14	(10,281,776,956.17)	(191.49)

Surplus/(defisit) – LO Tahun 2022 senilai minus Rp4.912.296.937,03 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 senilai Rp5.369.480.019,14 maka mengalami penurunan senilai Rp10.281.776.956,17 atau sebesar 191,49%. Surplus LO ini merupakan surplus atas Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional (Basis Akrua), sehingga akan menambah nilai Ekuitas pada Neraca Kota Dumai pada Tahun 2022.

5. 8. 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
18,858,371,966.06	11,665,800,010.05	7,192,571,956.01	61.66

Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengurangi Ekuitas Awal Tahun 2022 senilai Rp18.858.371.966,06 dan Tahun 2021 senilai Rp11.665.800.010,05, jika dibandingkan pada Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp7.192.571.956,01 atau sebesar 61,66%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD	-	0.17	(0.17)	(100.00)
Koreksi Piutang	(45,087,899.00)	(830,438,438.45)	785,350,539.45	(94.57)
Koreksi Penyisihan Piutang	13,084,782,824.50	23,562,679.60	13,061,220,144.90	55,431.81
Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	(264,600,000.00)	264,600,000.00	(100.00)
Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(229,500,000.00)	264,600,000.00	(494,100,000.00)	(186.73)
Koreksi Aset Tetap	745,887,550.00	16,929,497,316.00	(16,183,609,766.00)	(95.59)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2,532,592,975.81	(2,469,708,141.47)	5,002,301,117.28	(202.55)
Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(2.50)	2.50	(100.00)
Koreksi Aset Lain-lain	-	(2,706,770,000.00)	2,706,770,000.00	(100.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	5,924,303.75	669,949,025.71	(664,024,721.96)	(99.12)
Koreksi Pendapatan diterima dimuka	108,500,000.00	(45,000,000.00)	153,500,000.00	(341.11)
Koreksi Utang Belanja	2,655,272,211.00	94,707,571.00	2,560,564,640.00	2,703.65
Jumlah	18,858,371,966.06	11,665,800,010.05	7,192,571,956.01	61.66

5. 8. 3. 1. Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas BLUD

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0.00	0.17	(0.17)	(100.00)

Penyesuaian atas Hasil Rekonsiliasi Kas Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai Rp0,17. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp0,17 atau sebesar 100,00%. Nilai tersebut merupakan koreksi atas kas pada BLUD RSUD.

5. 8. 3. 2. Koreksi Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(45,087,899.00)	(830,438,438.45)	785,350,539.45	(94.57)

Koreksi Piutang Tahun 2022 senilai minus Rp45.087.899,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp830.438.438,45. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp785.350.539,45 atau sebesar 94,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.2 Rincian Koreksi Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.00	(1,011,079,997.45)	1,011,079,997.45	(100.00)
Badan Pendapatan Daerah	(20,752,523.00)	0.00	(20,752,523.00)	100.00
Dinas Kesehatan	(24,335,376.00)	180,641,559.00	(204,976,935.00)	(113.47)
Jumlah	(45,087,899.00)	(830,438,438.45)	785,350,539.45	(94.57)

Koreksi Piutang Tahun 2022 senilai minus Rp45.087.899,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.3 Koreksi Rincian Piutang Tahun 2022

Badan Pendapatan Daerah	(20,752,523.00)
Koreksi Saldo awal Piutang PPJ Non PLN Tahun 2021	2,806,145.00
Koreksi Saldo awal Piutang PPJ Non PLN Tahun 2021	(11,143,758.00)
Koreksi Saldo awal Piutang Air Tanah Tahun 2021	(12,470,590.00)
Koreksi saldo awal piutang pendapatan denda pajak walet tahun 2021	55,680.00
Dinas Kesehatan	(24,335,376.00)
Koreksi Piutang BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2021	(24,335,376.00)
Jumlah	(45,087,899.00)

Koreksi Piutang BLUD RSUD Kota Dumai Tahun 2021 Senilai Rp24.335.376,00 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi lebih catat Piutang BPJS	(18,248,800.00)
Koreksi lebih catat Ambulans BPJS	(1,560,000.00)
Koreksi lebih catat Asuransi Pegawai Pelindo	(4,080,744.00)
Koreksi kurang catat pelindo pensiunan	40,000.00
Koreksi lebih catat Asuransi PLN	(152,650.00)
Koreksi lebih catat Pertamina Hospital Dumai	(50,013.00)
Koreksi lebih catat Trauma Cetre	(143,169.00)
Koreksi lebih catat sewa kantin 1	(140,000.00)
Jumlah	(24,335,376.00)

5. 8. 3. 3. Koreksi Penyisihan Piutang

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)
------------	------------	-------------------------

Tahun 2022	Tahun 2021	Rp	%
13,084,782,824.50	23,562,679.60	13,061,220,144.90	55,431.81

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2022 senilai Rp13.084.782.824,50 dan Tahun 2021 senilai Rp23.562.679,60. Jika dibandingkan dengan TA 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.061.220.144,90 atau sebesar 55431,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.4 Penyisihan Piutang per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	15,860,729,282.00	57,500.00	15,860,671,782.00	27,583,777.01
Badan Pendapatan Daerah	(2,775,946,457.50)	23,505,179.60	(2,799,451,637.10)	(11,909.94)
Jumlah	13,084,782,824.50	23,562,679.60	13,061,220,144.90	55,431.81

Tabel 5.8.5 Koreksi Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2022

Dinas Kesehatan	15,860,729,282.00
Koreksi Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2022	20,000.00
Koreksi Penyisihan Piutang Karena pelunasan Per 31 Desember 2022:	15,860,709,282.00
1. KEMENKES	15,353,203,390.00
2. JAMKESKO	143,117,390.00
3. OBAT KRONIS	313,298,767.50
4. AMBULANCE BPJS	10,976,940.00
5. PELINDO PEGAWAI	4,440,803.20
6. PELINDO PENSUN	864,685.40
7. PERTAMINA HOSPITAL	2,927,716.90
8. PT. Murini Wood Indah Industry	1,588,193.00
9. TRAUMA CENTRE	26,636,070.00
10. SEWA KANTIN KECIL 1	3,640,000.00
11. ADMEDIKA PLN	15,326.00
Badan Pendapatan Daerah	(2,775,946,457.50)
Koreksi Saldo awal Penyisihan Piutang PPJ Non PLN Tahun 2021	(1,114,375.80)
Koreksi Saldo awal Penyisihan Piutang Air Tanah Tahun 2021	(1,247,059.00)
Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Hotel Tahun 2021	24,539,082.40
Koreksi Penyisihan Piutang Akibat Penghapusan Piutang PBB	(2,798,124,105.10)
Jumlah	13,084,782,824.50

5. 8. 3. 4. Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0.00	(264,600,000.00)	264,600,000.00	(100.00)

Koreksi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp264.600.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp264.600.000,00 atau sebesar 100,00%

5. 8. 3. 5. Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
(229,500,000.00)	264,600,000.00	(494,100,000.00)	(186.73)

Koreksi penyisihan investasi jangka panjang non permanen Tahun 2022 senilai minus Rp229.500.000,00 dan Tahun 2021 senilai Rp264.600.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp494.100.000,00 atau sebesar 186,73%. Koreksi penyisihan investasi non permanen ini merupakan penyisihan dana bergulir atas Koperasi Putri Tujuh dimana pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah disisihkan. Sebagai tambahan informasi bahwa dana bergulir ini sudah masuk kategori macet sejak tahun 2010, sehingga seharusnya disisihkan sebesar 100%.

5. 8. 3. 6. Koreksi Aset Tetap

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
745,887,550.00	16,929,497,316.00	(16,183,609,766.00)	(95.59)

Koreksi Aset Tetap Tahun 2022 senilai Rp745.887.550,00 dan Tahun 2021 senilai Rp16.929.497.316,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp16.183.609.766,00 atau sebesar 95,59% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.6 Koreksi Aset Tetap per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Daerah	0.00	(110,990,684.00)	110,990,684.00	(100.00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	935,910,550.00	17,040,488,000.00	(16,104,577,450.00)	(94.51)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9,977,000.00	0.00	9,977,000.00	100.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(200,000,000.00)	0.00	(200,000,000.00)	100.00
Jumlah	745,887,550.00	16,929,497,316.00	(16,183,609,766.00)	(95.59)

Tabel 5.8.7 Rincian Koreksi Aset Tetap Tahun 2022

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	935,910,550.00
Koreksi Aset Tanah Yang Masih Bernilai Nol Tahun 2021	410,187,100.00
Koreksi Aset Tanah Hasil Inventarisasi 2022	525,723,450.00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9,977,000.00
Koreksi Perpindahan Dari Ekstrakomptabel Ke Intrakomptabel	9,977,000.00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(200,000,000.00)
Koreksi Tanah Akibat Kelebihan Catat Berupa Tanah Palawija Jl. Bangun Sari Bukit Timah Luas 19.611M2 Tahun 1999	(200,000,000.00)
Jumlah	745,887,550.00

5. 8. 3. 7. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,532,592,975.81	(2,469,708,141.47)	5,002,301,117.28	(202.55)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 senilai Rp2.532.592.975,81 dan Tahun 2021 senilai minus Rp2.469.708.141,47 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp5.002.301.117,28 atau sebesar 202,55% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	(196,944,001.71)	185,982,725.61	(382,926,727.32)	(205.89)
Dinas Pendidikan	3,788,074,053.65	0.00	3,788,074,053.65	100.00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(809,290,594.14)	(1,184,714,664.81)	375,424,070.67	(31.69)

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(84,264.39)	0.00	(84,264.39)	100.00

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(39,961,751.25)	0.00	(39,961,751.25)	100.00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	(2,836,833.33)	2,836,833.33	(100.00)
Dinas Lingkungan Hidup	0.00	(817,278,089.20)	817,278,089.20	(100.00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	(73,657,600.00)	73,657,600.00	(100.00)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1,047,900.00)	0.00	(1,047,900.00)	100.00
Dinas Perhubungan	(46,812,924.50)	(191,882,854.00)	145,069,929.50	(75.60)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	0.00	(15,488,088.00)	15,488,088.00	(100.00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1,505,625.00)	0.08	(1,505,625.08)	(1,882,031,350.00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(106,555,485.47)	(3,644,281.95)	(102,911,203.52)	2,823.91
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73,935,420.69	240,000.00	73,695,420.69	30,706.43
Dinas Perdagangan		(236,033,310.25)	236,033,310.25	(100.00)
Sekretariat Daerah	19,218,000.49	(55,061,405.36)	74,279,405.85	(134.90)
Sekretariat DPRD	(22,462,000.00)	0.00	(22,462,000.00)	100.00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	617,114.97	0.00	617,114.97	100.00
Badan Pendapatan Daerah	(1,047,816.72)	0.00	(1,047,816.72)	100.00
Kecamatan Dumai Barat	(18,616,650.00)	2,822,614.29	(21,439,264.29)	(759.55)
Kecamatan Dumai Timur	(101,025,500.00)	8,467,842.86	(109,493,342.86)	(1,293.05)
Kecamatan Dumai Selatan	(2,990,000.00)	0.00	(2,990,000.00)	100.00
Kecamatan Bukit Kapur	0.00	(2,954,285.71)	2,954,285.71	(100.00)
Kecamatan Medang Kampai	0.00	9,325,114.29	(9,325,114.29)	(100.00)
Kecamatan Sungai Sembilan	0.00	3,213,162.31	(3,213,162.31)	(100.00)
Inspektorat	0.00	(87,970,609.75)	87,970,609.75	(100.00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(907,100.81)	(8,237,578.55)	7,330,477.74	(88.99)
Jumlah	2,532,592,975.81	(2,469,708,141.47)	5,002,301,117.28	(202.55)

Tabel 5.8.9 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

Dinas Kesehatan	(196,944,001.71)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(153,587,900.87)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(99,447,431.66)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar Tahun 2021	55,346,583.09
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan s.d 2021 yang direklas ke Gedung Tahun 2022	744,747.73
Dinas Pendidikan	3,788,074,053.65
Koreksi Kelebihan Catat Akumulasi Penyusutan Gedung s.d 2021	3,788,074,053.65
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(809,290,594.14)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(827,611,972.13)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Komputer (Adanya Perpindahan Nilai Aset dari Ekstracomp ke Intracomp)	(9,977,000.00)
Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Adanya Selisih Perhitungan dari Tahun 2021)	28,298,377.99
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(84,264.39)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021 (Kurang Catat Akumulasi Penyusutan S.D 2021)	(84,264.39)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	(39,961,751.25)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun lalu	(39,961,751.25)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1,047,900.00)
Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Tahun lalu	(1,047,900.00)

Dinas Perhubungan	(46,812,924.50)
Koreksi reklasifikasi antar aset tetap	(45,457,500.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan terhadap Bangunan Air/Irigasi (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(1,914,299.50)

Koreksi Akumulasi Penyusutan terhadap Komputer (Koreksi Lebih Catat TA 2021)	558,875.00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1,505,625.00)
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- Personal Komputer	(1,505,625.00)
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(106,555,485.47)
Koreksi Akumulasi Penyusutan terhadap Gedung dan Bangunan (koreksi lebih catat) Tahun 2021	(106,555,485.47)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	73,935,420.69
Koreksi terhadap Gedung Beban penyusutan 2021, kesalahan perhitungan Akm.Penyusutan 2021 Gedung (koreksi kurang catat)	(14,090,974.67)
Koreksi terhadap Tugu Kontrol/Pasti Beban penyusutan 2021, kesalahan perhitungan Akm.Penyusutan 2021 Tugu Kontrol/Pasti (koreksi lebih catat)	88,026,395.36
Sekretariat Daerah	19,218,000.49
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2021	22,362,000.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021	(3,143,999.51)
Sekretariat DPRD	(22,462,000.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(22,462,000.00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	617,114.97
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	617,114.97
Badan Pendapatan Daerah	(1,047,816.72)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung Kantor reklasifikasi dari KDP	(1,047,816.72)
Kecamatan Dumai Barat	(18,616,650.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, JIJ Tahun 2021 (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(18,616,650.00)
Kecamatan Dumai Timur	(101,025,500.00)
Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai Tahun 2021	(101,025,500.00)
Kecamatan Dumai Selatan	(2,990,000.00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 (Koreksi Kurang Catat Tahun 2021)	(2,990,000.00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(907,100.81)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan karena salah perhitungan	(907,100.81)
Jumlah	2,532,592,975.81

5. 8. 3. 8. Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0.00	(2.50)	2.50	(100.00)

Koreksi Akumulasi Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp2,50, jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp2,50 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.10 Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Perpustakaan dan kearsipan	0.00	(2.50)	2.50	(100.00)
Jumlah	0.00	(2.50)	2.50	(100.00)

5. 8. 3. 9. Koreksi Aset Lain-lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
0.00	(2,706,770,000.00)	2,706,770,000.00	(100.00)

Koreksi Aset lain-lain Tahun 2022 senilai Rp0,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp2.706.770.000,00 jika dibandingkan

dengan TA 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.706.770.000,00 atau sebesar 100,00%.

5. 8. 3.10. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
5,924,303.75	669,949,025.71	(664,024,721.96)	(99.12)

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022 senilai Rp5.924.303,75 dan Tahun 2021 senilai Rp669.949.025,71 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami penurunan senilai Rp664.024.721,96 atau sebesar 99,12% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.13 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,924,260.00	675,284,740.00	(669,360,480.00)	(99.12)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.75	0.00	43.75	100.00
Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	(6,000,000.00)	6,000,000.00	(100.00)
Dinas Perhubungan	0.00	664,285.71	(664,285.71)	(100.00)
Jumlah	5,924,303.75	669,949,025.71	(664,024,721.96)	(99.12)

Tabel 5.8.14 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.75
Koreksi kurang catat Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	43.75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5,924,260.00
Koreksi Akumulasi Penyusutan thn 2021 atas Hibah Ke Pemprov Riau berdasarkan BAST NO.06/BAST/BPKAD/2022 DAN NO.61/BA/2022 TGL.11.02.2022 NHPD NO.05/NPHBMD/2022 DAN NO.53/NPHBMD/2022 TGL.11.02.2022)	5,924,260.00
Jumlah	5,924,303.75

5. 8. 3.11. Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
108,500,000.00	(45,000,000.00)	153,500,000.00	(341.11)

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 senilai Rp108.500.000,00 dan Tahun 2021 senilai minus Rp45.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp153.500.000,00 atau sebesar 341,11%.

Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka ini merupakan koreksi pencatatan tahun lalu atas pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) dengan PT. Satwa Sarana Karunia. Kontribusi tahunan atas Bangun Guna Serah senilai Rp186.000.000,00 per tahun. Tahun 2021 telah disajikan sebagai pendapatan pada Laporan Operasional senilai Rp77.500.000,00 dan disajikan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada Neraca senilai Rp108.500.000,00, seharusnya kontribusi tahunan ini tidak menimbulkan kewajiban di masa depan kepada Pemerintah Kota Dumai. Kewajiban Pemerintah Kota Dumai sudah dianggap selesai pada saat serah terima aset sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

5. 8. 3.12. Koreksi Utang Belanja

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,655,272,211.00	94,707,571.00	2,560,564,640.00	2,703.65

Koreksi Utang Belanja Tahun 2022 senilai Rp2.655.272.211,00 dan Tahun 2021 senilai Rp94.707.571,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp2.560.564.640,00 atau sebesar 2703,65% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.15 Koreksi Utang Belanja per SKPD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
			Rp	%
Dinas Kesehatan	2,655,272,211.00	93,551,771.00	2,561,720,440.00	2,738.29
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	0.00	65,000.00	(65,000.00)	(100.00)
Kecamatan Dumai Barat	0.00	1,090,800.00	(1,090,800.00)	(100.00)
Jumlah	2,655,272,211.00	94,707,571.00	2,560,564,640.00	2,703.65

Koreksi Utang Belanja pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.655.272.211,00 merupakan kesalahan pencatatan pada TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.16 Rincian Utang Belanja TA 2022

Koreksi Utang Honorarium BLUD Th 2021	34,000,000.00
Kelebihan Catat Pembayaran Honorarium Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Bulan Januari s/d Maret 2021	17,700,000.00
Kelebihan catat Pembayaran Honorarium Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Bulan April s/d Juni 2021	17,700,000.00
Kelebihan catat Pembayaran Honorarium Pengurus Komite Medik RSUD Kota Dumai Triwulan III Tahun 2021	100,000.00
Kurang catat Pembayaran Honorarium Pengurus Komite Keperawatan Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2021	(8,550,000.00)
Kurang catat Pembayaran Honorarium Pengurus Komite Keperawatan Bulan April s.d Mei 2021	(5,700,000.00)
Kelebihan catat Pembayaran Honorarium Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya RSUD kota Dumai Bulan Januari s.d Mei (5 Bulan) Tahun 2021 Berdasarkan Keputusan No:074/KPTS-DIREKTUR/2021 Tgl:12 Januari 2021	12,750,000.00
Koreksi Utang Insentif Vaksinator Th 2021	44,850,000.00
Koreksi Utang Jasa Pelayanan BLUD Th 2021	963,221,844.00
Koreksi Utang Jasa BPJS dan Covid 19	248,479,191.00
Koreksi lebih catat insentif tim JKN	669,271,014.00
Koreksi lebih catat Jasa Umum & cost Sharing	34,536,444.00
Koreksi lebih catat Jasa Jamkesko (Jaminan Kesehatan Kota)	10,935,195.00
Koreksi lebih catat Utang Barang dan Jasa BLUD Th 2021	197,295,998.00
Koreksi lebih catat Utang Barang dan Jasa BLUD Th 2021 atas Pembayaran atas Pekerjaan angkutan dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun di RSUD Berdasarkan SPK No:044/B3/RSUDDMI/SPK/X/2020 Tgl: 07 November 2020, BASPT No:445/BAPST-TU/4017 Tgl: 31 Mei 2021, BASTPPB No:445/BASTPPB-TU/4016 Tgl: 31 Mei 2021, BAPP No:445/BAP-TU/4015 Tgl:31 Mei 2021 PT. Andhika Makmur Persada	
Koreksi kurang catat dan lebih catat Utang Obat dan BHP BLUD Th 2021	1,415,904,369.00
Jumlah	2,655,272,211.00

5. 8. 4. Ekuitas Akhir

Tahun 2022	Tahun 2021	Peningkatan/(Penurunan)	
		Rp	%
2,988,483,536,517.80	2,974,537,461,488.77	13,946,075,029.03	0.47

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah senilai Rp2.988.483.536.517,80 jika dibandingkan pada Tahun 2021 senilai Rp2.974.537.461.488,77 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 maka mengalami kenaikan senilai Rp13.946.075.029,03 atau sebesar 0,47%.

**PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN BEBAN BARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN	NILAI
1	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	116,519,764,911.93
2	BEBAN BARANG TAK HABIS PAKAI	4,303,421,262.54
	TOTAL	120,823,186,174.47

NO	BEBAN BARANG PAKAI HABIS	NILAI
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17,791,704,806.00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	3,131,243,448.26
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,473,871,845.00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	133,795,714.00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	714,273,699.00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	41,363,000.00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	14,036,500.00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	19,163,360,956.32
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21,930,000.00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	65,284,650.00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	130,737,232.00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,167,874,141.67
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,206,741,901.00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	19,970,000.00
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	394,043,730.00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	40,000,000.00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,428,887,280.37
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1,611,436,415.00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	8,615,200.00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	170,693,700.00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4,111,380,505.00
23	Beban Obat-Obatan-Obat	9,010,246,117.69
24	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	61,666,750.00
25	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2,867,950,000.00
26	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19,197,296,558.62
27	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	8,710,000.00
28	Beban Natura dan Pakan-Natura	2,784,732,171.00
29	Beban Natura dan Pakan-Pakan	206,165,000.00
30	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8,442,626,443.00
31	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,267,979,590.00
32	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2,108,233,798.00
33	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2,527,698,500.00
34	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	700,776,500.00
35	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9,769,000.00
36	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	348,780,000.00
37	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	301,335,600.00
38	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	92,460,500.00
39	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	69,425,950.00
40	Beban Pakaian KORPRI	488,500.00
41	Beban Pakaian Adat Daerah	402,327,300.00
42	Beban Pakaian Olahraga	189,432,410.00
43	Beban Pakaian Paskibraka	80,419,500.00
	TOTAL	116,519,764,911.93

NO	BEBAN BARANG TAK HABIS PAKAI	NILAI
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	888,213,530.00
2	Beban Komponen-Attachment	2,532,867,870.00
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	882,339,862.54
	TOTAL	4,303,421,262.54

PEMERINTAH KOTA DUMAI
RINCIAN BEBAN JASA KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	NILAI
1	BEBAN JASA KANTOR	166,304,708,221.00
	TOTAL	166,304,708,221.00
NO	BEBAN JASA KANTOR	NILAI
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,245,651,550.00
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,760,495,000.00
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	48,600,000.00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1,348,030,000.00
5	Beban Honorarium Rohaniwan	9,500,000.00
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	44,242,000.00
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	155,800,000.00
8	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1,031,700,000.00
9	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	21,456,400,000.00
10	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	20,671,151,791.00
11	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	479,691,404.00
12	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3,744,568,100.00
13	Beban Jasa Tenaga Ketertarikan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6,887,100,000.00
14	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1,227,430,000.00
15	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	8,800,000.00
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	729,700,000.00
17	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	112,000,000.00
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	3,179,180,000.00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	673,600,000.00
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	28,800,000.00
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	161,900,000.00
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	14,327,405,440.00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	714,415,668.00
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	272,050,000.00
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	6,562,058,761.00
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	19,231,818,011.00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	11,151,630,720.00
28	Beban Jasa Tenaga Supir	4,890,133,400.00
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1,474,895,400.00
30	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	86,550,000.00
31	Beban Jasa Tata Rias	11,875,000.00
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1,963,806,000.00
33	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	217,537,440.00
34	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1,242,874,149.00
35	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	2,883,000.00
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	83,647,844.00
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	15,460,000.00
38	Beban Jasa Kalibrasi	49,940,000.00
39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	240,260,160.00
40	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	163,565,000.00
41	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1,474,325,758.00
42	Beban Tagihan Telepon	294,002,941.00
43	Beban Tagihan Air	1,541,474,600.00
44	Beban Tagihan Listrik	17,259,600,571.00
45	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	581,044,000.00
46	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3,139,895,989.00
47	Beban Paket/Pengiriman	9,367,280.00
48	Beban Penambahan Daya	510,156,800.00
49	Beban Lembur	1,810,619,000.00
50	Beban Medical Check Up	104,000,000.00
51	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	2,463,415,000.00
52	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	5,409,670,444.00
	TOTAL	166,304,708,221.00

DAFTAR HIBAH KELUAR PEMERINTAH KOTA DUMAI TA 2022

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah					Hibah Ke	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Hibah		
1	PENGELOLA (PPKD)	TANAH	TANAH HUTAN WISATA TELUK MAKMUR 1 PERSIL LUAS 53.944M3 TH 2012	1	1,201,461,991.87	1,201,461,991.87	0.00	1,201,461,991.87	KKP POLTEK PERIKANAN	BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH NO.B.245/BRSDM/III/2022 TGL.31.03.2022 BAP NO.02/BA-PENELITIAN/2022 TGL.16.03.2022 SURAT WALIKOTA DUMAI NO.032/404.1/BPKAD-ASET TGL.12.04.2022 TTG PERSETUJUAN HIBAH SK WALIKOTA DUMAI NO.032/537/2022 TTG PENGHAPUSAN BMD TGL.27.05.2022
2			TANAH KOSONG YG SUDAH DIPERUNTUKKAN LUAS 45.604M2 TH2012 FASILITAS TANAH OLAH RAGA	1	829,992,800.00	829,992,800.00	0.00	829,992,800.00	BADAN KERJASAMA GEREJA-GEREJA KOTA DUMAI (BKGD)	BERDASARKAN SURAT KETUA BADAN KERJASAMA GEREJA-GEREJA KOTA DUMAI (BKGD) NO.02/BKGD-SP/X/2022 TGL.01.11.2022 SURAT PERSETUJUAN WALIKOTA NO.032/541/BPKAD-ASET TGL.25.11.2022 SK HIBAH NO.900/928/2022 TGL.28.11.2022
SUBTOTAL DINAS PENGELOLA (PPKD)				2	2,031,454,791.87	2,031,454,791.87	0.00	2,031,454,791.87		
3	SEKRETARIAT DAERAH	PERALATAN DAN MESIN	SOFA TITOF MINIMALIS Titov, Minimalis V3:2:1 TH 2011	1	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	DEWAN KESENIAN DAERAH KOTA DUMAI	BERDASARKAN BAST NO.24/BAST/BPKAD/2022 DAN 41/DKD/VI/2022 TGL.20.07.2022 SK PENGHAPUSAN NO.933/679/2022 TGL.22.08.2022
4			SEPEDA MOTOR BAK TERBUKA KAISAR TRISEDA XP LONG BM3457R TH2015	1	28,110,000.00	28,110,000.00	26,102,142.85	2,007,857.15	MASJID ATTAUBAH KEC.BUKIT NENAS	BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN MASJID ATTAUBAH KEC.BUKIT NENAS NO.013/MAT/2022 HAL.PERMINTAAN SEPEDA MOTOR RODA TIGA TGL.30.11.2022 SURAT PERSETUJUAN HIBAH WALIKOTA NO.032/1104.1/BPKAD-ASET TGL.22.12.2022 SK WALIKOTA HIBAH BMD NO.900/987/2022 TGL.22.12.2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1012/2022 TGL.29.12.2022
SUBTOTAL SEKRETARIAT DAERAH				2	38,010,000.00	38,010,000.00	36,002,142.85	2,007,857.15		
5	DINAS KESEHATAN	PERALATAN DAN MESIN	Mobil Ambulans ISUZU TH 2004 BM 8970 AP	1	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	MASJID AL-MUTHMAINNAH KEC.SEI SEMBILAN	BERDASARKAN SURAT KADIS DINKES PENGHAPUSAN NO.032/1370/DINKES TGL.24.11.2022 NASKAH PERJANJIAN HIBAH NO.019/NHPD/BPKAD/2022 DAN NO.000/AL-MUTHMAINNAH-TJP/07/002 TGL.18.07.2022 BAST NO.018/BAST/BPKAD/2022 DAN NO.000/AL-MUTHMAINNAH-TJP/07/001 TGL.18.07.2022 SK HIBAH NO.900/988/2022 TGL.27.12.2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/988/2022 TGL.27.12.2022
SUBTOTAL DINAS KESEHATAN				1	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00		
6	DINAS PERHUBUNGAN	PERALATAN DAN MESIN	1.KIBAR RAMBU2 Rp595.918.321.49 SBB: -Pengadaan & Pemasangan LPJU Solar Cell (Cabang Satu) pada Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Roro TH2013 Rp206,545,971.49 -Portal TH2009 Rp3,670,000 -Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell di Pelabuhan Penumpang Roro TH2014 Rp210,618,650.00 -Perbaikan Portal & Trali Parit TH2009 Rp4,900,000.00 -Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Arah di Pelabuhan Penumpang/Penyeberangan RoRo TH2014 Rp99,128,700.00 -Pembuatan Besi Portal Ro- Ro TH2013 Rp74,725,000.00	6	599,588,321.49	599,588,321.49	599,588,321.49	0.00	DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT KEMENHUB RI	BERDASARKAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH ANTARA PEMKO DUMAI DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT NO.016/NHPD/BPKAD/2022 DAN NO.HK.201/15/13/DJPD/2022 TGL.22.08.2022 BAST DARI PEMKO DUMAI KE DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT NO.015/BAST/BPKAD/2022 DAN BA-DJPD 95 TH 2022 TGL.22.08.2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/933/2022 TGL.26.10.2022
7			GEDUNG DAN BANGUNAN	2.KIBAR GEDUNG DAN BANGUNAN Rp526.362.184.84 SBB: -Pos Jaga Jembatan Timbang TH2020 Rp91,358,476.89 -Pekerjaan Duiker Jalan Masuk Agrobisnis TH2011 Rp45,455,000.00 -Pekerjaan Pasang Dinding Triplek Penutup Bangunan Roro TH2011 Rp25,563,000.00 -Pekerjaan Trap VVIP ELV+ 70cm TH2011 Rp96,012,000.00 -Pembangunan Jalan Koridor Penghubung antara Gedung Terminal dengan Trestel / Causeway Pelabuhan TH2013 Rp213,503,507.96 -Pembangunan Parit Keliling Pelabuhan Ro-Ro TH2009 Rp54,470,200.00 3.KIBAR Tugu Titik Kontrol/Pasti Pagar Sisi Darat Roro TH2008 Rp176.302.762 4.KIBAR KEMITRAAN PIHAK KETIGA Rp8.368.972.590 -Gedung kantor Penyeberangan Roro TH2013 Rp8,294,105,490 -Rumah Genset di Pelabuhan Penyeberangan Roro / Pelabuhan Penumpang TH2013 Rp74,867,100	9	9,071,637,536.84	9,071,637,536.84	1,556,216,456.68	7,515,421,080.16	

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah					Hibah Ke	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Hibah		
8		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	5.KIBAR JEMBATAN Jembatan Timbang TH2020 Rp1.180.581.506,78 6.KIBAR BANGUNAN AIR Menara Air Pos Jaga Jembatan Timbang TH2020 Rp19.998.000 7.Pembuatan Menara Air TH2009 Rp5.000,000 8.Pembangunan Bak Penampungan Air (Reservoir) Pelabuhan Penyeberangan Roro / Pelabuhan penumpang TH2013 Rp409.698,494	4	1,615,278,000.86	1,615,278,000.86	248,735,895.01	1,366,542,105.85		
SUBTOTAL DISHUB				19	11,286,503,859.19	11,286,503,859.19	2,404,540,673.18	8,881,963,186.01		
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	PERALATAN DAN MESIN	MESIN PORTABLE KECIL KOSHIN SHE-40 H TH2019	3	32,930,500.00	98,791,500.00	49,395,750.00	49,395,750.00	KOREM 031/WIRA BIMA	BERDASARKAN NASKAH HIBAH NO.41/NPHD/BPKAD/2022 & NO.B/1533/X/2022 TGL.25.10.2022 SK PENGHAPUSAN NO.032/993/2022 TGL.05.12.2022
10			-MESIN PORTABLE KECIL KOSHIN SHE-40 H TH2021	2	39,435,000.00	78,870,000.00	5,633,571.43	73,236,428.57		
11			-MOTOR TRAIL HONDA CRF 150 L BM 3543 R TH 2019	1	31,669,025.00	31,669,025.00	13,572,439.29	18,096,585.72		
12			-MOTOR TRAIL HONDA CRF 150 L BM 3553 R TH 2019	1	31,669,025.00	31,669,025.00	13,572,439.29	18,096,585.72		
SUBTOTAL BPBD				7	135,703,550.00	240,999,550.00	82,174,200.00	158,825,350.00		
13	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	TANAH	1.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) TANAH Rp75.000.000 SBB: -SDN 010 KAYU KAPUR Rp75.000.000 -SMPN 16 KOTA DUMAI Rp0	2	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00		BERDASARKAN SK HIBAH NO.900/1017/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 NHPD NO.53/NP/BPKAD-ASET/2022 DAN 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 BAST NO.54/BAST/BPKAD/2022 DAN 667/BAST/ASET/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1018/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
14		PERALATAN DAN MESIN	2. Alat Kantor Lainnya Rp325.876.404, Alat Studio Lainnya Rp3.750.000, Unit Alat Laboratorium Lainnya Rp430.763.200, Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp27.076.852,9, Peralatan Komputer Lainnya Rp396.900.431,53, Peralatan Olahraga Lainnya Rp3.000.000	6	1,187,366,888.43	1,187,366,888.43	740,233,736.98	447,133,151.45		
15		GEDUNG DAN BANGUNAN	3.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) GEDUNG & BANGUNAN Rp4.855.313.362,15 SBB: -SDN 010 KAYU KAPUR Rp2.789.726.013,33 -SMPN 16 KOTA DUMAI Rp2.065.587.348,82	2	4,855,313,362.15	4,855,313,362.15	1,427,560,112.81	3,427,753,249.34	KABUPATEN BENGKALIS	
16		ASET TETAP LAINNYA	4.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) ASET TETAP LAINNYA Rp245.257.133,30 SBB: -SDN 010 KAYU KAPUR Bahan Perpustakaan Rp173.289.554,12 -SMPN 16 KOTA DUMAI Bahan Perpustakaan Rp71.967.579,18	2	245,257,133.30	245,257,133.30	0.00	245,257,133.30		
17		ASET LAINNYA	5.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) ASET LAINNYA Rp24.900.000 SBB: -SDN 010 KAYU KAPUR Bahan Perpustakaan Rp0 -SMPN 16 KOTA DUMAI Bahan Perpustakaan Rp24.900.000	2	24,900,000.00	24,900,000.00	24,900,000.00	0.00		
		PERALATAN DAN MESIN	6. Unit Alat Laboratorium Lainnya Rp145.533.000, Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp298.548.000, Peralatan Komputer Lainnya Rp222.7586.000	3	2,671,667,000.00	2,671,667,000.00	0.00	2,671,667,000.00		
		GEDUNG DAN BANGUNAN	7.Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp698.869.200	1	698,869,200.00	698,869,200.00	0.00	698,869,200.00		
SUBTOTAL DISDIKBUD				18	9,758,373,583.88	9,758,373,583.88	2,192,693,849.79	7,565,679,734.09		

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah					Hibah Ke	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Hibah		
18		TANAH	1.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) TANAH Rp394.674.000 SBB: -TANAH Jl. Bukit Abas Luas 24,018M2 TH2004 Bukit Kapur Rp336,252,000.00 -TANAH Jl. Bukit Abas II Luas 3,960M2 TH2004 Bukit Kapur Rp55,440,000.00	2	391,692,000.00	391,692,000.00	0.00	391,692,000.00		
19		JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	2.HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE KABUPATEN BENGKALIS (P3D) JJJ Rp3.895.446.527,84 SBB: -Jl. Baru TH2004 bukit kapur Rp2,423,925,291.32 -Jl. Baru RT. 22 dan RT. 23 Bukit AbbasAgregat Klas B 2013 Bukit Kapur Rp513,581,236.53 -Jl.bukit abbas menuju SD (lanjutan)Agregat klas B TH2004 Bukit Kapur Rp280,000,000.00 -Jl.bukit abas menuju SDagregat klas B TH2004 Bukit Kapur Rp208,639,000.00 -Jl.bukit abas kel.kayu kapurAgregat Klas B TH2005 Bukit Kapur Rp179,510,000.00 -Peningkatan Jl. Bukit Abas 2020 kelurahan bukit kayu kapur Rp190,751,000.00 -Pekerjaan Penimbunan Tanah Uk. 37 x7 x0.5, Box Culvert Uk. 3 x 7 x 2,3 M Jl. Bukit Abbas 2011 bukit kapur Rp99,040,000.00	7	3,895,446,527.85	3,895,446,527.85	3,734,814,106.79	160,632,421.06	KABUPATEN BENGKALIS	BERDASARKAN SK HIBAH NO.900/1017/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 NHPD NO.53/NP/BPKAD-ASET/2022 DAN 145.4/SETDA-KS/XII/2022/01 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 BAST NO.54/BAST/BPKAD/2022 DAN 667/BAST/ASET/2022 TANGGAL 27 DESEMBER 2022 SK PENGHAPUSAN BMD NO.032/1018/2022 TANGGAL 29 DESEMBER 2022
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	GEDUNG DAN BANGUNAN	Pekerjaan Ruang Tunggu Samsat	1	146,550,000.00	146,550,000.00				
20		GEDUNG DAN BANGUNAN	Pekerjaan Pembangunan Pagar Samsat	1	149,663,000.00	149,663,000.00	56,280,470.00	239,932,530.00	HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE PEMPROV.RIAU	(HIBAH KELUAR DARI PEMKO DUMAI KE PEMPROV.RIAU berupa Pekerjaan Ruang Tunggu Samsat dan Pagar Samsat BERDASARKAN BAST NO.06/BAST/BPKAD/2022 DAN NO.61/BA/2022 TGL.11.02.2022 NHPD NO.05/NPHBMD/2022 DAN NO.53/NPHBMD/2022 TGL.11.02.2022) - DPUPR
SUBTOTAL DINAS PUPR				11	4,583,351,527.85	4,583,351,527.85	3,734,814,106.79	792,256,951.06		
TOTAL				31	27,983,397,312.79	28,088,693,312.79	8,600,224,972.61	19,432,187,870.18		
B	HIBAH UANG									
1	SEKRETARIAT DAERAH									
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
4	DINAS KESEHATAN									
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
6	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN									
7	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
8	DINAS PERIKANAN									
TOTAL										

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah					Hibah Ke	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Hibah		
			JUMLAH					42,565,151,769.26		

DAFTAR PENERIMAAN HIBAH PEMERINTAH KOTA DUMAI TA 2022

A. HIBAH ASET

No.	SKPD	KIB	Barang	Jumlah					Hibah Dari	Keterangan
				Unit	Harga Per Unit	HARGA PEROLEHAN	AKUMULUAS PENYUSUTAN	PENDAPATAN HIBAH LO		
1	PENGELOLA (PPKD)	TANAH	TANAH 1 PERSIL RUMAH SULUK LUAS 5.400M2 TH 2003	1	10,800,000.00	10,800,000.00	-	10,800,000.00	HIBAH MASUK TANAH DARI PENGURUS JAMI'ATUL MUSLIMIN JL. SYECH AHMAD QASIM KEL.BASILAM BARU KEC.SEI SEMBILAN (RUMAH SULUK)	BERDASARKAN PERJANJIAN HIBAH NO.MJM-BB/2022 & NO.07/NPH/BPKAD/2022 TGL.01.03.2022 BAST HIBAH NO.03/MJM-BB/2022 & NO.08/BAST/BPKAD/2022 TGL.01.03.2022 SK NO.930/287/2022 PENETAPAN NILAI BMD TANAH RUMAH SULUK TGL.04.03.2022 SK NO.930/500/2022 PENETAPAN STATUS TGL.05.04.2022
2			TANAH 1 PERSIL RUMAH SULUK LUAS 5.618,75M2 TH 2003 Rp	1	11,237,500.00	11,237,500.00	-	11,237,500.00		
3			LAHAN TPS3K/LPS (TANAH KOMPOS) KEL.PURNAMA KEC.DUMAI BARAT : -TANAH 1 PERSIL LAHAN TPS3K/LPS (TANAH KOMPOS) LUAS 238M3 TH 1982	1	-	-	-	-	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT a.n SUDARTO NIK.1403090711600004	BERDASARKAN SURAT PERNYATAAN HIBAH TAHUN 2022 a.n SUDARTO NIK.1403090711600004 TGL.11.03.2022 SURAT PERNYATAAN KELURAHAN PURNAMA TTG PEMASANGAN TANDA BATAS DAN PERSETUJUAN PEMILIK YANG BEBATASAN a.n SUDARTO NIK.1403090711600004 TGL.17.01.2022
4			TANAH PUSKESMAS KAYU KAPUR (IGD) JL.KKN RT.05 KEL.BUKIT KAYU KAPUR KEC.BUKIT KAPUR: -TANAH 1 PERSIL PUSKESMAS KAYU KAPUR (IGD) LUAS 9.279M2 TH 2022	1	-	-	-	-	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT a.n MITTAH NIK.1472032906820001	BERDASARKAN SURAT KETERANGAN HIBAH KEC.BUKIT KAPUR NO.02/SKH-BK/VI/2022 TGL.09.06.2022
5			TANAH RANCANA TANAH KANTOR KELURAHAN SUNGAI GENIOT Gg.H.ABDUL AZIS RT.016 KEL.BASILAM BARU KEC.SUNGAI SEMBILAN: -TANAH 1 PERSIL RANCANA TANAH KANTOR KELURAHAN SUNGAI GENIOT LUAS 3.500M2 TH 2019	1	-	-	-	-	HIBAH MASUK TANAH DARI MASYARAKAT a.n M.KATIB NIK.1472041602370001	BERDASARKAN SURAT KETERANGAN HIBAH KEC.SUNGAI SEMBILAN NO.005/SKH-SS/VIII/2019 TGL.2008.2019
6		GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN MASJID 1 UNIT TH 2003	1	181,140,355.04	181,140,355.04	336,121,207.58	572,314,488.58	HIBAH MASUK BANGUNAN DARI PENGURUS JAMI'ATUL MUSLIMIN JL. SYECH AHMAD QASIM KEL.BASILAM BARU KEC.SEI SEMBILAN (RUMAH SULUK)	BERDASARKAN PERJANJIAN HIBAH NO.MJM-BB/2022 & NO.07/NPH/BPKAD/2022 TGL.01.03.2022 BAST HIBAH NO.03/MJM-BB/2022 & NO.08/BAST/BPKAD/2022 TGL.01.03.2022 SK NO.930/500/2022 PENETAPAN STATUS TGL.05.04.2022
7			BANGUNAN WC MASJID TH 2003	1	52,196,838.75	52,196,838.75				
8			BANGUNAN WC MASJID TH 2003	1	24,617,084.04	24,617,084.04				
9			BANGUNAN RUMAH SULUK PEREMPUAN TH 2003	1	178,617,619.64	178,617,619.64				
10			BANGUNAN WC MASJID (3) 1 UNIT TH 2003	1	53,815,588.75	53,815,588.75				
11			BANGUNAN WC PEREMPUAN TH 2003	1	23,220,852.54	23,220,852.54				
12			BANGUNAN PAGAR MASJID TH 2003	1	65,980,248.40	65,980,248.40				
13			BANGUNAN MAKAM 1 UNIT TH 2003	1	116,588,311.40	116,588,311.40				
14			BANGUNAN RUMAH SULUK LAKI-LAKI 1 UNIT TH 2003	1	158,443,208.85	158,443,208.85				
15			BANGUNAN KAMAR MANDI LAKI-LAKI 1 UNIT TH 2003	1	53,815,588.75	53,815,588.75				
SUBTOTAL				15		930,473,196.16	336,121,207.58	594,351,988.58		
16	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN RUANG BELAJAR 2 UNIT TH 2019	1	375,834,700.00	375,834,700.00	22,550,082.00	353,284,618.00	HIBAH MASUK DARI YAYASAN ISLAMIC CENTRE AL-MANNAN	BERDASARKAN PERJANJIAN HIBAH NO.06/YIC AL-MANNAN/2022 & NO.17/NPH/BPKAD/2022 TGL.15.06.2022 BAST NO.06/YIC-AL MANNAN/2022 & NO.17/BAST-ASET/2022 TGL.15.06.2022 SK PENETAPAN STATUS NO.930/554/2022 TGL.15.06.2022
SUBTOTAL				1		375,834,700.00	22,550,082.00	353,284,618.00		

17	INSPEKTORAT	GEDUNG DAN BANGUNAN	MUSHALA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI JL.TUANKU TAMBUSAI KEL.BAGAN BESAR KEC.BUKIT KAPUR TH 2022	1	143,381,000.00	143,381,000.00	-	143,381,000.00	HIBAH MASUK BANTUAN SWADAYA MASYARAKAT SUMBANGAN ASN DILINGKUNGAN PEMKO DUMAI	BERDASARKAN PERJANJIAN HIBAH NO.02/PAN.PEMB/2022 & NO.02/NPH/BPKAD/2022 TGL.09.02.2022 BAST NO.01/PAN.PEMB/2022 & NO.01/BAST/BPKAD/2022 TGL.09.02.2022 SK NO.930/286/2022 PENETAPAN STATUS BMD TGL.21.02.2022
SUBTOTAL				1		143,381,000.00	-	143,381,000.00		
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	Rehab Gedung Kelas 3 Lokal dan 1 RKB SDN 007 PELINTUNG	1	1,521,711,486.00	1,521,711,486.00	-	1,521,711,486.00	HIBAH MASUK DIRJEN CIPTA KARYA KEMENPUPR	BERDASARKAN NASKAH HIBAH BMN ANTARA DIRJEN CIPTA KARYA KEMENPUPR DENGAN PEMKO DUMAI NO.276/BA/DC/2022 dan 04/NPH/BPKAD/2022 TGL.28.03.2022 BAST BMN ANTARA DIRJEN CIPTA KARYA KEMENPUPR DENGAN PEMKO DUMAI NO.276.1/BA/DC/2022 & NO.03/BAST/BPKAD/2022 TGL.28.03.2022 SK PENGHAPUSAN BMN BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH RIAU TINDAK LANJUT PROSES HIBAH NO.64/KPTS/BPPW-RIAU/2022 TGL.28.06.2022
SUBTOTAL				1		1,521,711,486.00	-	1,521,711,486.00		
19	DINAS KESEHATAN	PERALATAN DAN MESIN (B2)	Ambulance SUZUKI/GC 415 V-APV DLX 1493 cc 2014 BM 7025 R	1	212,290,000.00	212,290,000.00	212,290,000.00	-	HIBAH MASUK DARI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA	BERDASARKAN SK KEMENKES RI NO.KN.02.07/1.3/9055/2022 TGL.06.07.2022 NASKAH PERJANJIAN HIBAH KEMENKES RI NO.KN.02.07/1.3/7556/2022 TGL.24.06.2022 BAST NO.KN.02.07/1.3/7557/2022 TGL.24.06.2022
			Ambulance SUZUKI/GC 415 V-APV DLX 1493 cc 2014 BM 7026 R	1	212,290,000.00	212,290,000.00	212,290,000.00	-		
			Ambulance SUZUKI/GC 415 V-APV DLX 1493 cc 2014 BM 7027 R	1	212,290,000.00	212,290,000.00	212,290,000.00	-		
			Ambulance SUZUKI/GC 415 V-APV DLX 1493 cc 2014 BM 7028 R	1	212,290,000.00	212,290,000.00	212,290,000.00	-		
			Ambulance SUZUKI/GC 415 V-APV DLX 1493 cc 2014 BM 7029 R	1	212,290,000.00	212,290,000.00	212,290,000.00	-		
			Ambulance SUZUKI/GC 415 V-APV DLX 1493 cc 2014 BM 7030R	1	212,290,000.00	212,290,000.00	212,290,000.00	-		
20	ASET LAINNYA (RUSAK BERAT)	PERALATAN DAN MESIN (B2)	ALAT-ALAT KEDOKTERAN		-	1,870,295,000.00	1,870,295,000.00	-	HIBAH MASUK DARI PROVINSI RIAU	BERDASARKAN BAST PROVINSI RIAU NO.938/DINKES/1.2/914 TGL.04.04.2022
21			Mobil Ambulance Mitsubishi L300 TH2012 B 1549 SHX		319,699,600.00	319,699,600.00	319,699,600.00	-		
22	PERALATAN DAN MESIN (B1)	PERALATAN DAN MESIN (B1)	VENTILATOR RESMED 150 VPAP ST A	3	85,012,082.00	255,036,246.00	-	255,036,246.00	HIBAH MASUK DARI PROVINSI RIAU	BERDASARKAN BAST PROVINSI RIAU NO.938/DINKES/1.2/914 TGL.04.04.2022
23			OKSIMETER	10	58,000.00	580,000.00	-	580,000.00		
SUBTOTAL				6		3,719,350,846.00	3,463,734,600.00	255,616,246.00		
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN MASJID	1	10,339,965,292.28	10,339,965,292.28	-	10,339,965,292.28	HIBAH MASUK MASJID DUMAI ISLAMIC CENTER DARI DEWAN PENGURUS FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (FTJSP) KOTA DUMAI	BERDASARKAN BAST NO.08/FTJSP/VII/2022 DAN NO.10/BAST/BPKAD/2022 TGL.06.07.2022 SK PENETAPAN STATUS NO.930/752/2022 STATUS PENGGUNAAN BMD PADA PUPR (DIC) TGL.08.08.2022
25			BANGUNAN MENARA 1 MASID	1	154,346,232.51	154,346,232.51	-	154,346,232.51		
26			BANGUNAN MENARA 2 MASID	1	154,346,232.51	154,346,232.51	-	154,346,232.51		
27			BANGUNAN MENARA 3 MASID	1	154,346,232.51	154,346,232.51	-	154,346,232.51		
28			BANGUNAN MENARA 4 MASID	1	154,346,232.51	154,346,232.51	-	154,346,232.51		
29			TEMPAT WUDHU DAN TOILET PRIA	1	518,489,378.48	518,489,378.48	-	518,489,378.48		
30	TEMPAT WUDHU DAN TOILET WANITA	1	649,100,399.20	649,100,399.20	-	649,100,399.20				
SUBTOTAL				7		12,124,940,000.00	-	12,124,940,000.00		

31	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERALATAN DAN MESIN (B2)	1.SEPEDA MOTOR RODA TIGA VIAR NEW KARYA 200 RL TH 2022 NO.RANGKA MGRVR20TANL- 201194 NO.MESIN YX200FMG- 22210187 HIJAU KELURAHAN PURNAMA	1	38,250,000.00	38,250,000.00	-	38,250,000.00	HIBAH MASUK DARI BANK RIAU KEPRI BERUPA KENDARAAAAN RODA TIGA	BERDASARKAN BAST BANK RIAU KEPRI TGL.11.04.2022
32			-SEPEDA MOTOR RODA TIGA VIAR NEW KARYA 200 RL TH 2022 NO.RANGKA MGRVR20TANL- 201202 NO.MESIN YX200FMG- 22210191 HIJAU KELURAHAN BUKIT BATREM	1	38,250,000.00	38,250,000.00	-	38,250,000.00		
33			-SEPEDA MOTOR RODA TIGA VIAR NEW KARYA 200 RL TH 2022 NO.RANGKA MGRVR20TANL- 201738 NO.MESIN YX200FMG- 22211265 HIJAU KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG	1	38,250,000.00	38,250,000.00	-	38,250,000.00		
34			-SEPEDA MOTOR RODA TIGA VIAR NEW KARYA 200 RL TH 2022 NO.RANGKA MGRVR20TANL- 201741 NO.MESIN YX200FMG- 22211257 HIJAU KELURAHAN BUKIT KAPUR	1	38,250,000.00	38,250,000.00	-	38,250,000.00		
35			-SEPEDA MOTOR RODA TIGA VIAR NEW KARYA 200 RL TH 2022 NO.RANGKA MGRVR20TANL- 201698 NO.MESIN YX200FMG- 22211273 HIJAU KELURAHAN TELUK BINJAI	1	38,250,000.00	38,250,000.00	-	38,250,000.00		
36			DYNA DUMP TRUCK 110 ET TH 2013 BM8129TP	1	311,275,697.10	311,275,697.10	311,275,697.10	-		
SUBTOTAL				6		502,525,697.10	311,275,697.10	191,250,000.00		

37	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI	ASET TETAP LAINNYA	Buku Aksara	6	77,833.33	467,000.00	-	467,000.00	HIBAH MASUK DARI FOUNDER KOMUNITAS MERANGKAI AKSARA	BERDASARKAN BAST NOMOR: 028/001/HIBAH-DISPERSIP/2022 TGL.06.06.2022
38			Buku Aksara	5	74,000.00	370,000.00	-	370,000.00		BERDASARKAN BAST NOMOR: 028/002/HIBAH-DISPERSIP/2022 TGL.06.06.2022
39			Buku Aksara	2	70,000.00	140,000.00	-	140,000.00		BERDASARKAN BAST NOMOR: 028/003/HIBAH-DISPERSIP/2022 TGL.06.06.2022
SUBTOTAL				13		977,000.00	-	977,000.00		

40	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI	GEDUNG DAN BANGUNAN	SATU LAPANGAN TENIS LUAS 296,5M2 TAMAN BUKIT GELANGGANG	1	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	THE ZURI & GRAND ZURI HOTEL	BERDASARKAN BAST THE ZURI NO.SK/TZ/35/08/2022 & BAST GRAND ZURI NO.0295848/SK/H62-DMI-X2022 TGL.02.08.2022
SUBTOTAL				1		100,000,000.00	-	100,000,000.00		

41	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI	PERALATAN DAN MESIN (B1)	POMPA PEMANDAM KARHUTLA PIGHTER MERK SAN TH 2018	3	194,150,000.00	582,450,000.00	291,225,000.00	291,225,000.00	HIBAH MASUK DARI BNPB	BERDASARKAN NASKAH HIBAH BNPB NO.23/BNPB/D- V/RT.03.05/06/2022 & NO.360/BPBD-KL/117 TGL.02.06.2022 BAST BMN NO.23/D-V/RT.03.05/6/2022 TGL.02.06.2022
42			FLEXIBLE TANK 5000 GALON TH2016	1	90,145,000.00	90,145,000.00	70,828,214.29	19,316,785.71		
SUBTOTAL				4		672,595,000.00	362,053,214.29	310,541,785.71		

43	DINAS PERHUBUNGAN	PERALATAN DAN MESIN	KENDARAAN MICROBUS No Rangka MHCNLR55HLJ089953	1	504,825,000.00	504,825,000.00	180,294,642.86	324,530,357.14	DIRJEN KEMENHUB RI	Berdasarkan BAST No: KU.003/84/BASTO-AJ/BS/SATKER-DAJ/X/2021 Tanggal 15 November 2021 Tentang BAST Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas - Tugas Operasional
SUBTOTAL				1		504,825,000.00	180,294,642.86	324,530,357.14		

B. HIBAH PERSEDIAAN

1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PERSEDIAAN	BLANKO KTP	29,000	10,571	306,559,000.00	-	306,559,000.00	PEMERINTAH PROVINSI	
SUBTOTAL				29,000		306,559,000.00	-	306,559,000.00		
2	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PERSEDIAAN	OBAT			331,214,132.00	-	331,214,132.00	PEMERINTAH PUSAT	
SUBTOTAL						331,214,132.00	-	331,214,132.00		
3	DINAS KESEHATAN	PERSEDIAAN	BHP			43,021,000.00	-	43,021,000.00	PEMERINTAH PUSAT	
4		PERSEDIAAN	PERSEDIAAN			7,834,200.00	-	7,834,200.00		
SUBTOTAL						50,855,200.00	-	50,855,200.00		
TOTAL						21,285,242,257.26	4,676,029,443.83	16,609,212,813.43		